



RPD KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2024-2026

2023 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
BAPPELITBANGDA KOTA BEKASI



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 9 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dokumen perencanaan pembangunan merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026, dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 - 2026.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut dengan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah dokumen Pembangunan Kota Bekasi untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat KU-APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati oleh DPRD.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Bekasi yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

Sistematika Penyusunan RPD, terdiri dari:

- a. BAB I Pendahuluan,
Berisi uraian Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Dokumen RPD.
- b. BAB II Gambaran Umum,
Berisi uraian Kondisi Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam RPJMD sampai dengan tahun berjalan 2022.
- c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah,
Berisi Arah kebijakan, Gambaran Umum Perekonomian Daerah (Tantangan Dan Prospek Regional Kota Bekasi dan Strategi serta Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Pembangunan Kota Bekasi), Arah Kebijakan Keuangan Daerah (Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan dan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah).
- d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis,
Berisi Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Bekasi, kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
- e. BAB V Tujuan dan Sasaran,
Berisi tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun, yakni Tahun 2024-2026 dan sasaran yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
- f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas,
Berisi uraian penjelasan tentang Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bekasi, Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, Arah Kebijakan Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Pembangunan Kota Bekasi.
- g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah,
Berisi uraian program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2024-2026 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024-2026.

- h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Berisi uraian Penetapan proyeksi Indikator Kinerja Utama (IKU)
dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(IKD).
- i. BAB IX Penutup,
Berisi uraian tentang hal-hal pokok yang termuat dalam
keseluruhan dokumen RPD, sebagai pedoman bagi semua pihak
dalam memfungsikan RPD sesuai dengan ketentuan perundangan
yang berlaku.

Pasal 3

Uraian Penyusunan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar perangkat daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.
- (2) RPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) RPD berpedoman pada RPJMN serta memperhatikan:
 - a. RPJPD Kota Bekasi;
 - b. RTRW; dan
 - c. RPD Kabupaten/Kota sekitar.

Pasal 5

RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. pedoman bagi Penjabat Wali Kota dan Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
- b. pedoman bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun 2024-2026;
- c. pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- d. pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Kota Bekasi dalam menyelenggarakan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah menyusun evaluasi Rencana Pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tahun berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

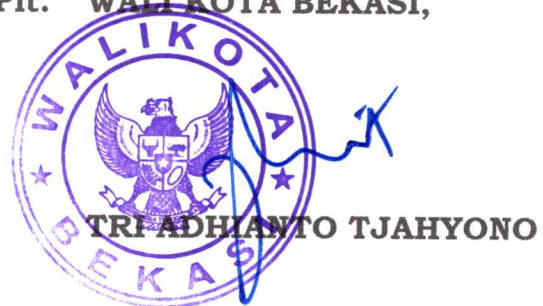
Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Februari 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,



Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR SERI



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-7
1.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024	I-8
1.3.2 Hubungan RPD Kota Bekasi dengan RPD Provinsi Jawa Barat.....	I-12
1.3.3 Hubungan RPJD Kota Bekasi dengan RPJPD Kota Bekasi	I-13
1.3.4 Hubungan RPD Kota Bekasi dengan RKPD Kota Bekasi	I-13
1.3.5 Hubungan RPD Kota Bekasi dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.....	I-14
1.3.6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals	I-15
1.4 Maksud dan Tujuan	I-16
1.5 Sistematika Penulisan	I-17
BAB II GAMBARAN UMUM.....	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1 Kondisi Umum Geografis	II-1
2.1.2 Kondisi Umum Demografi.....	II-9
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-10
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-10
2.2.2 Kesejahteraan Sosial	II-18
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-26
2.3.1 Fokus Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar	II-26
2.3.2 Fokus Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar	II-40
2.3.3 Urusan Pilihan.....	II-60



2.3.4	Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-63
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-66
2.4.1	Kemampuan Ekonomi Daerah	II-66
2.4.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-73
2.4.3	Iklim Berinvestasi	II-77
2.4.4	Sumberdaya Manusia.....	II-77
2.5.	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-80
2.5.1	Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021	II-82
2.5.2	Program Pendukung Pelaksanaan SPM	II-92
2.5.3	Penerima Manfaat dalam Pelaksanaan SPM	II-94
2.5.4	Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Pencapaian SPM.....	II-104
2.6.	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	II-119
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-2
3.1.2	Neraca Daerah.....	III-9
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-13
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-14
3.3	Kerangka Pendanaan	III-14
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-15
3.3.2	Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-19
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
4.1.1	Permasalahan terkait Aspek Kesejahteraan Masyarakat....	IV-1
4.1.2	Permasalahan terkait Aspek Daya Saing Daerah.....	IV-4
4.1.3	Permasalahan terkait Aspek Pelayanan Umum	IV-7
4.1.3.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	IV-7
4.1.3.2	Urusan Wajib yang tidak berkaitan Pelayanan Dasar	IV-10
4.1.3.3	Urusan Pemerintahan Pilihan.....	IV-18
4.2	Isu Strategis	IV-20
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi 2024-2026	V-1
5.2	Cascading Kinerja	V-2
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS.....	VI-1



6.1 Strategi Pembangunan	VI-1
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan	VI-3
6.3 Program Prioritas	VI-9
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI	VIII-1
8.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	VIII-1
8.2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	VIII-3
8.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	VIII-3
8.2.2 Aspek Daya Saing Daerah	VIII-4
8.2.3 Aspek Pelayanan Umum	VIII-5
BAB IX PENUTUP	IX-1



DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Daftar Tujuan Pembangunan dalam Sustainable Developments Goals (SDGs) (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017)	I-15
Tabel II. 1	Luas Kota Bekasi Dirinci Menurut Kecamatan	II-2
Tabel II. 2	Kondisi Cuaca	II-3
Tabel II. 3	Perubahan luas lahan di Kota Bekasi tahun 2000-2015	II-7
Tabel II. 4	Koefisien Wilayah Terbangun Maksimum dan Koefisien Wilayah Terbangun Aktual Kota Bekasi Eksisting	II-8
Tabel II. 5	Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	II-9
Tabel II. 6	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Bekasi, 2017-2021 (dalam persen)	II-11
Tabel II. 7	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2017-2021	II-13
Tabel II. 8	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Bekasi, 2017-2021	14
Tabel II. 9	Perbandingan Indeks dan Inflasi Kota-Kota di Provinsi Jawa Barat	16
Tabel II. 10	Unit Penyelenggara Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan Nilai Sangat Baik pada Semester 1 Tahun 2022 ..	II-24
Tabel II. 11	Angka Partisipasi Murni Kota Bekasi	II-28
Tabel II. 12	Angka Partisipasi Kasar Kota Bekasi	II-29
Tabel II. 13	Sarana Kesehatan di Kota Bekasi	II-30
Tabel II. 14	Realisasi Kinerja Kota Bekasi Bidang Pekerjaan Umum	II-34
Tabel II. 15	Data PMKS Menurut Kecamatan	II-38
Tabel II. 16	Data PMKS Menurut Kecamatan (lanjutan)	II-39
Tabel II. 17	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota	II-40
Tabel II. 18	Aspek Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi 2019-2021	II-52
Tabel II. 19	Aspek Pengendalian Penduduk Kota Bekasi 2019-2020	II-53
Tabel II. 20	Aspek Perhubungan Kota Bekasi 2019-2020	II-53
Tabel II. 21	Aspek Komunikasi dan Informatika Kota Bekasi 2019-2020	II-54
Tabel II. 22	Indikator Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	II-56
Tabel II. 23	Beberapa Indikator Urusan Penanaman Modal	II-57



Tabel II. 24	Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga	II-57
Tabel II. 25	Capaian Indikator Data Sektoral	II-58
Tabel II. 26	Capaian Indikator Urusan Perpustakaan	II-59
Tabel II. 27	Capaian Indikator Urusan Kearsipan	II-60
Tabel II. 28	Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan	II-61
Tabel II. 29	Capaian Indikator Urusan Pariwisata	II-61
Tabel II. 30	Capaian Indikator Urusan Pertanian	II-62
Tabel II. 31	Capaian Indikator Urusan Perdagangan	II-62
Tabel II. 32	Capaian Indikator Urusan Perindustrian	II-63
Tabel II. 33	Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2016-2021	II-63
Tabel II. 34	Indikator Keuangan Kota Bekasi 2016-2021.....	II-65
Tabel II. 35	Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 2021.....	II-65
Tabel II. 36	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kota Bekasi, 2020 dan 2021.....	II-66
Tabel II. 37	Sarana Perdagangan Kota Bekasi 2018 – 2021.....	II-67
Tabel II. 38	Jumlah Pelanggan, Listrik Terjual, dan Pendapatan PT PLN pada Cabang/Ranting PLN Menurut Jenis Pelanggan di Kota Bekasi, 2021	II-69
Tabel II. 39	Jumlah Rumah Makan menurut Kecamatan di Kota Bekasi, 2018–2021	II-70
Tabel II. 40	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Bekasi (km), 2019–2021	II-71
Tabel II. 41	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kota Bekasi, 2018–2021	II-71
Tabel II. 42	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (persen),.....	II-72
Tabel II. 43	Jumlah Penumpang yang menggunakan kereta api tahun 2017..	II-73
Tabel II. 44	Perbandingan Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan.....	II-74
Tabel II. 45	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021.....	II-76
Tabel II. 46	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi 2020-2022.....	II-78
Tabel II. 47	Penjelasan SPM Menurut Bidang.....	II-81
Tabel II. 48	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2021.....	II-83
Tabel II. 49	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	II-84
Tabel II. 50	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021.....	II-87
Tabel II. 51	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	II-88
Tabel II. 52	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021	II-89
Tabel II. 53	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Tahun 2021	II-89



Tabel II. 54	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Tahun 2021	II-90
Tabel II. 55	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2021.....	II-91
Tabel II. 56	Rekapitulasi Jumlah Warga Negara yang Berhak Mendapatkan Pelayanan Dasar Informasi Rawan Bencana.....	II-101
Tabel II. 57	Jumlah Warga Yang Memperoleh Layanan Evakuasi dan Penyelamatan	II-101
Tabel II. 58	Rekapitulasi jumlah warga Negara yang berhak mendapatkan pelayanan dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana.....	II-103
Tabel II. 59	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Pendidikan	II-104
Tabel II. 60	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Kesehatan.	II-105
Tabel II. 61	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021	II-113
Tabel II. 62	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021.....	II-115
Tabel II. 63	Permasalahan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kententraman dan Ketertiban Umum.....	II-116
Tabel II. 64	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sub Urusan Bencana hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021	II-117
Tabel II. 65	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021	II-118
Tabel II. 66	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Sosial hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021	II-118
Tabel III. 1	Postur Belanja Kota Bekasi Tahun 2018-2022.....	III-6
Tabel III. 2	Persentase Postur Belanja Menurut Kelompok Tahun 2018-2022.....	III-7
Tabel III. 3	Postur Pembiayaan Kota Bekasi Tahun 2018-2022	III-8
Tabel III. 4	Neraca Daerah	III-10
Tabel III. 5	Kewajiban Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2022	III-12
Tabel III. 6	Proporsi Penggunaan Anggaran Kota Bekasi	III-14
Tabel III. 7	Proporsi Pendapatan Kota Bekasi 2024-2026.....	III-16
Tabel III. 8	Proporsi Belanja Kota Bekasi 2024-2026	III-17
Tabel III. 9	Proporsi Pembiayaan Kota Bekasi 2024-2026	III-19
Tabel III. 10	Proporsi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Bekasi 2024-2026.....	III-20
Tabel IV. 1	Tabel Permasalahan per Urusan Pemerintah Daerah	IV-25
Tabel V. 1	Indikator dan Target dari Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026	V-6
Tabel VI. 1	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan	VI-4
Tabel VI. 2	Program Prioritas Pembangunan.....	VI-20
Tabel VII. 1	Program Perangkat Daerah disertai Pagu Indikatif	VII-2
Tabel VIII. 1	Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi 2024-2026	VIII-1



Tabel VIII. 2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat	VIII-3
Tabel VIII. 3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Aspek Daya Saing Daerah	VIII-4
Tabel VIII. 4 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Aspek Pelayanan Umum....	VIII-5



DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	I-15
Gambar II. 1	Peta Batas Administrasi Kota Bekasi	II-1
Gambar II. 2	DAS yang meliputi Kota Bekasi	II-4
Gambar II. 3	Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kota Bekasi	II-5
Gambar II. 4	Peta Gerakan Tanah yang dikelola dalam SIPD.....	II-6
Gambar II. 5	Perkembangan Inflasi Kota Bekasi, Maret 2019-2020 (Persen).II-16	
Gambar II. 6	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020	II-18
Gambar II. 7	Garis Kemiskinan Kota Bekasi Tahun 2015-2019.....	II-18
Gambar II. 8	Perkembangan Rasio Kesenjangan Kemiskinan, 2015-2019	II-19
Gambar II. 9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi, 2018-2021....	II-21
Gambar II. 10	Perkembangan Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Bekasi, Tahun 2013-2015.....	II-24
Gambar II. 11	Perkembangan Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bekasi, 2015-2019	II-26
Gambar II. 12	Harapan Lama Sekolah Kota Bekasi.....	II-28
Gambar II. 13	Rata-rata Lama Sekolah Kota Bekasi.....	II-28
Gambar II. 14	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	II-32
Gambar II. 15	Angka kematian Ibu per 100 ribu kelahiran hidup	II-33
Gambar II. 16	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik.....	II-34
Gambar II. 17	Persentase Luasan RTH Publik	II-35
Gambar II. 18	Capaian Penduduk Berakses Air Minum Kota Bekasi	II-36
Gambar II. 19	Persentase Rumah yang Sehat dan Aman didukung dengan PSU.....	II-37
Gambar II. 20	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	II-38
Gambar II. 21	Persentase PMKS yang Tertangani	II-39
Gambar II. 22	Persentase Layanan Respon Cepat Penanggulangan Kejadian Kebakaran	II-41
Gambar II. 23	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	II-43
Gambar II. 24	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	II-44
Gambar II. 25	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	II-44
Gambar II. 26	Persentase Produk PAH yang ASUH.....	II-46
Gambar II. 27	Pemenuhan Kebutuhan Tanah sesuai Kebutuhan	II-47



Gambar II. 28 Pemenuhan Kebutuhan Tanah sesuai Kebutuhan	II-47
Gambar II. 29 Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA	II-48
Gambar II. 30 Persentase Sampah yang Terangkut ke TPA	II-49
Gambar II. 31 Persentase Jumlah Sampah yang Berkurangnya melalui Reuse, Reduce, Recycle (3R)	II-50
Gambar II. 32 Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran	II-51
Gambar II. 33 Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	II-51
Gambar II. 34 Cakupan Kepemilikan KTP-el	II-52
Gambar II. 35 Jumlah Koperasi yang Beroperasi Sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	II-56
Gambar II. 36 Akses Rumah Tangga terhadap Air Bersih	II-76
Gambar II. 37 Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi	II-77
Gambar II. 38 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Bekasi	II-79
Gambar II. 39 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Bekasi (tahun), 2010-2021	II-80
Gambar II. 40 Pengeluaran per Kapita per Tahun di Kota Bekasi (Rp 000),	II-80
Gambar III. 1 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Bekasi	III-2
Gambar III. 2 Postur Pendapatan Kota Bekasi 2018-2022	III-3
Gambar III. 3 Derajat Kemandirian dan Ketergantungan Kota Bekasi 2018- 2022	III-4
Gambar III. 4 Komposisi Pendapatan Transfer Kota Bekasi 2018-2022	III-5
Gambar V. 1 Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026	V-2

BAB 01

PENDAHULUAN





PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengamanatkan untuk dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Konsekuensi regulasi tersebut terutama bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 atau 2023 akan dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah. Artinya, daerah tidak akan memiliki kepala daerah definitif yang baru sampai dengan tahun 2024. Sementara daerah tetap harus memiliki rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dalam kondisi normal sejatinya merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah. Dalam kondisi tersebut, salah satu yang menjadi konsentrasi terbesar di daerah adalah bagaimana dengan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan tahunannya.

Menindaklanjuti konsekuensi regulasi tersebut Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 atau 2023, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang kemudian disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Bersamaan dengan itu, kepala perangkat daerah juga diperintahkan untuk menyusun rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan RPD yang ditetapkan.

Walikota Bekasi akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023. Maka Kota Bekasi berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut harus menyusun RPD. Namun karena periode akhir jabatan kepala daerahnya adalah tahun 2023, maka Kota Bekasi akan menyusun RPD untuk periode Tahun 2024-2026. RPD ini sendiri akan digunakan oleh Penjabat Wali Kota Kota Bekasi sebagai



pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada periode perencanaan tersebut. Sementara rencana jangka menengah dan rencana tahunan Kota Bekasi untuk tahun 2023, tetap mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dan dokumen acuan lainnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Dalam penyusunan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, beberapa hal yang penting diperhatikan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 antara lain adalah (1) penyelarasan dengan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (2) kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Bekasi yang masih berlaku sampai dengan 2025; (3) hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023; (4) RPD Provinsi Jawa Barat tahun 2023-2026; (5) isu-isu strategis yang berkembang; (6) kebijakan nasional; dan (7) regulasi yang berlaku.

Berdasarkan kondisi dan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka penyusunan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 perlu memperhatikan kesinambungan rencana pembangunan Kota Bekasi, karena periode RPD yang disusun beririsan dengan periode rencana jangka menengah terakhir dalam RPJPD 2005-2025. Di samping itu yang tak kalah penting adalah bagaimana mengintegrasikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi capaian RPJMD sebelumnya. Serta tentu keselarasan dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional. Dengan begitu, diharapkan RPD Kota Bekasi tahun 2024-2026 benar-benar mampu menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bekasi bagi Penjabat Wali Kota Bekasi yang akan memerintah, sekaligus dapat menjadi acuan yang proporsional bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tiap tahunnya. Sementara bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) Kota Bekasi, RPD juga diharapkan mampu menjadi acuan dan dengan mudah diintegrasikan baik dalam konteks penyusunan Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja) tahunannya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang



Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 25. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus-utamaan Gender dalam Pembangunan;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan



Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang



- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
 38. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);
 39. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
 40. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13, Noreg Peraturan Daerah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat : (10/129/2022));
 41. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 3 Seri E).

1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Rencana pembangunan kabupaten/kota merupakan bagian dari rencana pembangunan provinsi, demikian juga rencana pembangunan provinsi merupakan bagian dari rencana pembangunan nasional. Dengan demikian dokumen RPJP Nasional menjadi pedoman penyusunan RPJP Provinsi dan RPJPD Provinsi menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota. Begitu juga RPJM Nasional menjadi pedoman penyusunan RPJMD Provinsi dan RPJMD Provinsi menjadi pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota. Dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah, Kabupaten/Kota harus mempedomani RPJMD atau RPD Provinsi yang juga harus mempedomani RPJM Nasional.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menginstruksikan bahwa penyusunan RPD Kabupaten/Kota perlu memperhatikan dokumen



perencanaan baik di level nasional, provinsi, maupun di kabupaten/kota itu sendiri. Penyusunan RPD kabupaten/kota memperhatikan dokumen perencanaan antara lain (1) RPJMN 2020-2024; (2) RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan 2025; (3) RPJMD Kabupaten/Kota sebelumnya; dan (4) RPJMD atau RPD Provinsi. Selain beberapa dokumen perencanaan tersebut, penyusunan RPD juga perlu memperhatikan isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku. Salah satu contohnya adalah penyusunan RPD juga penting untuk mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sementara regulasi lain yang berlaku dan akan menjadi acuan bagi penyusunan RPD misalnya adalah UU atau PP atau Permen yang mengatur secara lebih detil sampai dengan teknis perencanaan pembangunan daerah.

1.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Kebijakan pembangunan nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024. Visi tersebut adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong", Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

RPJMN 2020-2024 juga telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan, yaitu:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal



utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.
- 3) Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdayasaing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.
- 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024, ditetapkan 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai kerangka 17 kaidah pembangunan, yaitu:

1. Membangun Kemandirian

Berupaya memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang mumpuni dalam pembangunan baik pengelolaan sumberdaya alam, tata kelola pemerintahan dan pengambilan keputusan, dengan beberapa kaidah pembangunan antara lain:

- Memiliki kecukupan sumberdaya manusia yang memiliki *skill* dan kecakapan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan;

- Mampu mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan dan teknologi berkualitas dan tidak lagi pada prinsip asimetris terhadap bangsa lain dan bernilai budaya bangsa;
- Memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas, tanggung jawab, dan pelayanan kepada bangsa sendiri;
- Menjadi negara yang selalu aktif, terbuka dalam bekerjasama dalam memberikan pengaruh terhadap kemajuan bangsa dan negara Indonesia; dan
- Melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia.

2. Menjamin Keadilan

Keadilan adalah pembangunan yang dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warganegara, bersifat proporsional, dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, dengan beberapa kaidah pembangunan antara lain:

- Mengembangkan pola distribusi yang berimbang antara input dengan output dalam mempertahankan keseimbangan dalam berbangsa dan bernegara;
- Keseimbangan dan konsistensi dalam upaya penetrasi pembangunan untuk sampai kepada masyarakat pada level minimum yang diharapkan;
- Memberikan *share* yang seimbang dalam pencapaian pembangunan untuk mengurangi kesenjangan wilayah secara bertanggungjawab;
- Bersikap *inclusive* atas setiap pencapaian dan evaluasi pembangunan untuk melakukan koreksi serta perbaikan yang menjunjung tinggi pemerataan;
- Kepercayaan dan tanggung jawab atas keputusan rencana pembangunan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang berkualitas; dan
- Kesetaraan akses dalam setiap perencanaan, program, dan implementasi sehingga tiap orang paham hak & kemampuannya dalam berpartisipasi thd pembangunan.

3. Menjaga Keberlanjutan

Keberlanjutan adalah memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti, dengan beberapa kaidah pembangunan antara lain:



- Melakukan penguatan, percepatan dan pengelolaan pembangunan dengan mempertimbangkan kemampuan dasar bangsa atas kecukupan dan ketersediaan fondasi ekonomi;
- Menciptakan sebuah kerangka pembangunan untuk menumbuhkan sistem ekonomi pembangunan yang sehat antara input, proses, dan output pembangunan sehingga tidak menyebabkan terjadinya defisiensi;
- Mempertimbangkan keberadaan dan pola sosial budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat untuk menumbuhkan tatanan pengelolaan pembangunan *inclusive* dan interaksi sosial sebagai sebuah *supporting system* dalam koherensi pembangunan;
- Terpatrynya orientasi sikap (*attitude*) yang bertanggungjawab sebagai basis nilai dan etika universal untuk mengikat keberagaman bangsa dalam menciptakan tata pembangunan yang maju;
- Penguatan komitmen dalam menjamin terciptanya keseimbangan antara tujuan pembangunan manusia dengan kemampuan alam dan lingkungan; dan
- Bersifat *inclusive* dalam mengadaptasikan berbagai dinamika pembangunan dengan pendekatan dan keilmuan yang mampu menumbuhkan sistem tata nilai yang bertanggung jawab secara integratif.

Lima fokus kerja Presiden Republik Indonesia pada kurun 2020-2024 ini, yaitu:

1. Pembangunan sumberdaya manusia, dengan prioritas utama:
 - Membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai iptek;
 - Mengundang kerjasama dengan talenta-talenta global;
 - Mengoptimalkan kerjasama dengan industri; dan
 - Penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.
2. Pembangunan infrastruktur, dengan prioritas utama:
 - Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;
 - Mempermudah akses ke kawasan wisata;
 - Mendongkrak lapangan kerja baru; dan
 - Mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi, dengan prioritas utama:

- Menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
 - Merevisi undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan prioritas utama:
- Pemangkasan prosedur dan birokrasi;
 - Penyederhanaan eselonisasi dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi; dan
 - Serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan.
5. Transformasi ekonomi, dengan prioritas utama transformasi dari ketergantungan kepada sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyusunan RPD Kota Bekasi 2024-2026 memperhatikan dan menyelaraskan dengan indikator makro dan program prioritas nasional yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024. Selain dua hal utama yang akan diacu dari RPJMN tersebut, secara umum pelaksanaan RPJMN 2020-2024 juga akan dilakukan oleh Kota Bekasi dengan membuat perencanaan pembangunan yang memprioritaskan penataan kebijakan dan kelembagaan perangkat daerah yang bersih, demokratis, partisipatif, dan akuntabel untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

1.3.2 Hubungan RPD Kota Bekasi dengan RPD Provinsi Jawa Barat

Penyelarasan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dengan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 akan mengacu pada ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022. Sementara secara teknis, hubungan kedua dokumen perencanaan jangka menengah ini dan penyelarasan yang dilakukan akan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini penyelarasan dilakukan pada level tujuan, sasaran, sampai dengan program pembangunan jangka menengah daerah Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat, di samping juga menyelaraskan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk bidang-bidang pembangunan dan



pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

1.3.3 Hubungan RPD Kota Bekasi dengan RPJPD Kota Bekasi

Penyusunan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 salah satunya mempedomani RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025. RPD Kota Bekasi dengan demikian menyelaraskan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan RPJPD Kota Bekasi 2005-2025. RPD ini sendiri salah satunya menerjemahkan rencana jangka panjang sampai dengan 2025, karena periode RPD ini beririsan dengan sisa periode dalam RPJPD Kota Bekasi yang baru berakhir di tahun 2025. Di samping itu, RPD ini tentu juga mengintegrasikan perencanaan jangka menengah nasional dan provinsi yang ada, bersamaan hasil evaluasi dari rencana jangka menengah periode berikutnya.

1.3.4 Hubungan RPD Kota Bekasi dengan RKPD Kota Bekasi

Rencana pembangunan tahunan daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan *"RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat"*. Juga, Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan: *"RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat"*.

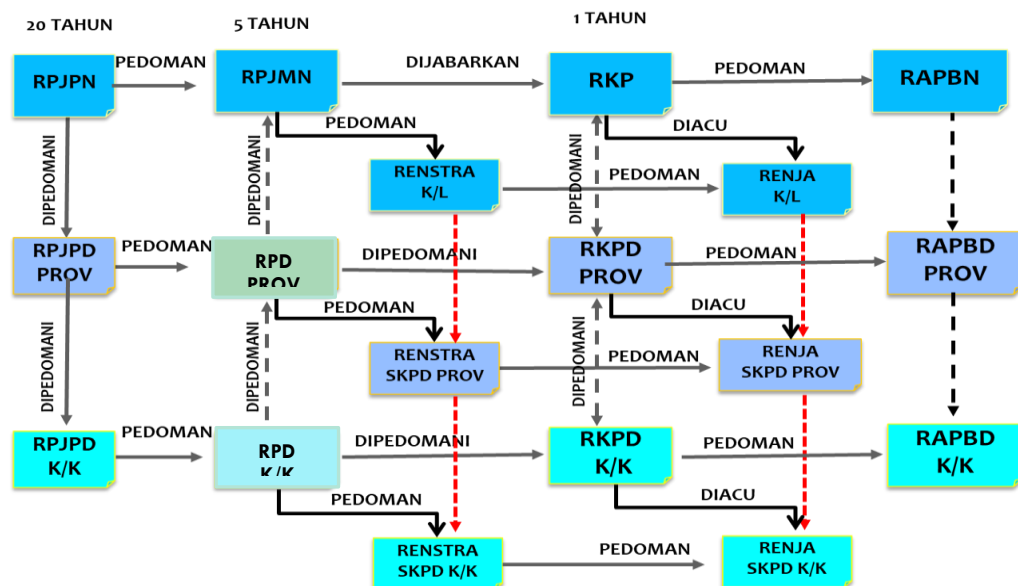
Hubungan RPD sebagai pengganti RPJMD ketika Kota Bekasi dipimpin oleh Pejabat Wali Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan RKPD sebetulnya sama dengan hubungan RPJMD dan RKPD dalam kondisi pergantian kepala daerah berjalan normal, tidak ada pilkada serentak 2024. Berdasarkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 maka penyusunan RKPD Kota Bekasi tahun 2024 sampai dengan 2026 akan mengacu pada RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 ini. Di samping itu, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tentang penyusunan dokumen perencanaan daerah RKPD yang akan disusun pada periode RPD ini juga akan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD pada tiap

tahunnya, juga mengacu pada RKP dari pemerintah pusat, dan mengacu pada RPD Provinsi Jawa Barat beserta dengan RKPD turunannya.

1.3.5 Hubungan RPD Kota Bekasi dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Di samping itu dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 juga menyatakan bahwa RPD yang disusun menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah yang merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPD dan menjadi acuan juga dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun pada tiap tahunnya.

Dengan memposisikan RPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang selevel dengan RPJMD, maka secara garis besar hubungan RPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar I. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.3.6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan berkelanjutan pasca 2015 yang memberikan arahan tentang pentingnya 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang harus bersinergi dalam pembangunan global ke depan. SDGs dicanangkan



untuk melanjutkan tujuan utama MDGs yang belum tercapai, yang antara lain permasalahan kesehatan ibu dan anak, akses terhadap air bersih dan sanitasi, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta status nutrisi. Selain itu, SDGs juga terbuka bagi beberapa isu pembangunan yang muncul sejak MDGs lahir di tahun 2000, seperti ketersediaan anggaran, perubahan iklim, ketersediaan energi, dan lainnya. Agenda ini diimplementasikan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dokumen ini merupakan kiblat pembangunan ekonomi global, dan Indonesia memiliki “batas akhir” pencapaian target-targetnya pada tahun 2030. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator, sebagaimana terinci pada Tabel SDGs.

Terkait dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkannya strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, peningkatan kesejahteraan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, penurunan kesenjangan, serta peningkatan kemitraan. Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah Kota Bekasi mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu: *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment*.

Tabel I. 1 Daftar Tujuan Pembangunan dalam *Sustainable Developments Goals* (SDGs) (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017)

No	Tujuan Pembangunan	Σ Target
1.	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun	7 target
2.	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan	8 target
3.	Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia	13 target
4.	Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang	10 target
5.	Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan	9 target
6.	Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang	8 target
7.	Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang	5 target
8.	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang	12 target



No	Tujuan Pembangunan	Σ Target
9.	Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yg inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi	8 target
10.	Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar Negara	10 target
11.	Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berke-lanjutan	10 target
12.	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	11 target
13.	Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	5 target
14.	Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumberdaya laut secara ber-kelanjutan untuk pembangunar berkelanjutan	10 target
15.	Melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati	12 target
16.	Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yg efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan	12 target
17.	Memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pem-bangunan berkelanjutan	19 target

1.4 Maksud dan Tujuan

RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi dalam menentukan prioritas program tahunan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada periode 2024 sampai dengan 2026.
2. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah dan memberikan pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi jangka menengah 2024-2026.



3. Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam kerangka koordinasi, integrasi, dan sinergi kebijakan antar pelaku pembangunan (*stakeholders*).
4. Menyediakan indikator dan target kinerja untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada periode 2024-2026.
5. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan sesuai arahan dan tahapan pembangunan jangka panjang Kota Bekasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan terkait latar belakang penyusunan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, dasar hukum perencanaannya, maksud, dan tujuan penyusunan serta sistematika penyajian dokumen.

Bab 2 Gambaran Umum

Bab ini berisi penjelasan terkait gambaran umum kondisi daerah meliputi kondisi geografi, demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, serta evaluasi capaian pembangunan RPJMD periode sebelumnya.

Bab 3 Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini berisi penjelasan terkait gambaran keuangan daerah yang meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan anggaran, dan kerangka pendanaan serta beberapa komponen keuangan lainnya seperti komponen pendapatan, komponen belanja, kapasitas fiskal, neraca pendapatan dan belanja, serta aspek pembiayaan pembangunan.

Bab 4 Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini berisi penjelasan terkait permasalahan dan isu strategi pembangunan daerah yang terjadi pada masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa mendatang. Permasalahan menggambarkan *gap* antara target pembangunan dengan capaian pembangunan sesuai bidang urusannya, sementara isu strategis membahas terkait permasalahan yang dapat berdampak luas bagi pembangunan Kota Bekasi.

Bab 5 Tujuan dan Sasaran



Bab ini berisi penjelasan terkait tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024–2026 beserta indikator pembangunannya.

Bab 6 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Bab ini berisi penjelasan rumusan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024–2026 yang merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan visi misi tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Bab 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini berisi penjelasan berbagai program pembangunan daerah, indikator kinerja dan target kinerja outcome beserta pagu indikatif seluruh Perangkat Daerah untuk melaksanakan arah kebijakan setiap tahun yang telah dirumuskan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Bab 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini berisi penjelasan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Penjabat Wali Kota pada akhir periode jabatan, yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah yang merupakan indikator penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bab 9 Penutup

Bab ini berisi penjelasan hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam mengimplementasikan RPD secara terpadu dan berkelanjutan.

BAB 02

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



BAB 02

GAMBARAN UMUM

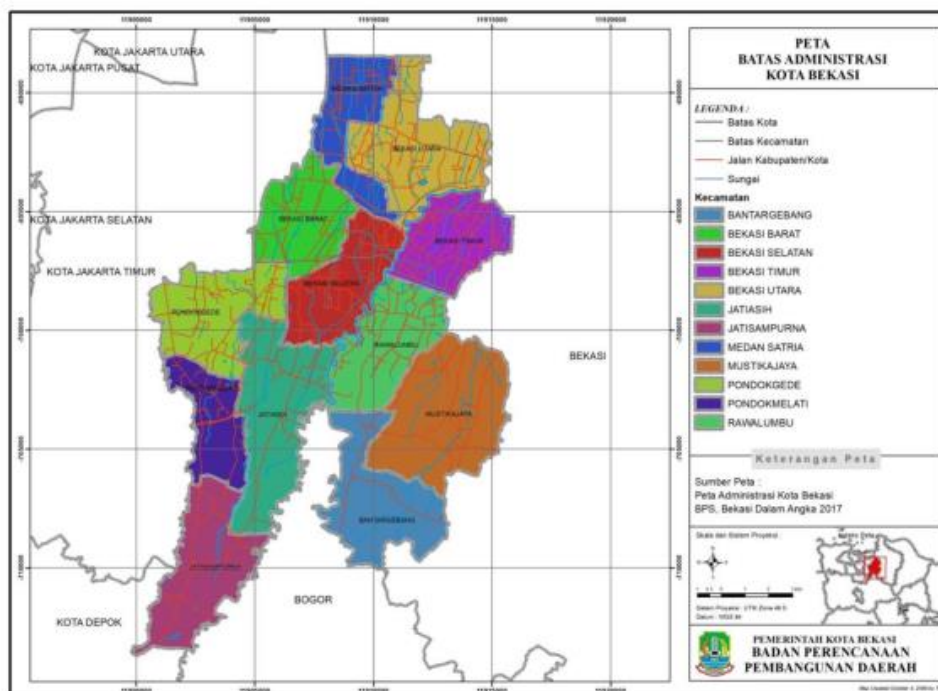
2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Kondisi Umum Geografis

Kota Bekasi yang merupakan salah satu wilayah bagian dari Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah sekitar 213,11 km² atau 21.311 ha, dengan batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok.
- Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta.
- Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi.

Sedangkan secara astronomis, wilayah Kota Bekasi terletak pada 106°48'28" – 107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6" – 6°30'6" Lintang Selatan.



Gambar II. 1 Peta Batas Administrasi Kota Bekasi
Sumber: Revisi RTRW Kota Bekasi dan Analisis GIS Tahun 2021

Secara geografis Kota Bekasi merupakan daerah perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta, sekaligus merupakan bagian dari perlintasan atau poros Sumatera – Jakarta – Jawa Tengah – Jawa Timur maupun poros Jakarta – Bandung. Kota Bekasi merupakan penyangga bagi Kota Jakarta. Dalam konteks nasional maupun regional, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Bekasi merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu (Kota Bekasi, Banten, dan Jawa Barat). Kota Bekasi juga merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yang dalam PP tersebut dijelaskan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

Secara administrasi Kota Bekasi dibagi menjadi 12 wilayah kecamatan yaitu: Pondok Gede, Jatisampurna, Pondok Melati, Jatiasih, Bantar Gebang, Mustika Jaya, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria, dan Bekasi Utara. Kecamatan yang mempunyai wilayah yang paling luas yaitu Kecamatan Jatiasih yang luasnya 25,75 km², sedangkan Kecamatan Pondok Melati merupakan wilayah yang paling kecil yaitu 11,75 km². Dari 12 kecamatan, terbagi lagi menjadi 56 kelurahan, dimana setiap kecamatan dibagi sedikitnya menjadi 4 kelurahan. Pusat Kota Bekasi (BWP) berada pada Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi Selatan dan Rawalumbu.

Tabel II. 1 Luas Kota Bekasi Dirinci Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah	
		km2	(%)
1	Pondok Gede	16,55	7,76
2	Jatisampurna	19,21	9,01
3	Pondok Melati	11,75	5,51
4	Jatiasih	25,75	12,08
5	Bantargebang	18,84	8,84
6	Mustikajaya	24,97	11,72
7	Bekasi Timur	14,64	6,87
8	Rawalumbu	17,12	8,03
9	Bekasi Selatan	15,38	7,22
10	Bekasi Barat	14,42	6,77
11	Medan Satria	11,88	5,58
12	Bekasi Utara	22,60	10,60
	Kota Bekasi	213,11	100,00

Sumber: Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dan Revisi RTRW Kota Bekasi serta Analisis GIS Tahun 2021

Kondisi topografi Kota Bekasi relatif datar dan landai, dengan kemiringan lerengnya antara 0 – 2%. Wilayah Kota Bekasi terletak pada ketinggian antara 11 m sampai 81 m di atas permukaan air laut (dpl). Kecamatan Bekasi Utara dan Bekasi Timur merupakan wilayah yang paling rendah berada pada 0 – 5 m dpl, sehingga wilayahnya banyak genangan, terutama pada musim hujan. Ketinggian kurang dari 30 m dpl berada pada Kecamatan Bekasi Selatan (sebagian), Pondok Gede, Jatiasih (sebagian), Medan Satria, dan Mustika Jaya. Sedangkan ketinggian di atas 30 dpl berada di Pondok Melati, Jatiasih (sebagian), dan Mustika Jaya (sebagian). Kecamatan Jatisampurna dan Bantar Gebang merupakan wilayah yang memiliki ketinggian di atas 45 m dpl.

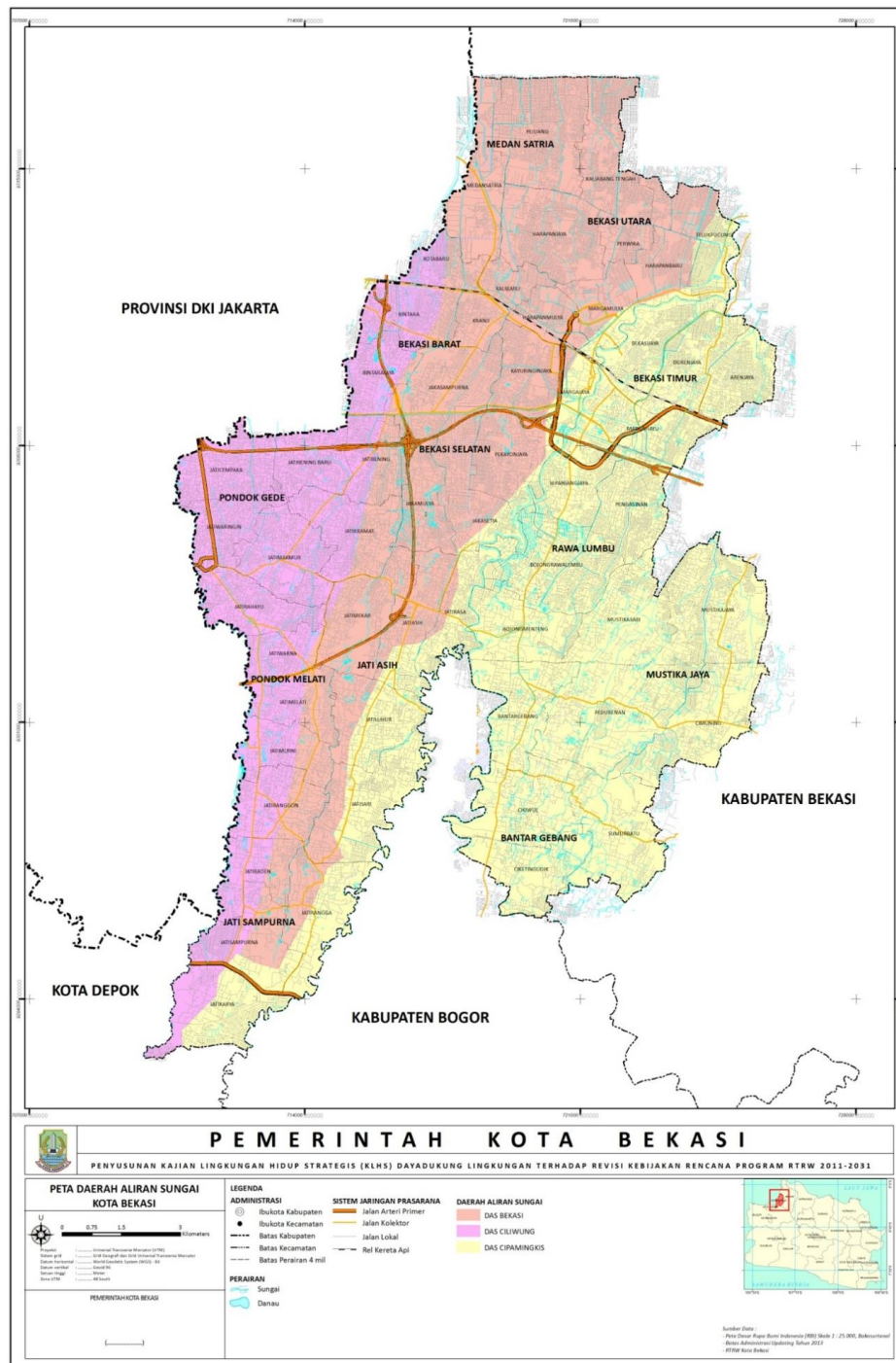
Kota Bekasi memiliki iklim kering dengan tingkat kelembaban rendah dan rata-rata suhu udara paling tinggi di bulan Juni dengan suhu maksimum sekitar 33,00°C dan suhu minimum 26,90°C. Pola curah hujan di Kota Bekasi adalah monsunial dimana hanya terdapat satu puncak terjadinya musim hujan. Berdasarkan data Perum Jasa Tirta II tahun 2021 menunjukkan bahwa intensitas curah hujan tertinggi di bulan Februari yaitu sebanyak 1.898 mm, dengan jumlah hari hujan 29 hari. Sementara intensitas curah hujan terendah ada di bulan Juli yaitu sebanyak 45 mm dengan jumlah hari hujan 31 hari.

Tabel II. 2 Kondisi Cuaca

Bulan	Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari
Januari	1.089	31	-
Februari	1.898	29	-
Maret	655	31	-
April	655	30	-
Mei	433	31	-
Juni	190	30	-
Juli	45	31	-
Agustus	87	31	-
September	217	30	-
Oktober	574	17	-
November	422	23	-
Desember	407	20	-

Sumber : Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, dalam Kota Bekasi Dalam Angka 2021

Wilayah Kota Bekasi dialiri 3 (tiga) sungai utama, yaitu: Sungai Cakung, Sungai Bekasi, dan Sungai Sunter, beserta anak-anak sungainya. Sungai Bekasi mempunyai hulu di Sungai Cikeas yang berasal dari gunung dengan ketinggian kurang lebih 1.500 meter dari permukaan air laut. Air permukaan yang terdapat di wilayah Kota Bekasi meliputi sungai/kali Bekasi dan beberapa sungai/kali kecil serta saluran irigasi Tarum Barat yang selain digunakan untuk mengairi sawah juga merupakan sumber air baku bagi kebutuhan air minum wilayah Bekasi (kota dan kabupaten) dan wilayah DKI Jakarta.

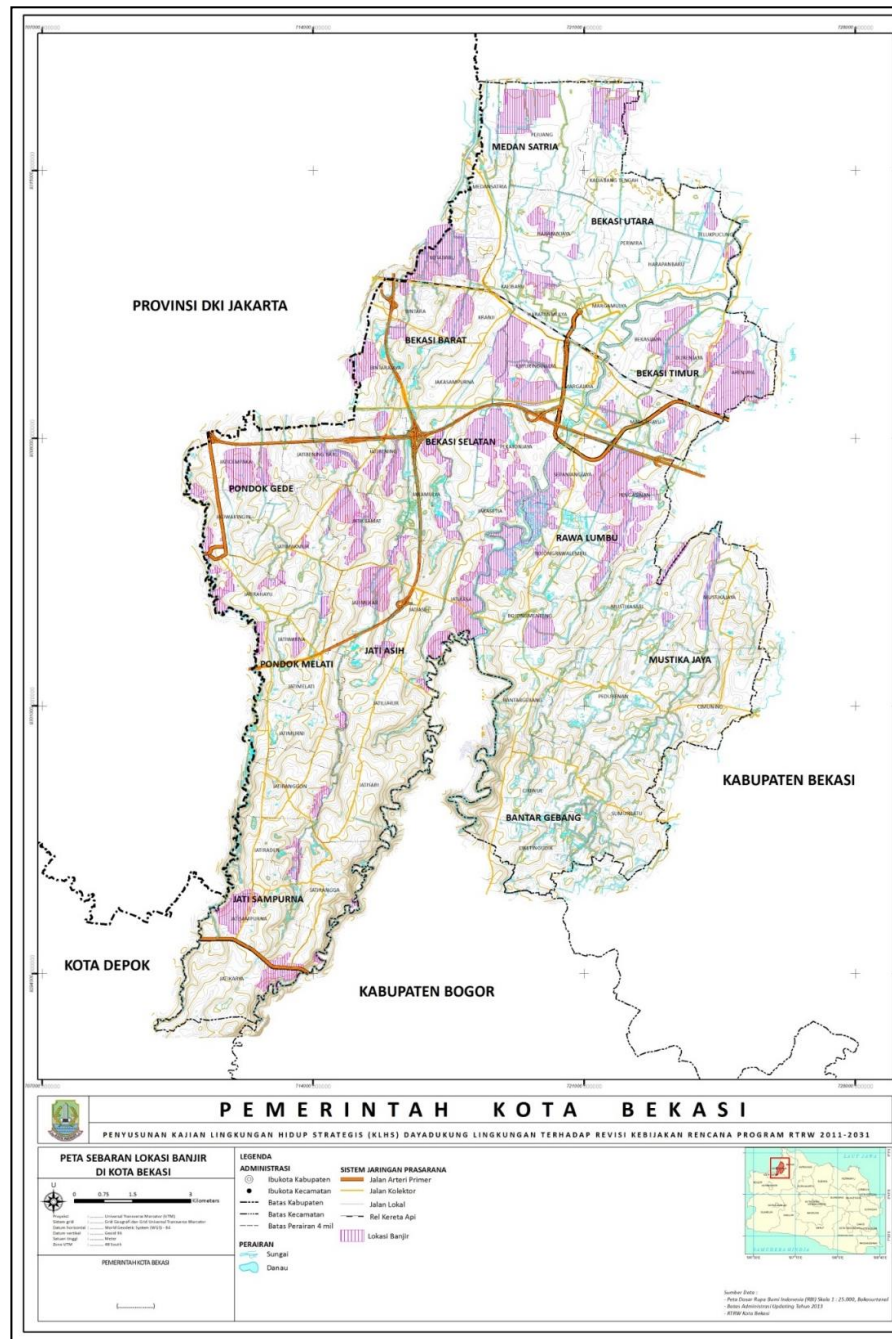


Gambar II. 2 DAS yang meliputi Kota Bekasi

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi (2020) yang dikelola dalam SIPD

Kota Bekasi tercatat ada 49 titik rawan banjir yang tersebar di 10 kecamatan. Daerah rawan banjir yang jumlahnya mencapai 49 titik terbagi di Kecamatan Jatiasih delapan titik, Kecamatan Bekasi Selatan tujuh titik, Kecamatan Rawalumbu lima titik, Kecamatan Bekasi Timur delapan titik, Kecamatan Bekasi

Utara tiga titik, Kecamatan Bekasi Barat enam titik, Kecamatan Pondok Melati dua titik, Kecamatan Pondok Gede lima titik, Kecamatan Medan Satria tiga titik, dan Kecamatan Mustika Jaya dua titik.



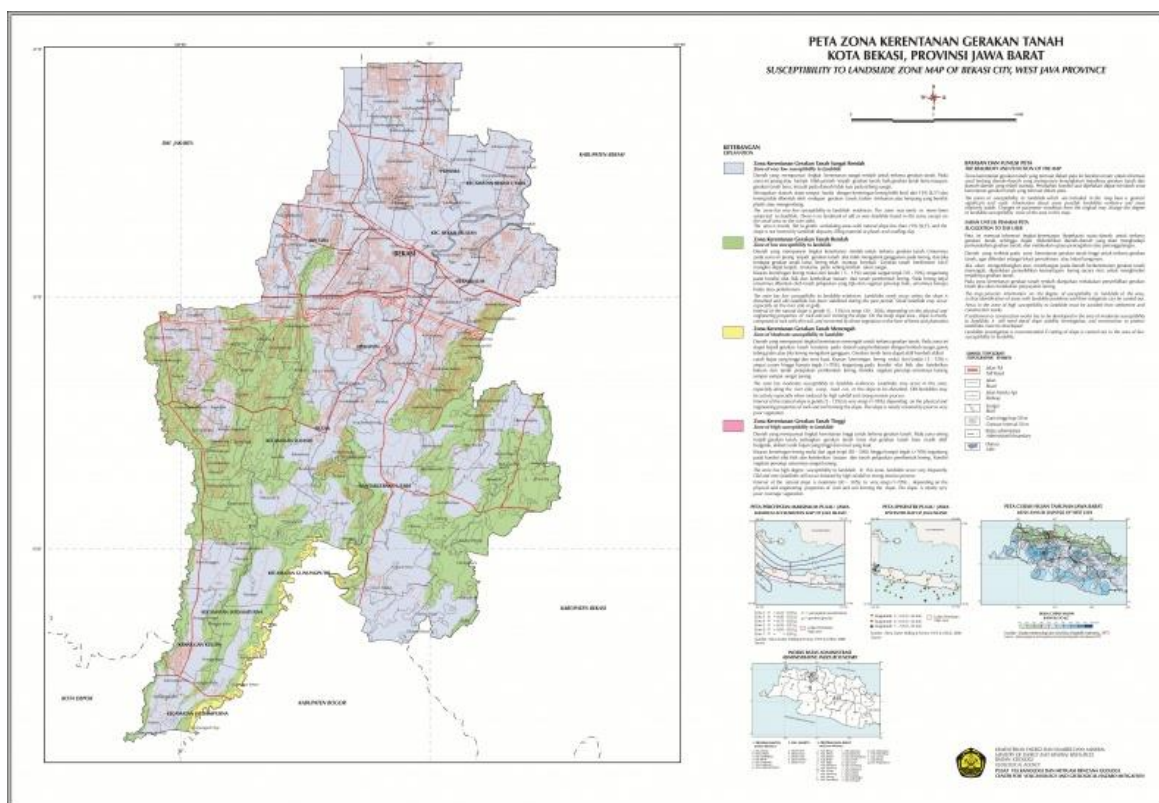
Gambar II. 3 Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kota Bekasi

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi (2020) yang dikelola dalam SIPD

Kondisi air tanah di wilayah Kota Bekasi sebagian cukup potensial untuk digunakan sebagai sumber air bersih terutama di wilayah selatan Kota Bekasi, tetapi untuk daerah yang berada di sekitar TPA Bantar Gebang kondisi air tanahnya kemungkinan besar sudah tercemar. Kondisi air tanah yang terdapat di

Bekasi Timur sebagian mengandung zat besi. Namun secara umum wilayah Kota Bekasi merupakan kawasan resapan air pada Cekungan Air Tanah (CAT) Bekasi-Karawang. Untuk penggunaan air tanah, baik air tanah dangkal maupun dalam harus dikendalikan, karena menurut Kementerian ESDM, CAT Bekasi-Karawang dinyatakan dalam kondisi kritis.

Struktur geologi wilayah Kota Bekasi didominasi oleh *pleistocene volcanik facies*. Struktur aluvium menempati sebagian kecil wilayah Kota Bekasi bagian utara sedangkan struktur *miocene sedimentary facies* terdapat di bagian timur wilayah Kota Bekasi sepanjang perbatasan dengan DKI Jakarta. Kedalaman efektif tanah sebagian besar di atas 91 cm. Jenis tanah latosol dan aluvial, serta tekstur tanah didominasi tekstur sedang dan halus. Komposisi perbandingan berdasarkan luasnya adalah: tekstur halus seluas 17.260 ha (82%), tekstur sedang seluas 3.368 ha (16%) dan tekstur kasar seluas 421 ha (2%) (BAPPEDA Kota Bekasi, 2005).



Gambar II. 4 Peta Gerakan Tanah yang dikelola dalam SIPD

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi (2020) yang dikelola dalam SIPD

Pengembangan Kota Bekasi sangat pesat. Jumlah penduduk yang semakin bertambah yang disertai peningkatan kegiatan perekonomian, tentunya membutuhkan ruang dan lahan. Secara umum luas lahan terbuka dan lahan bervegetasi mengalami penurunan. Perubahan luas antara lahan bervegetasi dengan lahan terbangun menunjukkan hasil yang berbanding terbalik. Hal ini

dibuktikan dengan berkurangnya lahan bervegetasi dan bertambahnya lahan terbangun selama 15 tahun. Luas lahan vegetasi berkurang sebesar 4.805 ha dan lahan terbuka yang berkurang sebesar 752 ha. Sementara lahan terbangun menjadi bertambah sebesar 5.596 ha. Secara lebih rinci hal tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II. 3 Perubahan luas lahan di Kota Bekasi dari tahun 2000 sampai 2015

No	Tutupan Lahan	Luas Lahan 2000		Luas Lahan 2015		Perubahan Luas Lahan	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Badan Air	58	0.3	20	0.1	-38	-0.2
2	Lahan Terbangun	12250	56.4	17846	82.1	5596	25.8
3	Lahan Terbuka	2412	11.1	1660	7.6	-752	-3.5
4	Vegetasi	7004	32.2	2199	10.1	-4805	-22.1

Sumber: KLHS perubahan RPJMD Kota Bekasi (2020)

Analisis ketersediaan lahan di Kawasan Bekasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan kemampuan kawasan tersebut untuk meresapkan air. Kemampuan meresapkan air ini tergantung beberapa faktor, seperti: jenis tanah, geologi, curah hujan, kemiringan lereng, dan morfologi. Selanjutnya kemampuan meresapkan air pada setiap zonasi dari hasil analisis perhitungan neraca air digunakan untuk menentukan besaran Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Maksimum. KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.

Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa daya tampung suatu lahan untuk bisa dikembangkan dengan asumsi peningkatan air larian mencapai 100% dari kondisi awal. Daya tampung lahan terbangun setiap zonasi potensi resapan akan berbeda besarnya, untuk KWT maksimum di zona resapan tinggi akan lebih kecil dibandingkan dengan besaran KWT maksimum di zona potensi resapan rendah. Hal ini disebabkan pada zona potensi resapan tinggi mempunyai fungsi orologis yaitu sebagai pasokan air tanah untuk daerah hilirnya, sehingga untuk kegiatan pembangunan di zona potensi resapan sedang hingga tinggi perlu adanya rekayasa teknik seperti sumur resapan dan atau kolam resapan. Untuk pembangunan di daerah yang berpotensi resapan rendah bisa dilakukan dengan KWT yang lebih besar, tetapi untuk mencegah terjadi air limpasan terhadap bagian hilir yang tidak menimbulkan banjir maka perlu dibuatkan kolam retensi, yang juga dapat berfungsi untuk penyediaan sumber air.

Guna mengetahui kondisi daya dukung lahan yang ada di suatu kawasan, maka perlu dihitung KWT aktual, yang merupakan kondisi pada saat ini terkait dengan perbandingan (persentase) luas kawasan yang terbangun terhadap kawasan peruntukan seluruhnya di dalam satu kawasan. Selanjutnya KWT aktual



dibandingkan dengan KWT maksimal suatu kawasan yang sudah ditentukan sebelumnya. Jika KWT aktual lebih besar atau melampaui KWT maksimal maka berarti kawasan tersebut sudah melebihi daya dukung lahannya. Koefisien Wilayah Terbangun Aktual (KWT_{aktual}) di Kota Bekasi belum melebihi KWT_{maks} . Sehingga banyak lahan yang tersedia untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 4 Koefisien Wilayah Terbangun Maksimum dan Koefisien Wilayah Terbangun Aktual Kota Bekasi Eksisting

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Luas Tertutup Bangunan (Ha)	KWT Aktual (%)	KWT Maksimal (%)	Ketersediaan Ruang Lahan Terbangun (%)	Ketersediaan Ruang Lahan Terbangun (Ha)
1.	Bantar Gebang	2.159	1.353	63	98	35	763
2.	Bekasi Barat	1.489	1.285	86	98	12	174
3.	Bekasi Selatan	1.582	1.355	86	98	12	195
4.	Bekasi Timur	1.407	1.285	91	96	5	65
5.	Bekasi Utara	2.061	1.764	86	98	12	256
6.	Jatiasih	2.536	1.989	78	98	20	496
7.	Jatisampurna	2.248	1.529	68	93	25	562
8.	Medan Satria	1.434	967	67	97	30	424
9.	Mustika Jaya	2.414	1.663	69	85	16	389
10.	Pondok Melati	963	730	76	96	20	194
11.	Pondok Gede	1.501	1.448	96	98	2	23
12.	Rawalumbu	1.772	1.454	82	92	10	175

Sumber : KLHS Metropolitan Bodebekkarpur 2016

Berdasarkan data ketersediaan lahan dan karakteristik wilayah, maka pengembangan wilayah dapat dilaksanakan sesuai dengan RTRW Kota Bekasi yang ada. Namun yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan dan pemerataan pembangunan antara wilayah di Kota Bekasi. Pembangunan yang ada cenderung lebih ke arah ke pusat Kota Bekasi, dimana daya dukung wilayah sudah hampir terlampaui.

2.1.2 Kondisi Umum Demografi

Berdasarkan definisi BPS (2021), penduduk semua orang yang telah berdomisili selama 6 bulan atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Penduduk dalam suatu daerah merupakan subyek dan obyek pembangunan. Semakin bagus kualitas penduduk suatu daerah maka akan semakin baik pembangunan daerah tersebut.

Pada tahun 2021 penduduk Kota Bekasi berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sebanyak 2.468.448 jiwa. Terdiri atas laki-laki 1.238.339 jiwa dan perempuan 1.230.109 jiwa, sehingga angka sex ratio di Kota Bekasi sebesar 101 yang artinya terdapat 101 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan. Populasi penduduk terbesar berada di Kecamatan Bekasi Utara yang dihuni sebanyak 333.170 penduduk (13,50 persen), diikuti Kecamatan Bekasi Timur dan Kecamatan Bekasi Barat, masing-masing 271.823 penduduk (11,01 persen) dan 266.211 penduduk (10,78 persen). Sedangkan Kecamatan dengan populasi terkecil adalah Kecamatan Bantargebang yang memiliki jumlah penduduk 108.332 penduduk (4,39 persen). Jumlah penduduk Kota Bekasi berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin dapat dilihat dalam Tabel II.5 di bawah.

Tabel II. 5 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk				Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Penduduk	Persentase (%)	
Pondok Gede	113.459	112.929	226.388	9,17	101
Jatisampurna	54.459	54.306	108.765	4,41	100
Pondokmelati	63.595	63.238	126.833	5,14	101
Jatiasih	115.798	115.631	231.429	9,38	100
Bantargebang	55.259	53.073	108.332	4,39	104
Mustikajaya	103.275	101.761	205.036	8,31	102
Bekasi Timur	135.881	135.942	271.823	11,01	100
Rawalumbu	110.986	109.821	220.807	8,94	101
Bekasi Selatan	105.514	106.850	212.364	8,60	99
Bekasi Barat	133.234	132.977	266.211	10,78	102
Medan Satria	79.270	78.020	157.290	6,37	102
Bekasi Utara	167.609	165.561	333.170	13,50	102
Kota Bekasi	1.238.339	1.230.109	2.468.448	100,00	101

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi 2021, diolah

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah/negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi bisa pula diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah/nasional.

Ditilik dari sisi Perekonomian Nasional, pada triwulan II-2022 terhadap triwulan sebelumnya ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 3,72 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,15 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 32,00 persen. Penguatan ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II-2022 terlihat pada semua wilayah. Kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi kontributor utama dengan peranan sebesar 56,55 persen dari ekonomi Nasional, dengan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,66 persen (y-on-y) dibanding triwulan II-2021 (BPS, 2022).

Perekonomian Jawa Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I/2022 mencapai Rp581,64 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp388,54 triliun. Ekonomi Jawa Barat triwulan I/2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,18 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,72 persen (BPS Jawa Barat, 2022).

Nilai PDRB Kota Bekasi atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 101,39 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 4,9 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh kenaikan produksi dikarenakan sudah longgarnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 67,62 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 69,8 triliun rupiah pada tahun 2021. Selama tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi meningkat sebesar 3,22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

1) Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Kota Bekasi didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Transportasi dan Pergudangan.

Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Bekasi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB

Kota Bekasi pada tahun 2021 dihasilkan oleh kategori lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 34,00 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 21,87 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,03 persen, serta lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,05 persen. Sementara peranan kategori lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah lima persen. Pengaruh Pandemi Covid-19 membuat gejolak dan kontraksi yang cukup dalam terhadap perekonomian dunia. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, perekonomian Kota Bekasi kembali bangkit. Kondisi tersebut belum menggeser struktur perekonomian di Kota Bekasi.

Tabel II. 6 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Bekasi, 2017-2021 (dalam persen)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,59	0,59	0,56	0,59	0,57
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	34,34	33,87	33,28	33,74	34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,94	1,74	1,62	1,42	1,4
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,11	0,11
F	Konstruksi	11,00	11,53	12,00	11,18	11,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,60	22,51	22,54	22,08	21,87
H	Transportasi dan Pergudangan	10,18	10,06	10,08	10,09	10,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,88	4,08	4,07	4,05	3,99
J	Informasi dan Komunikasi	2,06	2,06	2,07	2,79	2,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,09	3,12	3,05	3,13	3,22
L	Real Estat	1,57	1,56	1,58	1,65	1,77
M,N	Jasa Perusahaan	0,45	0,46	0,48	0,44	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,98	1,95	1,84	1,77	1,77
P	Jasa Pendidikan	2,30	2,39	2,57	2,80	2,78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,11	1,12	1,17	1,16	1,26
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,81	2,87	3,00	3,00	2,91
TOTAL		100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi 2021

2) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bekasi pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi dan jasa yang disebabkan sudah longgarnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Peningkatan tersebut terjadi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Bekasi tahun 2021 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 69,8 triliun rupiah. Angka tersebut naik sebesar 2,18 triliun dari 67,62 triliun rupiah pada tahun 2020. Tercatat bahwa selama tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali bangkit sebesar 3,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai minus 2,48 persen.

Pemerintah dan para pelaku usaha masih harus berusaha keras untuk berjuang menghadapi dampak pandemi ini untuk memulihkan perekonomian di Kota Bekasi. Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi per masing-masing kategori, semua kategori memiliki pertumbuhan positif. Kategori yang mengalami pertumbuhan positif tertinggi di masa pandemi yaitu kategori real estate sebesar 12,90 persen. Sedangkan pertumbuhan positif yang paling kecil yaitu kategori Penyedia Makanan dan Minuman sebesar 0,86 persen.

Meskipun masih pandemi Covid-19, aktivitas sebagian masyarakat dan pekerja sudah mulai melakukan kegiatan tatap muka dan sebagian dari mereka masih menggunakan media online. Pendidikan juga mengalami pertumbuhan positif karena jumlah anak usia sekolah yang juga meningkat dan umumnya masih tetap bersekolah walaupun tanpa tatap muka (*School From Home*). Volume dan pendapatan dari pengadaan air bersih yang disalurkan meningkat 9,43 persen dibandingkan tahun 2021, kebiasaan cuci tangan akibat Covid-19 menjadi salah satu penyebab peningkatannya.

Adapun kategori yang mengalami dampak kedua terbesar akibat pandemic Covid-19 yaitu Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,54 persen. Urutan ketiga terbesar yaitu kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang. Urutan kelima terdapat pada kategori Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 8,08 persen, urutan selanjutnya yaitu Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi yaitu sebesar 3,65 persen. Angka ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 0,57 persen. Kategori yang memiliki pertumbuhan terkecil yaitu Penyediaan Makan dan Minum sebesar 0,86 persen. Hal ini menunjukkan, perekonomian Kota Bekasi sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya dimana

untuk kategori tersebut pertumbuhan nya melambat yaitu minus 5,06 persen. Kondisi Pandemi Covid-19 yang sudah bisa diatasi oleh pemerintah sehingga pertumbuhan ekonomi sudah menjadi lebih baik. Banyak usaha yang sudah mulai bangkit kembali. Meskipun begitu, pemerintah masih harus berusaha untuk berjuang menghadapi dampak pandemi ini untuk memulihkan perekonomian di Kota Bekasi.

Tabel II. 7 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2017-2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,39	2,02	2,49	1,35	1,44
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4,76	4,61	3,79	-1,19	3,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	- 22,19	-3,76	-2,21	-12,88	3,37
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7,38	5,30	5,10	10,48	9,43
F	Konstruksi	10,39	9,54	9,71	-8,72	2,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,47	5,51	5,13	-5,72	2,81
H	Transportasi dan Pergudangan	6,14	5,49	7,85	-1,98	1,76
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,98	9,44	2,62	-5,06	0,86
J	Informasi dan Komunikasi	10,99	9,06	8,25	33,57	8,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,28	5,37	2,13	0,57	3,65
L	Real Estat	6,89	6,92	7,57	0,55	12,90
M,N	Jasa Perusahaan	8,49	8,53	6,74	-14,21	2,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,11	1,68	0,92	-6,18	2,93
P	Jasa Pendidikan	8,87	7,07	5,43	2,31	2,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,98	8,02	9,99	-4,87	11,54
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,61	6,82	8,60	-2,94	1,74
Produk Domestik Regional Bruto		5,73	5,86	5,41	-2,58	3,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi 2021

3) PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB



per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Bekasi atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 terus mengalami kenaikan, Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 29,14 juta rupiah. Secara nominal mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 39,53 juta rupiah.

Tabel II. 8 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Bekasi, 2017-2021

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
- ADHB	83.327,64	90.980,62	98.107,70	96.493,20	101.388,47
- ADHK	62.202,01	65.845,09	69.406,53	67.619,24	69.796,94
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)					
- ADHB	29,14	31,03	33,34	38,00	39,53
- ADHK	21,75	22,46	23,58	26,63	27,21
- Jumlah Penduduk (ribu orang)	2,860	2,932	2,943	2,539	2,565

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi 2021

4) Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Sementara itu, Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah suatu indeks yang menghitung atau mengukur rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga (*household*) atau masyarakat dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur laju inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Laju inflasi di Jawa Barat dipantau di 7 (tujuh) kota, termasuk Kota Bekasi. Dari 7 Kota pantauan IHK di Provinsi Jawa Barat, tercatat semua kota mengalami inflasi. Pada Juli 2022 Kota Bekasi mengalami inflasi sebesar 0,62 persen dengan

Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,60. Tingkat inflasi tahun kalender Kota Bekasi (*year to date*) Juli 2022 sebesar 3,49 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (*year on year*), Juli 2022 terhadap Juli 2021 sebesar 4,57 persen (Berita Resmi Statistik BPS Kota Bekasi, 2022). Sedangkan tingkat inflasi di Jawa Barat pada periode yang sama tercatat sebesar 0,62 persen dan Nasional mengalami inflasi sebesar 0,64 persen.

Inflasi di Kota Bekasi sampai dengan Juli 2022 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Dari sebelas kelompok pengeluaran, tujuh kelompok pengeluaran mengalami inflasi, satu kelompok pengeluaran mengalami deflasi dan tiga kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan indeks. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,68 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar mengalami inflasi sebesar 0,68 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 0,65 persen; kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 0,61 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami inflasi sebesar 0,23 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,12 persen; dan kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 0,03 persen. Kelompok yang mengalami deflasi adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen. Kelompok yang tidak mengalami perubahan indeks adalah kelompok kesehatan; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; dan kelompok pendidikan.



Gambar II. 5 Perkembangan Inflasi Kota Bekasi, Agustus 2021-Agustus 2022 (Persen)

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2022

Pada Juli 2022, dari 7 (tujuh) kota di Jawa Barat, seluruh kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Depok sebesar 0,71 persen sedangkan . Berturut-turut diikuti Kota Bekasi inflasi sebesar 0,62 persen, Kota Bandung inflasi sebesar 0,60 persen, Kota Tasikmalaya inflasi sebesar 0,57 persen, Kota Bogor inflasi sebesar 0,55 persen, Kota Sukabumi inflasi sebesar 0,43 persen, dan terakhir Kota Cirebon inflasi sebesar 0,36 persen.

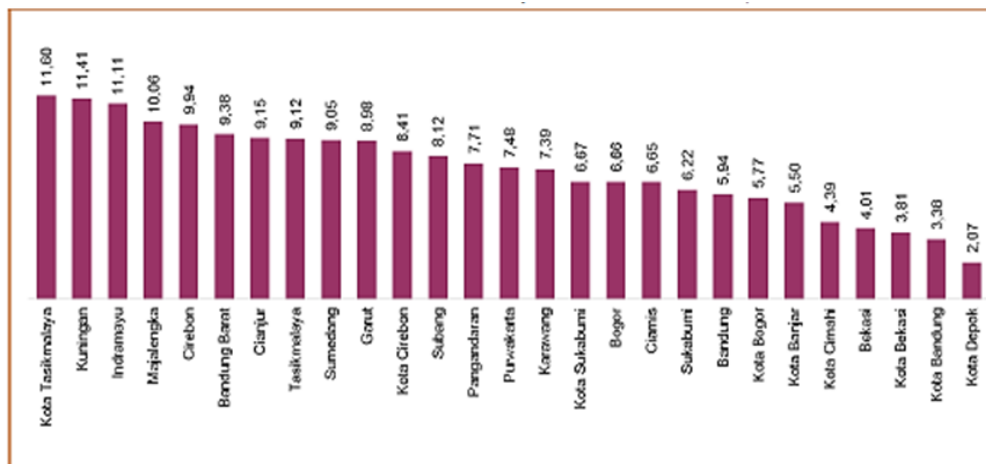
Tabel II. 9 Perbandingan Indeks dan Inflasi Kota-Kota di Provinsi Jawa Barat

KOTA		JULI 2022	
		IHK	Inflasi (%)
(1)		(2)	(3)
1.	BOGOR	113,81	0,55
2.	SUKABUMI	111,17	0,43
3.	BANDUNG	112,10	0,60
4.	CIREBON	108,76	0,36
5.	BEKASI	113,60	0,62
6.	DEPOK	113,30	0,71
7.	TASIKMALAYA	110,24	0,57

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2022, diolah

5) Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Di Kota Bekasi, persentase penduduk di atas garis kemiskinan mengalami kenaikan dari 95,89 persen pada tahun 2018 menjadi 96,19 persen pada tahun 2019. Kenaikan ini terjadi karena keberhasilan Kota Bekasi dalam menurunkan persentase penduduk miskin dari 4,11 persen pada tahun 2018 menjadi 3,81 persen pada tahun 2019 yang merupakan urutan ketiga terbawah dari antara Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

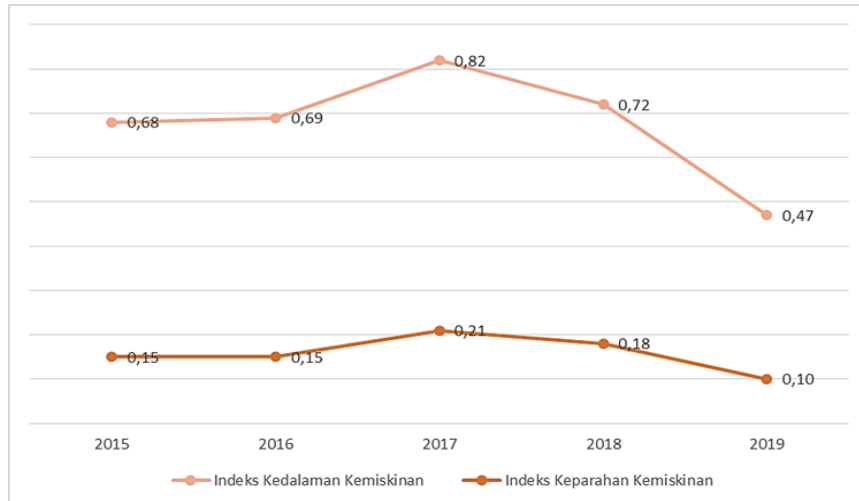


Gambar II. 6 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2020 yang dikelola dalam SIPD

Selain itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Bekasi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Seperti pada

tahun 2015 Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 0,68 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 mencapai 0,82 dan kemudian menurun hingga tahun 2019 dengan besaran 0,47, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 0,15 dan pada tahun 2017 terjadi kenaikan hingga 0,21 kemudian mengalami penurunan hingga 0,10 pada 2019 (lihat Gambar 2.18).



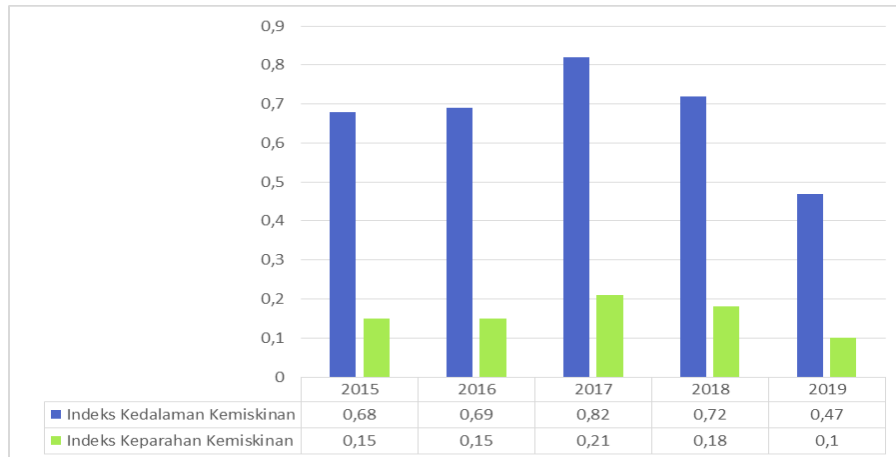
Gambar II. 7 Garis Kemiskinan Kota Bekasi Tahun 2015-2019

Sumber: Kota Bekasi dalam Angka, 2020 yang dikelola dalam SIPD

Sementara menurut data BPS tahun 2022, Tahun 2021, Garis Kemiskinan ditentukan pada angka rata-rata pengeluaran per kapita masing-masing Rp. 692.885 per bulan. Angka kemiskinan di Kota Bekasi sebanyak 144,12 ribu orang (4,74 persen), terjadi peningkatan dibanding tahun 2020. Pada 2020 angka kemiskinan mencapai 134,01 ribu orang (4,38 persen).

6) Rasio Kesenjangan Kemiskinan

Rasio kesenjangan kemiskinan atau disebut juga indeks kedalaman kemiskinan atau (*poverty gap index*, P_1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.



Gambar II. 8 Perkembangan Rasio Kesenjangan Kemiskinan, 2015-2019

Sumber: Kota Bekasi dalam Angka, 2020 yang dikelola dalam SIPD

Sepanjang kurun waktu 2015-2019, rasio kesenjangan kemiskinan di Kota Bekasi bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat hingga tahun 2017 dan turun setelahnya. Pada tahun 2015, rasio kesenjangan kemiskinan di kota ini mencapai angka rasio 0,68. Beberapa tahun kemudian meningkat hingga 0,82, seperti dapat dilihat pada Gambar II.8. Akan tetapi, rasio kesenjangan kemiskinan di Kota Bekasi kembali menurun menjadi 0,72 pada tahun 2018 dan kembali turun menjadi 0,47 pada tahun 2019, yang berarti lebih rendah dibandingkan rasio tahun 2015. Kecenderungan serupa juga diperlihatkan oleh rasio keparahan kemiskinan untuk rentang waktu bersamaan.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial

1) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hasil pengukuran IPM dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal berikut:

- Mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia (masy/penduduk).
- Menentukan peringkat atau level pembangunan suatu daerah/negara.
- Menjadi ukuran kinerja pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
- Khusus di Indonesia, digunakan sebagai indikator untuk penentuan besaran DAU.

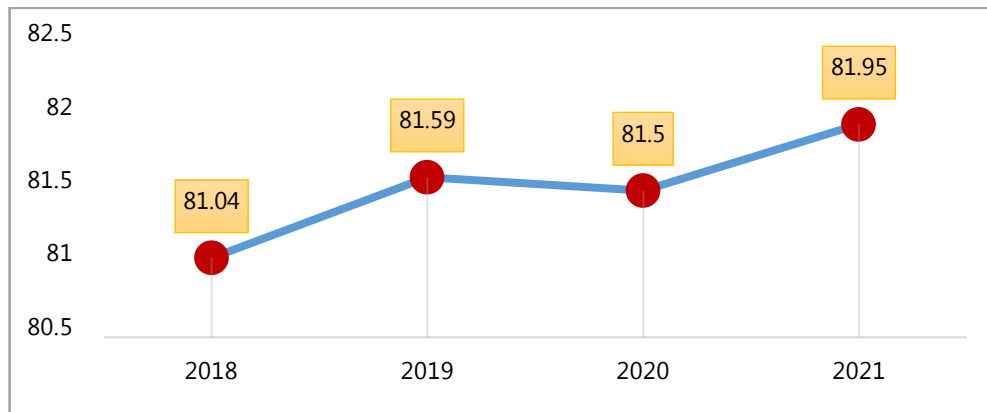
Pembangunan manusia di Kota Bekasi terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi. Pada tahun 2021, IPM Kota Bekasi mencapai 81,95. Angka ini meningkat sebesar 0,45 poin dibandingkan dengan IPM Kota Bekasi pada tahun 2020 yang sebesar 81,50. Status pembangunan manusia di Kota Bekasi mencapai level “tinggi”. IPM Kota Bekasi pada tahun 2021 meningkat sebesar 0,45 poin dibandingkan tahun 2020.

Peningkatan IPM ditunjukkan dengan peningkatan pada setiap komponen penyusunnya. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 75,19 tahun, meningkat 0,18 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,10 tahun, meningkat 0,10 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 11,31 tahun, meningkat 0,15 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp 15,903 juta rupiah pada tahun 2021, meningkat Rp 127 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur Panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. **Standar hidup yang layak** digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometric indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.



Gambar II. 9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi, 2018-2021

Sumber: BPS Kota Bekasi 2021

Secara umum, pembangunan manusia Kota Bekasi terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2021. IPM Kota Bekasi meningkat dari 76,77 pada tahun 2010 menjadi 81,95 pada tahun 2021. Selama periode tersebut, IPM Kota Bekasi rata-rata tumbuh sebesar 0,60 persen per tahun. Pada periode 2020-2021, IPM Kota Bekasi tumbuh 0,55 persen. Capaian pembangunan manusia Kota Bekasi sebesar 81,95 masuk dalam kategori IPM “sangat tinggi”.

2) Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup (*age specific rate*) penduduk adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Usia harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, maka usia harapan hidup akan rendah. Usia harapan hidup di negara-negara maju relatif tinggi karena tingkat kesehatan ibu dan bayinya pada umumnya juga tinggi. Sebaliknya, di negara berkembang biasanya relatif rendah karena buruknya tingkat kesehatan ibu dan bayi. Di Kota Bekasi, sebagaimana terlihat, angka usia harapan hidup saat lahir sudah mencapai 75,48 tahun (capaian di Tahun 2022).

3) Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih. Mereka terdiri dari “Angkatan Kerja” dan “Bukan Angkatan Kerja”. Proporsi penduduk yang tergolong “Angkatan Kerja” adalah mereka yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja yakni yang bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah Angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia

kerja. Penduduk Kota Bekasi berusia 15 tahun atau lebih pada tahun 2021 mencapai 2,38 juta orang. Jumlah angkatan kerja sebanyak 1,54 juta orang, dimana 1,35 juta orang di antaranya bekerja di berbagai sektor usaha, sedangkan sisanya 0,19 juta masih menganggur.

Pekerja di Kota Bekasi didominasi oleh lulusan SMA, yakni mencapai 45,07 persen, dan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja yang tamat SMA sebesar 64,99 persen. Sedangkan untuk pekerja lulusan perguruan tinggi mencapai 28,69 persen dan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja yang tamat perguruan tinggi sebesar 80,47 persen. Jadi terlihat bahwa perbedaan persentase yang bekerja dengan angkatan kerja antara yang lulus SMA dan perguruan tinggi menjadi cukup signifikan.

4) Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Dengan begitu, angka partisipasi angkatan kerja merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang menunjukkan besarnya persentase partisipasi angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

Di Kota Bekasi, angka partisipasi angkatan kerja cenderung meningkat selama periode 2015-2017, yakni dari 60,16 persen pada tahun 2015 hingga 2016 menjadi 66,38 persen tahun 2017. Berdasarkan data BPS Jawa Barat tahun 2022, pada 2019 angka partisipasi angkatan kerja sebesar 65,66 persen dan pada tahun setelahnya sedikit mengalami penurunan, kemudian sedikit kenaikan pada tahun setelahnya. Tahun 2020 angkanya sebesar 64,74 dan tahun 2021 angkanya sebesar 64,76 persen (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2022).

5) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari:

- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Berdasarkan pemutakhiran data yang dilakukan Badan Pusat Statistik Jawa Barat tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka tahun 2021 di Kota Bekasi sebesar 10,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10,68

persen. Jumlah angkatan kerja di Kota Bekasi pada tahun 2021 mencapai 1.544.421 jiwa atau bertambah 34.580 jiwa dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.509.841 jiwa. Sedangkan masyarakat yang berstatus menganggur di Kota Bekasi tahun 2021 tercatat sebanyak 167.974 jiwa atau sebesar 12,2% dari yang berstatus bekerja sebanyak 1.376.447 jiwa (Bekasi Dalam Angka 2022).

6) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional¹, tingkat kesejahteraan sebuah keluarga dapat dibagi ke dalam 5 tahap, yaitu Pra Sejahtera (sangat miskin), Sejahtera Tahap I (miskin), Sejahtera Tahap II (hampir miskin), Sejahtera Tahap III (tidak miskin), dan Sejahtera Tahap III Plus.

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keluarga berencana. Kebutuhan dasar minimal mencakup:

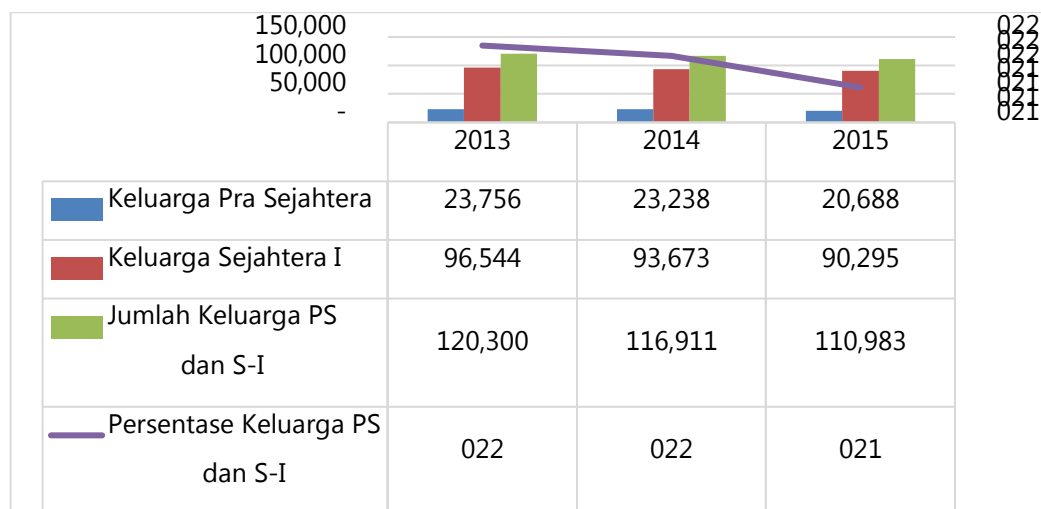
- Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga.
- Seluruh anggota keluarga makan dua kali atau lebih dalam sehari.
- Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian berbeda di rumah, bekerja, sekolah, atau berpergian.
- Bagian yang terluas dari lantai bukan dari tanah.
- Apabila anak sakit dan atau pasangan usia subur ingin berkeluarga berencana, dibawa ke sasaran kesehatan.

Keluarga Sejahtera Tahap I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. Kebutuhan sosial psikologi yang belum terpenuhi meliputi:

- a) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
- b) Paling kurang sekali seminggu, keluarga menyediakan daging, ikan atau telur.
- c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 (satu) pasang pakaian baru per tahun.
- d) Luas lantai rumah paling kurang 8 (delapan) meter persegi untuk setiap pengguna rumah.
- e) Seluruh anggota keluarga dalam 3 (tiga) bulan terakhir dalam keadaan sehat.

¹ Baca: Euis Sunarti. 2011. "Kependudukan dan Keluarga Sejahtera". *Tulisan Tidak Dipublikasikan*. Bogor, Juli.

- f) Paling kurang 1 (satu) anggota keluarga berusia 15 tahun ke atas sudah berpenghasilan tetap.
- g) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun bisa baca tulis huruf latin.
- h) Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.
- i) Bila anak hidup 2 (dua) atau lebih, keluarga yang usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil).



Gambar II. 10 Perkembangan Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Bekasi, Tahun 2013-2015

Sumber: Kota Bekasi dalam Angka, 2020 yang dikelola dalam SIPD

Selama kurun waktu 2013-2015, persentase jumlah Keluarga Pra Sejahtera ditambah Keluarga Sejahtera I dibandingkan jumlah seluruh keluarga di Kota Bekasi, memperlihatkan penurunan (lihat Gambar II.11), yakni dari 21,88% (120.300 keluarga) menjadi 21,29% (110.983 keluarga). Penurunan ini mengindikasikan bahwa secara eksplisit kesejahteraan keluarga di Kota Bekasi mulai meningkat menuju tahapan Keluarga Sejahtera II dan seterusnya. Dengan kata lain, ekonomi masyarakat di Kota Bekasi semakin membaik. Pada tahun 2015, persentase jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Bekasi lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat yang mencapai angka sekitar 48,05 persen.

7) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara



harapan dan kebutuhannya. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor: 067/Kep.552.1/Setda.Org/VII/2022 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Bekasi Semester 1 Tahun 2022 bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat yang dihasilkan dari survei yang telah dilaksanakan oleh 95 Unit Penyelenggara Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi tahun 2022. Berdasarkan hasil survei tersebut Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bekasi pada semester 1 tahun 2022 diketahui rata-rata baik (dengan nilai rata-rata 83,42) dan terdapat 8 (delapan) Unit Penyelenggara Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang mendapat nilai kinerja pelayanan sangat baik, sebagaimana tertera di dalam tabel berikut.

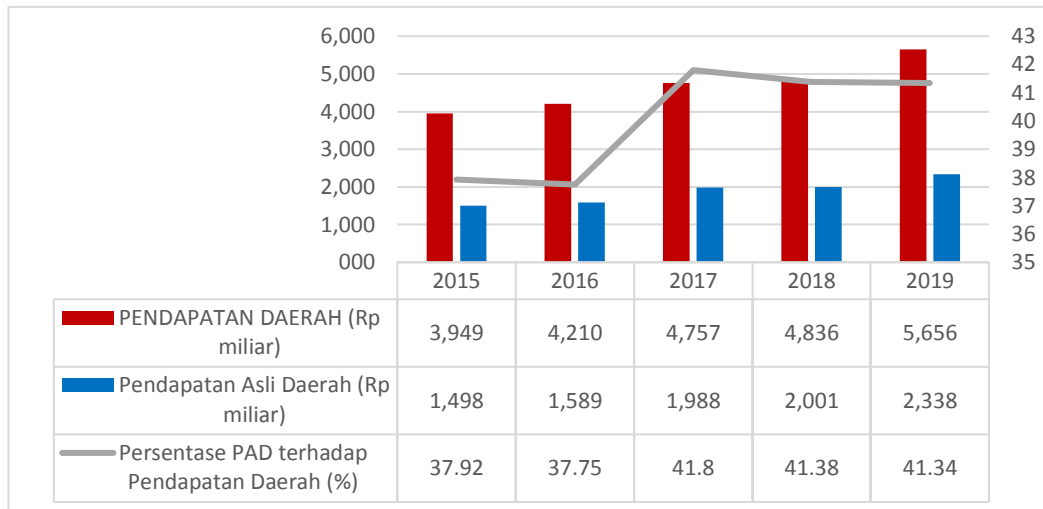
Tabel II. 10 Unit Penyelenggara Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan Nilai Sangat Baik pada Semester 1 Tahun 2022

No	Unit Penyelenggara Pelayanan	Nilai IKM Semester 1 Tahun 2022	Kinerja Pelayanan
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	88,74	Sangat Baik
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	92,34	Sangat Baik
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	91,77	Sangat Baik
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	88,70	Sangat Baik
5	Kecamatan Jatisampurna	90,10	Sangat Baik
6	RSUD Kelas D Jatisampurna	92,04	Sangat Baik
7	RSUD Kelas D Pondokgede	97,71	Sangat Baik
8	Puskesmas Sumurbatu	94,44	Sangat Baik

Sumber : Setda Kota Bekasi, 2022

8) Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Pendapatan Daerah adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Gambar II. 11 Perkembangan Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bekasi, 2015-2019

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2017c:43; Kota Bekasi dalam Angka, 2020

Dalam lima tahun terakhir, persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah di Kota Bekasi meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 hingga 2019. Pada tahun 2015, persentase tersebut berada pada angka 37,92 persen, kemudian membesar menjadi 37,75 persen tahun 2016. Memasuki tahun 2017, persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Kota Bekasi sudah menembus angka 41,80 persen dan kemudian menurun sebesar 0,42 persen pada tahun 2018 menjadi 41,38 persen. Pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 41,34 persen.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

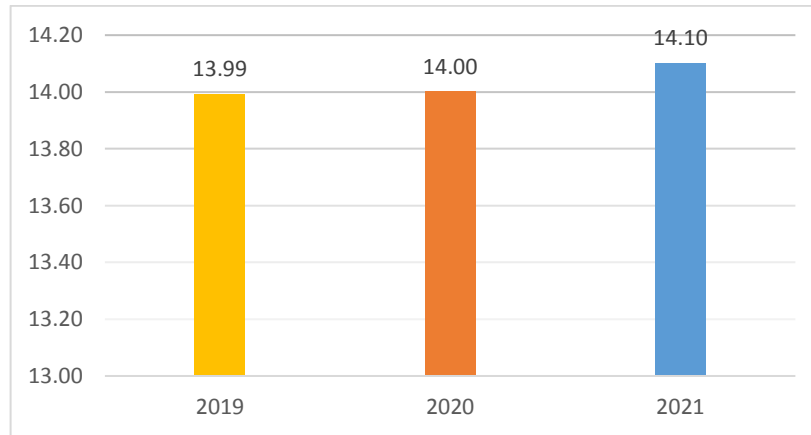
2.3.1 Fokus Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan bidang pembangunan yang menempati posisi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Pendidikan pada hakekatnya bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi, pendidikan diarahkan pada perluasan dan pemerataan pendidikan. Hal tersebut diketahui melalui indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur perluasan dan pemerataan pendidikan seperti: Harapan Lama Sekolah; Rata-rata Lama Sekolah; Persentase Angka Partisipasi Murni; Persentase Angka Partisipasi Kasar.

Harapan lama sekolah (HLS) menggantikan komponen Angka Melek Huruf (AMH) pada metode lama. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu program wajib belajar. Standar HLS adalah minimal 0 tahun dan maksimal 18 tahun.

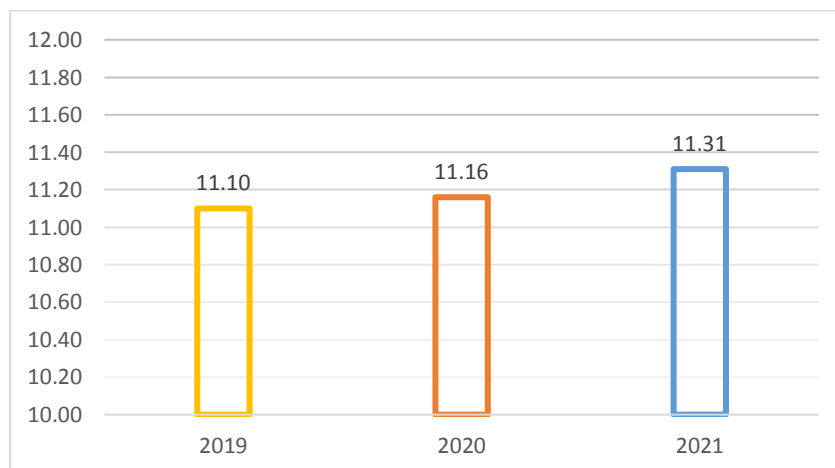


Gambar II. 12 Harapan Lama Sekolah Kota Bekasi

Sumber : Kota Bekasi dalam Angka 2022

Angka harapan lama sekolah Kota Bekasi tahun 2021 adalah sebesar 14,10. Artinya, lama sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 14,10 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan jenjang diploma D-III.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar RLS adalah usia 25 tahun ke atas.



Gambar II. 13 Rata-rata Lama Sekolah Kota Bekasi

Sumber : Kota Bekasi dalam Angka 2022

Gambar di atas tampak bahwa angka rata-rata lama sekolah di Kota Bekasi pada tahun 2021 adalah 11,31 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kota Bekasi usia 15 tahun ke atas sudah menempuh 11,31 tahun masa sekolah atau menyelesaikan pendidikan setara kelas XI.

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Perkembangan APM di Kota Bekasi disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 11 Angka Partisipasi Murni Kota Bekasi

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni		
	2019	2020	2021
SD/MI	98,72	98,72	98,94
SMP/MTs	84,16	84,16	86,30
SMA/SMK/MA	70,37	70,37	70,52

Sumber: Bekasi dalam Angka, BPS, Susenas 2021

SD/MI mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2019 sebesar 97,64 persen menjadi 98,22 persen di tahun 2021, hal ini berarti terdapat 1,78 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tidak mengikuti pendidikan SD tepat waktu sesuai umurnya. Sedangkan APM SMP/MTs pada tahun 2017 tercatat sebesar 80,72 persen, kemudian mengalami peningkatan menjadi 83,01 persen di tahun 2021. Untuk APM SMA/SMK/MA selama tahun 2017 hingga tahun 2021 juga mengalami peningkatan secara signifikan dari yang sebelumnya 59,54 persen menjadi 83,36 persen. Kondisi di atas menggambarkan bahwa mayoritas penduduk Kota Bekasi telah mendapatkan akses terhadap pendidikan dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah.

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya. Pada gambar di bawah disajikan perkembangan SD/MI, SMP/MTs dan APK SMA/SMK/MA di Kota Bekasi tahun 2019-2021:

Tabel II. 12 Angka Partisipasi Kasar Kota Bekasi

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni		
	2019	2020	2021
SD/MI	109,06	108,99	110,25
SMP/MTs	97,16	98,40	97,03
SMA/SMK/MA	107,42	105,35	103,60

Sumber : Bekasi dalam Angka, BPS, Susenas 2021

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa APK SD/MI di Kota Bekasi selama tahun 2019-2021 telah melebihi 100 persen. Pada tahun 2019 terdapat 109,06 persen murid SD/MI yang tidak berusia 7-12, sedangkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi sebesar 110,25 persen. Hal ini menunjukkan telah terjadi penurunan pengulangan kelas, penambahan murid dari daerah lain, atau adanya paket penyetaraan.

Sementara itu, APK SMP/MTs mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2021, terdapat penurunan dari tahun 2019 sebesar 97,16 persen menjadi 97,03 persen di tahun 2021. APK siswa SMA/SMK/MA juga mengalami penurunan dari 107,42 persen pada tahun 2019 menjadi 105,35 persen pada tahun 2020 dan menurun lagi di tahun 2021 menjadi 103,60. Meskipun memiliki tren penurunan, namun APK SMA/SMK/MA di Kota Bekasi masih di atas 100 persen. Hal ini dikarenakan banyak siswa lulusan SMP yang melanjutkan ke jenjang SMA.

2) Kesehatan

a. Sarana dan Prasarana Kesehatan

- Sarana Kesehatan

Kota Bekasi dengan jumlah penduduk yang cukup besar tentu memerlukan pelayanan di bidang kesehatan yang memadai. Dalam upaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, pemerintah Kota Bekasi telah menyediakan sarana dan prasarana kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas yang tersebar di masing-masing kecamatan. Di Kota Bekasi terdapat 27 rumah sakit, 43 puskesmas, dan 4 puskesmas pembantu pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel II. 13 Sarana Kesehatan di Kota Bekasi

Sarana Kesehatan	Tahun		
	2019	2020	2021
Rumah Sakit	26	28	27
Rumah Sakit Bersalin	6	6	3
Poliklinik	55	54	55
Puskesmas	39	40	43
Puskesmas Pembantu	11	8	4

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, yang dikelola dalam SIPD 2022

Pada tabel tersebut terlihat bahwa jumlah sarana kesehatan skala kecamatan di Kota Bekasi, ada beberapa sarana kesehatan yang meningkat dan juga ada sarana kesehatan yang mengalami penurunan. Beberapa sarana kesehatan yang mengalami penurunan adalah: Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin dan Puskesmas Pembantu yang turun jumlahnya pada tahun 2021.

- **Jaminan Kesehatan**

Pemerintah Kota Bekasi sejak RPJMD 2013-2018 telah menyediakan layanan kartu sehat berbasis NIK yang mampu menjangkau pelayanan untuk seluruh warga Kota Bekasi yang memiliki KTP. Dengan adanya kartu Sehat Bekasi yang diperkuat dengan adanya BPJS maka dari sisi jaminan pelayanan kesehatan warga di Kota Bekasi termasuk tinggi.

Penyelenggaraan BPJS di Kota Bekasi sampai dengan tahun 2022 telah menjangkau kepesertaan sebanyak 2.468.448 jiwa atau sekitar 95,27% dari jumlah total penduduk Kota Bekasi. Meliputi kepesertaan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah, perusahaan atau pekerja penerima upah dan peserta mandiri yaitu pekerja bukan penerima upah.

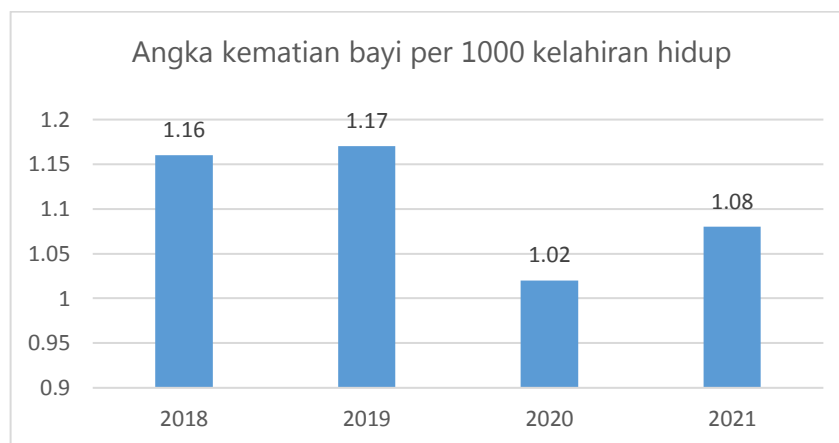
Dengan data diatas Pemerintah Kota Bekasi resmi mencapai Universal Health Coverage (UHC). Artinya, hampir seluruh masyarakat di Kota Bekasi telah memiliki jaminan kesehatan, Pencapaian ini merupakan bentuk komitmen dari Pemerintah Kota Bekasi dalam mendukung apa yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), di mana tahun 2024 setidaknya 98% penduduk Indonesia terlindungi program jaminan kesehatan.

b. Indikator Kinerja Layanan Kesehatan

- **Angka Kematian Bayi (AKB)**

Angka kematian bayi merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu

atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orangtua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dapat dilihat pada grafik berikut

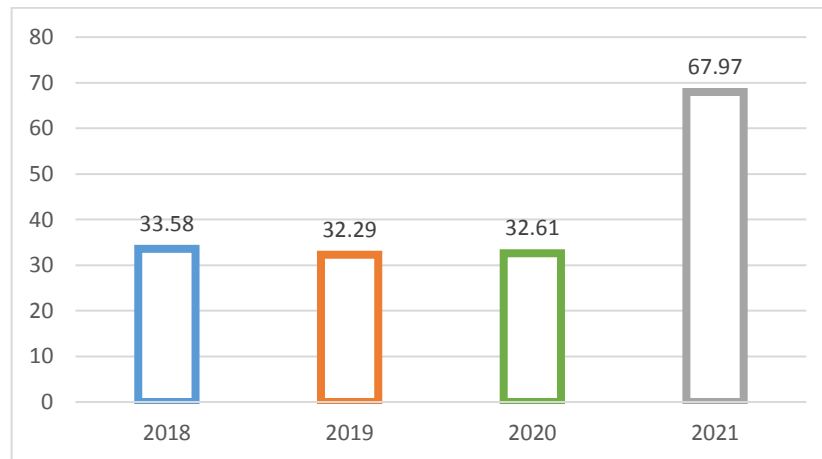


Gambar II. 14 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

- **Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)**

Angka Kematian Ibu merupakan banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, seperti: kecelakaan, terjatuh, dan lain lain, per 100.000 kelahiran hidup. Informasi mengenai tingginya angka kematian ibu akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu. Selama kurun waktu 2018 – 2020, angka kematian ibu di Kota Bekasi cenderung stabil akan tetapi meningkat cukup besar di tahun 2021 sekitar 67,97 orang per 100 ribu kelahiran hidup.



Gambar II. 15 Angka kematian Ibu per 100 ribu kelahiran hidup

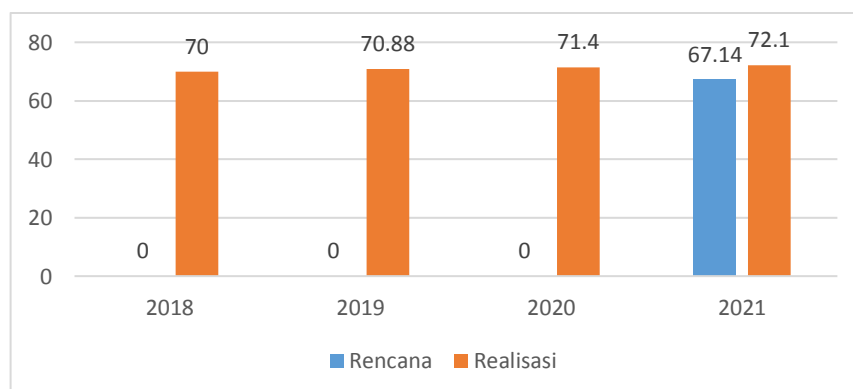
Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2022

Rendahnya angka kematian ibu tidak terlepas dari kinerja layanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan yang cenderung sangat baik. Terlihat dari indikator-indikator yang lain, seperti: cakupan komplikasi kebidanan, cakupan pelayanan tenaga kesehatan, cakupan kunjungan ibu hamil, dan cakupan layanan nifas.

3) Pekerjaam Umum dan Tata Ruang

a. Sistem Drainase di Kota Bekasi

Jika melihat permasalahan di bidang pekerjaan umum, Kota Bekasi fokus pada sebaran titik banjir yang berada di 53 titik banjir. Kemudian, fokus lainnya adalah presentase RTH. Maka, dari dua aspek tersebut, berdasarkan data Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, realisasi sistem drainase Kota Bekasi mengalami kenaikan dari tahun 2018 – 2021, masing-masing kenaikannya secara berturut-turut 0,88%, 0,52%, dan 0,70% (Lihat Gambar II.15).



Gambar II. 16 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik

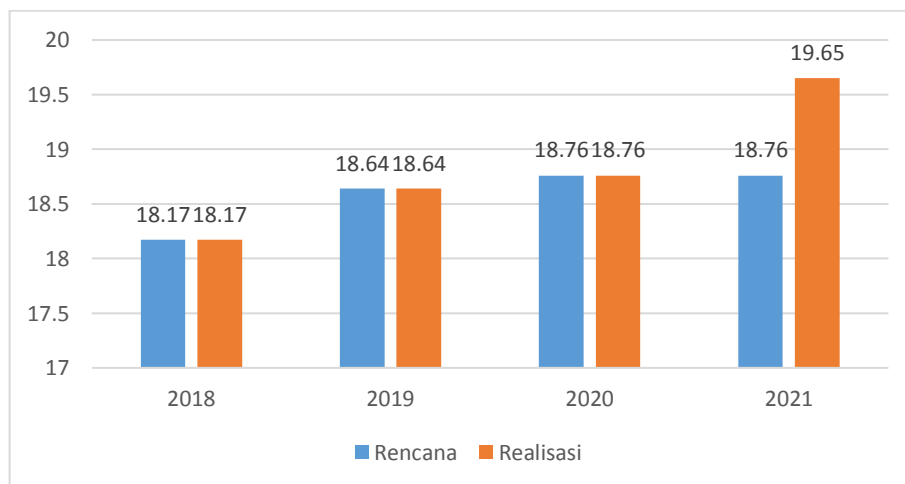
Sumber: Dinas Tata Ruang Kota Bekasi 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 2018 sampai 2021, Kota Bekasi telah memberikan dukungan terhadap pemecahan masalah banjir di Kota Bekasi. Tiga sungai penyumbang banjir terbesar di Kota Bekasi adalah: Kali Bekasi, Kali Cikeas, dan Kali Sunter rutin menyumbang banjir tahunan di wilayah berikut:

- 1) Kecamatan Pondok Gede (Perumahan Bina Lindung);
- 2) Kecamatan Pondok Melati (Perumahan Chandra RW 15, Perumahan Pondok Melati Indah, Perumahan Nyai Putu Bawah);
- 3) Kecamatan Bekasi Selatan (Perumahan Jaka Kencana);
- 4) Kecamatan Jati Asih (Pondok Mitra Lestari, Jati Asih Indah, Kemang IFI Graha, Pondok Gede Permai, Villa Jati Rasa, Perumahan Mandosi);
- 5) Kecamatan Jati Sampurna (Perumahan Citra Grand).

b. Tersedianya Luasan RTH Publik

Fokus lainnya, yaitu ketersediaan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bagi masyarakat, dari sisi realisasi kinerja, Kota Bekasi juga telah menunjukkan kinerja yang meningkat dari tahun 2018 sampai 2021. Berdasarkan data Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah atau kawasan perkotaan. Dari sisi kinerja, tahun 2019 kinerja penyediaan luasan RTH publik naik sebesar 0,47% dari tahun sebelumnya; tahun 2020 kinerjanya naik sebesar 0,12% dari tahun sebelumnya; dan tahun 2021 kinerjanya naik sebesar 0,89% dari tahun sebelumnya, sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar di bawah ini.



Gambar II. 17 Persentase Luasan RTH Publik

Sumber: Dinas Tata Ruang Kota Bekasi 2022

Dari aspek-aspek lain, secara umum, realisasi kinerja urusan Pekerjaan Umum Kota Bekasi mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai 2021, meskipun tingkat kenaikannya tidak terlalu besar. Persentase Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2019 adalah 97,76% mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 1,08% dari tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2021 naik kinerjanya sebesar 0,05%. Begitu juga dengan aspek lain yang terkait jembatan, pedestrian yang ramah pejalan kaki dan penyandang disabilitas, serta drainase. Realisasi kinerja dalam bidang pekerjaan umum secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II. 14 Realisasi Kinerja Kota Bekasi Bidang Pekerjaan Umum

No.	Indikator Kinerja Pekerjaan Umum	Satuan	Realisasi Kinerja		
			2019	2020	2021
1.	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	97,76%	98,84%	98,89%
2.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	74,56%	78,71%	78,72%
3.	Persentase Pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas	%	25,76%	25,99%	26,00%
4.	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	70,88%	71,40%	72,10%

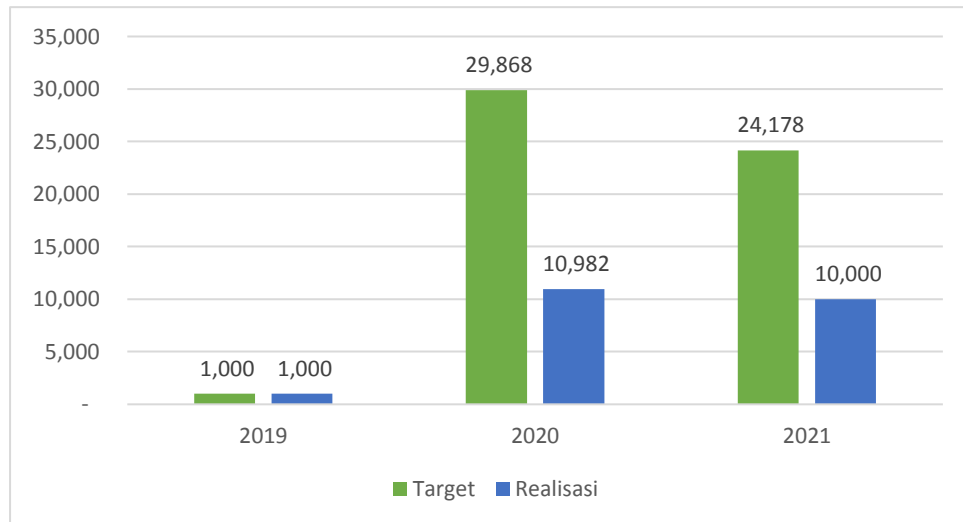
Sumber: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Penduduk yang Mengakses Air Minum

Berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2022 penduduk Kota Bekasi yang mengakses air minum yang terealisasi pada tahun 2018 sebesar 1.000 SR (tercapai 100% dari yang ditargetkan); tahun 2019 sebesar 10.982 SR (tercapai 36,77% dari yang ditargetkan sebesar 29.868 SR); dan tahun 2020 sebesar 10.000 SR (tercapai 41,36% dari yang ditargetkan sebesar 24.178 SR). Dengan melihat data capaian akses air minum penduduk Kota Bekasi dapat disimpulkan bahwa akses air minum masih minim dan perlu ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mengingat, air minum merupakan kebutuhan pokok yang wajib diperoleh masyarakat dan dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor

29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

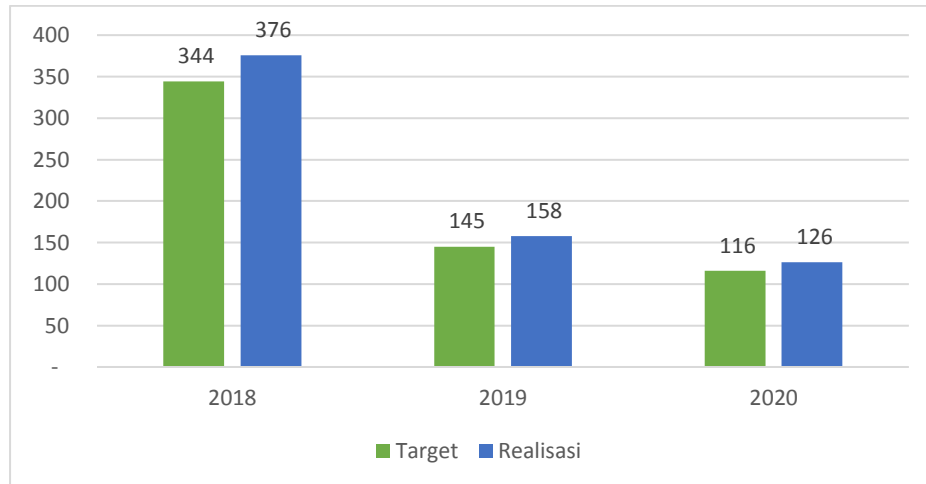


Gambar II. 18 Capaian Penduduk Berakses Air Minum Kota Bekasi

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi 2022

b. Rumah yang Sehat dan Aman didukung dengan PSU

Seperti masyarakat di kota-kota lainnya, penduduk Kota Bekasi membutuhkan rumah yang sehat dan aman, didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai. Hal tersebut untuk memberikan solusi bagi permasalahan kumuh yang masih belum ditangani secara keseluruhan di Kota Bekasi. Rumah yang sehat dan aman di Kota Bekasi yang telah tertangani pada tahun 2018 sebanyak 378 RT (realisasinya tercapai 109,3% dari yang ditargetkan sebanyak 344 RT atau tercapai melebihi target yang ditetapkan); tahun 2019 sebanyak 158 RT (tercapai 108,96% dari yang ditargetkan sebanyak 145 RT atau tercapai melebihi target yang ditetapkan); dan tahun 2020 sebanyak 126 RT (tercapai 108,62% dari yang ditargetkan sebanyak 116 RT atau tercapai melebihi target yang ditetapkan). Meskipun persentasenya cenderung tinggi, melebihi target, namun angka capaian tersebut perlu ditingkatkan, karena target dari tahun 2018 ke 2019 dan 2019 ke 2020 cenderung turun. Sehingga cakupan rumah sehat dan aman yang didukung PSU harus terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mengingat permasalahan terkait lokasi kumuh yang belum ditangani di Kota Bekasi masih belum selesai.

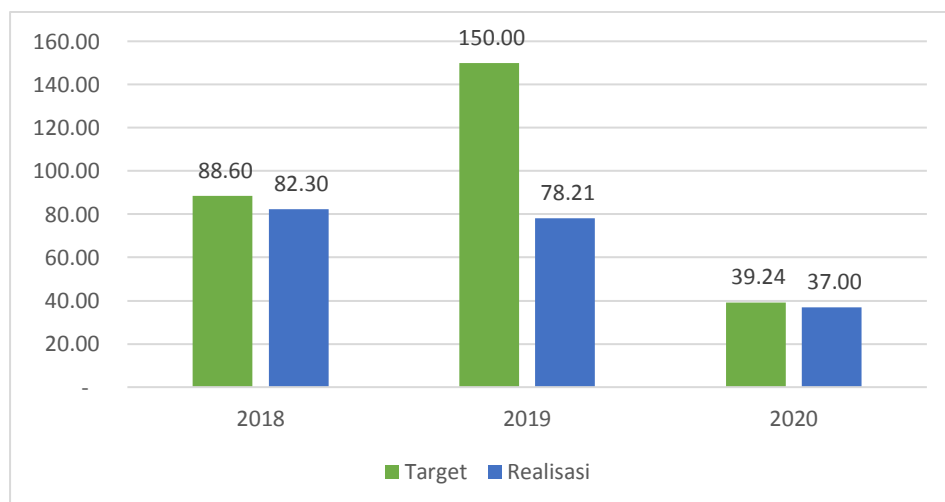


Gambar II. 19 Presentase Rumah yang Sehat dan Aman didukung dengan PSU

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi 2022

c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Layak Huni

Selain dukungan PSU untuk rumah sehat dan aman, Kota Bekasi juga perlu meningkatkan kualitas lingkungan layak huni bagi warganya. Data menunjukkan capaian kinerja kualitas lingkungan layak huni Kota Bekasi pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan pada tahun 2019 dan penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Tahun 2018 cakupan lingkungan layak huni di Kota Bekasi seluas 82,30 ha (teralisasi 92,89% dari yang ditargetkan seluas 88,60 ha); tahun 2019 cakupan lingkungan layak huni mencapai seluas 78,21 ha (teralisasi 52,14% dari yang ditargetkan seluas 150 ha); dan tahun 2020 cakupannya seluas 37,00 (teralisasi 94,29% dari yang ditargetkan seluas 39,24 ha). Pada tahun 2020, meskipun presentasenya sebesar 94,29%, luasannya tidak cukup signifikan karena target luasannya juga tidak signifikan.



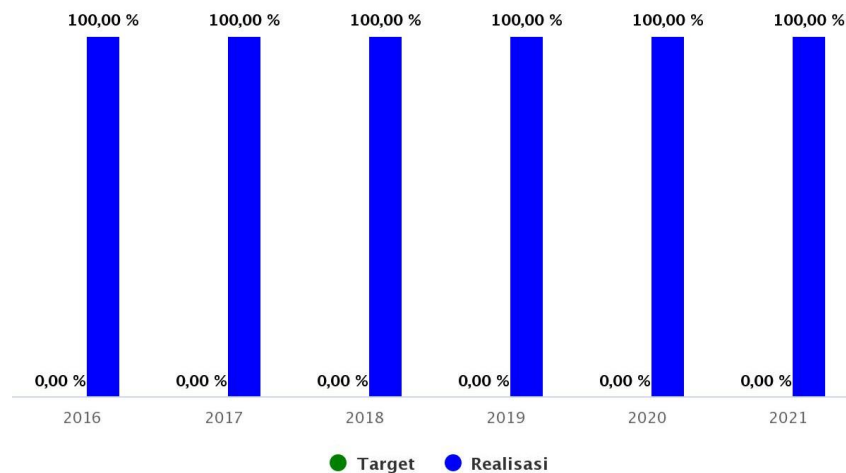
Gambar II. 20 Peningkatan Kualitas Lingkungan Layak Huni Kota Bekasi

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2022

5) Sosial

a. PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Kota Bekasi dalam pelaksanaan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial mencapai kinerja sangat baik. Sejak tahun 2016 sampai 2021 capaiannya sebesar 100% (lihat Gambar II.20). Namun demikian, berdasarkan identifikasi Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2022, penanganan PPKS dinilai masih belum optimal. Hal tersebut berkenaan dengan kualitas penanganan PPKS. Artinya, dari sisi kualitas penanganan PPKS di Kota Bekasi masih perlu ditingkatkan.

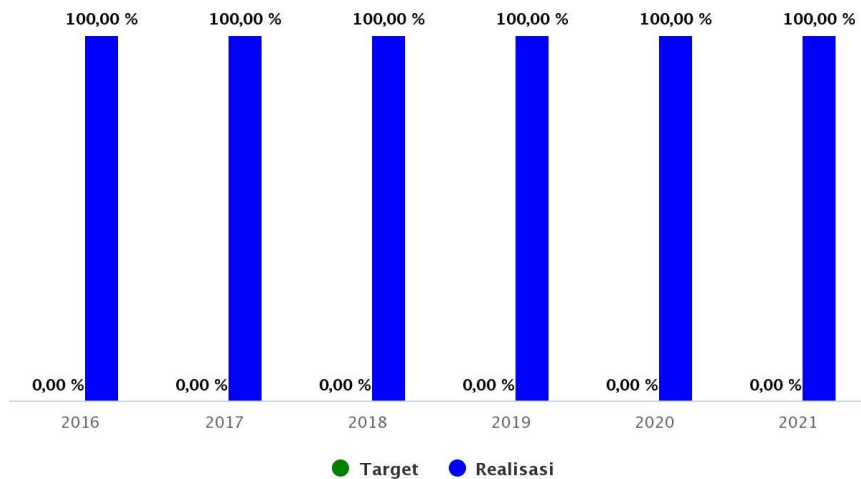


Gambar II. 20 Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Sumber: Sosial Kota Bekasi 2022

b. Persentase PPKS yang Tertangani

Sama halnya dengan PPKS yang memperoleh bantuan sosial, persentase PPKS yang tertangani di Kota Bekasi juga menunjukkan kinerja yang baik, capaiannya sebesar 100%, sejak tahun 2016 hingga 2021. Hanya saja dari sisi kualitas penanganan perlu ditingkatkan, karena permasalahan penanganan PPKS di Kota Bekasi masih menjadi isu yang perlu diselesaikan.



Gambar II. 21 Persentase PPKS yang Tertangani

Sumber: Sosial Kota Bekasi 2022

Tabel II. 15 Data PPKS Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)					
	Mantan Warga Binaan	Korban NAPZA	Keluarga Bermasalah	Keluarga Fakir Miskin	Korban Bencana Sosial / Pengungsi	Keluarga Berumah Tak Layak Huni
Pondok Gede	-	-	2	644	-	-
Jatisampurna	-	-	-	1249	-	103
Pondok Melati	-	-	-	1570	-	57
Jatiasih	9	16	18	2484	-	278
Bantar Gebang	0	-	3	437	-	99
Mustika Jaya	11	-	4	167	-	82
Bekasi Timur	-	2	-	1247	-	16
Rawalumbu	4	5	13	105	-	48
Bekasi Selatan	1	5	2	3798	-	68
Bekasi Barat	-	1246	53	1	-	-
Medan Satria	-	2	-	148	-	22
Bekasi Utara	1	18	1	1759	-	187
TOTAL	26	1294	96	13636	-	960
Up Date					147	

Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi, 2018 yang dikelola dalam SIPD

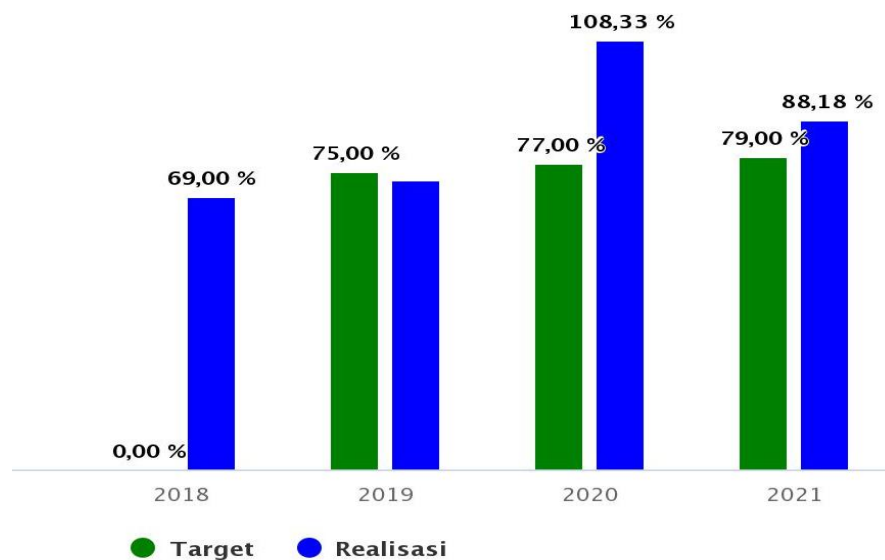
Tabel II. 16 Data PPKS Menurut Kecamatan (lanjutan)

Kecamatan	Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)						Total
	Korban Bencana Alam	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Pengidap HIV/AIDS (ODHA)	Keluarga Rentan	Trafficking	
Pondok Gede	116	119	-	-	-	-	1.055
Jatisampurna	-	65	-	-	-	-	1.547
Pondok Melati	14	36	-	1	-	-	1.785
Jatiasih	2323	158	3	-	2	2	5.787
Bantar Gebang	93	64	-	-	-	3	816
Mustika Jaya	148	87	-	-	6	-	697
Bekasi Timur	30	52	-	-	-	-	1.807
Rawalumbu	157	83	-	-	1	-	460
Bekasi Selatan	134	151	-	37	5	-	4.776
Bekasi Barat	23	59	3	1	-	-	1.471
Medan Satria	-	64	-	-	6	-	282
Bekasi Utara	134	187	-	22	3	-	2.820
TOTAL	3.172	1.125	6	61	23	5	23.303
Up Date			63	150			46.730

Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi, 2018 yang dikelola dalam SIPD

6) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Salah satu layanan yang penting terkait urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah Layanan Respon Cepat (Respon Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran. Selain layanan ini menjadi kewajiban semua pemerintah daerah yang diatur dalam ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, juga menjadi salah satu masalah yang cukup serius di Kota Bekasi. Berdasarkan identifikasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan masih dinilai belum optimal. Artinya, layanan tersebut masih perlu ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Namun demikian, data capaian kinerja terkait layanan ini menunjukkan angka yang baik. Dalam tiga tahun terakhir, jika dihitung sampai tahun 2021 capaian kinerjanya cenderung naik. Tahun 2019 capaiannya sebesar 72,90%; pada tahun berikutnya, 2019, naik signifikan menjadi sebesar 108,33%. Walaupun tahun 2021 capaian layanannya turun menjadi 88,18%.



Gambar II. 22 Persentase Layanan Respon Cepat Penanggulangan Kejadian Kebakaran

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi 2022

2.3.2 Fokus Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

a. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat

Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Bekasi masih menjadi permasalahan penting untuk diselesaikan. Berdasarkan data BPS Jawa Barat tahun 2021, pada 2019 tingkat pengangguran terbuka Kota Bekasi sebesar 8,30% masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat (8,04%). Begitu pula pada 2020, tingkat pengangguran Kota Bekasi masih tinggi yaitu sebesar 10,68%, masih lebih tinggi daripada rata-rata provinsi (10,46%). Tahun 2020 Kota Bekasi belum mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Pada tahun ini tingkat pengangguran terbuka Kota Bekasi naik menjadi 10,88%, berada di atas rata-rata provinsi (9,82%).

Tabel II. 17 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2019-2021

Wilayah Jawa Barat	[SUPAS 2015] Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (Persen)		
	2019	2020	2021
Provinsi Jawa Barat	8.04	10.46	9.82
Bogor	9.11	14.29	12.22
Sukabumi	8.05	9.60	9.51
Cianjur	9.81	11.05	9.32

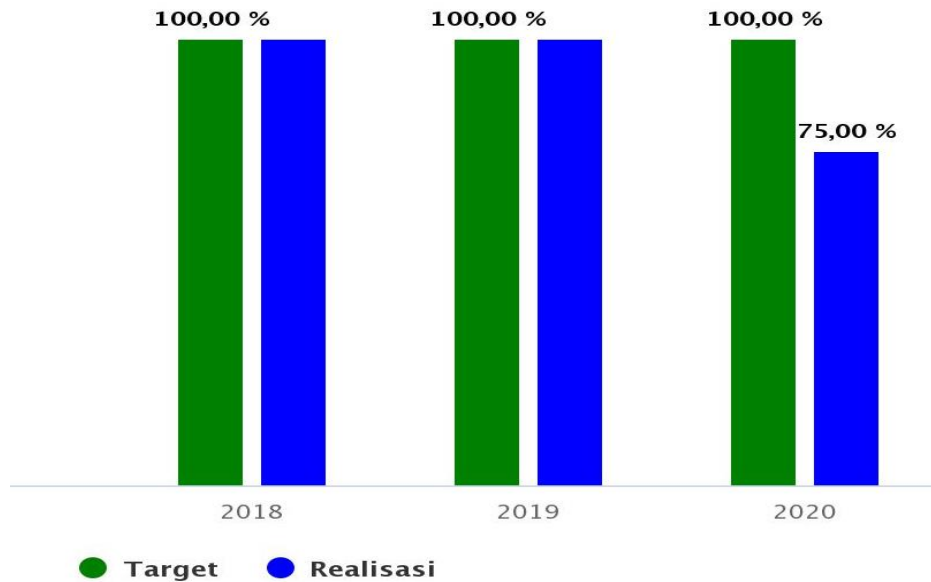
Wilayah Jawa Barat	[SUPAS 2015] Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (Persen)		
	2019	2020	2021
Bandung	5.51	8.58	8.32
Garut	7.35	8.95	8.68
Tasikmalaya	6.31	7.12	6.16
Ciamis	5.16	5.66	5.06
Kuningan	9.68	11.22	11.68
Cirebon	10.35	11.52	10.38
Majalengka	4.37	5.84	5.71
Sumedang	7.70	9.89	9.18
Indramayu	8.35	9.21	8.30
Subang	8.68	9.48	9.77
Purwakarta	9.73	11.07	10.70
Karawang	9.68	11.52	11.83
Bekasi	9.00	11.54	10.09
Bandung Barat	8.24	12.25	11.65
Pangandaran	4.52	5.08	3.25
Kota Bogor	9.16	12.68	11.79
Kota Sukabumi	8.49	12.17	10.78
Kota Bandung	8.18	11.19	11.46
Kota Cirebon	9.04	10.97	10.53
Kota Bekasi	8.30	10.68	10.88
Kota Depok	6.12	9.87	9.76
Kota Cimahi	8.09	13.30	13.07
Kota Tasikmalaya	6.78	7.99	7.66
Kota Banjar	6.16	6.73	6.09

Sumber: BPS Jawa Barat, 2021

Catatan: Sakernas Agustus 2018-2021 menggunakan penimbang hasil SUPAS 2015. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

b. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Jika dilihat dari hasil capaian produktivitas tenaga kerja Kota Bekasi memang menunjukkan angka yang baik. Namun demikian, permasalahan pengangguran di Kota Bekasi masih perlu mendapatkan perhatian serius. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2022, produktivitas tenaga kerja di Kota Bekasi mengalami pencapaian yang baik di tahun 2018 dan 2019, masing-masing tercapai 100%. Namun, mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020, tercapai 75% dari yang ditargetkan 100%.



Gambar II. 23 Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

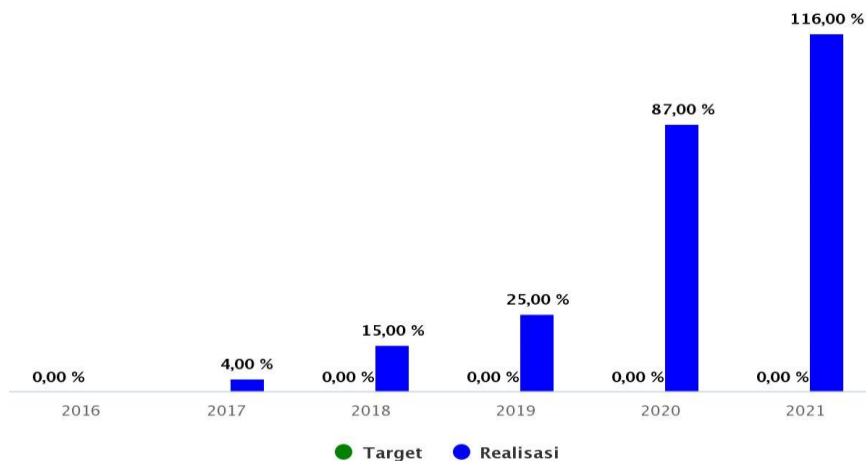
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi 2022

2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Kurang maksimalnya perlindungan terhadap perempuan dan pemenuhan hak anak di Kota Bekasi masih menjadi permasalahan yang penting untuk ditangani. Permasalahan tersebut menuntut Kota Bekasi untuk lebih serius dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terkait hal tersebut, Kota Bekasi telah membuat capaian sebagaimana dijelaskan di bawah.

a. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum terhitung signifikan kenaikannya dari tahun ke tahun. Dalam tiga tahun terakhir hingga tahun 2021, realisasinya cenderung naik tinggi. Tahun 2019, capaiannya sebesar 25,00%; lalu naik menjadi 87,00% pada 2019; dan tahun 2020 naik secara signifikan menjadi 116,00%. Hal ini menjadi tanda bahwa penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bekasi mendapatkan tempat yang baik, meskipun masih perlu terus ditingkatkan kualitasnya.

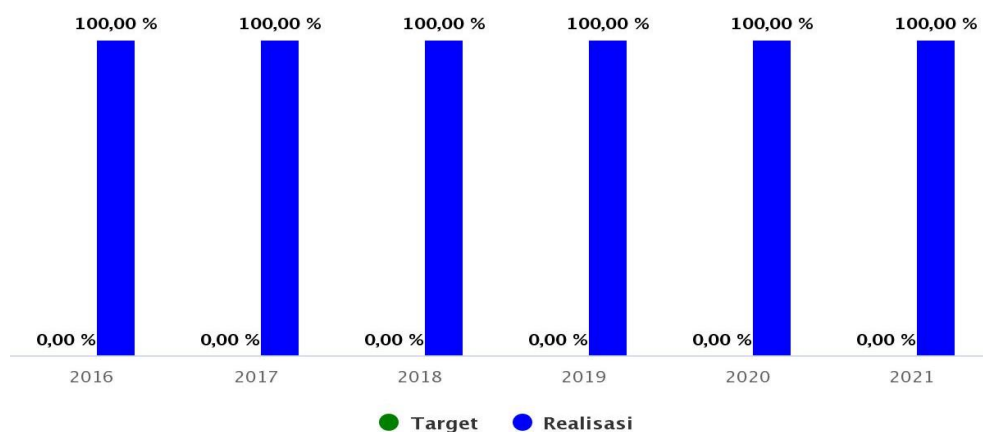


Gambar II. 24 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi 2022

b. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tahun 2022, Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu pun mencapai kinerja yang baik. Sejak tahun 2016 hingga 2021 kinerjanya mencapai 100%.

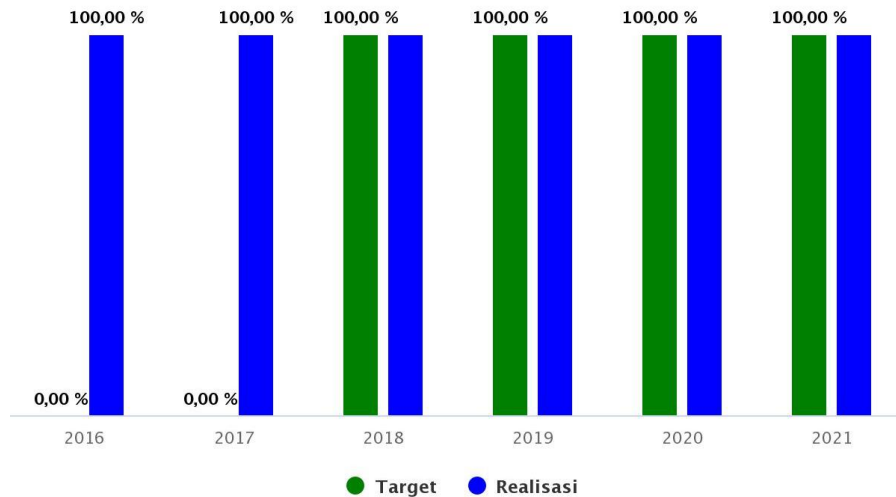


Gambar II. 25 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi 2022

c. Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Secara khusus, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bekasi juga terhitung baik. Jika dilihat dari data capaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan capaiannya tinggi yaitu sebesar 100%, sejak tahun 2016 sampai 2021.



Gambar II. 27 Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi 2022

3) Pangan

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mencatat bahwa masih ada daerah rawan pangan di Kota Bekasi. Maka, permasalahan tersebut menjadi penting untuk mendapat dukungan, khususnya secara lebih awal di dalam dokumen perencanaan Kota Bekasi. Selain itu, dukungan data terkait masalah ini juga menjadi penting untuk uraikan, sebagai berikut.

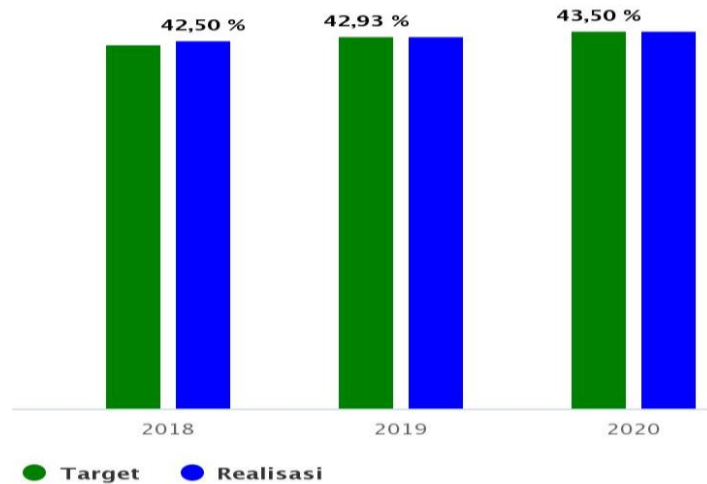
a. Stabilitas Harga Pangan

Tercatat, realisasi stabilitas harga pangan Kota Bekasi tahun 2018 mencapai 3,70%; sedangkan tahun 2019 mencapai 3,60% atau mengalami penurunan. Kemudian, tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mencatat di tahun tersebut capaian kinerjanya sebesar < 5%.

b. Produk Pangan Asal Hewan (PAH) yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH)

Sementara terkait Produk Pangan Asal Hewan (PAH) yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) Kota Bekasi memperoleh capaian yang signifikan. Tahun 2018 capaian produk PAH yang ASUH sebesar 42,50%

melebihi yang ditargetkan sebesar 42,00%; tahun 2019 capaiannya sebesar 43,00% lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar 42,93%; dan tahun 2020 capaiannya sebesar 43,60% sedikit lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar 43,50%.



Gambar II. 26 Persentase Produk PAH yang ASUH

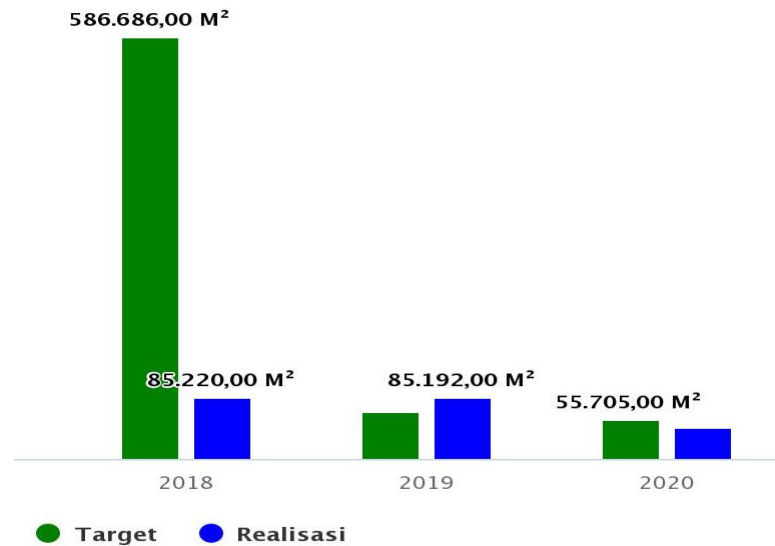
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kota Bekasi 2022

4) Pertanahan

Terdapat tiga indikator untuk urusan pertanahan, yaitu: persentase luas lahan yang bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara, dan penyelesaian izin lokasi. Ketiga indikator tersebut menjadi acuan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan di daerah. Dalam pelaksanaannya, Kota Bekasi telah memperoleh capaian terkait pemenuhan kebutuhan tanah dan penyelesaian kasus sengketa tanah sejak tahun 2018 hingga 2020.

a. Pemenuhan Kebutuhan Tanah Sesuai Kebutuhan

Pemenuhan kebutuhan tanah sesuai kebutuhan Kota Bekasi pada tahun 2018 masih jauh di bawah target, yaitu luasannya sebesar 85.220 M², sebesar 14,53% dari yang ditargetkan seluas 586.686 M². Sementara tahun 2019 luasan yang tercapai sebesar 85.192 M², sebesar 131,06% dari yang ditargetkan sebesar 65.000 M². Kemudian, tahun 2020 luasan yang tercapai sebesar 44.524 M², sebesar 79,93% dari yang ditargetkan sebesar 55.705 M².

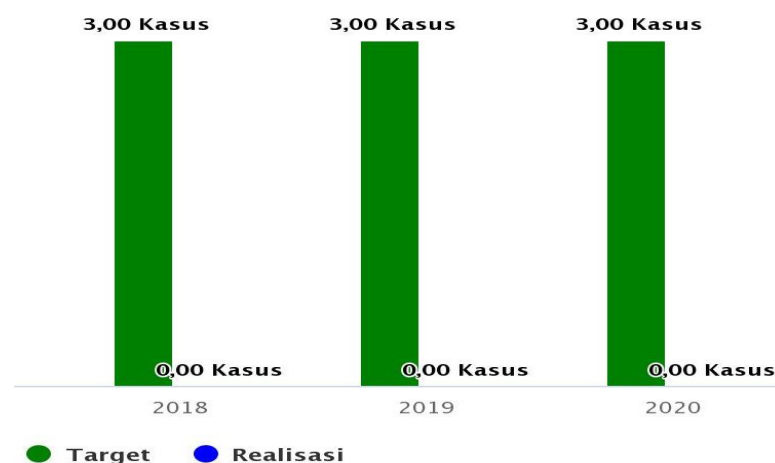


Gambar II. 27 Pemenuhan Kebutuhan Tanah sesuai Kebutuhan

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi 2022

b. Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah

Sementara penyelesaian kasus sengketa tanah di Kota Bekasi penanganannya masih kurang optimal. Hal tersebut terlihat dari data capaian Kota Bekasi, yaitu pada 2018, 2019, dan 2020 capaiannya hanya 3 kasus.



Gambar II. 28 Pemenuhan Kebutuhan Tanah sesuai Kebutuhan

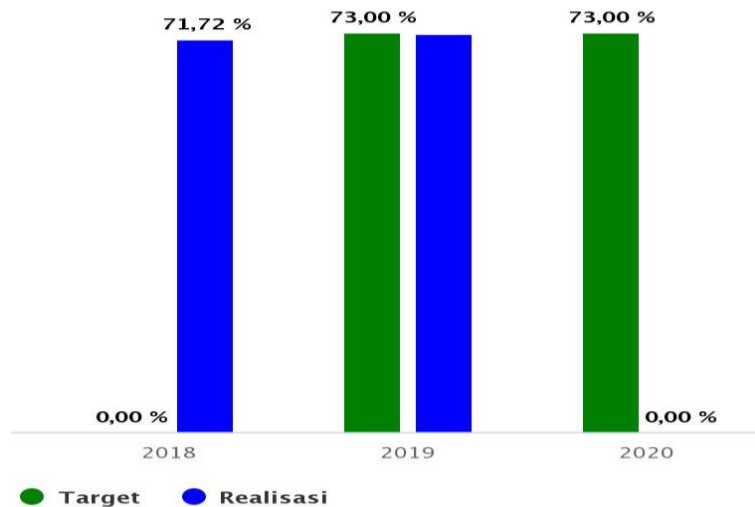
Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi 2022

5) Lingkungan Hidup

a. Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA

Masalah krusial yang terkait lingkungan hidup di Kota Bekasi adalah masih rendahnya cakupan pelayanan pengelolaan sampah. Karena itu persoalan sampah menjadi penting untuk ditanggulangi oleh pihak yang berwenang di

pemerintah daerah. Dari sisi perencanaan, dukungan data terkait operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA penting untuk diuraikan. Mengutip data Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022, tahun 2018 operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA mencapai 71,72%; tahun 2019 naik menjadi 72,80%. Sementara tahun 2020 tidak ada capaian.

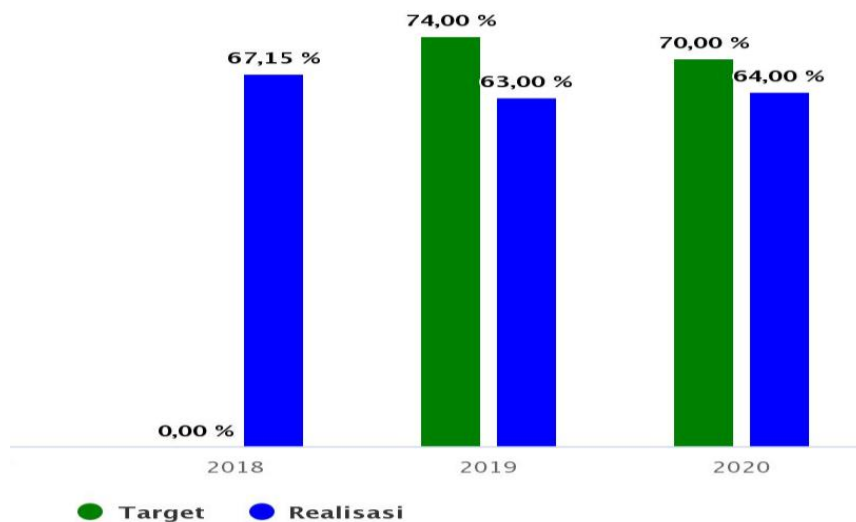


Gambar II. 29 Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kota Bekasi 2022

b. Persentase Sampah yang Terangkut ke TPA

Sementara persentase sampah yang terangkut ke TPA yang dikelola oleh Kota Bekasi menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun dari tahun 2018 ke 2019 turun angkanya. Jika melihat data, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mencatat, pada tahun 2018 capaian sampah yang terangkut ke TPA sebesar 67,15%, pada tahun tersebut tidak ditargetkan. Tahun 2019 capaiannya sebesar 63,00% dari yang ditargetkan sebesar 74,00%. Sementara tahun 2020 capaiannya sebesar 64,00% dari yang ditargetkan sebesar 70,00%.



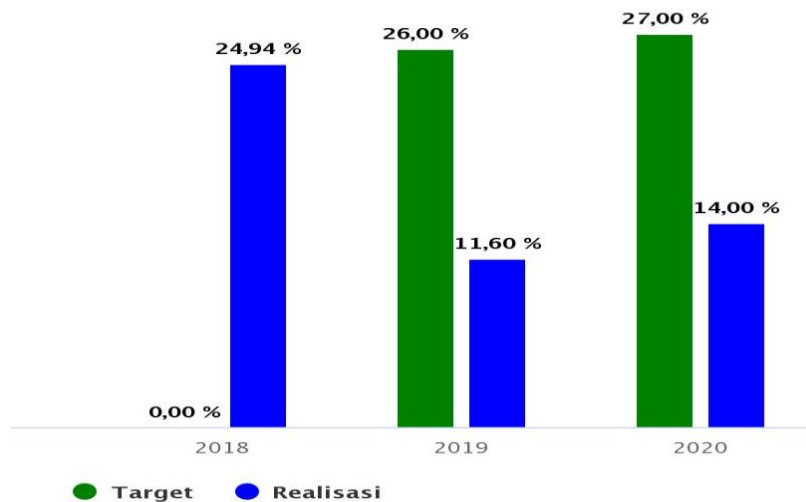
Gambar II. 30 Persentase Sampah yang Terangkut ke TPA

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi 2022

c. Persentase Jumlah Sampah yang Berkurang melalui Reuse, Reduce, Recycle (3R)

Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui Reuse, Reduce, Recycle (3R) yang dikerjakan oleh Kota Bekasi tercatat mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai 2020. Tahun 2018 capaian jumlah sampah yang berkurang melalui 3R sebesar 24,94% dari yang tidak ditargetkan. Tahun 2019 capaiannya sebesar 11,60% dari yang ditargetkan sebesar 26,00%. Sementara tahun 2020 capaiannya sebesar 14,00% dari yang ditargetkan sebesar 27,00%.

Capaian-capaian tersebut merupakan data untuk dijadikan bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja terkait dengan penanggulangan sampah di Kota Bekasi, mengingat permasalahan sampah masih menjadi isu penting. Sebagaimana diketahui, masalah persampahan meliputi: (a) pengelolaan sampah Kabupaten/Kota, (b) penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, (c) pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta.



Gambar II. 31 Persentase Jumlah Sampah yang Berkurangnya melalui Reuse, Reduce, Recycle (3R)

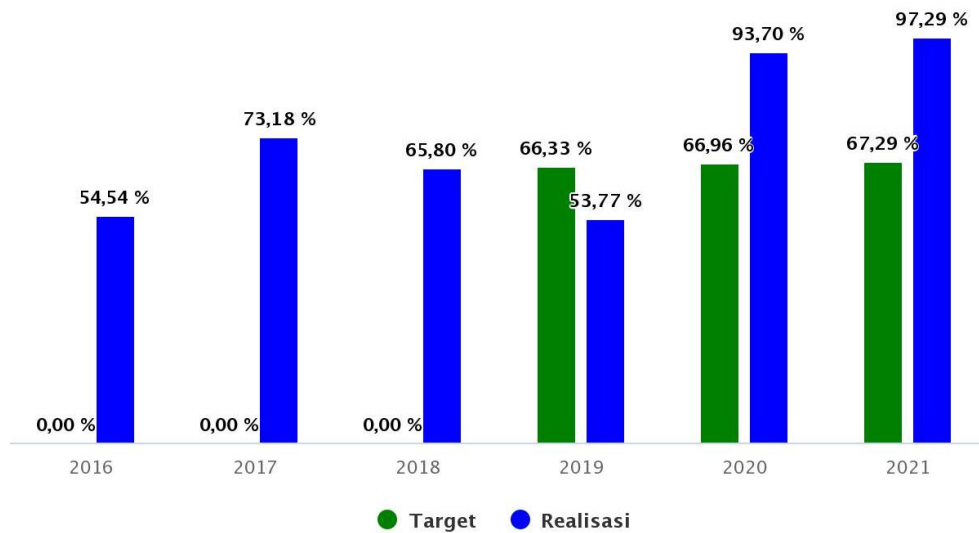
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi 2022

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Menurut catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, masyarakat Kota Bekasi kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan masih rendah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, karena kepemilikan dokumen kependudukan menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk mengakses hak masyarakat terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan fasilitas-fasilitas lain diberikan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya.

a. Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran

Akte kelahiran ada dokumen paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap orang, berkaitan dengan hak individu masyarakat. Jika melihat angka cakupan kepemilikan akte kelahiran di Kota Bekasi, persentasinya cukup mengembirakan. Setidaknya dalam tiga tahu hingga 2021 angkanya capaian cakupan kepemilikan akte kelahiran penduduk Kota Bekasi terus naik. Tahun 2019 capaiannya memang hanya 53,77% dari yang ditargetkan sebesar 66,33%. Capaian ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 65,80%. Namun, tahun 2020 capaiannya naik menjadi 93,70% di atas dari yang ditargetkan sebesar 66,96%. Kemudian, tahun 2021 capaiannya Kembali naik menjadi 97,29%, di atas dari yang ditargetkan sebesar 67,29%.

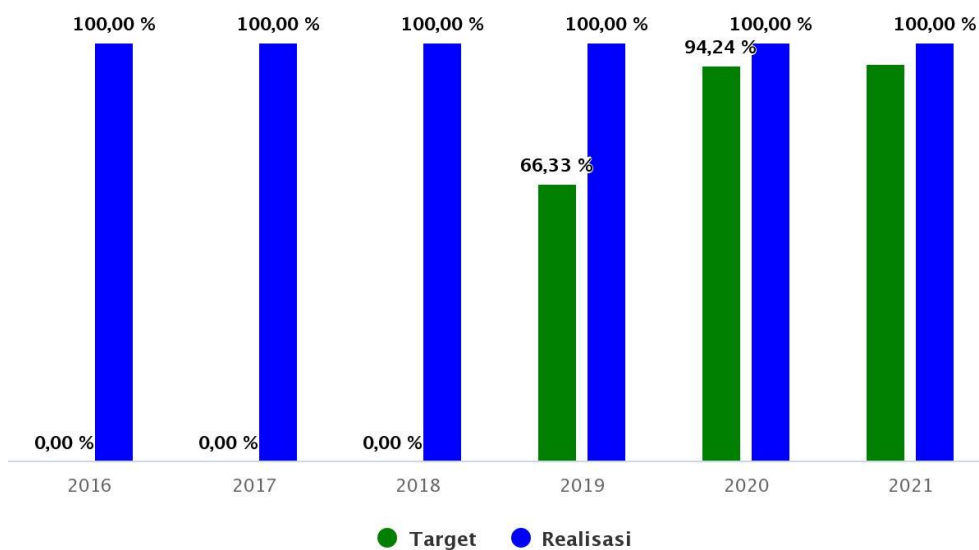


Gambar II. 32 Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi 2022

b. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga

Dokumen lainnya yaitu Kartu Keluarga, angka cakupan kepemilikannya cenderung baik. Sejak tahun 2016 sampai 2021 realisasi atau capaiannya sebesar 100%. Artinya, cakupan kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Bekasi selalu terpenuhi 100% setiap tahunnya.

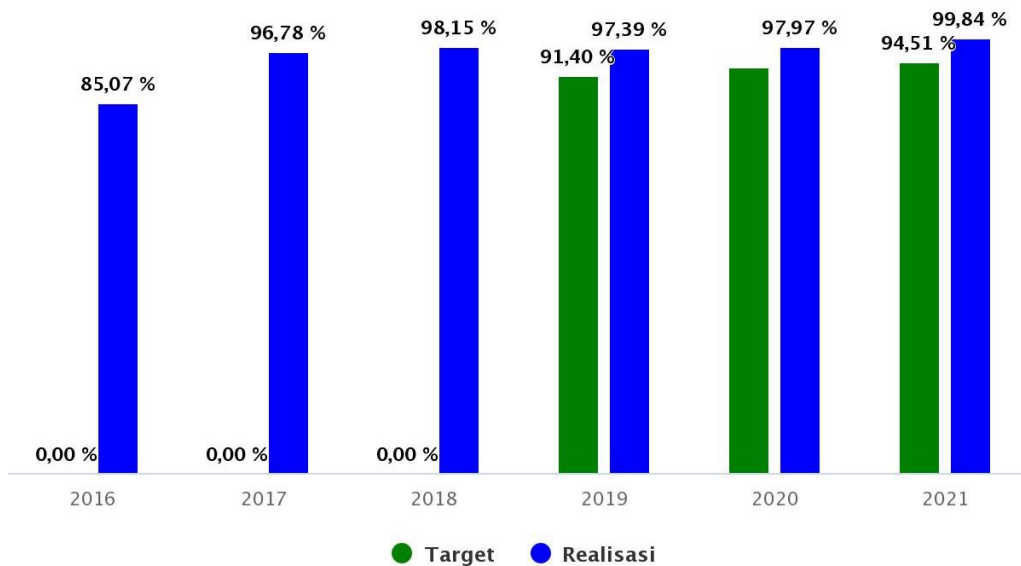


Gambar II. 33 Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi 2022

c. Cakupan Kepemilikan KTP-el

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Cakupan kepemilikan KTP elektronik di Kota Bekasi cenderung tinggi. Dalam tiga tahun hingga 2021, angkanya selalu di atas yang ditargetkan. Tahun 2019 cakupannya 97,39% di atas dari yang ditargetkan sebesar 91,40%. Sementara tahun 2020 cakupannya sebesar 97,97% di atas dari yang ditargetkan sebesar 93,16%. Tahun 2021 lebih tinggi dari dua tahun sebelumnya, cakupannya sebesar 99,84% di atas dari yang ditargetkan sebesar 94,51%.



Gambar II. 34 Cakupan Kepemilikan KTP-el

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi 2022

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Aspek Pemberdayaan Masyarakat mencakup beberapa hal terkait keterlibatan masyarakat umum terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan pelayanan umum, di antaranya LPM, PKK, Posyandu dan lain-lain. Berdasarkan data dari kecamatan-kecamatan di Kota Bekasi, aspek pemberdayaan masyarakat Kota Bekasi menunjukkan kinerja yang positif pada tahun 2019 dan 2020, kecuali Persentase Kenaikan Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Event Sosial Kemasyarakatan mengalami penurunan dari 85% di tahun 2019 menjadi 30% di tahun 2020. Sementara di tahun 2021, hanya Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat saja yang tersedia data capaian kinerjanya, yaitu sebesar 100% pada tahun 2019, 2020, dan 2021 (lihat tabel di bawah).

Tabel II. 18 Aspek Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi 2019-2021

No	Indikator Kinerja Aspek Pemberdayaan Masyarakat	Satuan	Realisasi Kinerja		
			2019	2020	2021
1.	Persentase LPM Aktif	%	100	100	-
2.	Persentase PKK Aktif	%	100	100	-
3.	Persentase Posyandu Aktif	%	90	96	-
4.	Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	15	18	-
5.	Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan	%	100	100	-
6.	Persentase Monografi Kelurahan dan Kecamatan Yang Lengkap dan Terbaharui	%	100	100	-
7.	Persentase Kenaikan Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Event Sosial Kemasyarakatan	%	85	30	-
8.	Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat	%	100	100	100

Sumber Data: Kecamatan di Kota Bekasi 2022

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Terkait pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, Kota Bekasi masih memiliki permasalahan yang tidak sedikit, antara lain masih banyaknya yang menikah pada usia muda; satu dari sembilan anak perempuan berusia 20-24 tahun sudah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun; ledakan kelahiran pasca pandemic Covid-19; laju pertumbuhan penduduk 1,25%, dalam hal ini penduduk di Kota Bekasi bertambah 3,2 juta orang setiap tahun; kurangnya dukungan sumber daya manusia dan pemerintah pusat dan daerah; masih banyak yang melahirkan pada usia muda; setiap tahunnya, masih banyak bayi yang dilahirkan oleh orang-orang yang masih berusia sekitar 15 hingga 19 tahun; dan masih rendahnya partisipasi fasilitas layanan kesehatan dalam layanan KB, terutama dari sektor swasta. Masalah-masalah tersebut membutuhkan penyelesaian yang terprogram dan terencana. Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, data realisasi kinerja yang terkait pengendalian penduduk yaitu:

- Persentase cakupan anggota Poktan yang ber-KB pada tahun 2019 sebesar 75% dan menurun pada tahun setelahnya menjadi 71,3%.
- Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan menikah usia 15-49 tahun pada tahun 2019 capaiannya sebesar 79,35% dan walaupun tidak signifikan tahun 2020 naik menjadi sebesar 79,40%.

- c. Persentase Cakupan Data Mikro Keluarga pada tahun 2019 tercapai sebesar 60% dan naik pada tahun 2020 menjadi sebesar 70%.
- d. Sementara jumlah pembinaan organisasi kemasyarakatan pengelola pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, pada tahun 2019 realisasi kinerjanya sebesar 25% dan pada tahun setelahnya naik signifikan menjadi 75%.

Dari angka-angka tersebut, dapat disimpulkan bahwa dukungan terhadap aspek pengendalian penduduk di Kota Bekasi masih harus didorong untuk terus ditingkatkan kinerjanya, mengingat masalah-masalah pengendalian penduduk sebagaimana telah dikemukakan.

Tabel II. 19 Aspek Pengendalian Penduduk Kota Bekasi 2019-2020

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2019	2020
1.	Persentase Cakupan Anggota Poktan yang ber-KB	%	75	71,3
2.	Angka Pemakaian Kotrasepsi/CPR bagi Perempuan menikah usia 15-49 tahun	%	79,35	79,4
3.	Persentase Cakupan Data Mikro Keluarga	%	60	70
4.	Jumlah pembinaan organisasi kemasyarakatan pengelola pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	%	25	75

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2021

9) Perhubungan

Masalah yang terkait dengan perhubungan di Kota Bekasi adalah peningkatan titik kemacetan lalu lintas pada jam sibuk. Berdasarkan data pembangunan, terkait urusan perhubungan digambarkan kinerja layanan umum Kota Bekasi berdasarkan tahun 2019 dan 2020, sebagaimana diuraikan dalam Tabel II.21 berikut.

Tabel II. 20 Aspek Perhubungan Kota Bekasi 2019-2020

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2019	2020
1.	Persentase prasarana dan sarana lalu lintas yang berfungsi baik	%	60	70
2.	Persentase pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas	%	5	10
3.	Persentase Pembinaan, Pengendalian dan Penindakan Lalu Lintas	%	-	10
4.	Jumlah prasarana angkutan public massal terintegrasi yang terbangun	Koridor	0	0

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2019	2020
5.	Persentase Sarana Transportasi City Tourism yang Terbangun	%	0	0
6.	Persentase kendaraan yang melakukan uji kendaraan bermotor	% (Kendaraan)	100	100
7.	Persentase Peningkatan Fasilitas Penunjang Transportasi	%	5	2,5
8.	Persentase Pencapaian Perencanaan Smart Parking Terpadu	%	-	22,5
9.	Persentase pelaksanaan penertiban parkir	%	-	25

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bekasi

10) Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika di Kota Bekasi dijalankan oleh Dinas Kominfo Statistik dan Persandian. Cakupan telekomunikasi telah melayani seluruh wilayah, namun demikian belum dilakukan pembinaan yang intensif terhadap kelompok masyarakat. Data pembangunan Kota Bekasi merinci indikator dan capaian kinerja pada tahun 2019 dan 2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel II.22 berikut.

Tabel II. 21 Aspek Komunikasi dan Informatika Kota Bekasi 2019-2020

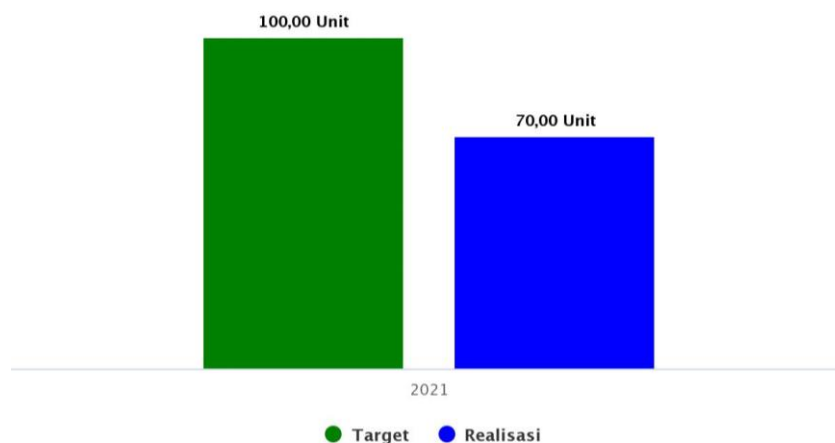
No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2019	2020
1.	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Layanan Digital government	Jumlah	9	9
2.	Jumlah layanan digital government yang di integrasikan	Jumlah	5	5
3.	Cakupan Unit Kerja Yang Terkoneksi Dengan Jaringan Primer	%	39	39
4.	Cakupan Layanan Informasi Pemerintahan Daerah Kepada Publik	%	32	51
5.	Persentase Tingkat Layanan Infrastruktur Pusat Data	%	93	98
6.	Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	Nilai	-	-
7.	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan	%	0	-
8.	Persentase Penyebaran Informasi melalui Media Digital dan Media Luar Ruang	%	139	93

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2019	2020
9.	Persentase Pengembangan Strategi Komunikasi Publik dalam Rangka Diseminasi Informasi Pemerintah Kota Bekasi	%	17	50
10	Persentase Laporan Hasil Tindak Lanjut Aduan Masyarakat secara Online yang Sudah Ditangani oleh OPD terkait	%	81	90

Sumber: Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, 2022

11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Terdapat beberapa indikator untuk urusan koperasi, usah kecil dan menengah, yaitu: persentase koperasi aktif, persentase UKM aktif, persentase BPR/LKM aktif, persentase UKM, persentase wirausaha muda, cakupan pembinaan kelompok pedagang informal, dan cakupan bina kelompok pengrajin. Terkait indikator koperasi aktif, Kota Bekasi mencatat capaian kinerja jumlah koperasi yang beroperasi sesuai dengan peraturan tahun 2021 yang tercapai 70 unit dari target yang ditetapkan 100 unit (lihat Gambar II.38).



Gambar II. 35 Jumlah Koperasi yang Beroperasi Sesuai dengan Peraturan Perkoperasian

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Bekasi, 2022

Beberapa capaian indikator lain tercatat dalam tabel di bawah ini. Dari data capaian tersebut tersebut dapat dijelaskan bahwa indikator-indikator capaian tersebut ada yang naik kinerjanya dan ada yang turun. Beberapa yang turun yaitu persentase koperasi aktif, persentase peningkatan skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dan persentase jumlah pelaku UMKM kreatif (lihat Tabel II.40).

Tabel II. 22 Indikator Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi Kinerja		
			2019	2020	2021
1.	Persentase Koperasi Aktif	%	4.20%	10.75%	5,62%
2.	Peningkatan Skala Koperasi	Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
3.	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi usaha kecil	%	2.00%	0,20%	0,30%
4.	Persentase Jumlah Pelaku UMKM Kreatif	%	10.00%	5.00%	5.00%
5.	Persentase PKL yang menempati Tempat yang telah ditetapkan	%	7.00%	15.00%	15.00%
6.	Jumlah Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	unit	-	-	70 unit
7.	Persentase Koperasi yang telah tersertifikasi Kesehatannya	%	-	-	13,07%
8.	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian	orang	-	-	140 orang
9.	Persentase Koperasi yang memiliki Izin simpan Pinjam	%	-	-	5%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Bekasi, 2022

12) Penanaman Modal

Pada kurun waktu 2013-2017 telah terjadi kenaikan jumlah investor yang semula 66 menjadi 217 investor, walaupun terjadi penurunan dibandingkan tahun 2015 dan 2016. Sejalan dengan kenaikan jumlah investor, juga diikuti dengan kenaikan nilai investasi. Rasio daya serap tenaga kerja berkisar antara 0,93 – 0,98 artinya setiap 100 PMA/PMDN akan menyerap tenaga kerja 93-98 orang. Indikator yang lain, menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan nilai realisasi PMDN, dari 14.820M di tahun 2013 menjadi 53.200M di tahun 2017.

Berdasarkan hasil proyeksi tahun 2018-2020 terjadi kenaikan jumlah investor yang semula 391 menjadi 504 investor. Rasio daya serap tenaga kerja berkisar antara 0,91 – 0,93 artinya setiap 100 PMA/PMDN akan menyerap tenaga kerja 91-93 orang. Pada nilai realisasi PMDN terjadi kenaikan dari 63.585M di tahun 2018 menjadi 86.046M di tahun 2020. Urusan penanaman modal dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan capaian seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel II. 23 Beberapa Indikator Urusan Penanaman Modal

Nama	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	66	114	340	375	217	391	448	504
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.529.660	5.178.564	9.892.062	32.558.856	16.499.936	30.328.069	36.060.153	41.792.238
Rasio daya serap tenaga kerja	0,98	0,97	0,93	0,94	0,95	0,93	0,92	0,91
Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	3.717	3.822	4.300	5.366	4.061	4.923	5.146	5.369
Jumlah seluruh PMA/PMDN	3.783	3.936	4.640	5.741	4.278	5.314	5.594	5.873
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	14.820	10.658	24.592	46.201	53.200	63.585	74.815	86.046
Realisasi PMDN Tahun evaluasi (Juta)	5.126.645	5.423.839	6.731.170	8.688.493	10.014.890	11.109.351	12.413.465	13.717.579
Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi (juta)	4.464.951	4.901.446	5.402.591	5.942.850	6.537.140	7.005.530	7.524.108	8.042.687
Realisasi PMDN sebelum evaluasi (juta)	4.464.951	4.901.446	5.402.591	5.942.850	6.537.140	7.005.530	7.524.108	8.042.687

Catatan: *) Hasil Analisis

Sumber: Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi 2022

13) Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam urusan kepemudaan dan olahraga Kota Bekasi masih memiliki beberapa permasalahan, yaitu masih rendahnya persentase tingkat prestasi olah raga, minimnya pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga, masih rendahnya penyelenggaraan kompetisi olahraga bagi penyandang disabilitas, dan sistem pembinaan olahraga prestasi masih belum dikembangkan dan dilakukan secara sistematis, terencana, berjenjang dan berkelanjutan. Berdasarkan data Dinas Kepemudaan dan Olahraga, tahun 2019 dan 2020, realisasi kinerja kepemudaan dan olahraga semuanya naik, kecuali cakupan pembinaan atlet muda yaitu pada tahun 2019 sebesar 39,38%, pada tahun 2020 turun menjadi 25,40%, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel II.41 berikut.

Tabel II. 24 Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2019	2020
1.	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	%	51,6	121,03
2.	Jumlah Komunitas Kreatif yang berperan dalam pembangunan	%	1	20
3.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	39,38	25,4
4.	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang representative	%	42,6	62,48
5.	Cakupan pembinaan olahraga	%	43,8	99,97

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2019	2020
6.	Persentase pelatih yang bersertifikat	%	33,9	60

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi 2022

14) Statistik dan Persandian

Urusan statistik dan persandian di Kota Bekasi dijalankan oleh Dinas Kominfo Statistik dan Persandian. Tercatat, masalah yang terkait urusan statistik dan persandian adalah masih belum terpenuhinya ketersediaan data sektoral yang valid. Data realisasi kinerja terkait data sektoral Kota Bekasi pada tahun 2019 dan 2020 masih terhitung kecil persentasinya. Tercatat, pada tahun 2019 Persentase Data Sektoral yang Terintegrasi dengan Open Data Kota Bekasi hanya 4% dan tahun setelahnya naik menjadi 28%. Kemudian, pada tahun 2019 Persentase Data Sektoral Perangkat Daerah yang Harus Dipenuhi sebesar 4% dan tahun setelahnya naik menjadi 28%. Dengan melihat capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa data sektoral masih menjadi masalah yang perlu terus ditingkatkan kinerjanya.

Tabel II. 25 Capaian Indikator Data Sektoral

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2019	2020
1.	Persentase Data Sektoral yang Terintegrasi dengan Open Data Kota Bekasi	%	4%	28%
2.	Persentase Data Sektoral Perangkat Daerah yang Harus Dipenuhi	%	4%	28%

Sumber: Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kota Bekasi 2022

15) Kebudayaan

Untuk urusan Kebudayaan, masalah yang masih tercatat adalah belum optimalnya pelestarian kesenian tradisional dan cagar budaya di kota Bekasi. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi (2022) mencatat bahwa realisasi kinerja terkait Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan pada tahun 2020 sebanyak 1 situs dan tahun 2021 sebanyak 2 situs. Dengan melihat capaian dalam dua tahun tersebut, artinya pelestarian kesenian tradisional dan cagar budaya masih menjadi masalah yang penanganannya perlu terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

16) Perpustakaan

Urusan perpustakaan dijalankan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah. Peran perpustakaan sangat penting untuk menyediakan sumber informasi yang valid dan lengkap terhadap penduduk Kota Bekasi. Dengan tersedianya sumber informasi maka masyarakat dapat memanfaatkan untuk beberapa kepentingan yang berbeda. Pelajar dan mahasiswa akan menggunakan perpustakaan sebagai wahana untuk melengkapi buku teks. Ibu rumah tangga akan mendapatkan sumber bacaan yang variatif, dan sebagainya. Kota Bekasi masih mencatat masalah terkait urusan perpustakaan, yaitu masih rendahnya Indeks membaca masyarakat Kota Bekasi. Dan dengan melihat data capaian kinerja urusan perpustakaan, tercatat bahwa Persentase Perpustakaan yang Aktif pada tahun 2019 tercapai 1,28%, tahun 2020 naik menjadi 2,31%, dan tahun 2021 kenaikannya sangat signifikan menjadi 52,62%. Namun demikian, untuk Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan capaiannya minus pada tahun 2019 sebesar -113,17% dan tahun 2020 sebesar -208,93%; kemudian pada tahun 2021 naik menjadi 1,92% (lihat Tabel II.27). Dengan melihat data capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa urusan perpustakaan masih perlu ditingkatkan kinerjanya.

Tabel II. 26 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi Kinerja		
			2019	2020	2021
1.	Persentase Perpustakaan yang Aktif	%	1,28	2,31	52,62
2.	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	%	- 113,17	-208,93	1,92

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, 2022

17) Kearsipan

Arsip merupakan bagian yang terpenting dalam suatu organisasi pemerintah daerah. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut data Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, pada tiga tahun hingga 2021, tercatat Persentase Pengelolaan Arsip In Aktif pada tahun 2019 sebesar 14,47% dan tahun 2020 kinerjanya naik signifikan menjadi 100%, namun turun pada tahun berikutnya menjadi 60%. Sementara Persentase SKPD yang



Menerapkan Pengelolaan Arsip SKPD Secara Baku pada tahun 2019 tercapai sebesar 43,47% dan pada dua tahun berikutnya naik menjadi 54,54% dan 63% (lihat Tabel II.28). Meskipun cenderung naik capaian kinerjanya, kinerja urusan kearsipan masih perlu ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel II. 27 Capaian Indikator Urusan Kearsipan

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi Kinerja		
			2019	2020	2021
1.	Persentase Pengelolaan Arsip In Aktif	%	14,47	100	60
2.	Persentase SKPD yang Menerapkan Pengelolaan Arsip SKPD Secara Baku	%	43,47	54,54	63

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi 2022

2.3.3 Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Ada enam indikator untuk urusan kelautan dan perikanan, yaitu: produksi perikanan, budidaya (ikan hias), konsumsi ikan, cakupan bina kelompok nelayan, produksi perikanan kelompok nelayan, proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial. Dari keenam indikator tersebut, Kota Bekasi fokus pada produksi olahan hasil perikanan dan produksi ikan hias. Mengingat keduanya penting untuk dilaksanakan mengingat potensi dan peluang yang dimiliki. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, produksi olahan hasil perikanan dalam tiga tahun sampai 2021 mencapai progress yang baik. Tahun 2018 realisasi kinerjanya mencapai 82.745 ton; tahun 2020 naik menjadi 87.135 ton; dan tahun setelahnya naik menjadi 88.000 ton. Maka, pada tahun-tahun berikutnya kedua indikator tersebut penting untuk terus ditingkatkan capaiannya.

Tabel II. 28 Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi Kinerja		
			2019	2020	2021
1.	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	82.745	87.135	88.000

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi Kinerja		
			2019	2020	2021
2.	Produksi Ikan Hias	Ekor	18.622.238	20.623.141	21.625.000

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi 2022

2) Pariwisata

Kota Bekasi merupakan salah satu destinasi wisata di Provinsi Jawa Barat yang memiliki karakter sebagai destinasi wisata perkotaan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan variasi produk wisata kota (*urban tourism*), seperti wisata: wisata keluarga, wisata belanja, wisata sejarah, wisata pendidikan dan budaya serta wisata industri. Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dalam beberapa tahun terakhir mengalami turun dan naik, jumlah kunjungan wisata di Kota Bekasi mencapai 10.068.125 wisatawan pada tahun 2019, tetapi mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 yaitu hanya mencapai 243.410 wisatawan, karena badai pandemi Covid-19. Namun demikian, tahun 2021 capaiannya kembali meningkat menjadi 615.598 wisatawan (lihat Tabel II.29).

Tabel II. 29 Capaian Indikator Urusan Pariwisata

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi Kinerja		
			2019	2020	2021
1.	Jumlah Kawasan Wisata yang ditata	Lokasi	1	1	1
2.	Persentase peningkatan usaha/jasa kepariwisataan yang berizin	%	20%	10%	10%
3.	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	10.068.125	243.410	615.598
4.	Jumlah Penyelenggaraan event bekasi kreatif	Event	26	11	10

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi 2022

3) Pertanian

Ada enam indikator untuk urusan pertanian, yaitu: kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB, kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB, kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB, produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, dan cakupan bina kelompok petani. Berdasarkan data Dinas Pangan,

Pertanian dan Perikanan tercatat capaian kinerja produksi komoditas pertanian pada tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, secara berturut-turut 23.185 ton, 29.392 ton, dan 30.289 ton.

Tabel II. 30 Capaian Indikator Urusan Pertanian

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi Kinerja		
			2019	2020	2021
1.	Jumlah produksi Komoditas Pertanian	Ton	23.185	29.392	30.289

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi 2022

4) Perdagangan

Ada dua indikator untuk urusan perdagangan, yaitu: ekspor bersih perdagangan yang merupakan selisih dari total ekspor dan total impor, serta cakupan bina kelompok usaha/pedagang informal. Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian mencatat bahwa nilai ekspor pada tahun 2019 mencapai sebesar Rp.9.018,81 miliar, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.7.269,00 miliar, dan tahun 2020 naik nilainya menjadi sebesar Rp.9.980,83 miliar. Beberapa indikator capaian terkait urusan perdagangan dapat dilihat dalam Tabel II.32.

Tabel II. 31 Capaian Indikator Urusan Perdagangan

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi Kinerja		
			2019	2020	2021
1.	Laju Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan	%	0,17%	0,48%	0,05%
2.	Nilai Ekspor	Rp. (Miliar)	9.018,81	7.269,00	9.980,83
3.	Nilai Impor	Rp. (Miliar)	58.622,08	-	-
4.	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	Unit	30.939	13.528	16.707

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi 2022

5) Perindustrian

Ada satu indikator untuk urusan perindustrian, yaitu: cakupan bina kelompok pengrajin. Sesuai data Dinas Perdagangan dan Perindustrian, tercatat Persentase pertumbuhan Industri kreatif yang memiliki legalitas dalam tiga tahun sejak 2019 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan dalam realisasi kinerja, secara berturut-turut 42 unit (-64,10%), 72 unit (71,43%), dan 131 unit (81,34%).

Tabel II. 32 Capaian Indikator Urusan Perindustrian

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi Kinerja		
			2019	2020	2021
1.	Persentase pertumbuhan Industri kreatif yang memiliki legalitas	%	42 unit (-64.10%)	72 unit (71.43%)	131 unit (81.34%)

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi 2022

2.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi telah disahkan menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005–2025. Kemudian RPJMD Provinsi Kota Bekasi juga telah ditetapkan menjadi Perda melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Hal ini artinya selama periode 2005-2025 telah ada dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah yang menjadi acuan dan terlegitimasi. Selain itu, selama periode 2018-2023 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Capaian Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini.

**Tabel II. 33 Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi
2016-2021**

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	91	98,11	100	97,41
2.	Persentase Kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100



No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi Kinerja					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.	Persentase Kesesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	%	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu dan Tepat Aturan	%	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan	%	64,51	70,97	61,29	75	66,67	64
9.	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang ditindaklanjuti dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100
10.	Persentase Ketersediaan Data/Dokumen Perencanaan Sektoral Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	100	100	100	100	100	100
11.	Persentase Ketersediaan Data/Dokumen Perencanaan Sektoral Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
12.	Persentase Ketersediaan Data/Dokumen Perencanaan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi 2022

2) Keuangan

Realisasi Keuangan Kota Bekasi selama tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2016-2020 secara rata-rata realisasi Keuangan Kota Bekasi fluktuatif setiap tahunnya.

Tabel II. 34 Indikator Keuangan Kota Bekasi 2016-2021

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	15,69%	11,00%	5,96%	1,64%	8,85%
2.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	1,18%	0,91%	3,62%	9,91%	3,89%
3.	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	26,69%	26,22%	27,89%	22,10%	23,75%
4.	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	11,71%	11,52%	18,83%	25,29%	19,37%
5.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Rasio	63.35% :	64.17% :	53.87% :	61,30% :	50.70% :
6.	Persentase Belanja Bagi hasil Kota Bekasi	%	36.65%	35.83%	46.13%	38.70%	49.30%
7.	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	GRADE	20,42%	18,66%	19,40%	15,53%	17,36%
			A	A	A	A	A

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi 2022

3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam urusan kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan, tahun 2021 Kota Bekasi menetapkan 3 indikator dengan capaian kinerja cukup baik, hanya indikator ke-3 yaitu persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi masih perlu ditingkatkan, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel II.36 di bawah ini.

Tabel II. 35 Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 2021

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi Kinerja 2021
1.	Mutu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Bernilai Baik	%	85,73
2.	Persentase Prestasi Kerja ASN Bernilai Baik	%	93,05
3.	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	68,01

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi 2022

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan salah satu tinjauan tingkat keberhasilan pembangunan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk bertahan dalam menghadapi tantangan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Indikator daya saing daerah di Kota Bekasi ditunjukkan oleh tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, nilai tukar petani,

persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa, rasio ekspor-impor terhadap PDRB, rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank Umum, angka kriminalitas yang tertangani, Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di BPR, angka kriminalitas yang tertangani, rasio ketergantungan penduduk.

1) Pengeluaran Penduduk

Kesejahteraan suatu kelompok masyarakat dapat diketahui dari tingkat pendapatan masyarakatnya. Namun data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, sehingga dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tingkat kesejahteraan masyarakat diperoleh dengan pendekatan Pengeluaran Rumah Tangga. Di Kota Bekasi, tahun 2021 proporsi pengeluaran makanan dan non makanan adalah 39,78 persen berbanding 60,22 persen. Pada tahun 2021 secara rata-rata pengeluaran masyarakat Kota Bekasi lebih banyak digunakan untuk pengeluaran non makanan. Hal ini mencirikan sebagian besar masyarakat Kota Bekasi sudah beralih ke ciri masyarakat kelas menengah.

Komoditi yang menyumbang pengeluaran terbesar untuk subgolongan makanan adalah kelompok makanan dan minuman jadi sebesar 15,82 persen. Sedangkan untuk subgolongan bukan makanan sebagian besar dipengaruhi oleh pengeluaran kelompok Perumahan dan fasilitas rumah sebesar 29,02 persen, aneka barang dan jasa 15,24 persen dan barang tahan lama 7,77 persen. Secara keseluruhan, terlihat bahwa pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Kota Bekasi sebesar Rp. 2.488.463 pada tahun 2021.

Tabel II. 36 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kota Bekasi, 2020 dan 2021

Kelompok Komoditas		2020	2021
Makanan			
	Padi-padian	62.706	65.631
	Umbi-umbian	10.500	10.527
	Ikan/Udang/Cumi/Kerang	88.334	83.960
	Daging	54.092	61.952
	Telur dan Susu	64.356	64.225
	Sayur-sayuran	76.022	83.912
	Kacang-kacangan	17.817	19.614
	Buah-buahan	59.342	54.735
	Minyak dan Kelapa	15.631	17.847
	Bahan Minuman	22.371	20.780
	Bumbu-bumbuan	16.533	18.620
	Konsumsi lainnya	17.435	18.356
	Makanan dan Minuman Jadi	412.504	393.726
	Rokok	87.880	75.985

Kelompok Komoditas		2020	2021
Jumlah Makanan		1.005.522	989.869
Bukan Makanan			
	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	677.280	722.201
	Aneka Barang dan Jasa	355.329	379.233
	Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	55.319	46.126
	Barang Tahan Lama	105.011	193.402
	Pajak, Pungutan, dan Asuransi	94.565	116.099
	Keperluan Pesta dan Upacara	54.061	41.534
Jumlah Bukan Makanan		1.341.565	1.498.594
Jumlah		2.347.086	2.488.463

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021

2) Sarana Perdagangan

Jumlah sarana perdagangan menurut jenisnya di Kota Bekasi Tahun 2021, antara lain: pasar sebanyak 15; toko sebanyak 587; kios sebanyak 17; dan warung sebanyak 11.924. Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, tahun 2021 jumlah pasar di Kota Bekasi sebanyak 15, toko sebanyak 587, kios sebanyak 17, dan warung sebanyak 11.924.

Tabel II. 37 Sarana Perdagangan Kota Bekasi 2018 – 2021

Jenis Sarana Perdagangan		2018	2019	2020	2021
	Pasar	14	14	15	15
	Toko	337	458	540	587
	Kios	17	17	17	17
	Warung	11.924	11.924	11.924	11.924
	Jumlah	12.292	12.413	12.496	12.543

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, dalam Kota Bekasi Dalam Angka 2022

3) Pendapatan Regional

Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 di Kota Bekasi menurut Lapus di Kota Bekasi tahun 2021 adalah sebesar 3,22%. Angka tersebut menunjukkan perekonomian Kota Bekasi tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sebesar -2,58 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang negatif ini dipicu terjadinya pandemi covid-19. Laju pertumbuhan tertinggi adalah kategori real estat sebesar 12,9 persen.

Berdasarkan distribusi PDRB menurut lapangan usaha, sektor industri pengolahan merupakan sector yang memiliki kontribusi paling besar terhadap

PDRB Kota Bekasi tahun 2021 dengan share mencapai 34 persen, naik dibanding tahun 2020 yang sebesar 33,74 persen. Disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 21,87 persen turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 22,08 persen. Sementara itu, sektorsektor yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya antara lain informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; dan real estate.

4) Produksi Tanaman Hortikultura

Produksi Tanaman hortikultura di Kota Bekasi tahun 2021 telah menghasilkan produk-produk pertanian, antara lain hasil tanaman biofarmaka dan buah-buahan. Menurut data BPS Kota Bekasi hasil tanaman biofarmaka dalam tahun 2021 yaitu: kunyit sebanyak 56.681 KG, kencur sebanyak 83.664 KG, Jahe sebanyak 165.801 KG, Laos/Lengkuas sebanyak 729.426 KG, dan lempuyang sebanyak 93.800 KG. Kemudian, produksi buah-buahan tahunan tersebar di Kota Bekasi tahun 2021 adalah rambutan sebesar 68.507 ton, sedangkan produksi terkecil adalah jengkol dengan produksi sebesar 139 ton.

Pembangunan ekonomi pada sektor pertanian merupakan hal sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dibidang pertanian, yaitu Peningkatan produksi pangan terutama menuju pencapaian surplus beras, Stabilisasi harga pangan, Pemantapan penganeekaragaman Pangan berbasis sumberdaya lokal, dan Perlindungan dan pemberdayaan petani serta peningkatan kesejahteraan petani.

Tanaman hortikultura terbagi dalam empat jenis, yaitu buah-buahan, Sayur-sayuran, tanaman hias dan biofarmaka. Pada tahun 2020, Produksi tanaman sayuran terbesar di Kota Bekasi adalah kangkung besar yaitu sebanyak 5.119,9 ton dengan luas panen sebesar 732 hektar. Sedangkan produksi tanaman sayuran terkecil selama tahun 2020 adalah cabe rawit yaitu sebesar 37,4 ton dengan luas panen sebesar 5 hektar.

Produksi tanaman biofarmaka terbesar di Kota Bekasi pada tahun 2020 adalah tanaman Jahe yaitu sebanyak 172.812 kg, dengan luas panen sebesar 80.687 m², sementara produksi tanaman biofarmaka terkecil selama tahun 2020 adalah tanaman Mengkudu, yaitu 150 kg dengan luas panen 30 pohon. Produksi tanaman hias terbesar di Kota Bekasi selama tahun 2020 adalah tanaman Kamboja Jepang yaitu sebanyak 116.625 pohon, dengan luas panen sebesar 2.815 pohon. Produksi buah-buahan tahunan terbesar selama tahun 2020 di Kota Bekasi adalah Mangga sebanyak 1.111,2 ton. Sedangkan produksi terkecil adalah Jeruk Siam/Keprok sebanyak 3,9 ton.

5) Pontensi Energi

Data yang dikutip dari Kota Bekasi Dalam Angka 2022 yang dirilis BPS Kota Bekasi menyebutkan bahwa listrik terjual di Kota Bekasi tahun 2021 adalah 1.763.945 KWh. Jumlah tersebut terhitung tinggi. Listrik merupakan salah satu komponen vital dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai salah satu sumber energi yang digunakan baik oleh rumahtangga, bisnis, pemerintah, industri maupun sosial. Seiring dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan akan listrik pun bertambah dari tahun ke tahun. Sementara itu, produksi listrik yang terjual mencapai 1.763.945.748 Kwh dan pajak yang disetorkan mencapai 2.138,74 miliar rupiah.

Selain sektor listrik, yang tidak kalah pentingnya adalah sektor air minum, Berdasarkan data dari PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi, pada tahun 2020 tercatat volume air yang disalurkan sebanyak 12.669.210 m³ dengan nilai nominal sebesar 85,23 miliar rupiah.

Tabel II. 38 Jumlah Pelanggan, Listrik Terjual, dan Pendapatan PT PLN pada Cabang/Ranting PLN Menurut Jenis Pelanggan di Kota Bekasi, 2021

Jenis Pelanggan	Listrik Terjual (m ³)	Pendapatan (Rp)
Sosial	74.454.818	70.531.349.614
Rumah Tangga	597.838.677	778.133.180.251
Bisnis	379.256.327	479.183.289.374
Industri	666.006.419	752.584.192.676
Publik	36.581.814	50.698.260.711
Lain-lain	9.807.693	7.606.460.077

Sumber: PT. PLN (Persero) UP3 Bekasi 2021

6) Aspek Pariwisata

Dari aspek pariwisata dan jika dilihat dari jumlah rumah makan, data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi menunjukkan terjadi peningkatan yaitu dari 2.507 rumah makan dan restoran pada tahun 2020 menjadi 2.829 rumah makan dan restoran pada tahun 2021.

Dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu wilayah, sector pariwisata memiliki andil yang sangat besar. Dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada dengan sebaik-baiknya maka suatu daerah dapat menarik para wisatawan baik yang ada di dalam negeri maupun wisatawan asing untuk datang dan berwisata di daerahnya. Pertumbuhan sektor pariwisata dapat dilihat dari perkembangan wisatawan yang berkunjung, perkembangan hotel/penginapan dan perkembangan fasilitas akomodai lainnya.

Tabel II. 39 Jumlah Rumah Makan menurut Kecamatan di Kota Bekasi, 2018–2021

Kecamatan	2018	2019	2020	2021
Pondokgede	249	308	357	386
Jatisampurna	156	198	212	223
Pondokmelati	77	90	101	110
Jatiasih	96	116	127	151
Bantargebang	18	20	20	23
Mustika Jaya	87	108	118	158
Bekasi Timur	199	250	253	268
Rawalumbu	103	121	124	141
Bekasi Selatan	428	504	526	614
Bekasi Barat	109	126	139	162
Medan Satria	175	201	228	243
Bekasi Utara	218	270	302	350
Kota Bekasi	1.915	2.312	2.507	2.829

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi 2021, dalam Kota Bekasi Dalam Angka 2022

7) Transportasi

Perhubungan darat merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Di samping itu perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya karena kontribusinya untuk menembus isolasi suatu daerah untuk pemerataan pembangunan seluruh daerah.

Panjang jalan di Kota Bekasi pada akhir tahun 2021 adalah 4.496,23 km. Jika dirinci menurut jenis permukaan jalan maka sepanjang 2.031,67 km atau sebesar 45,18 persen sudah beraspal, 2.464,55 km atau 54,81 persen belum beraspal.

Tabel II. 40 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Bekasi (km), 2019–2021

Kondisi Jalan	2019	2020	2021
Baik	4.382,79	4.285,38	4.145,69
Sedang	109,57	173,79	195,79
Rusak	24,54	27,44	64,86
Rusak Berat	29,68	86,90	89,90
Jumlah	4.546,58	4.573,51	4.496,23

Sumber: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, dalam Kota Bekasi Dalam Angka 2022

8) Perkembangan Koperasi

Perkembangan Koperasi di Kota Bekasi selama ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, antara lain terlihat dari terus meningkatnya jumlah Koperasi aktif. Dalam empat tahun terakhir terus terjadi peningkatan. Tahun 2020 jumlah koperasi aktif di Kota Bekasi sebanyak 760 koperasi, dan tahun 2021 menjadi 1.119 koperasi aktif. Jumlah tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kota Bekasi.

Kecamatan Bekasi Timur adalah kecamatan yang memiliki jumlah koperasi aktif terbanyak yaitu 163 koperasi, diikuti kecamatan Bekasi Selatan dengan 161 koperasi serta Kecamatan Jatiasih dan Kecamatan Bekasi Barat masing-masing memiliki 80 koperasi. Sedangkan kecamatan yang memiliki koperasi aktif terendah adalah kecamatan Pondok Melati dengan 23 koperasi aktif.

Tabel II. 41 Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kota Bekasi, 2018–2021

Kecamatan	2018	2019	2020	2021
Pondokgede	56	63	68	88
Jatisampurna	30	38	39	62
Pondokmelati	22	23	24	54
Jatiasih	67	74	80	104
Bantargebang	41	43	43	70
Mustika Jaya	26	34	35	62
Bekasi Timur	102	111	115	140
Rawalumbu	46	55	56	83
Bekasi Selatan	104	111	114	140
Bekasi Barat	76	80	80	102
Medan Satria	60	63	63	89

Kecamatan	2018	2019	2020	2021
Bekasi Utara	25	38	43	125
Kota Bekasi	655	733	760	1.119

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi, dalam Kota Bekasi Dalam Angka 2022

9) Perbandingan Antar-Kabupaten/Kota

Jumlah Penduduk Kota Bekasi sekitar 5,25 persen dari total penduduk Provinsi Jawa Barat. Dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat, Laju Pertumbuhan Produk domestik Regional Bruto Kota Bekasi berada di bawah rata-rata provinsi yaitu 3,22, sedangkan provinsi 3,74. Jumlah Penduduk yang termasuk dalam kategori miskin di Kota Bekasi Tahun 2021 sekitar 3,43 persen dari total penduduk kategori miskin di Jawa Barat.

Tabel II. 42 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (persen),

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Bogor	5,92	6,19	5,85	-1,76	3,55
Sukabumi	5,75	5,81	5,64	-0,92	3,75
Cianjur	5,77	6,24	5,67	-0,78	3,48
Bandung	6,15	6,26	6,36	-1,80	3,56
Garut	4,91	4,96	5,02	-1,26	3,58
Tasikmalaya	5,95	5,70	5,43	-0,98	3,43
Ciamis	5,21	5,31	5,38	-0,14	3,66
Kuningan	6,36	6,43	6,59	0,11	3,56
Cirebon	5,06	5,02	4,68	-1,08	2,47
Majalengka	6,81	6,48	7,77	0,89	4,75
Sumedang	6,23	5,79	6,33	-1,12	3,17
Indramayu	1,43	1,34	3,20	-1,58	0,58
Subang	5,10	4,41	4,61	-1,15	2,40
Purwakarta	5,15	4,98	4,37	-2,13	3,42
Karawang	5,13	6,04	4,21	-3,80	5,85
Bekasi	5,68	6,02	3,95	-3,40	3,65
Bandung Barat	5,21	5,50	5,05	-2,41	3,46
Pangandaran	5,10	5,32	5,94	-0,05	3,67
Kota Bogor	6,12	6,14	6,19	-0,41	3,76

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Sukabumi	5,43	5,52	5,53	-1,49	3,71
Kota Bandung	7,21	7,08	6,79	-2,28	3,76
Kota Cirebon	5,80	6,20	6,29	-0,98	3,04
Kota Bekasi	5,73	5,86	5,41	-2,58	3,22
Kota Depok	6,75	6,97	6,74	-1,92	3,76
Kota Cimahi	5,43	6,46	7,85	-2,26	4,19
Kota Tasikmalaya	6,07	5,93	5,97	-2,01	3,57
Kota Banjar	5,30	5,05	5,03	0,94	3,46
Jawa Barat	5,33	5,65	5,02	-2,52	3,74

Sumber: BPS dan sumber lain, dalam Kota Bekasi Dalam Angka 2022

2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Perhubungan

Kota Bekasi yang dikelilingi oleh daratan, mengandalkan sistem transportasi darat sebagai sarana perhubungan dengan wilayah lain disekitarnya. Salah satu moda transportasi yang banyak digunakan masyarakat Kota Bekasi adalah Kereta Api. Berdasarkan data BPS dalam angka tahun 2018, berikut merupakan jumlah penumpang yang menggunakan kereta api selama satu tahun di Kota Bekasi dibandingkan dengan Kota Depok dan Tangerang pada tahun 2017:

Tabel II. 43 Jumlah Penumpang yang menggunakan kereta api tahun 2017

Kota	Stasiun	Jumlah Penumpang	Jumlah Penduduk
Bekasi		20,521,911	2.7 jiwa
	Bekasi	15,030,291	
	Kranji	5,491,620	
Depok		31,451,695	2.2 Jiwa
	Universitas Indonesia	3,864,949	
	Pondok Cina	4,525,113	
	Depok Baru	11,772,140	
	Depok	4,437,241	
	Citayam	6,852,252	
Tangerang		11,651,635	2.1 jiwa

Sumber : Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tangerang dalam angka 2018

Selama tahun 2017, Kota Bekasi yang dengan jumlah penduduk sekitar 2,7 juta jiwa, terdapat sekitar 20,5 juta penumpang yang menggunakan angkutan kereta api melalui stasiun-stasiun yang ada di Kota Bekasi. Jumlah tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan kota Depok dengan jumlah penduduk sekitar 2,2 juta jiwa yang mencapai 31,4 juta dengan 5 stasiun. Namun jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan kota Tangerang (dengan 2,1 jiwa) yang hanya mencapai 11,6 Juta penumpang per tahun.

Selain angkutan kereta api, moda angkutan lainnya adalah kendaraan bermotor. Berikut merupakan perbandingan panjang jalan dengan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tangerang.

Tabel II. 44 Perbandingan Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan

Kota	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan
Tangerang	1,402.64	784,314.00
Depok	476.15	1,144,311.00
Bekasi	3,193.04	1,593,978.00

Sumber : Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Depok dalam angka 2018 yang dikelola dalam SIPD

Adapun terkait jumlah penumpang yang menggunakan angkutan darat pada tahun 2016 sejumlah 801.772 orang dan pada tahun 2017 sejumlah 801.772 orang.

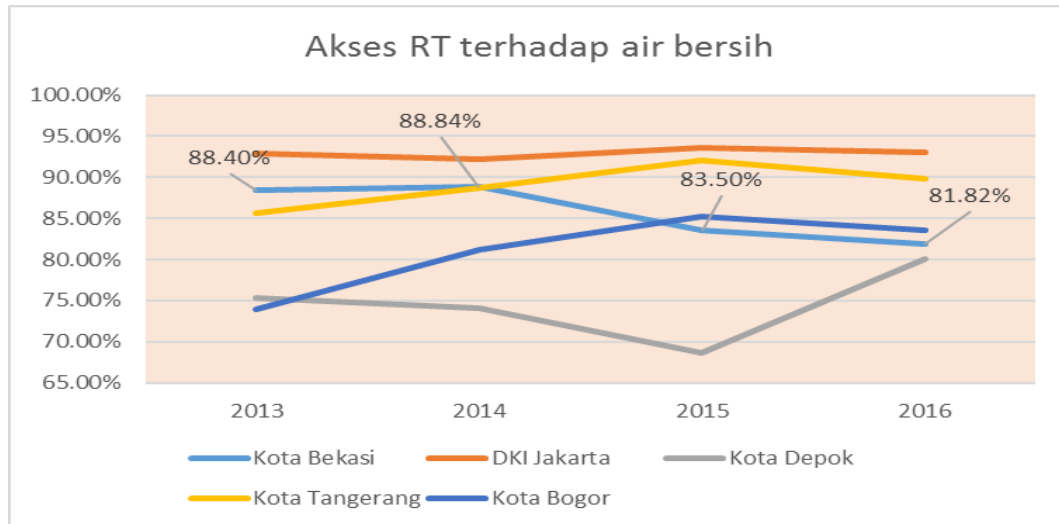
2) Lingkungan

Definisi daya saing sebagaimana dikemukakan Porter (1990), bahwa daya saing merupakan kemampuan suatu ekonomi yang memiliki produktivitas yang tinggi dan masyarakatnya memiliki kehidupan yang baik (*good of living*). Kehidupan masyarakat yang baik salah satu indikatornya tercermin dari, salah satunya, indikator akses terhadap air bersih dan sanitasi. Berikut merupakan gambaran akses rumah tangga terhadap air bersih dan sanitasi di Kota Bekasi dibandingkan dengan kota lain disekitarnya.

3) Akses terhadap air bersih

Indikator yang mencerminkan infrastruktur pengelolaan lingkungan antara lain akses rumah tangga terhadap air bersih dan kepemilikan toilet rumah tangga pribadi yang mencerminkan sanitasi yang sehat. Berikut merupakan perbandingan

akses rumah tangga terhadap air bersih di kota bekasi dibandingkan dengan kota di sekitarnya.



Gambar II. 36 Akses Rumah Tangga terhadap Air Bersih

Sumber: data.worldbank.org, 2018

Akses rumah tangga terhadap air bersih di Kota Bekasi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya yang cenderung meningkat. Pada awal tahun 2013 akses terhadap air bersih di Kota Bekasi menempati peringkat ke-2 dengan persentase 88.40%, namun semakin lama akses terhadap air bersih semakin menurun hingga mencapai angka 81.82 % di peringkat ke-4 dari kota yang dibandingkan. Bahkan jika dilihat trendnya, daerah lain seperti kota bogor dan Tangerang senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akses rumah tangga terhadap air bersih di Kota Bekasi juga lebih rendah dibandingkan di Kota Bekasi.

4) Sanitasi lingkungan

Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya (Notoadmojo, 2003). Sanitasi lingkungan dapat pula diartikan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan dan mempertahankan standar kondisi lingkungan mendasar yang mempengaruhi kesejahteraan manusia. Kondisi tersebut mencakup: (1) pasokan air yang bersih dan aman; (2) pembuangan limbah dari hewan, manusia dan industri yang efisien; (3) perlindungan makanan dari kontaminasi biologis dan kimia; (4) udara yang bersih dan aman; dan (5) rumah yang bersih dan aman.

Dari pengertian tersebut menjadi jelas bahwa sanitasi lingkungan ditujukan untuk memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat dan nyaman. Sebab, lingkungan yang sanitasinya buruk dapat menjadi sumber berbagai penyakit yang



dapat mengganggu kesehatan manusia. Dalam konteks kota, sanitasi lingkungan menjadi penting, karena akan memberikan sumbangsih terhadap kualitas dan kesehatan masyarakatnya. Kota yang mayoritas penduduknya memiliki akses terhadap sanitasi layak, dapat dikatakan memiliki kualitas kesehatan yang baik pula.

Jika melihat data BPS Provinsi Jawa Barat (2021), Kota Bekasi memiliki persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak cukup tinggi di antara kota-kota lainnya di Jawa Barat. Tahun 2019 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak Kota Bekasi sebesar 86,97%, di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat yang sebesar 69,64%; tahun 2020 Kota Bekasi persentasenya sebesar 88,82%, di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat yang sebesar 71,40%; dan tahun 2021 Kota Bekasi persentasenya sebesar 81.02%, masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat yang sebesar 71,66%. Artinya, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kota Bekasi dinilai baik di antara kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terlihat di Tabel II.46 di bawah.

Tabel II. 45 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

Wilayah Jawa Barat	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (Persen)		
	2019	2020	2021
Provinsi Jawa Barat	69.64	71.40	71.66
Bogor	61.17	53.36	63.91
Sukabumi	49.66	62.88	64.35
Cianjur	49.71	51.40	58.52
Bandung	70.09	67.27	64.51
Garut	41.37	46.42	43.73
Tasikmalaya	47.19	51.45	49.35
Ciamis	57.53	69.20	66.59
Kuningan	82.68	83.92	80.98
Cirebon	81.84	83.23	83.41
Majalengka	76.36	79.44	80.59
Sumedang	89.26	92.43	87.87
Indramayu	86.40	88.86	89.75
Subang	78.23	81.14	85.82
Purwakarta	82.60	83.21	72.61
Karawang	74.32	78.14	77.19
Bekasi	86.97	88.82	81.02
Bandung Barat	59.47	71.74	63.78
Pangandaran	82.77	87.58	81.49
Kota Bogor	67.57	69.86	75.35

Kota Sukabumi	39.79	34.93	39.64
Kota Bandung	51.65	51.39	48.90
Kota Cirebon	90.85	89.01	92.71
Kota Bekasi	96.01	93.90	97.54
Kota Depok	96.30	97.48	97.06
Kota Cimahi	69.61	70.05	78.67
Kota Tasikmalaya	46.66	49.29	52.62
Kota Banjar	88.21	89.33	81.92

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2021

2.4.3 Iklim Berinvestasi

Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi menyebutkan, melampaui target realisasi investasi tahun 2021 dengan capaian Rp8,1 triliun yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Hal itu mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Bekasi bergerak ke arah positif di tengah pandemi Covid-19. Capaian tersebut membuat Kota Bekasi menduduki posisi keempat jumlah proyek PMA-PMDN terbanyak se-Jawa Barat dengan total 3.115 proyek atau berkontribusi sebesar 9,8 persen dari total proyek provinsi di periode yang sama.

2.4.4 Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia dapat dikaitkan dengan Pembangunan manusia di suatu daerah. Pembangunan manusia Kota Bekasi terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi.

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel II. 46 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi 2020-2022

Komponen	Satuan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	Tahun	75,01	75,19	75,48
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,00	14,10	14,11
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,16	11,31	11,44

Komponen	Satuan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengeluaran per Kapita	Rp (000) per tahun	15.776,00	15.903,00	16.239,00
IPM		81,50	81,95	82,46
Pertumbuhan IPM	%	-0,09	0,45	0,51

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi 2022

1) Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2021, Kota Bekasi telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 1,07 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata Umur Harapan Hidup tumbuh sebesar 0,13 persen per tahun. Pada tahun 2010, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kota Bekasi sebesar 74,12 tahun, dan pada tahun 2021 telah mencapai 75,19 tahun.



Gambar II. 37 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Bekasi

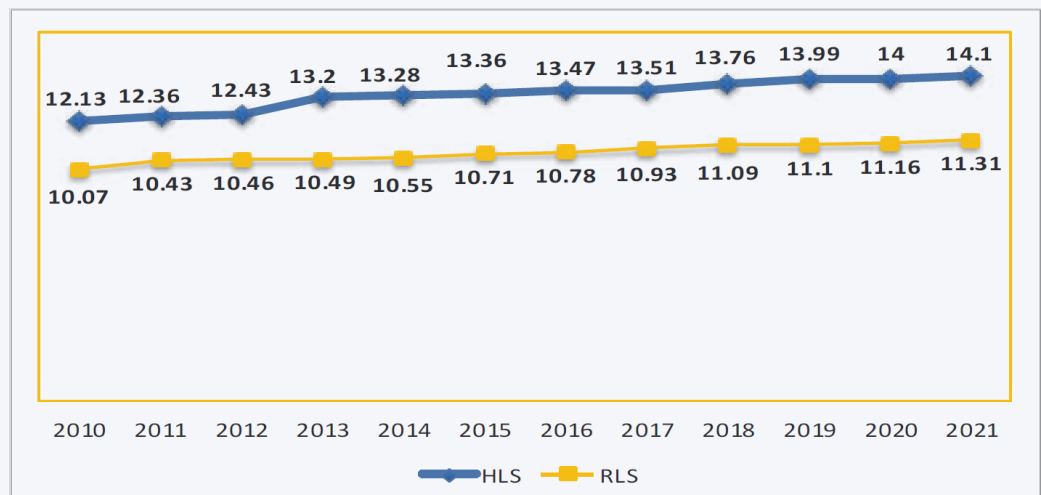
Sumber: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik Kota Bekasi 2021

2) Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2021, Harapan Lama Sekolah di Kota Bekasi telah meningkat sebesar 1,97 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 1,24 tahun. Selama periode 2010 hingga 2021, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,39 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2021, Harapan Lama Sekolah di Kota Bekasi telah mencapai 14,10 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus DII.

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Bekasi tumbuh 1,06 persen per tahun selama periode 2010 hingga 2021. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun

kualitas manusia di Kota Bekasi yang lebih baik. Pada tahun 2021, secara rata-rata penduduk Kota Bekasi usia 25 tahun ke atas mencapai 11,31 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas 11 SMA/Sederajat.

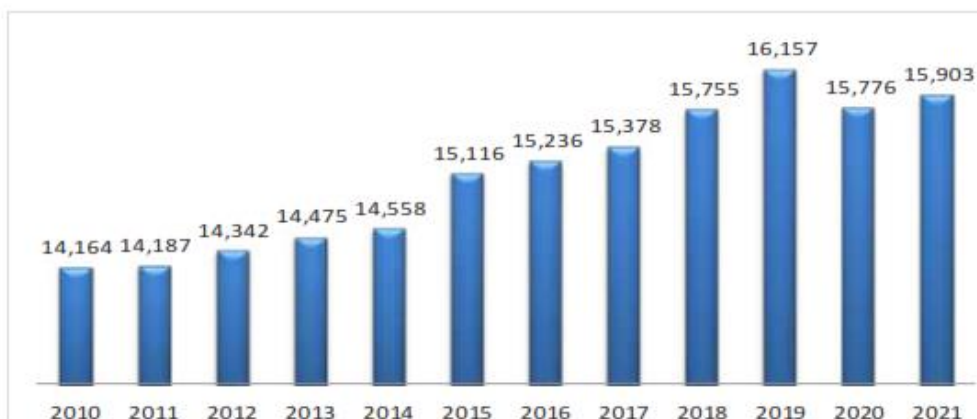


Gambar II. 38 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Bekasi (tahun), 2010-2021

Sumber: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

3) Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan (harga konstan 2012). Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat Kota Bekasi mencapai Rp15,903 juta per tahun. Selama 2010-2021, pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat rata-rata meningkat sebesar 1,07 persen per tahun.



Gambar II. 39 Pengeluaran per Kapita per Tahun di Kota Bekasi (Rp 000),

Sumber: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik Kota Bekasi



2.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 menjelaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar harus berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pelayanan Dasar yang dimaksud dalam hal ini adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Sedangkan Standar Pelayanan Minimal yang dimaksud dalam hal ini adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.²

Dalam menjalankan ketentuan pasal 18, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, yang dimaksud dengan Pelayanan dasar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih mengacu terhadap definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun dalam Peraturan ini dijelaskan bahwa pelaksanaan SPM tersebut harus didasarkan pada prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.³

Pemerintah Kota Bekasi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 bidang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 antara lain: ⁴ (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan (6) Sosial.

Standar teknis yang dimaksud di atas, ditetapkan oleh kementerian teknis terkait setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Secara rinci dijelaskan tentang layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel II. 47 Penjelasan SPM Menurut Bidang

No.	Bidang	Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal
1.	Pendidikan	a. Pendidikan anak usia dini. b. Pendidikan dasar. c. Pendidikan kesetaraan.

² Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³ Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

⁴ Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.



No.	Bidang	Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal
2.	Kesehatan	a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir d. Pelayanan Kesehatan Balita e. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar f. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif g. Pelayanan Kesehatan pada usia lansia h. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi i. Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari. b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota. b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota.
5.	Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum. b. Pelayanan informasi rawan bencana. c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban.
6	Sosial	a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti. b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti. c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti

No.	Bidang	Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal
		d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti. e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota.

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

2.5.1 Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021

Dalam pelaksanaannya, Kota Bekasi telah menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, sehingga tahun 2021, Kota Bekasi telah melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Bekasi tahun 2021, dapat diuraikan capaian penerapan SPM Kota Bekasi sebagai berikut:

1) Pendidikan

Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 48 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM)	Indikator Capaian	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Realisasi Capaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Kota Bekasi Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dasar (SD/MI, SMP/MTs)	380.656. Orang	372.258 Orang	97,76
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Kota Bekasi Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan	5.295 orang	5.295 orang	100
3	Pendidikan	Jumlah Warga Kota	82.140	44.813	54,56

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM)	Indikator Capaian	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Realisasi Capaian
	Anak Usia Dini	Bekasi Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	orang	orang	

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi 2021

Data peserta didik jenjang pendidikan dasar diperoleh dari Data Jumlah Penduduk berdasarkan struktur umur tunggal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Semester II Tahun 2021 pada usia 7-15 tahun, yaitu sebanyak 380.656 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam*), sementara jumlah peserta didik jenjang Pendidikan Dasar di Kota Bekasi tahun 2021 sebanyak 372.258 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan*) orang. Data tersebut diperoleh dari Dapodik milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta EMIS milik Kementerian Agama.

2) Kesehatan

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Tahun 2021 dapat dilihat dalam Tabel berikut:

**Tabel II. 49 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Kesehatan Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM)	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Terlayani	Realisasi Capaian (%)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	47,248	45,957	97
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	47,248	45,957	47,248
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan	42,953	41,993	98
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	42,953	41,993	98
5.	Pelayanan Kesehatan pada	Jumlah warga Kota Bekasi usia pendidikan dasar	380,656	240,131	63

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM)	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Terlayani	Realisasi Capaian (%)
	usia pendidikan dasar	yang mendapatkan pelayanan kesehatan			
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Kota Bekasi usia produktif (15-59 tahun) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1,680,894	612,129	36
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lansia	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	229,471	159,512	70
8.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	536,813	78,727	15
9.	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	54,661	49,740	91
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	3,428	2,234	65
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	37,838	16,222	43
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan	62,057	21,143	34

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi 2021

Dari tabel di atas tampak bahwa dari ke-12 indikator SPM belum ada yang mencapai target 100%. Secara rinci pencapaian SPM Kesehatan dijelaskan sebagai berikut:

- a) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil. Tahun 2021 terdapat 47,248 sasaran ibu hamil di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan bulanan pelayanan di Puskesmas jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai adalah 45.957 orang (97%).
- b) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan. Tahun 2021 terdapat 45.099 sasaran ibu bersalin di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan bulanan pelayanan di Puskesmas jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai adalah 44.167 orang (98 %).
- c) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Tahun 2021 terdapat 42.953 sasaran bayi baru lahir di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan bulanan pelayanan di Puskesmas jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 41.993 orang (98 %).
- d) Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita. Tahun 2021 terdapat 42.953 sasaran balita di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan bulanan pelayanan di Puskesmas jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 41.993 orang (98 %).
- e) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Tahun 2021 terdapat 380,656 anak usia pendidikan dasar yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 240.131 orang (63 %).
- f) Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Tahun 2021 terdapat 1.680.894 warga negara usia 15-59 tahun yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 612.129 orang (36 %).
- g) Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar standar. Tahun 2021 terdapat 229,471 warga negara usia 60 tahun ke atas yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 159.512 orang (70%).
- h) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Tahun 2021 terdapat 536,813 penderita hipertensi yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 78.727 orang (15%).

- i) Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Tahun 2021 terdapat 54.661 penderita diabetes melitus yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 49.740 orang (91%).
- j) Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Tahun 2021 terdapat 3.428 penderita ODGJ yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 2.234 orang (65%).
- k) Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar. Tahun 2021 terdapat 37.838 orang terduga TBC yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 16.222 orang (43%).
- l) Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar. Tahun 2021 terdapat 62.057 orang yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah penderita orang beresiko HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar adalah 21.143 orang (34 %).

3) Pekerjaan Umum

Realisasi pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kota Bekasi didukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021, yang tersebar di beberapa perangkat Daerah, dimana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebagai *leading sector* dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum. Adapun realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021 dapat dirinci dalam Tabel berikut:

Tabel II. 50 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM)	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Terlayani	Realisasi Capaian
1	Penyediaan kebutuhan	Jumlah Warga Kota Bekasi yang	2.469.814 Orang	2.281.840 Orang	92,39

	pokok air minum sehari-hari	memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari			
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	2.469.814 Orang	2.336.460 Orang	94,60

Sumber: Dinas Perkimtan Kota Bekasi, 2021

4) Perumahan Rakyat

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021 dapat disajikan dalam Tabel berikut:

**Tabel II. 51 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM)	Indikator Capaian	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Realisasi Capaian
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Kota Bekasi korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	N/A	N/A	N/A
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi	Jumlah Warga Kota Bekasi yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Perkimtan Kota Bekasi 2021

Pemenuhan pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota pada tahun 2021 realisasi N/A (*Not Available*), dikarenakan dengan melihat dan memperhatikan waktu kejadian serta tingkat kerusakan yang diakibatkan dari bencana dari bencana hidrometeorologi sesuai dengan Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Nomor 900/337-BPBD.Darlog tanggal 20 Mei 2021 tentang Permohonan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk bantuan masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Bekasi. Tim TAPD Kota Bekasi menilai resiko social yang rendah untuk tidak diberikan bantuan perbaikan atau kerusakan tempat tinggal dan fasilitas umum, sehingga penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan kepada korban bencana hidrometeorologi di Kota Bekasi tidak dapat diberikan.



Kemudian, untuk pemenuhan pelayanan dasar Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada tahun 2021 realisasi N/A (*Not Available*), dikarenakan pada tahun 2021 tidak ada kegiatan relokasi warga, baik program dari Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat.

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a) Capaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021 dapat disajikan dalam Tabel II.51. Pada tahun 2021, telah dilaksanakan 99 kali kegiatan penegakan Perda dan Perkada di Kota Bekasi.

Tabel II. 52 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM)	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Terlayani	Realisasi Capaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	0 Orang	0 Orang	100%

Sumber: Satpol PP Kota Bekasi 2021.

b) Capaian SPM Sub Urusan Urusan Bencana

Realisasi pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana di Kota Bekasi didukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021, yang tersebar di beberapa perangkat Daerah, dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi sebagai *leading sector* dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana, dengan didukung oleh Dinas Sosial, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dan Bagian Perlengkapan Setda Kota Bekasi. Adapun realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Tahun 2021 dapat disajikan dalam Tabel berikut:

**Tabel II. 53 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan
Bencana Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM)	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Terlayani	Realisasi Capaian
1.	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	649.248 Orang	648.880 Orang	99,94
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	649.248 Orang	427.693 Orang	65,88
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	649.248 Orang	649.248 Orang	100

Sumber: BPBD Kota Bekasi 2021

c) Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II. 54 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan
Kebakaran Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM)	Indikator Capaian	Persentase Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Persentase Jumlah Orang Yang Terlayani	Realisasi Capaian
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	96,42	96,42

Sumber: Dinas Damkar Kota Bekasi 2021

Capaian kinerja Tahun 2021 atas indikator layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah kejadian kebakaran di Kota Bekasi = 254 (dua ratus lima puluh empat) kejadian.
- b. Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dalam waktu tanggap (*respon time*) = 219 (dua ratus sembilan belas) kejadian.
- c. Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemda dalam waktu tanggap = 0 (nihil) kejadian.
- d. Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani diluar waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan/atau relawan kebakaran = 35 (tiga puluh lima) kejadian.

6) Sosial

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kota Bekasi Tahun 2021 mencapai 100% mencakup 5 jenis layanan SPM Sosial sesuai ketentuan peraturan yang ditetapkan. Jika dirinci semua layanan yang ditetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah pe/Kota juga telah dilaksanakan. Secara rinci capaian SPM Sosial dapat disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel II. 55 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM)	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Terlayani	Realisasi Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	1.035 Orang	1.035 Orang	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	1.708 Orang	1.708 Orang	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	888 Orang	888 Orang	100

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM)	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Terlayani	Realisasi Capaian
4	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	736 Orang	736 Orang	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial korban bencana di daerah kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	12.474	12.474	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi 2021

2.5.2 Program Pendukung Pelaksanaan SPM

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Bekasi telah menetapkan program dan kegiatan yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2021, yang tersebar di beberapa dinas yang mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal. Program-program yang mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Program Pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

Program pendukung pelaksanaan SPM Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (realisasi anggarannya tercapai 95,95); Program Pengelolaan Pendidikan (realisasi anggarannya tercapai 87,64); dan Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (realisasi anggarannya tercapai 88,40). Sementara program penunjang pelaksanaan SPM Pendidikan yang bersifat fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yaitu: Program Pengelolaan Pendidikan (realisasi anggarannya tercapai 86,80).

b. Program Pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan.

Program pendukung pelaksanaan SPM Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (realisasi anggarannya tercapai 95,22); Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (realisasi anggarannya tercapai 85,24); Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (realisasi anggarannya tercapai 91,03); Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (realisasi anggarannya tercapai 100%); Program Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Kesehatan (realisasi anggarannya tercapai 94,99%). Kemudian, program penunjang pelaksanaan SPM Kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah, yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (realisasi anggarannya tercapai 97,25%); Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (realisasi anggarannya tercapai 88,86%); Sementara program penunjang pelaksanaan SPM Kesehatan yang bersifat fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yaitu: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (realisasi anggarannya tercapai 89,06%).

c. Program Pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum.

Program pendukung pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (realisasi anggarannya tercapai 93,61%) dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (realisasi anggarannya tercapai 83,85%). Kemudian, program penunjang pelaksanaan SPM Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (realisasi anggarannya tercapai 91,44%); Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (realisasi anggarannya tercapai 91,58%); Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase (realisasi anggarannya tercapai 95,17 %); Program Pengembangan Permukiman (realisasi anggarannya tercapai 89,12%); Program Penyelenggaraan Jalan (realisasi anggarannya tercapai 85,72%); Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (realisasi anggarannya tercapai 89,99%); Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (realisasi anggarannya tercapai 94,00%); Program Pengembangan Permukiman (realisasi anggarannya tercapai 80,23%); dan Program Penataan Bangunan Gedung (realisasi anggarannya tercapai 84,04%).

d. Program Pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat.

Program pendukung pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air yaitu: Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) (realisasi anggarannya tercapai 95,49%). Kemudian, Program pendukung pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (realisasi anggarannya tercapai 94,78%); Program Pengembangan Perumahan (realisasi anggarannya tercapai 86,08%); Program Kawasan Permukiman (realisasi anggarannya tercapai 100,00%); Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

(realisasi anggarannya tercapai 98,96%); dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) (realisasi anggarannya tercapai 91,85%).

e. Program Pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibumlinmas.

Program pendukung pelaksanaan SPM Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (realisasi anggarannya tercapai 91,76%); Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (realisasi anggarannya tercapai 92,72%). Kemudian, program pendukung pelaksanaan SPM Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu: Program Penanggulangan Bencana (realisasi anggarannya tercapai 90,30%). Sementara, program pendukung pelaksanaan SPM Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (realisasi anggarannya tercapai 91,65%); Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (realisasi anggarannya tercapai 91,28%).

f. Program Pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial.

Program pendukung pelaksanaan SPM Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (realisasi anggarannya tercapai 93,42%); Program Pemberdayaan Sosial (realisasi anggarannya tercapai 89,92%); Program Rehabilitasi Sosial (realisasi anggarannya tercapai 82,18%); Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial (realisasi anggarannya tercapai 59,32%); Program Penanganan Bencana (realisasi anggarannya tercapai 85,84%); Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (realisasi anggarannya tercapai 99,06%). Kemudian, program pendukung pelaksanaan SPM Sosial yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (realisasi anggarannya tercapai 84,72%).

2.5.3 Penerima Manfaat dalam Pelaksanaan SPM

a. Analisis Penerima Manfaat SPM Pendidikan

Data peserta didik jenjang pendidikan dasar diperoleh dari Data Jumlah Penduduk berdasarkan struktur umur tunggal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Semester II Tahun 2021 pada usia 7-15 tahun, yaitu sebanyak 380.656 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam*), sementara jumlah peserta didik jenjang Pendidikan Dasar di Kota Bekasi tahun 2021 sebanyak 372.258 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima*

Puluh Delapan) orang. Data tersebut diperoleh dari Dapodik milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta EMIS milik Kementerian Agama.

Untuk menghitung peserta pendidikan kesetaraan diperoleh dari anak usia 7 – 18 tahun yang putus sekolah sebanyak 5.295 orang dan jumlah anak putus sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan Paket A, B dan Paket C sebanyak 5.295 orang atau sebesar 100 persen. Untuk mengatasi anak putus sekolah ini ditangani oleh Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Adapun jumlah siswa yang mengikuti pendidikan kesetaraan Paket A sebanyak 1.726 orang, Paket B sebanyak 1.713 orang dan Paket C sebanyak 1.856 orang.

Untuk menghitung peserta pendidikan anak usia dini diperoleh dari Data Jumlah Penduduk berdasarkan struktur umur tunggal yang diolah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Semester II Tahun 2021 pada usia 5-6 tahun, yaitu sebanyak 82.140 (*Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh*) orang, sementara peserta didik jenjang pendidikan anak usia dini pada tahun 2021 sebanyak 44.813 (*Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Belas*) orang, dengan demikian capaian kinerja untuk indikator pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2021 sebesar 54,56 Persen.

b. Analisis Penerima Manfaat SPM Kesehatan

Dari hasil pencapaian SPM Kesehatan diketahui bahwa dari ke-12 indikator SPM Kesehatan, belum ada yang mencapai target 100%. Pencapaian ini diperoleh dari pelaporan puskesmas, rumah sakit dan fasilitas Kesehatan lain di Kota Bekasi yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.** Tahun 2021 terdapat 47,248 sasaran ibu hamil di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan bulanan pelayanan di Puskesmas jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai adalah 45.957 orang (97%). Diperoleh dari kunjungan bumil ke-4 di fasilitas kesehatan. Dengan demikian adanya pandemi Covid-19 masih menjadi kendala umum dalam pelayanan kesehatan pada ibu hamil, dimana ibu hamil sebagai salah satu kelompok rentan terhadap virus ini, sangat berhati-hati untuk mendatangi pelayanan kesehatan karena takut tertular di pelayanan kesehatan.
- 2) Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan.** Tahun 2021 terdapat 45.099 sasaran ibu bersalin di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan bulanan pelayanan di Puskesmas jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai adalah 44.167 orang (98%). Diperoleh jumlah bayi baru lahir dari jumlah ibu bersalin di fasilitas Kesehatan. Hal ini didukung oleh penyebaran fasilitas kesehatan sehingga memudahkan akses ibu untuk mendapatkan layanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar.

Selain itu didukung oleh kesadaran ibu bersalin untuk melakukan persalinan di fasilitas kesehatan.

- 3) **Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.** Tahun 2021 terdapat 42.953 sasaran bayi baru lahir di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan bulanan pelayanan di Puskesmas jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 41.993 orang (98%). Kendala yang dihadapi antara lain karena adanya pandemi Covid-19 sama seperti ibu hamil, bayi baru lahir juga merupakan salah satu kelompok rentan terhadap virus ini sehingga para ibu sangat berhati-hati untuk mendatangi pelayanan kesehatan untuk memeriksakan bayinya karena takut tertular di pelayanan kesehatan. Rencana tindak lanjut tahun 2022 adalah dengan memperbanyak kunjungan rumah untuk memeriksa kesehatan bayi baru lahir yang diintegrasikan dengan kegiatan posyandu di masyarakat
- 4) **Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita.** Tahun 2021 terdapat 42.953 sasaran balita di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan bulanan pelayanan di Puskesmas jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 41.993 orang (98%). Kendala yang dihadapi antara lain disebabkan oleh pelayanan Posyandu masih terbatas pada masa pandemi Covid-19. Sehingga pelayanan Posyandu dilakukan dengan kunjungan rumah, hal ini terkendala jumlah petugas yang terbatas. Rencana tindak lanjut tahun 2022 adalah dengan memberikan penyuluhan tentang kesehatan balita bagi masyarakat. Selain itu memperbanyak kunjungan rumah untuk memeriksa kesehatan balita yang diintegrasikan dengan kegiatan posyandu di masyarakat.
- 5) **Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.** Tahun 2021 terdapat 380,656 anak usia pendidikan dasar yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 240.131 orang (63%). Kendala yang dihadapi antara lain karena sekolah belum melaksanakan pembelajaran tatap muka seutuhnya, sehingga banyak siswa tidak hadir saat dilakukan pemeriksaan kesehatan di sekolah. Rencana tindak lanjut di tahun 2022 adalah membuat penjadwalan secara bertahap untuk menghadirkan siswa ke sekolah apabila pandemi masih berlangsung dan siswa masih melakukan BDR dan dapat melakukan kunjungan rumah bila kehadiran siswa masih rendah.
- 6) **Persentase Orang Usia 15 - 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar.** Tahun 2021 terdapat 1.680.894 warga negara usia 15-59 tahun yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi

yang diperoleh datanya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 612.129 orang (36%). Diperoleh dari skrining kesehatan terkait penyakit tidak menular yang dilakukan pada penduduk usia produktif di fasilitas pelayanan kesehatan. Kendala yang dihadapi antara lain belum adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan karena masih merasa sehat sehingga merasa tidak perlu pemeriksaan kesehatan. Selain itu juga adanya pandemi Covid-19 sehingga masyarakat sangat berhati-hati untuk mendatangi pelayanan kesehatan karena takut tertular di pelayanan kesehatan. Rencana tindak lanjut adalah memberikan penyuluhan dan memperbanyak kunjungan rumah dan mengintegrasikannya dengan pelayanan Posbindu PTM untuk melakukan skrining kesehatan.

- 7) **Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Standar.** Tahun 2021 terdapat 229,471 warga negara usia 60 tahun keatas yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi yang diperoleh datanya dari dinas Kependudukan dan catatan Sipil. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 159.512 orang (70%). Kendala yang dihadapi antara lain adanya pandemi Covid-19 sama seperti ibu hamil dan bayi baru lahir, lansia juga merupakan salah satu kelompok rentan terhadap virus ini, selain itu pelayanan Posbindu yang biasanya dipusatkan pada satu lokasi ditiadakan karena tidak boleh mengumpulkan massa. Rencana tindak lanjut tahun 2022 adalah dengan memperbanyak kunjungan rumah dan mengintegrasikannya dengan pelayanan Posbindu.
- 8) **Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar.** Tahun 2021 terdapat 536,813 penderita hipertensi yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi yang diperoleh datanya dari perhitungan rumus yang menggunakan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 78.727 orang (15%). Kendala yang dihadapi antara lain masih rendahnya kesadaran masyarakat penderita hipertensi untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan secara rutin. Rencana tindak lanjut adalah memberikan penyuluhan dan memperbanyak kunjungan rumah untuk melakukan pemeriksaan hipertensi dan mengintegrasikannya dengan Posbindu PTM.
- 9) **Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar.** Tahun 2021 terdapat 54.661

penderita diabetes melitus yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 49.740 orang (91%). Keberhasilan ini didukung oleh penyuluhan dan banyaknya kunjungan rumah yang dilakukan untuk pemeriksaan diabetes melitus.

- 10) **Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.** Tahun 2021 terdapat 3.428 penderita ODGJ yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi yang diperoleh datanya dari pendataan diseluruh kelurahan dengan bekerjasama dengan dinas sosial. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 2.234 orang (65%). Masih perlu penguatan kerjasama lintas sektor baik dengan kelurahan, kecamatan dan Dinas Sosial sehingga ODGJ berat mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan.
- 11) **Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar.** Tahun 2021 terdapat 37.838 orang terduga TBC yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 16.222 orang (43 %). Kendala yang dihadapi antara lain belum semua Puskesmas dilengkapi dengan pelayanan laboratorium dan belum semua rumah sakit melaksanakan strategi DOTS untuk penanganan TBC. Selain itu adanya pandemi Covid-19 sehingga penderita TBC sebagai salah satu kelompok rentan karena memiliki penyakit penyerta yang akan dapat memperparah bila tertular Covid-19, sangat berhati-hati untuk pergi ke pelayanan kesehatan khawatir tertular. Rencana tindaklanjut tahun 2021 antara lain melengkapi Puskesmas dengan pelayanan pemeriksaan laboratorium serta meningkatkan jumlah RS yang melaksanakan strategi DOTS. Dan memperbanyak kunjungan rumah untuk melakukan pemeriksaan TBC.
- 12) **Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar.** Tahun 2021 terdapat 62.057 orang yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah penderita orang berisiko HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar adalah 21.143 orang (34%). Kendala yang dihadapi antara lain masih banyak masyarakat yang belum mau melakukan pemeriksaa deteksi dini HIV dan sarana dan prasarana yang kurang. Selain itu adanya pandemi Covid-19 sehingga orang yang berisiko terinfeksi HIV sebagai salah satu kelompok rentan yang akan dapat memperparah bila tertular Covid-19, sangat berhati-

hati untuk pergi ke pelayanan kesehatan khawatir tertular. Rencana tindak lanjut tahun 2022 adalah melakukan penyuluhan terhadap kelompok resiko HIV dan memenuhi sarana dan prasarana untuk pemeriksaan di Puskesmas dan rumah sakit.

c. Analisis Penerima Manfaat SPM Pekerjaan Umum

Untuk pemenuhan pelayanan dasar Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari jumlah target yang harus dilayani pada tahun 2021, diambil dari jumlah seluruh warga Kota Bekasi yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kota Bekasi, angka tersebut diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2021 Triwulan I. Adapun warga Negara yang berhak menerima layanan Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebanyak 2.469.814 orang, dimana realisasi pelayanan yang telah diberikan adalah 92.39 persen, yaitu sebesar 2.281.840 orang yang terdiri dari Warga Negara yang telah terlayani dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Dalam pemberian layanan Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari tersebut ada kriteria pemenuhan barang/jasa yang harus diberikan Pemerintah Kota Bekasi kepada penerima layanan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan terealisasi 18,44 Persen, dimana dari 2.469.814 orang yang berhak menerima Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari, namun baru 455.341 orang mendapatkan Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan, adapun target Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2021 sebanyak 2.469.814 orang. Dengan demikian sampai dengan Tahun 2021, baru 18.44 persen warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan SPAM Jaringan Perpipaan. Jumlah warga Negara yang telah terlayani SPAM Jaringan Perpipaan sebanyak 455.341 orang, capaian tersebut diperoleh dari 141.851 rumah yang memperoleh layanan SPAM Jaringan Perpipaan, baik dari PDAM Tirta Patriot, PDAM Tirta Bhagasasi, UPTD PALD, SPAM Komunal dan SPAM Swasta dikalikan dengan rasio sebesar 3.21, yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah penduduk Kota Bekasi Tahun 2021 sebanyak 2.469.814 dengan jumlah keluarga di Kota Bekasi tahun 2021 sebanyak 770.317. Adapun rincian penggunaan SPAM Jaringan Perpipaan di Kota Bekasi Tahun 2021 sebagai berikut: PDAM Tirta Bhagasasi 88.849 rumah; PDAM Tirta Patriot 37.905 rumah; UPTD PALD 1.910 rumah; SPAM Komunal 1.916 rumah; dan SPAM Swasta 11.271 rumah.
- 2) Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Layanan terealisasi 79,95 persen, warga yang menerima layanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

adalah seluruh warga Kota Bekasi yang menggunakan air tanah sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pokok air minumannya (setelah dikurangi warga yang memperoleh Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan dan warga yang belum memperoleh Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari). Sehingga warga yang menerima layanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan adalah sebanyak 1.826.499 orang, capaian tersebut diperoleh dari jumlah rumah tangga yang telah menerima layanan SPAM bukan jaringan perpipaan, yaitu 569.003 rumah dikalikan dengan rasio sebesar 3.21, yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah penduduk Kota Bekasi Tahun 2021 sebanyak 2.469.814 dengan jumlah keluarga di Kota Bekasi Tahun 2021 sebanyak 770.317. sehingga Jumlah warga Kota Bekasi yang belum menerima layanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan sebanyak 643.315 orang.

d. Analisis Penerima Manfaat SPM Perumahan Rakyat

Untuk pemenuhan pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota pada tahun 2021 realisasi N/A (*Not Available*), dikarenakan dengan melihat dan memperhatikan waktu kejadian serta tingkat kerusakan yang diakibatkan dari bencana dari bencana hidrometeorologi sesuai dengan Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Nomor 900/337-BPBD. Darlog tanggal 20 Mei 2021 tentang Permohonan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk bantuan masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Bekasi. Tim TAPD Kota Bekasi menilai resiko sosial yang rendah untuk tidak diberikan bantuan perbaikan atau kerusakan tempat tinggal dan fasilitas umum, sehingga penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan kepada korban bencana hidrometeorologi di Kota Bekasi tidak dapat diberikan. Hal ini tercantum didalam Nota Dinas Sekretaris Daerah Kota Bekasi selaku Ketua TAPD Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi Nomor 910/228-ND.TAPD tanggal 03 Juni 2021 perihal pertimbangan TAPD atas usulan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya pada status siaga darurat bencana hidrometeorologi.

e. Analisis Penerima Manfaat SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pada tahun 2021, telah dilaksanakan 99 kali kegiatan penegakan Perda dan Perkada di Kota Bekasi. Dari data di atas, jelas bahwa pada tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dapat mempertahankan kinerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dimana dari 99 kali kegiatan Penegakkan Perda



dan Perkada tidak ada korban terdampak penegakkan Perda dan Perkada, dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja tidak perlu memberikan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2) Sub Urusan Bencana

Data warga Negara yang berhak memperoleh layanan dasar informasi rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial kami sajikan pada tabel berikut:

Tabel II. 56 Rekapitulasi Jumlah Warga Negara yang Berhak Mendapatkan Pelayanan Dasar Informasi Rawan Bencana

No	Kejadian	Jumlah Korban		Ket
		Kepala Keluarga	Jiwa	
1.	Bencana Banjir	55.988	223.952	-
2.	Bencana Longsor	21	87	-
3.	Bencana Putting Beliang	195	635	-
4.	Terdampak Ekonomi Pandemi COVID -19	225.000	1.069.345	900.000 (Sembako) 169.345 (Nasi Bungkus)
5.	Positif COVID-19	-	15.572	Diberikan perawatan di Fasyankes dan Isolasi Mandiri
Jumlah		56.441	1.309.781	

Sumber: BPBD Kota Bekasi, 2021

3) Sub Urusan Kebakaran

Tahun 2021, di Kota Bekasi terdapat 254 kejadian kebakaran dan dari kejadian-kejadian kebakaran tersebut, jumlah orang yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah sebagai berikut:

Tabel II. 57 Jumlah Warga Yang Memperoleh Layanan Evakuasi dan Penyelamatan

No	Status Korban	Respon Time (170 kejadian)	Non Respon Time (34 kejadian)	Total (204 kejadian)
1.	Selamat	1623	55	1678
2.	Luka Luka	22	2	24
3.	Meninggal	4	-	4
Total		1649	57	1706

Sumber: Dinas Damkar Kota Bekasi, 2021

Dari tabel di atas, diketahui bahwa selama Tahun 2021, di Kota Bekasi terjadi 254 (dua ratus lima puluh empat) kali kebakaran, dimana sebanyak 219

kejadian terlayani secara Respon Time dan 35 kejadian diluar respon time. Dari 254 kejadian tersebut sebanyak 240 kejadian di wilayah Kota Bekasi dan 14 kejadian di luar Kota Bekasi. Untuk menghitung Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran diambil dari:

- Jumlah warga selamat dalam waktu respon time sebanyak 1623 orang;
- Jumlah warga Negara yang luka dalam waktu respon time sebanyak 22 orang.

Sementara warga yang dianggap tidak memperoleh layanan evakuasi dan penyelamatan adalah:

- Korban meninggal dalam waktu respon time sebanyak 4 orang;
- Korban selamat dalam waktu di luar respon time sebanyak 55 orang;
- Korban luka-luka dalam waktu di luar respon time sebanyak 2 orang.

Dengan demikian capaian kinerja Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban terdampak Kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi mencapai 96,42 persen, hal tersebut menunjukkan bahwa target pelayanan minimal Sub Urusan Kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 belum tercapai. Namun demikian capaian kinerja tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 89,36 persen, dengan demikian terdapat peningkatan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi sebesar 7,06 persen.

f. Analisis Penerima Manfaat SPM Sosial

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial.** Untuk pemenuhan pelayanan dasar Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti jumlah target yang harus dilayani pada tahun 2021 sebanyak 1.035 orang, diambil dari data Basis Data Terpadu dan pengaduan melalui Media Sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Bekasi khusus untuk menerima pengaduan dan pemberian layanan kedaruratan urusan sosial. Adapun realisasi pelayanan yang diberikan adalah 100 persen, dimana seluruh warga Negara yang berhak menerima layanan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti terlayani sebanyak 1.035 orang.
- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial.** Untuk pemenuhan pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial jumlah target yang harus dilayani pada tahun 2021 sebanyak 1.708 orang, diambil dari data Basis Data Terpadu dan pengaduan melalui Media Sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Bekasi khusus untuk menerima pengaduan dan pemberian layanan kedaruratan urusan sosial. Adapun realisasi pelayanan yang diberikan adalah 100 persen, dimana

seluruh warga Negara yang berhak menerima layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial terlayani sebanyak 1.708 orang.

- 3) **Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial.** Untuk pemenuhan pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial jumlah target yang harus dilayani pada tahun 2021 sebanyak 888 orang, diambil dari data Basis Data Terpadu dan pengaduan melalui Media Sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Bekasi khusus untuk menerima pengaduan dan pemberian layanan kedaruratan urusan sosial. Adapun realisasi pelayanan yang diberikan adalah 100 persen, dimana seluruh warga Negara yang berhak menerima layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial terlayani sebanyak 888 orang.
- 4) **Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial.** Untuk pemenuhan pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial jumlah target yang harus dilayani pada tahun 2021 sebanyak 736 orang, diambil dari data Basis Data Terpadu dan pengaduan melalui Media Sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Bekasi, khusus untuk menerima pengaduan dan pemberian layanan kedaruratan urusan sosial. Adapun realisasi pelayanan yang diberikan adalah 100 persen, dimana seluruh warga Negara yang berhak menerima layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial terlayani sebanyak 736 orang.
- 5) **Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota.** Untuk jenis pelayanan dasar Perlindungan dan jaminan sosial korban bencana di daerah kab/kota pada tahun 2021 terealisasi 100 persen, dimana terdapat terdapat beberapa kali bencana alam dan bencana sosial yang harus ditangani, diantaranya bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung. Secara garis besar jumlah warga Negara yang berhak mendapatkan pelayanan dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota di Kota Bekasi pada tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II. 58 Rekapitulasi jumlah warga Negara yang berhak mendapatkan pelayanan dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana

No	Kejadian	Jumlah Korban		Ket
		Kepala Keluarga	Jiwa	
1.	Bencana Banjir	2.814	11.250	Sumber: Dinas Sosial
2.	Bencana Longsor	2	8	Sumber: Dinas Sosial
3.	Bencana Putting Beliung	302	1.208	Sumber: Dinas Sosial
4.	Kebakaran	2	8	
5.	COVID-19	-	424	Bantuan Pemulasaran oleh Dinas Sosial
Jumlah		3.120	12.898	

Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi, 2021

2.5.4 Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Pencapaian SPM

a. SPM Pendidikan

Berdasarkan oleh lintas perangkat Daerah untuk menyelesaikan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan, dengan dikeluarkannya Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 069/1200/SETDA.Tapem tanggal 15 Oktober 2021 Tentang Penyampaian Data Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Bekasi 2021 diperoleh data permasalahan dan solusi penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan sebagai berikut:

Tabel II. 59 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Pendidikan
Hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1.	Perencanaan		
	Untuk kegiatan penarikan kembali calon belajar paket A, B, dan C yang tidak mampu telah direncanakan namun karena adanya dampak COVID-19 tidak dapat terlaksana	Diupayakan dari sumber lain seperti kejar Paket A, Paket B dan paket C	Diupayakan pada anggaran perubahan dan diusulkan lagi tahun depan
2.	Koordinasi		
	-	-	-
3.	Pendanaan		



No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
	Akibat dampak COVID-19 terjadinya anggaran yang terkena refocusing	Memaksimalkan dana anggaran yang tersedia	Diupayakan pada anggaran perubahan dan diusulkan lagi tahun depan
4.	Lain-lain		
	-	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi, 2021

b. SPM Kesehatan

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 100/6920/SETDA.Tapem tanggal 10 November 2021 tentang Monitoring dan Evaluasi Terpadu Penerapan Standar Pelayanan Minimal diperoleh data permasalahan dan solusi penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan sebagai berikut:

**Tabel II. 60 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Kesehatan
hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021**

No	Indikator SPM	Permasalahan			Langkah-Langkah Yang Akan Dan Seharusnya Agar Capaian Kinerja Meningkat
		Faktor Penyebab Ketidakcapaian Target			
		Faktor Teknis Substansi Indikator	Faktor Dukungan Program Kegiatan Anggaran	Faktor Dukungan Personil	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	• Pemeriksaan <i>Antenatal Care</i> (ANC) kurang optimal dikarenakan: a. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan <i>Antenatal Care</i> (ANC) pada ibu hamil yaitu kunjungan ke 4 (trimester 3) sebagai salah satu upaya percepatan penurunan AKI dan AKB di Kota Bekasi	Anggaran yang didapatkan sudah cukup besar hanya waktu pelaksanaan kegiatan belum semua kegiatan dapat dilaksanakan terkait adanya pandemi covid-19	Mobilitas pegawai di Puskesmas sangat tinggi sehingga pergantian pemegang program sangat cepat, pemahaman terhadap DO, target dan indikator belum dapat dipahami dengan baik	• Melakukan penyuluhan terkait dengan pentingnya melakukan pemeriksaan <i>Antenatal Care</i> (ANC) dari awal kehamilan • Memperbaiki pencatatan dan pelaporan di Kohort ibu dengan melaksanakan kegiatan orientasi pencatatan dan pelaporan melalui e Kohort • Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelayanan, pencatatan dan



No	Indikator SPM	Permasalahan			Langkah-Langkah Yang Akan Dan Seharusnya Agar Capaian Kinerja Meningkat
		Faktor Penyebab Ketidakcapaian Target			
		Faktor Teknis Substansi Indikator	Faktor Dukungan Program Kegiatan Anggaran	Faktor Dukungan Personil	
		b.Dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan ibu hamil enggan melakukan pemeriksaan <i>Antenatal Care</i> (ANC) • Kurangnya koordinasi lintas program dan lintas sektor sehingga pencatatan dan pelaporan kohort ibu masih kurang optimal			pelaporan kesehatan ibu hamil di fasilitas Kesehatan • Optimalisasi serah terima hasil pekerjaan yang telah dilakukan untuk pegawai yang dimutasi kepada pemegang program yang baru
2	Layanan Kesehatan Ibu Bersalin	• Dampak pandemic Covid 19 dimana masyarakat enggan melakukan pemeriksaan kesehatan sehingga terlambatnya deteksi dini kegawatdaruratan ibu bersalin. • Kurangnya koordinasi lintas program dan lintas sektor sehingga pencatatan dan pelaporan kohort ibu masih kurang optimal.	Anggaran yang didapatkan sudah cukup besar hanya waktu pelaksanaan kegiatan belum semua kegiatan dapat dilaksanakan terkait adanya pandemi covid-19		Layanan Kesehatan Ibu Bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	• Dampak pandemi Covid 19 dimana masyarakat enggan melakukan pemeriksaan kesehatan	Anggaran yang didapatkan sudah cukup besar hanya waktu pelaksanaan kegiatan belum semua kegiatan	3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir



No	Indikator SPM	Permasalahan			Langkah-Langkah Yang Akan Dan Seharusnya Agar Capaian Kinerja Meningkat
		Faktor Penyebab Ketidakcapaian Target			
		Faktor Teknis Substansi Indikator	Faktor Dukungan Program Kegiatan Anggaran	Faktor Dukungan Personil	
		sehingga terlambatnya deteksi dini kegawatdaruratan pada bayi. • Kurangnya koordinasi lintas program dan lintas sektor sehingga pencatatan dan pelaporan kohort bayi masih kurang optimal.	dapat dilaksanakan terkait adanya pandemi covid-19		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	1. Dampak pandemi Covid 19 dimana Posyandu tidak dibuka dan masyarakat enggan melakukan pemeriksaan kesehatan balita secara mandiri dengan buku KIA Versi 2020 maupun sweeping yang dilakukan oleh fasilitas Kesehatan a. Kurangnya koordinasi lintas program dan lintas sektor sehingga pencatatan dan pelaporan kohort balita masih kurang optimal. b. Tidak semua orang tua balita mengisi google form Pelayanan Kesehatan Balita	Anggaran yang didapatkan sudah cukup besar hanya waktu pelaksanaan kegiatan belum semua kegiatan dapat dilaksanakan terkait adanya pandemi Covid-19	Mobilitas pegawai di Puskesmas sangat tinggi sehingga pergantian pemegang program sangat cepat, pemahaman terhadap DO, target dan indikator belum dapat dipahami dengan baik	• Melakukan penyuluhan terkait optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan balita menuju generasi muda yang unggul dan berkualitas • Memperbaiki pencatatan dan pelaporan di Kohort Balita dengan melaksanakan kegiatan orientasi pencatatan dan pelaporan e Kohort • Melakukan monitoring dan evaluasi ke Kader Posyandu dan Guru PAUD/TK/RA sebagai tindak lanjut hasil Orientasi SDIDTK pada Kader dan Guru PAUD/TK/RA yang sudah dilakukan di tahun 2020 dan tahun 2021



No	Indikator SPM	Permasalahan			Langkah-Langkah Yang Akan Dan Seharusnya Agar Capaian Kinerja Meningkat
		Faktor Penyebab Ketidakcapaian Target			
		Faktor Teknis Substansi Indikator	Faktor Dukungan Program Kegiatan Anggaran	Faktor Dukungan Personil	
					• Memperkuat jejaring kemitraan lintas program dan lintas sektor dalam pencatatan dan pelaporan. • Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan, pencatatan dan pelaporan kesehatan balita di fasilitas kesehatan • Menyebarkan Kembali Google Form Pelayanan Kesehatan Balita Kepada Kader dan Guru PAUD/TK/RA • Optimalisasi serah terima hasil pekerjaan yang telah dilakukan untuk pegawai yang dimutasi kepada pemegang program yang baru.
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	• Dampak pandemi Covid 19 mengakibatkan pembelajaran secara online (PJJ) sehingga penjangkaran tidak dapat dilakukan di sekolah • Orang tua murid banyak yang tidak mengisi google form Penjangkaran • Belum terbentuknya Posyandu Remaja di Kota Bekasi	Anggaran yang didapatkan sudah cukup besar hanya waktu pelaksanaan kegiatan belum semua kegiatan dapat dilaksanakan terkait adanya pandemi covid-19	Mobilitas pegawai di Puskesmas sangat tinggi sehingga pergantian pemegang program sangat cepat, pemahaman terhadap DO, target dan indikator belum dapat	• Melakukan penyuluhan terkait dengan kesehatan reproduksi remaja • Koordinasi dengan pihak sekolah dalam melaksanakan model sekolah sehat dan melaksanakan kegiatan orientasi model sekolah sehat • Menyebarkan kembali google form penjangkaran



No	Indikator SPM	Permasalahan			Langkah-Langkah Yang Akan Dan Seharusnya Agar Capaian Kinerja Meningkat
		Faktor Penyebab Ketidakcapaian Target			
		Faktor Teknis Substansi Indikator	Faktor Dukungan Program Kegiatan Anggaran	Faktor Dukungan Personil	
		Masih sedikitnya Puskesmas PKPR		dipahami dengan baik	- Membentuk Posyandu Remaja sebagai tindak lanjut hasil pertemuan orientasi Posyandu Remaja - Melaksanakan Pembinaan Pelayanan, Pencatatan dan Pelaporan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Puskesmas - Optimalisasi serah terima hasil pekerjaan yang telah dilakukan untuk pegawai yang dimutasi kepada pemegang program yang baru
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (KB)	- Target terlalu tinggi - Belum semua KUA berkoordinasi dengan Puskesmas berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan calon pengantin. - Belum dilakukan pendataan sasaran KB aktif Gakin, KB aktif 4T - Adanya Pandemi Covid-19	Anggaran yang didapatkan untuk pelaksanaan kegiatan program KB belum teralokasikan	Mobilitas pegawai di Puskesmas sangat tinggi sehingga pergantian pemegang program sangat cepat, pemahaman terhadap DO, target dan indikator belum dapat dipahami dengan baik	- Melakukan penyuluhan terkait dengan pentingnya pemeriksaan kesehatan calon pengantin dan perencanaan KB sebagai upaya percepatan penurunan aKI dan AKB - Pembuatan MOU antara Dinkes dan Kemenag Kota Bekasi berkaitan pemeriksaan kesehatan calon pengantin sebagai salah satu syarat nikah. - Kegiatan promosi KB baik di Posyandu,



No	Indikator SPM	Permasalahan			Langkah-Langkah Yang Akan Dan Seharusnya Agar Capaian Kinerja Meningkat
		Faktor Penyebab Ketidakcapaian Target			
		Faktor Teknis Substansi Indikator	Faktor Dukungan Program Kegiatan Anggaran	Faktor Dukungan Personil	
					maupun masyarakat, kegiatan safari KB, distribusi alkon ke BPM, Pelayanan KB dalam gedung • Mengusulkan perencanaan kebutuhan anggaran • Optimalisasi serah terima hasil pekerjaan yang telah dilakukan untuk pegawai yang dimutasi kepada pemegang program yang baru.
7	Pelayananan Kesehatan Pada Anak Usia Produktif	• Banyak pelayanan kesehatan yang tidak beroperasi karena pandemic COVID 19 • Proses belajar mengajar tidak tatap muka	Pendanaan untuk BHP yang memadai sesuai sasaran yang ada	• Adanya pergantian pemegang program	• Mengoptimalkan peran posbindu remaja • Meningkatkan Kerjasama dengan fasyankes lain dalam hal pencatatan/ pelaporan • Pergantian pemegang program harus disertakan dengan serah terima pekerjaan dan sharing knowledge.
8	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	• Kurangnya informasi mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala pada usia lanjut • Dampak pandemi Covid 19 dimana pelayanan	Anggaran yang didapatkan sudah cukup besar hanya waktu pelaksanaan kegiatan belum semua kegiatan dapat dilaksanakan terkait adanya	Mobilitas pegawai di Puskesmas sangat tinggi sehingga pergantian pemegang program sangat cepat, pemahama	• Memperkuat Koordinasi Lintas Sektor dan lintas Program dalam pelayanan, pencatatan dan pelaporan kesehatan usia lanjut • Monitoring dan Evaluasi pelayanankeseha



No	Indikator SPM	Permasalahan			Langkah-Langkah Yang Akan Dan Seharusnya Agar Capaian Kinerja Meningkat
		Faktor Penyebab Ketidakcapaian Target			
		Faktor Teknis Substansi Indikator	Faktor Dukungan Program Kegiatan Anggaran	Faktor Dukungan Personil	
		Posbindu diberhentikan sementara dan masyarakat enggan melakukan pemeriksaan kesehatan lanjut usia dan skrining jempit bola yang dilakukan oleh fasilitas Kesehatan • Kurangnya koordinasi lintas program dan lintas sektor sehingga pencatatan dan pelaporan masih kurang optimal. • Pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan jejaring puskesmas (seperti fasyankes swasta dll) ke puskesmas • Adanya usia lanjut yang mendapatkan layanan diluar wilayah kerja kabupaten/kota • Ketersediaan sumber daya terbatas • Adanya kematian/mortalitas usia lanjut • Perpindahan penduduk/migrasi • Target proyeksi cukup tinggi	pandemi covid-19	n terhadap DO, target dan indikator belum dapat dipahami dengan baik	tan lansia di Puskesmas sebagai tindak lanjut hasil Orientasi Care Giver yang sudah dilakukan pada tahun 2020. • Sosialisasi dan penyuluhan kesehatan secara kontinue melalui kunjungan rumah • Melaksana-kan Kegiatan Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Lansia • Optimalisasi serah terima hasil pekerjaan yang telah dilakukan untuk pegawai yang dimutasi kepada pemegang program yang baru
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	• Banyak pelayanan kesehatan yang tidak beroperasi			• Meningkatkan edukasi kepada penderita hipertensi agar



No	Indikator SPM	Permasalahan			Langkah-Langkah Yang Akan Dan Seharusnya Agar Capaian Kinerja Meningkat
		Faktor Penyebab Ketidakcapaian Target			
		Faktor Teknis Substansi Indikator	Faktor Dukungan Program Kegiatan Anggaran	Faktor Dukungan Personil	
		karena pandemic COVID 19 • Masyarakat penderita hipertensi tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan • Belum optimalnya pencatatan pelaporan			rutin memeriksakan diri ke fasyankes sehingga terpantau • Mengoptimalkan peran posbindu PTM • Mengoptimalkan pencatatan dan pelaporan di puskesmas dan rumah sakit
10	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	• Banyak pelayanan kesehatan yang tidak beroperasi karena pandemic COVID 19			• Melakukan koordinasi dengan pelayanan Kesehatan swasta untuk mendapatkan laporan yang optimal
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgi)	• Belum adanya kendaraan operasional untuk merujuk pasien ODGJ		Tetap melakukan Kerjasama dengan panti rehabilitasi dan puskesmas	• Tetap menjalin koordinasi terus menerus dengan panti rehabilitasi dan melakukan monitoring laporan puskesmas
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terifeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	• Belum ada penetapan sasaran SPM tingkat Kota Bekasi, yang berbasis NIK • Dari 46 RS baru 14 yang melaporkan data skrining HIV • RS sudah melaksanakan skrining dan memiliki TIM terlatih tetapi belum melakukan pencatatan & pelaporan di SIHA	• Pendanaan Pembentukan PPM TB HIV di seluruh wilayah kelurahan dan kecamatan se-Kota Bekasi • Pendanaan Penyuluhan Kesehatan ke seluruh lapisan masyarakat • Pendanaan Penyusunan Rencana Aksi Daerah untuk program TB		• Mengusulkan dalam Perencanaan Anggaran APBD dan BOK • Melakukan penyuluhan terkait TB HIV ke seluruh lapisan masyarakat • Memperkuat system pencatatan dan pelaporan yang sudah ada melalui sosialisasi dan monitoring

No	Indikator SPM	Permasalahan			Langkah-Langkah Yang Akan Dan Seharusnya Agar Capaian Kinerja Meningkat
		Faktor Penyebab Ketidakcapaian Target			
		Faktor Teknis Substansi Indikator	Faktor Dukungan Program Kegiatan Anggaran	Faktor Dukungan Personil	
		• RS sudah melaksanakan skrining, tetapi belum mempunyai TIM terlatih sehingga belum mampu melakukan pencatatan & pelaporan • Belum semua bidan melaksanakan ANC 10 T (T ke-8) • Belum semua lapisan masyarakat memahami ttg TB HIV	HIV • Pendanaan Peningkatan Kapasitas SDM		

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

c. SPM Pekerjaan Umum

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 yang dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 069/1200/SETDA.Tapem tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penyampaian Data Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021 diperoleh data permasalahan penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut:

Tabel II. 61 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1.	Perencanaan		
	1. Kurangnya tenaga ahli yang memahami penyusunan kelayakan studi dan DED (Detail Engineering Design) mengenai system pengelolaan air limbah domestic 2. Dasar dalam penentuan kebutuhan air minum berbeda tiap OPD, contohnya dalam menentukan jumlah penduduk, data yang	1. Mencari tenaga ahli/sumber daya manusia yang mengerti perencanaan 2. Adanya pelatihan atau sertifikasi tenaga ahli 3. Koordinasi dengan OPD terkait	Menambah sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan perencanaan teknis Mengikuti pelatihan/Bimbingan teknis Meningkatkan koordinasi antar OPD

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
	digunakan bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Badan Pusat Statistik. Sumber air baku yang dapat dijadikan air minum sulit dicari, selain itu dasar kebutuhan pemenuhan O Babs dan untuk pembangunan SPALDT diperlukan data yang akurat		
2.	Koordinasi		
	1. Kurangnya koordinasi dengan Dinkes dan Bappelitbangda 2. Masih terdapat penolakan warga untuk diberikan akses ipal kumunal dan akses air minum perpipaan karena sumber air minum dari air tanah masuk layak	1. Melakukan koordinasi dengan Dinkes dan Bappelitbangda 2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat warga untuk mengetahui dan mencari solusi Bersama	1. Meningkatkan dialog dan koordinasi dengan Dinkes dan Bappelitbangda 2. Terus meningkatkan dialog dan koordinasi dengan perangkat warga
3.	Pendanaan		
	1. Terbatasnya dana pembangunan fisik pembangunan bidang Air Minum dan bidang Sanitasi 2. Terbatasnya akses untuk memperoleh sumber dana selain dari APBD dan DAK kegiatan Bidang Air Minum dan Bidang Sanitasi	Melakukan koordinasi dan sosialisasi rencana pembangunan bidang Air Minum dan Bidang Sanitasi kepada OPD terkait pembiayaan pembangunan infrastruktur	1. Mempersiapkan perencanaan dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan pengajuan untuk bantuan dari pusat atau kerjasama dengan swasta 2. Mencari informasi sumber-sumber pendanaan bidang air minum dan bidang sanitasi
4.	Lain-lain		
	Sulitnya mendapatkan data untuk penyusunan pelaporan dari OPD terkait dan masyarakat penyelenggaraan air minum	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dan masyarakat untuk mencari solusi bersama terkait data untuk penyusunan pelaporan	Terus meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dan masyarakat

Sumber: Laporan SPM Kota Bekasi 2021, Diolah

d. SPM Perumahan Rakyat

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 yang dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 069/1200/SETDA.Tapem tanggal 15 Oktober 2021 tentang penyampaian Data Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota



Bekasi Tahun 2021 diperoleh data permasalahan penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

Tabel II. 62 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1.	Perencanaan		
	1. Belum ada anggaran peningkatan rutilahu akibat bencana di Disperkimtan 2. Data warga yang berhak memperoleh layanan diperoleh setelah terjadi kejadian bencana dari Disperkimtan selaku estimator 3. Belum menganggarkan untuk pembangunan kembali atau rehabilitasi rumah yang terkena relokasi program pemerintah	1. Melakukan perencanaan dan penganggaran dalam rencana kerja dinas 2. Mengidentifikasi kerusakan rumah akibat bencana sesuai dengan hasil survey untuk diusulkan dalam program rutilahu	Penanganan rutilahu akibat bencana dimasukkan dalam target Renja Dinas
2.	Koordinasi		
	Masih kurang optimalnya koordinasi lintas perangkat daerah	Karena menggunakan dana BTT diperlukan koordinasi yang lebih optimal dengan BPBD. Dinsos dan BPKAD	Membuat Standar Operasional Prosedur penanganan rutilahu akibat bencana
3.	Pendanaan		
	Penyediaan dan rehabilitasi akibat bencana dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial yang tidak direncanakan pada BPKAD Kota Bekasi	Membuat usulan kegiatan rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan apabila terdapat kekurangan anggaran dapat diubah di APBD-P	Mengajukan usulan dan pendanaan untuk kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana

Sumber: Dinas Perkimtan Kota Bekasi, 2021

e. SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 100/6920/SETDA.Tapem tanggal 10 November 2020 tentang Monitoring dan Evaluasi Terpadu Penerapan Standar Pelayanan Minimal diperoleh data permasalahan penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut:

**Tabel II. 63 Permasalahan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan
Kententraman dan Ketertiban Umum**

No	Uraian	Permasalahan
1.	Pengumpulan data	Karena padatnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, berdampak pada banyaknya kegiatan yang tidak terdokumentasikan dengan baik sehingga berakibat pada terhambatnya proses pengumpulan data penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kententraman dan Ketertiban Umum.
2.	Penghitungan kebutuhan	Dalam penghitungan kebutuhan personil, banyaknya regulasi dan kebutuhan di lapangan berdampak pada sulitnya melakukan penghitungan logis kebutuhan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
3.	Perencanaan dan penganggaran	Karena di tahun 2021 nomenklatur kegiatannya tidak ada, maka Satuan Polisi Pamong Praja tidak bisa menetapkan Indikator SPM Sub Urusan Kententraman dan Ketertiban Umum menjadi Indikator Program/Outcome, karena dikhawatirkan akan membawa dampak penganggaran, sehingga indikator SPM tersebut ditempatkan sebagai Indikator Kegiatan pada Kegiatan Penanganan Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum di Tahun Anggaran 2022.
4.	Pelaksanaan	Rasio pemenuhan barang/jasa dan personil anggota Satpol PP yang ada belum sebanding dengan jumlah personil Satpol PP yang ada, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2019, sehingga dikhawatirkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidak bisa mempertahankan kondisi Zero Korban Terdampak Penegakan Perda dan Perkada di tahun-tahun berikutnya.
5.	Pelaporan	Tidak ada kendala yang berarti dikarenakan hasil FGD yang difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan berdampak pada peningkatan tertib administrasi dan pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Sumber: Satpol PP Kota Bekasi, 2021

2) Sub Urusan Bencana

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 100/6920/SETDA.Tapem tanggal 10 November 2021 tentang Monitoring dan Evaluasi Terpadu Penerapan Standar Pelayanan Minimal diperoleh data permasalahan penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana sebagai berikut:

**Tabel II. 64 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sub Urusan
Bencana hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021**

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1.	Perencanaan		
	Belum adanya Kajian resiko bencana untuk penanganan banjir, angin puting beliung dan bencana sosial	Perlu adanya kajian resiko bencana untuk penanganan banjir, angin puting beliung dan bencana sosial	Pada tahun 2021 akan dilaksanakan kegiatan kajian rencana bencana
2.	Koordinasi		
	Kurang efektifnya koordinasi antar perangkat Daerah terkait, yang disebabkan Grade BPBD hanya dipimpin pejabat struktur eselon III a	Harus dilakukan perubahan SOTK BPBD dengan Grade setingkat dengan Dinas Daerah	Pengajuan Grade BPBD menjadi setara dengan Dinas Daerah
3.	Pendanaan		
	Banyak indikator dan Sub indikator SPM Sub Urusan Bencana yang belum memperoleh alokasi anggaran	Perlu adanya alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana	Melakukan perubahan renstra dengan memasukkan indikator dan sub indikator SPM Sub Urusan Bencana, sehingga bias mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2021
4.	Lain-lain		
	1) Kurangnya sarana dan prasarana operasional BPBD 2) Kurangnya SDM Kebencanaan yang terlatih dan tersertifikasi	1) Perujukan sarana dan prasarana operasional BPBD 2) Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kebencanaan yang terlatih dan tersertifikasi	1) Menyampaikan Pengajuan pengadaan sarana dan prasarana Operasional BPBD 2) Pengajuan Diklat dan Bimtek Kebencanaan

Sumber: BPBD Kota Bekasi, 2021

3) Sub Urusan Kebakaran

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 100/6920/SETDA.Tapem tanggal 10 November 2021 tentang Monitoring dan Evaluasi Terpadu Penerapan Standar Pelayanan Minimal diperoleh data permasalahan dan solusi penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran sebagai berikut:

Tabel II. 65 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1.	Perencanaan		
	Kurangnya sarana dan prasarana Kurangnya SDM yang terlatih (professional)	Penambahan sarana dan prasarana Diklat	Membuat usulan pemenuhan sarana prasarana ke <i>stakeholder</i> . Mengusulkan program dan mengirimkan peserta didik
2.	Koordinasi		
	Kurang maksimalnya fungsi koordinasi	Memaksimalkan koordinasi	Meningkatkan intensitas koordinasi
3.	Pendanaan		
	Terbatasnya alokasi anggaran pendukung SPM	Efektivitas anggaran	Meningkatkan intensitas koordinasi
4.	Lain-lain		
	-	-	-

Sumber: Diolah, 2021

f. SPM Sosial

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 yang dilaksanakan, diperoleh data permasalahan dan solusi penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial sebagai berikut:

Tabel II. 66 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Urusan Sosial hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
1.	Perencanaan		
	Data PPKS	Melakukan Verifikasi dan validasi terhadap Data PPKS	Melakukan kegiatan pendataan PPKS
2.	Koordinasi		
	-	-	-
3.	Pendanaan		
	Minimnya anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial.	Memetakan kebutuhan anggaran sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar	Mengusulkan kebutuhan ke bidang terkait anggaran
4.	Lain-lain		
	Minimnya Sarana dan Prasana	Memetakan kebutuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang SPM	Mengusulkan kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana
	Minimnya SDM	Melakukan rekrutmen dan seleksi terhadap SDM yang memahami tentang background kesejahteraan sosial	Mengusulkan kegiatan kebutuhan penerima tenaga kesejahteraan sosial

Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi, 2021

2.6. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Kota Bekasi memiliki beberapa BUMD yang menunjang kinerja maupun layanan pemerintah daerah kepada masyarakat. BUMD tersebut bergerak di berbagai sektor seperti Air Minum; Perbankan; Perdagangan Barang dan Jasa; Migas; Energi serta Energi Terbaru dan Terbarukan. Eksistensi BUMD yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Bekasi merupakan bentuk kekuatan dan kemandirian Kota Bekasi.

1. Perumda Tirta Patriot

Merujuk Perda Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot dijelaskan dalam Ketentuan Umum bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot (Perumda Tirta Patriot) adalah salah satu BUMD Kota Bekasi yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak dalam bidang penyediaan pelayanan air minum di Daerah Kota.

Bidang Kegiatan Usaha Perumda Tirta Patriot di bidang (Pasal 5 Perda Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2021):

- a. pengelolaan dan pendistribusian air bersih dan air minum kepada masyarakat serta pelaksanaan pemungutan tarif air bersih dan air minum pengelolaan sanitasi dan air limbah.
- b. usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perumda Tirta Patriot.

Sementara besarnya modal dasar dan modal disetor Perumda Tirta Patriot, yaitu (Pasal 16, Perda Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2021):

- a. Modal dasar Perumda Tirta Patriot sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah).
- b. Modal yang telah disetor kepada Perumda Tirta Patriot sebesar Rp.266.665.975.217 (dua ratus enam puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
- c. Modal yang disetor merupakan modal yang telah disertakan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember Tahun 2019 berdasarkan hasil audit.

- d. Pemenuhan Modal Dasar dilakukan secara bertahap dengan dianggarkan terlebih dahulu dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

2. PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda)

Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi (PT. BPRS Patriot/Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi yang bergerak di bidang Perbankan Syariah (Ketentuan Umum Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pemerintah Kota Bekasi Menjadi Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi).

BPRS Patriot Bekasi dengan bidang usaha perbankan syariah ini memiliki ruang lingkup usaha yaitu:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
- b. memberikan bantuan pembiayaan dan melakukan pembinaan khususnya terhadap para pengusaha mikro atau kecil.
- c. melakukan penyaluran dana melalui: (a) transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istishna, ijarah, salam, dan jual beli lainnya; (b) pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip, mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya; (c) pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip, rahn, dan qardh.
- d. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) sepanjang disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional.
- e. memberikan jasa lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. mengelola kegiatan dana sosial berupa: zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS); dan wakaf tunai.

Sementara dari aspek modal, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2020, Modal Dasar Perseroda BPRS Patriot Bekasi ditetapkan sebesar Rp.140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah). Modal ditempatkan dan modal disetor PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal Dasar. Kemudian, modal PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota. Sementara, modal disetor PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) sebesar Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah) terdiri dari:

- a. Pemerintah Daerah Kota sebesar Rp. 34.550.000.000 (tiga puluh empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);

- b. Koperasi Syariah sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

3. PT. Mitra Patriot (Perseroda)

Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi yang selanjutnya disebut PT. Mitra Patriot (Perseroda) adalah BUMD Kota Bekasi yang bergerak di bidang aneka usaha (Ketentuan Umum Perda Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Patriot). Kegiatan usaha yang dijalankan yaitu di bidang perdagangan barang dan jasa, antara lain (Pasal 5 Perda Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2020):

- a. Pengelolaan transportasi.
- b. Pengolahan limbah padat dan cair.
- c. Pengelolaan parkir.
- d. Reklame/periklanan.
- e. Percetakan.
- f. Konstruksi.
- g. Telekomunikasi.
- h. Perdagangan Umum.
- i. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya PT. Mitra Patriot (Perseroda).

Dalam melaksanakan usahanya, PT. Mitra Patriot (Perseroda) dapat melakukan (Pasal 6 Perda Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2020):

- a. hubungan kerja sama dengan pihak lain dalam bidang sejenis; dan
- b. melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sementara aspek permodalan diatur dalam Pasal 8 Pasal 6 Perda Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Modal Dasar Perseroda Mitra Patriot ditetapkan sebesar Rp.127.231.908.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah).
- b. Modal yang disetor sebesar Rp.31.807.977.000,- (Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- c. Modal sebagaimana dimaksud ayat (2), merupakan modal yang telah disetor dalam bentuk uang dan barang milik daerah oleh Pemerintah Kota Bekasi.

- d. Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan modal yang telah disertakan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Mitra Patriot Kota Bekasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik.
- e. Pemenuhan Modal Dasar dilakukan secara bertahap dengan dianggarkan terlebih dahulu dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

4. PT. Minyak dan Gas Bumi (Perseroda)

Perseroan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi (PT. Migas/Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi yang bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi kegiatan hulu minyak dan gas bumi pada wilayah dan di luar wilayah administratif Kota Bekasi (Ketentuan Umum Perda Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Minyak dan Gas Bumi).

Perseroda Migas melakukan kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas Bumi, yaitu melakukan eksplorasi dan eksploitasi (Pasal 5 Perda Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2022). Dalam melaksanakan usahanya, Perseroda Migas dapat melakukan: hubungan kerja sama dengan pihak lain dalam bidang sejenis; dan melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara dari aspek permodalan, modal dasar PT. Migas (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah). Modal tersebut disetor sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 9, Perda Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2022).

5. PT. Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda)

Perusahaan Perseroan Daerah Sinergi Patriot Bekasi yang selanjutnya disebut PT.Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda) adalah BUMD yang bergerak dibidang Hulu dan Hilir minyak dan gas bumi, energi terbaru dan terbarukan (Ketentuan Umum Perda Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Sinergi Patriot Bekasi). Kegiatan Usaha PT.Sinergi Patriot Bekasi meliputi (Pasal 5, Perda Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2021):

- a. Kegiatan usaha PT.Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda) yaitu: minyak dan gas bumi di sektor hilir Daerah Kota; sektor energi, energi baru dan terbarukan di Daerah Kota; dan jasa penunjang lainnya.



- b. Untuk pengembangan usaha, dapat bekerja sama dengan pihak swasta di Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri atas persetujuan RUPS.

Sementara dari aspek permodalan, merujuk Perda Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2021, Pasal 9, modal dasar PT. Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda) adalah sebesar Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah). Modal dimaksud disetor Pemerintah Daerah Kota sampai dengan 31 Desember 2020 pada PT. Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda) sebesar Rp9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah).

BAB 03

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH





GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Mekanisme pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan pada masa RPJMD sebelumnya. Pada tahun 2019, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui peraturan Pemerintah ini, struktur belanja daerah yang awalnya diklasifikasi dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung, dirubah menjadi 4 (empat) akun yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Perubahan struktur belanja ini juga diikuti dengan perubahan dari sisi kodefikasi. Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negerii Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mengatur tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan daerah dan keuangan daerah, menetapkan struktur kode mulai dari program, kegiatan, sub kegiatan, pendapatan, belanja, pembiayaan, organisasi dan termasuk juga kodefikasi fungsi.

Perubahan mekanisme pengelolaan keuangan daerah ini penting dicatat ketika melakukan analisis terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah sendiri, dalam konteks penyusunan RPD, sangat dibutuhkan untuk melihat kemampuan pendanaan kota Bekasi untuk penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis keuangan daerah memuat analisis terhadap pendapatan, analisis terhadap belanja, dan analisis terhadap pembiayaan. Analisis kinerja masa lalu ini, menjadi acuan untuk melakukan proyeksi kemampuan pendanaan di masa datang.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Peninjauan terhadap kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk dapat mengetahui potensi sumber daya keuangan Pemerintah Kota Bekasi. Peninjauan ini dilakukan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Bekasi selama beberapa tahun terakhir. Kinerja keuangan masa lalu ini mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah.

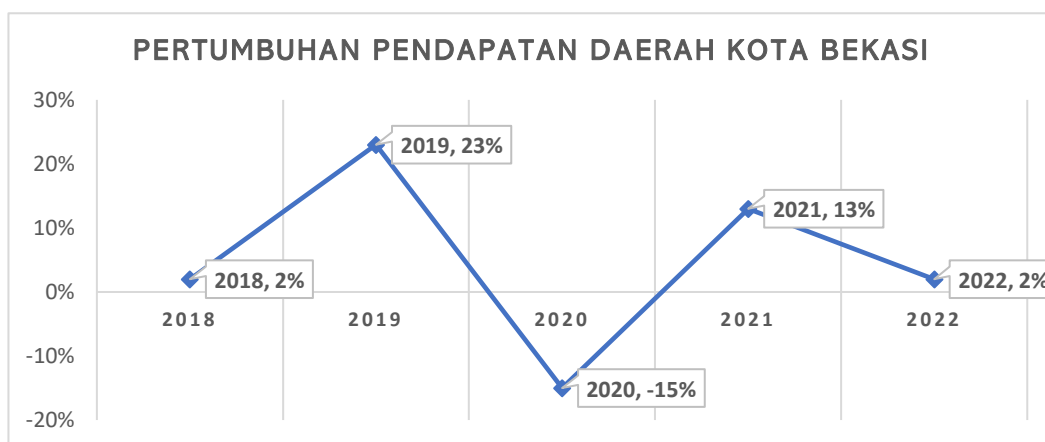
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD ini menguraikan perkembangan kinerja tiga komponen keuangan daerah, yaitu kinerja pengelolaan Pendapatan Daerah, kinerja pengelolaan Belanja Daerah, dan kinerja pengelolaan Pembiayaan Daerah.

1) Kinerja pengelolaan Pendapatan Kota Bekasi

Pendapatan daerah dibagi dalam 3 kategori: pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer, dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Pembahasan terkait kinerja pengelolaan pendapatan daerah akan difokuskan pada analisis terkait masing masing kelompok pendapatan. Time frame yang digunakan sebanyak 5 tahun untuk dapat melihat pola pendapatan serta dapat melakukan proyeksi pendapatan dengan lebih akurat.

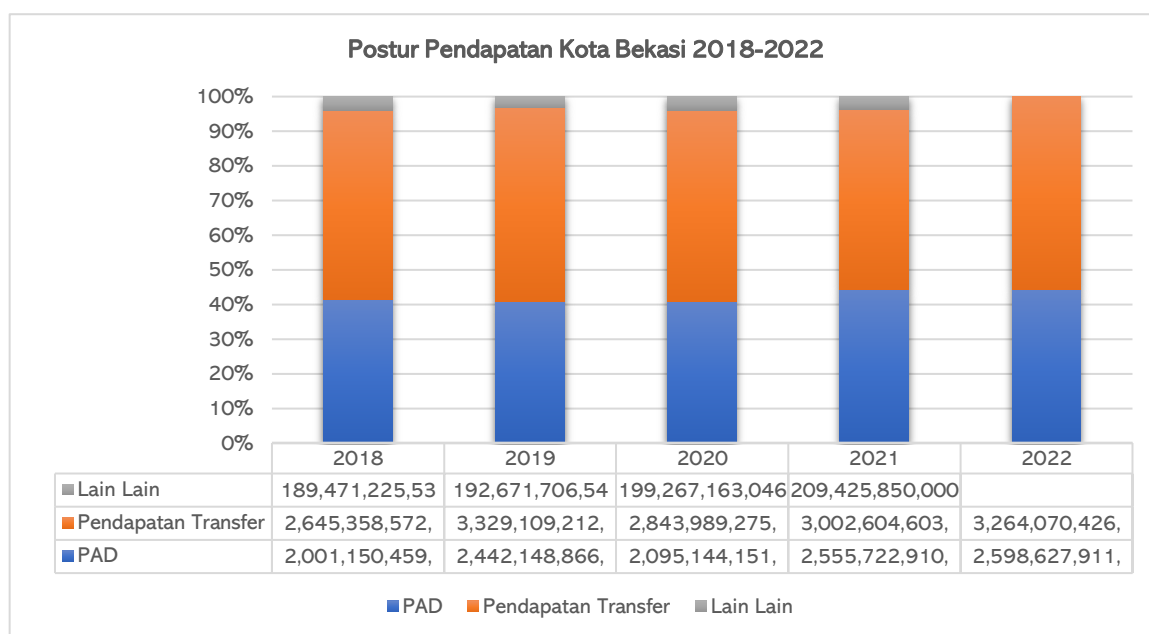
Pada tahun 2018, Kota Bekasi mencatatkan total pendapatan daerah sebesar 4,835,980,257,174.21. dalam kurun waktu 5 tahun di tahun 2022, total pendapatan kota Bekasi meningkat menjadi 5,767,823,062,057.00. Dengan kata lain, dalam jangka waktu 5 tahun, terdapat peningkatan pendapatan sebesar 21%, dengan rata rata pertumbuhan sebesar 6% per tahunnya.



Gambar III. 1 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Secara keseluruhan, Pendapatan Kota Bekasi didominasi oleh pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Di setiap tahunnya, lebih dari 40% pendapatan kota Bekasi berasal dari pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain lain PAD yang sah. Komposisi pendapatan kota Bekasi dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar III. 2 Postur Pendapatan Kota Bekasi 2018-2022

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

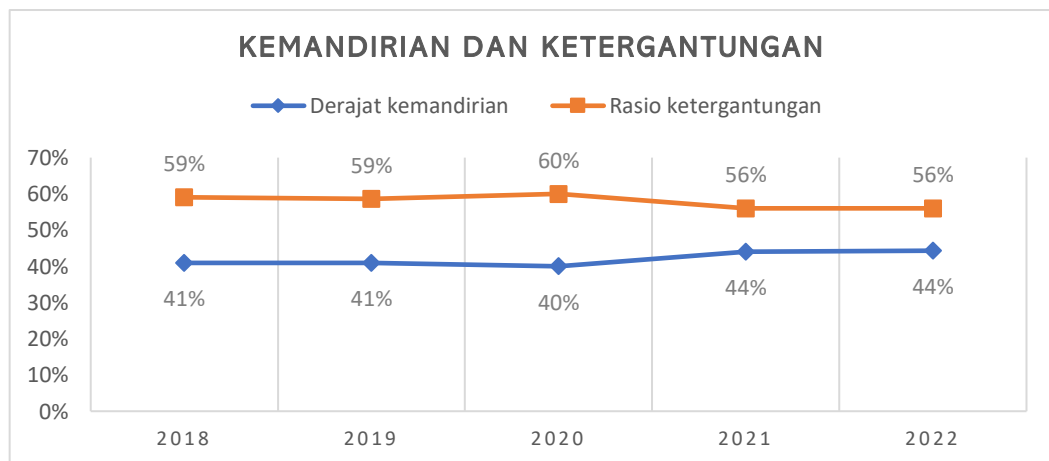
Pada sektor pendapatan Asli daerah, kota Bekasi memperlihatkan perkembangan dalam pengelolaan PAD. Di tahun 2018, realisasi PAD sebesar Rp. 2.001.150.459.494 dan pada tahun 2022 realisasi PAD ini meningkat menjadi Rp. 2.598.627.911.358. Dengan begitu, dalam kurun waktu 5 tahun, terdapat peningkatan PAD sebesar 30%.

Kontribusi utama PAD di kota Bekasi berasal dari pendapatan pajak daerah. Di tahun 2018, kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 1.580.754.200.591 atau 79% dari total PAD di tahun tersebut. Potret ini berubah di tahun 2022. pendapatan dari pajak daerah mengalami peningkatan signifikan disbanding 5 tahun lalu, sehingga Kota Bekasi mampu mencatatkan realisasi pendapatan pajak di tahun 2022 sebesar 2.012.879.316.011,00 atau sebesar 77% dari total Pendapatan Asli daerah. Pendapatan dari pajak ini berkontribusi sebesar 34% terhadap total pendapatan daerah Bekasi tahun 2022.

Dilihat dari tren pertumbuhan, Pendapatan Asli daerah mengalami pertumbuhan sebesar rata rata 8% dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Terjadi penurunan pendapatan di tahun 2020 sampai dengan -16% akibat pandemic covid 19. Namun ditahun 2021, kota Bekasi berhasil mencatatkan pertumbuhan PAD yang positif di angka 25%. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh sektor pajak yang secara umum dari tahun 2018 sampai dengan 2022 tumbuh sebesar 6%.

Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain. Derajat Kemandirian Daerah ditunjukkan oleh proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan, sedangkan Rasio Ketergantungan Daerah ditunjukkan dari proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Total Pendapatan. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang rendah.

Dilihat dari sisi kemandirian dan ketergantungan, Kota Bekasi memiliki derajat kemandirian yang lebih baik ketimbang banyak daerah lain di Indonesia. Setiap tahunnya derajat kemandirian kota Bekasi berada di atas 40%, bahkan derajat kemandirian sejak tahun 2021 sampai 2022 telah meningkat menjadi 44%. Namun, angka ini masih dibawah rasio ketergantungan. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus untuk intensifikasi peningkatan PAD ke depannya. Derajat kemandirian dan rasio ketergantungan kota Bekasi dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar III. 3 Derajat Kemandirian dan Ketergantungan Kota Bekasi 2018-2022

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan di kota Bekasi cenderung stabil di angka 1,6 Trilyun. Dana perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil, dana

transfer umum dan dan transfer khusus. Komponen dana transfer umum berkontribusi paling besar untuk pendapatan kota Bekasi, dengan rata rata 1,2 Trilyun per tahunnya. Secara ringkas komposisi pendapatan Kota Bekasi dari dana perimbangan sebagai berikut.



Gambar III. 4 Komposisi Pendapatan Transfer Kota Bekasi 2018-2022

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

Selain dana transfer dari pemerintah pusat, Kota Bekasi selama 5 tahun terakhir juga mendapatkan dana transfer dari kategori lain, yaitu transfer antar daerah, pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya, dan termasuk juga bantuan keuangan. Hanya saja, tidak semua kelompok ini menjadi pendapatan tahunan, beberapa kelompok seperti pendapatan transfer antar daerah tercatat mulai diterima Kota Bekasi setelah tahun 2022. Hal ini tentunya salah satu dampak dari pemberlakuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Pusat dan daerah.

2) Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga.

Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2018 s.d 2022 yang digunakan

sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Besaran belanja daerah kota Bekasi berfluktuasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Di tahun 2018, total belanja daerah sebesar 5,745,961,495,721.00, di tahun 2019, belanja daerah naik tajam menyentuh angka 7,004,094,885,460.00. Di tahun 2020 total belanja daerah mengalami penurunan yang signifikan pada angka 5,757,432,487,561.00,- dan kemudian kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 6,449,614,890,862.00. Pada tahun 2022, Total Belanja Kota Bekasi menjadi 5.717.113.125.770. Penurunan tajam belanja daerah di tahun 2020 diakibatkan penurunan pendapatan yang mencapai 15% akibat pandemic covid 19.

Secara keseluruhan, postur belanja kota Bekasi dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 1 Postur Belanja Kota Bekasi Tahun 2018-2022

BELANJA	2018	2019	2020	2021	2022
BELANJA OPERASI	4,729,604,533,577.00	5,348,414,528,411.00	4,303,595,073,630.00	4,659,345,443,268.00	4,620,864,058,840
Belanja Pegawai	2,428,803,623,851.00	2,322,889,743,039.00	1,981,447,219,292.00	2,072,844,545,064.00	2,028,519,756,782
Belanja Barang dan Jasa	2,127,022,644,840.00	2,752,709,787,972.00	2,145,058,658,538.00	2,232,053,528,866.00	2,208,190,555,620
Belanja Subsidi		6,500,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	5,659,942,704
Belanja Hibah	1,500,000,000.00	161,995,136,800.00	67,775,115,800.00	215,535,311,288.00	233,217,537,734
Belanja Bantuan Sosial	84,795,002,486.00	104,319,860,600.00	103,314,080,000.00	132,912,058,050.00	145,276,266,000
Belanja Bunga	8,374,400.00				
BELANJA MODAL	1,013,356,962,144.00	1,362,418,915,611.00	1,113,115,198,940.00	1,377,851,309,337.00	1,073,709,690,606
Belanja Modal Tanah	108,920,565,000.00	292,093,168,979.00	225,231,313,803.00	306,328,038,165.00	78,294,563,017
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160,988,664,560.44	204,585,975,143.00	390,134,371,825.00	313,342,843,250.00	326,899,442,902
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	226,323,687,419.56	229,788,944,890.00	246,563,386,751.00	228,906,639,887.00	192,838,870,845
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	514,813,274,895.00	634,267,434,039.00	249,146,142,761.00	526,734,852,025.00	472,984,678,264

BELANJA	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,310,770,269.00	1,683,392,560.00	2,039,983,800.00	2,538,936,010.00	2,692,135,578
BELANJA TAK TERDUGA	3,000,000,000.00	293,261,441,438.00	340,722,214,991.00	412,418,138,257.00	21,539,376,324
Belanja Tak Terduga	3,000,000,000.00	293,261,441,438.00	340,722,214,991.00	412,418,138,257.00	21,539,376,324
TRANSFER	1,459,736,986.00	65,313,729,000.00	1,900,000,000.00		
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	1,459,736,986.00	65,313,729,000.00	1,900,000,000.00		
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1,459,736,986.00	63,767,082,000.00	231,679,000.00		
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		1,546,647,000.00	1,668,321,000.00		1,000,000,000

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

Berdasarkan tabel diatas, belanja daerah kota Bekasi setiap tahunnya didominasi oleh belanja operasi. Pada akun belanja operasi ini, belanja pegawai dan belanja barang/jasa menempati posisi puncak dengan alokasi anggaran terbesar. Belanja modal yang menjadi belanja pembangunan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2018, proporsi belanja modal sebesar 17,64%, proporsi ini mengalami kenaikan hingga akhirnya di tahun 2022 menjadi 18,78%. Secara lengkap proporsi belanja menurut kelompok sebagai berikut:

Tabel III. 2 Persentase Postur Belanja Menurut Kelompok Tahun 2018-2022

BELANJA	2018	2019	2020	2021	2022
OPERASI	82.31%	76.36%	74.75%	72.24%	80,83%
MODAL	17.64%	19.45%	19.33%	21.36%	18,78%
TAK TERDUGA	0.05%	4.19%	5.92%	6.39%	0,38%
TRANSFER	0.03%	0.93%	0.03%		0,02%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

3) Pembiayaan daerah

Untuk menyalurkan surplus atau menutup defisit, dalam penganggaran dikenal Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan di kota Bekasi berasal dari sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) yang kecenderungannya meningkat setiap tahunnya. SiLPA ini digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan kota Bekasi yang sejauh ini dialokasikan untuk penyertaan modal, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, pengeluaran investasi non permanen lainnya, pembayaran utang jangka Panjang, dan pemberian pinjaman daerah. Postur pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 3 Postur Pembiayaan Kota Bekasi Tahun 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	306,532,367,875.00	99,395,517,385.00	494,437,959,154.00	776,523,219,854.00	826,691,182,317
Penggunaan SiLPA	306,532,367,875.00	99,395,517,385.00	494,437,959,154.00	776,523,219,854.00	826,691,182,317
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	41,468,582,050.00	23,500,000,000.00	22,500,000,000.00	12,600,000,000.00	75,875,319,295
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	41,212,397,000.00	23,500,000,000.00	22,500,000,000.00	10,100,000,000.00	45,875,319,295
Pembentukan Dana Cadangan					30,000,000,000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	107,674,700.00				
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	100,000,000.00				
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	48,510,350.00				
Pemberian Pinjaman Daerah				2,500,000,000.00	
	265,063,785,825.00	75,895,517,385.00	471,937,959,154.00	763,923,219,854.00	902,566,501,612

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi



Penerimaan pembiayaan dari SiLPA juga digunakan untuk menutup defisit antara pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022, pemerintah kota Bekasi mengalami defisit antara pendapatan dan belanja yang pada akhirnya ditutup dengan menggunakan SiLPA.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintahan Daerah, pihak Legislatif Daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.



Tabel III. 4 Neraca Daerah

ASET LANCAR	2018	2019	2020	2021	2022
Kas di Kas Daerah	23,652,019,708.14	417,207,846,751.00	756,947,185,699.00	579,963,440,166.00	725,991,565,428
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	3,007,125.00	32,513,174.00	6,550,000.00	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.00	2,287,600.00	18,000.00	0.00	0.00
Kas di BLUD	7,771,851,187.00	57,693,946,967.00	16,547,356,373.00	243,067,165,931.00	165,683,385,537
Kas Dana BOS	1,514,858,048.86	7,878,130,358.00	2,996,146,608.00	3,654,026,220.00	2,027,079,909
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	10,563,809,303.00	9,552,380,741.00	25,000,000.00	0.00	0.00
Kas Lainnya	0.00	100,359,611.00	10,680,613.00	84,552.00	0.00
Setara Kas	56,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Piutang Pendapatan	829,835,793,848.61	903,291,083,118.12	965,269,886,424.00	1,045,480,809,489.00	1,106,813,679,672.13
Piutang Lainnya	1,589,676,061.00	2,122,347,159.00	2,913,921,732.00	1,279,887,402.00	853,405,601
Penyisihan Piutang	(393.368.695.716,17)	(417.928.366.258,39)	(434.413.378.267,36)	(530.083.876.759,24)	(587,221,969,154.46)
Beban Dibayar Dimuka	927,300,970.00	973,129,788.75	1,477,586,942.09	1,178,343,474.92	1,624,921,086.17
Persediaan	137,207,531,423.86	123,201,375,185.19	140,873,981,471.58	172,619,305,744.75	109,054,292,526.76
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi -TGR	8,900,000.00	65,015,198.00	85,717,385.00	0.00	0.00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(367,500.00)	(325,076.00)	(428,587.00)	0.00	0.00
Jumlah Aset Lancar	675,702,677,336.30	1.106.162.218.267,67	1.452.680.898.769,31	1.517.165.736.220,43	1,524,826,360,605.6

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

**Rencana Pembangunan Daerah
Kota Bekasi 2024-2026**



URAIAN		2018	2019	2020	2021	2022
INVESTASI JANGKA PANJANG						
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	17,891,244,950.48	17,343,914,435.70	17,666,965,669.05	19,309,914,876.41	20,554,121,290.91
	Investasi Jangka Panjang Permanen	304,585,204,820.23	394,597,858,925.17	422,150,876,782.27	433,320,243,140.10	479,413,364,883.34
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	322,476,449,770.71	411,941,773,360.87	439,817,842,451.32	452,630,158,016.51	499,967,486,174.25
ASET TETAP						
	Tanah	4,819,027,827,247.00	6,142,632,284,110.00	6,703,985,172,547.00	7,234,326,593,141.00	7,634,835,520,568.00
	Peralatan dan Mesin	1.380.217.090.541,17	1.507.464.156.315,32	1.849.007.847.911,93	2,151,290,348,904.97	2,490,710,060,809.63
	Gedung dan Bangunan	2.858.809.392.710,36	2.956,369,325,560.80	3.039.680.100.585,06	3,186,007,944,099.40	3,399,597,703,497.14
	Jalan, Irigasi dan jaringan	4.895.658.326.944,22	5.527.680.469.120,61	5.651.933.441.443,68	6,113,986,520,015.78	6,596,262,741,874.78
	Aset tetap Lainnya	71,648,039,720.13	68,580,150,840.13	69,946,562,829.13	71,961,742,694.13	73,987,583,138.13
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	276,798,843,760.00	58,647,025,110.00	55,238,991,300.00	143,657,337,571.00	90,792,813,945.00
	Akumulasi penyusutan	(3.731.075.918.361,46)	(4.397.097.828.030,30)	(5.020.485.166.743,36)	(5,900,803,948,776.68)	(6,646,193,305,420.47)
	Jumlah Aset tetap	10.571.083.602.561,40	11.864.275.583.026,60	12.349.306.949.873,40	13,000,426,537,649.60	13,639,993,118,412.20
DANA CADANGAN						
	Dana Cadangan	0	0	0	0	30,000,000,000.00
	Jumlah Dana Cadangan	0	0	0	0	30,000,000,000.00
ASET LAINNYA						
	Jumlah Aset Lainnya	138,229,217,758.22	122,464,119,943.89	244,600,610,171.14	123,846,927,295.82	124,031,070,433.07
JUMLAH ASET		11.707.491.947.426,70	13,504,843,694,599.00	14,486,406,301,265.20	15,153,838,224,880.60	15,818,818,035,625.10
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	575,803,341,697.73	193,138,576,569.25	134,336,715,394.09	104,733,347,230.10	117,609,033,519.16
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	90,131,250.00				
JUMLAH KEWAJIBAN		575,893,472,947.73		134,336,715,394.09	104,733,347,230.10	117,609,033,519.16
EKUITAS						
	Ekuitas	11,131,575,088,750.90	13,311,705,118,029.70	14,352,069,585,871.10	15,049,104,877,650.50	15,701,209,002,106.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		11,707,468,561,698.70	13,504,843,694,599.00	14,486,406,301,265.20	15,153,838,224,880.60	15,818,818,035,625.10

Catatan:

1. *Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi (diolah)*
2. *Data neraca tahun 2022 masih berstatus unauditted*

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kota Bekasi mengalami pertumbuhan asset dalam lima tahun ke belakang. Rata rata pertumbuhan asset sebesar 7%, dengan pertumbuhan terbesar di tahun 2019 sebesar 15%. Pertumbuhan paling rendah terjadi di tahun 2018 dengan angka hanya sebesar 3%.

Pada sisi kewajiban daerah, terlihat lonjakan kewajiban daerah pada tahun 2018, dari total kewajiban sebesar 120,690,098,666.41 di tahun 2017, menjadi 575,893,472,947.73 di tahun 2018. Namun, besaran kewajiban ini terus menurun seiring membaiknya pengelolaan keuangan daerah, sehingga pada tahun 2022, total kewajiban daerah menjadi 117,609,033,519.16. angka ini jauh lebih kecil ketimbang total kewajiban di tahun 2018.

Tabel III. 5 Kewajiban Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Lancar	1,173	5,727	10,814	14,488	12,97
2	Rasio Cepat	0,935	5,089	9,765	12,84	12,04
3	Rasio Modal kerja terhadap Total Aset	0,008	0,068	0,091	0,093	0,089
4	Rasio Solvabilitas	20,33	69,92	107,84	144,15	134,50

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

Rasio lancar untuk pemerintah kota Bekasi menunjukkan angka yang cukup baik, dengan perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar sebesar 12,97:1 pada tahun anggaran 2022. Angka perbandingan yang selalu di atas 2:1 sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 menunjukkan bahwa kota Bekasi memiliki aset lancar yang cukup untuk melunasi utang jangka pendeknya.

Quick Ratio (rasio cair) yaitu ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang lebih likuid, dimana persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid, sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Dengan melihat tabel diatas, Pemerintah Kota Bekasi capaiannya lebih dari 1, artinya Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Hal tersebut menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek.

Rasio Modal kerja terhadap Total Aset menunjukkan proporsi dari modal kerja (aset lancar dikurang utang lancar) terhadap total aset sebesar 0,089 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi masih memiliki 8,9% aset yang bersifat likuid dari total aset pemerintah kota Bekasi setelah melunasi utang jangka pendeknya.

Rasio Solvabilitas menunjukkan perbandingan antara total aset dengan total utang yang cukup besar, yaitu sebesar 134,50:1 pada tahun 2022. Angka ini mengindikasikan bahwa pemerintah kota Bekasi dapat memenuhi seluruh kewajibannya, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2021, meskipun secara keseluruhan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan cukup signifikan.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pada sektor pendapatan Asli daerah, kota Bekasi memperlihatkan perkembangan dalam pengelolaan PAD. Di tahun 2018, besaran PAD sebesar Rp. 2,001,150,459,494 dan pada tahun 2022 besaran PAD ini meningkat menjadi Rp. 2,598,627,911,358. Dengan begitu, dalam kurun waktu 5 tahun, terdapat peningkatan PAD sebesar 30%. Pertumbuhan ini tergolong baik mengingat adanya perlambatan ekonomi pada tahun 2019 sampai dengan 2021 akibat pandemic covid 19.

Dilihat dari tren pertumbuhan, Pendapatan Asli daerah mengalami pertumbuhan sebesar rata rata 8% dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Terjadi penurunan pendapatan di tahun 2020 sampai dengan -16% akibat pandemic covid 19. Namun ditahun 2021, kota Bekasi berhasil mencatatkan pertumbuhan PAD yang positif di angka 25%. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh sektor pajak yang secara umum dari tahun 2018 sampai dengan 2022 tumbuh sebesar 6%.

Pertumbuhan PAD cenderung lebih tinggi ketimbang komponen pendapatan lainnya. Hal ini menunjukkan pengelolaan pendapatan yang semakin membaik. Dari sisi derajat kemandirian kota Bekasi dapat dikatakan lebih baik disbanding banyak daerah di Indonesia. Setiap tahunnya terdapat peningkatan angka derajat kemandirian yang disertai dengan penurunan rasio ketergantungan.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022, terjadi penurunan biaya pegawai secara bertahap. Di tahun 2018, belanja pegawai mencapai 42% dari total

pengeluaran (belanja dan pengeluaran pembiayaan). Proporsi ini menurun di tahun 2019 menjadi 33%, dan pada tahun 2021 proporsi belanja pegawai tersebut menyentuh angka 32%. Pada tahun 2022, proporsi belanja pegawai dibandingkan dengan total belanja mengalami sedikit peningkatan, menjadi 35%. Meskipun begitu, proporsi belanja pegawai ini sesungguhnya sudah hampir mencapai titik ideal yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah.

Secara detail, proporsi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 6 Proporsi Penggunaan Anggaran Kota Bekasi

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	$(a)/(b) \times 100\%$
1	Tahun anggaran 2018	2,428,803,623,851.00	5,788,889,814,757.00	42%
2	Tahun anggaran 2019	2,322,889,743,039.00	7,092,908,614,460.00	33%
3	Tahun anggaran 2020	1,981,447,219,292.00	5,781,832,487,561.00	34%
4	Tahun anggaran 2021	2,072,844,545,064.00	6,462,214,890,862.00	32%
5	Tahun anggaran 2022	2,028,519,756,782.00	5,792,988,445,065.00	35%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan, maka dapat diproyeksikan bahwasannya Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 3 tahun ke depan (2024- 2026) dalam RPD Kota Bekasi.

Prioritas pendanaan pembangunan periode 2024 sampai dengan 2026 diarahkan pada:

1. Pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi covid 19. pemulihan ekonomi ini dilakukan dengan intensifikasi lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor sektor berbasis pengalaman (kreatif)

2. Pendanaan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
3. Pencapaian target yang belum terpenuhi pada periode RPJMD sebelumnya
4. Dukungan terhadap prioritas nasional dan prioritas provinsi sebagai bentuk sinkronisasi antar tingkatan pemerintahan
5. Dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

1) Proyeksi Pendapatan

Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah pendapatan daerah. Pendapatan Daerah merupakan penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Penerimaan Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah mencakup dana hibah, dana darurat, dan/atau pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 5,96% dibandingkan tahun 2023 sedangkan proyeksi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 naik sebesar Rp. 179,981,900.00 dengan kata lain hanya naik sebanyak 0,01% dibandingkan Tahun 2023,-, persentase kenaikan yang kecil tersebut disebabkan antara lain :

- Penurunan proyeksi pajak hiburan dikarenakan adanya penurunan besaran tariff pajak hiburan pada beberapa potensi pajak hiburan, yang saat ini berkisar 0-40%, dalam UU No 1 Tahun 2022;
- Penurunan pajak parkir dikarenakan adanya penurunan besaran tariff pajak parkir yang semula dikenakan 30% sesuai UU No. 1 Tahun 2022 menjadi 10%;

- Penurunan pajak air tanah dikarenakan pengetatan penerbitan ijin SIPA oleh ESDM Provinsi Jawa Barat, karena Kota Bekasi termasuk diwilayah perbatasan DKI Jakarta dan berada di daerah Cekungan Air Tanah (CAT).

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 7,59% dibandingkan tahun 2024 sedangkan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 sebesar Rp. 3.703.070.218.000,00 atau naik sebesar 18,99% dibandingkan tahun 2024. Di sisi lain, Pendapatan Daerah Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 3,40% dibandingkan tahun 2025 sedangkan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 sebesar Rp. 3.847.507.498.000,00 atau naik sebesar 3,90% dibandingkan tahun 2025.

Secara rinci proyeksi pendapatan kota Bekasi tahun 2024 sampai 2026 sebagai berikut:

Tabel III. 7 Proyeksi Pendapatan Kota Bekasi 2024-2026

Kode	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026
4	Pendapatan Daerah	5,506,906,383,000.00	5,924,886,682,000.00	6,126,218,962,000.00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	3,112,184,848,000.00	3,703,070,218,000.00	3,847,507,498,000.00
4.1.1	Pajak Daerah	2,587,391,884,600.00	3,160,739,527,000.00	3,274,392,850,000.00
4.1.2	Retribusi Daerah	74,292,730,400.00	71,791,947,000.00	74,201,038,000.00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14,399,150,000.00	14,399,150,000.00	14,399,150,000.00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	436,101,083,000.00	456,139,594,000.00	484,514,460,000.00
4.2	Pendapatan Transfer	2,394,721,535,000.00	2,221,816,464,000.00	2,278,711,464,000.00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,583,341,535,000.00	1,640,234,535,000.00	1,697,129,535,000.00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	811,380,000,000.00	581,581,929,000.00	581,581,929,000.00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, Tahun 2022.

Proyeksi pendapatan ini telah mempertimbangkan perubahan regulasi desentralisasi fiskal yang baru yang memasukkan pajak opsen PKB dan BBNKB sebagai bagian dari PAD. Selain itu, proyeksi ini juga mempertimbangkan beberapa jenis penerimaan retribusi yang dihapus melalui UU nomor 1 Tahun 2022, yang terdiri dari:

- Retribusi pengujian kendaraan bermotor;

- Retribusi pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi;
- Retribusi pelayanan terminal, termasuk (a) Retribusi pelayanan penyediaan parker di terminal, (b) retribusi tempat kegiatan usaha di terminal, dan (c) retribusi penyediaan fasilitas lainnya di terminal.
- Retribusi ijin trayek.

Terkait dana transfer, Proyeksi dana transfer Pemerintah Pusat maupun Daerah, baru sebagian diproyeksikan, sedangkan yang bersifat spesifik grand belum diproyeksikan seperti DAK, DID dan Bantuan Keuangan. Hal ini dikarenakan penentuan besaran jenis dana transfer tersebut tidak bisa diproyeksikan.

2) Proyeksi Belanja

Proyeksi belanja daerah dilakukan dengan memperhatikan proyeksi pendapatan daerah Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun ke depan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Bekasi dalam menutup kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Akan tetapi, kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Bekasi selama ini berpegang pada prinsip keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Untuk itu, belanja daerah Kota Bekasi disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan yang sama dengan pertumbuhan pendapatan daerah Kota Bekasi.

Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,89% dibandingkan Tahun 2023 atau menjadi sebesar Rp. 5.592.270.605.992,- kenaikan proyeksi belanja ini sejalan dengan kenaikan pada proyeksi pendapatan. Pada tahun 2025 belanja daerah diproyeksikan kembali mengalami kenaikan sebesar 7,73% dibandingkan Tahun 2024 atau menjadi sebesar Rp. 6.024.684.868.912,-. Untuk tahun 2026, proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 4,23% dibandingkan Tahun 2025 atau menjadi sebesar Rp. 6.279.374.436.050,-.

Tabel III. 8 Proyeksi Belanja Kota Bekasi 2024-2026

Kode	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026
5	Belanja Daerah	5,592,270,605,992.00	6,024,684,868,912.00	6,279,374,436,050.00
5.1	Belanja Operasi & Belanja Modal	5,517,270,605,992.00	5,949,684,868,912.00	6,204,374,436,050.00
5.3	Belanja Tidak Terduga	75,000,000,000.00	75,000,000,000.00	75,000,000,000.00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	75,000,000,000.00	75,000,000,000.00	75,000,000,000.00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, Tahun 2022.

Proyeksi belanja yang tertuang dalam tabel di atas masih menggabungkan antara belanja operasi dan belanja modal. Penggabungan ini dikarenakan belum adanya proyeksi belanja yang terpisah antara kedua kelompok belanja tersebut. Di sisi lain, proyeksi belanja yang berbasis aplikasi ini sulit dilakukan mengingat adanya anomaly belanja terutama pada tahun 2020 dan 2021 akibat refocusing belanja untuk penanganan covid 19.

Di sisi lain, terdapat kebijakan nasional terkait non PNS yang berimbas pada pengalihan belanja untuk non PNS yang awalnya di jenis belanja barang dan jasa menjadi belanja pegawai. Pemisahan dan perhitungan belanja pegawai secara rigid akan sangat bergantung pada implementasi kebijakan tersebut.

3) Proyeksi Pembiayaan

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat melakukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah. Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian melalui pembentukan dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD adalah :

- a. Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan bagian dari investasi langsung. Untuk itu perlu dilakukan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko atas penyertaan modal tersebut.
- b. Dana untuk penyertaan modal harus berasal dari surplus APBD;
- c. Penyertaan modal harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
- d. Penyertaan modal dapat berupa uang atau barang milik daerah,
- e. Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD;
- f. Penyertaan modal pemerintah harus memperhatikan aspek keamanan, sehingga keputusan penyertaan modal harus didasarkan pada analisis investasi agar dana publik terbebas dari risiko kerugian.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi dimungkinkan memanfaatkan surplus APBD untuk melakukan penyertaan modal kepada BUMD yang ada. Tujuan melakukan penyertaan modal pada BUMD adalah untuk memanfaatkan adanya surplus APBD, mengembangkan jangkauan pelayanan BUMD, dan menambah sumber pendapatan daerah.

Terkait proyeksi pembiayaan, pada kelompok penerimaan pembiayaan, kota Bekasi masih akan didominasi oleh SiLPA. Sedangkan pada kelompok pengeluaran pembiayaan, penyertaan modal daerah yang sudah ditetapkan dalam Perda tentang penyertaan modal akan menjadi komponen pengeluaran utama selama periode 2024 sampai dengan 2026. Berikut adalah proyeksi pembiayaan kota Bekasi 2024 sampai 2026.

Tabel III. 9 Proyeksi Pembiayaan Kota Bekasi 2024-2026

Kode	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN 2026
6	Pembiayaan Daerah	85,364,222,992.00	99,798,186,912.00	153,155,474,050.00
6,1	Penerimaan Pembiayaan	185,956,222,992.00	219,798,186,912.00	226,655,474,050.00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	185,956,222,992.00	219,798,186,912.00	226,655,474,050.00
6,2	Pengeluaran Pembiayaan	100,592,000,000.00	120,000,000,000.00	73,500,000,000.00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	100,592,000,000.00	120,000,000,000.00	73,500,000,000.00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Sisa lebih/(kurang) pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, Tahun 2022.

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024-2026, hanya mencantumkan proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), dengan mempertimbangkan defisit anggaran dibawah angka 3%. Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024-2026, hanya mencantumkan proyeksi penyertaan modal pada BUMD, berdasarkan hasil analisa kebutuhan masing-masing BUMD.

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

1) Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Berdasarkan proyeksi keuangan, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan, disusun analisis terkait kapasitas real keuangan daerah. Kapasitas riil ini dihitung dengan mengkalkulasi penerimaan daerah yang berasal dari



pendapatan daerah dan SiLPA, untuk kemudian dikurangi dengan pengeluaran berupa belanja operasi dan pengeluaran pembiayaan. Hasil analisis tersebut terlihat pada tabel berikut:

Tabel III. 10 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Bekasi 2024-2026

NO	URAIAN	PROYEKSI		
		2024	2025	2026
1	Pendapatan	5,506,906,383,000.00	5,924,886,682,000.00	6,126,218,962,000.00
2	Pencairan Dana Cadangan			
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	185,956,222,992.00	219,798,186,912.00	226,655,474,050.00
	TOTAL PENERIMAAN	5,692,862,605,992.00	6,144,684,868,912.00	6,352,874,436,050.00
	<i>Dikurangi</i>			
4	Belanja Operasi	5,517,270,605,992.00	5,949,684,868,912.00	6,204,374,436,050.00
5	Pengeluaran Pembiayaan	100,592,000,000.00	120,000,000,000.00	73,500,000,000.00
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	75,000,000,000.00	75,000,000,000.00	75,000,000,000.00

2) Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia bagi kepentingan masyarakat dan untuk pencapaian efektifitas program. Dalam menentukan alokasi anggaran perlu skala prioritas dan kebutuhan karena adanya keterbatasan anggaran.

Prioritas alokasi anggaran dalam penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua). Prioritas I dialokasikan untuk belanja mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Sedangkan Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan prioritas pembangunan kota bekasi tahun 2024-2026.

BAB 04

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS





BAB 04

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dan isu-isu strategis merupakan salah satu bagian penting dari dokumen perencanaan karena akan menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusan Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah Kota Bekasi. Penyajian permasalahan dan isu-isu strategis diharapkan dapat menjelaskan butir-butir penting yang akan menentukan kinerja pembangunan Kota Bekasi mendatang.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang telah dicapai saat ini dan yang telah direncanakan sebelumnya, serta antara kesenjangan antara kondisi yang ingin dicapai pada masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kegagalan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja pembangunan daerah pada masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan untuk memetakan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat 2 (dua) kategori permasalahan yang perlu diidentifikasi yakni permasalahan pembangunan daerah dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, yang keduanya saling terkait satu dengan lainnya.

4.1.1 Permasalahan terkait Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sesuai amanah Undang-Undang Pemerintahan Daerah, salah satu indikator pembangunan daerah adalah kinerja kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017



menjabarkan indikator-indikator kesejahteraan masyarakat secara lebih rinci sebagaimana telah dibahas pada Bab 2 dokumen ini. Permasalahan aspek kesejahteraan masyarakat pada bagian ini merupakan hasil identifikasi terhadap indikator kesejahteraan masyarakat skala kota yang mencerminkan *outcome* serta dampak (*impact*) dari pembangunan daerah yang telah dilakukan selama ini. Beberapa indikator kesejahteraan yang telah diidentifikasinya adalah sebagai berikut:

- **Pertumbuhan Ekonomi**

Pemerintah Kota Bekasi harus berjuang lebih keras dalam memulihkan pertumbuhan perekonomian diakibatkan dampak dari Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan beberapa kategori lapangan usaha mengalami penurunan pertumbuhannya di tahun 2019 (5,41%) dari (5,86%) pada tahun 2018 bahkan minus di tahun 2020 (-2,58%), beberapa kategori yang mengalami penurunan terbesar ada pada Jasa perusahaan, jasa Kesehatan dan kegiatan social, jasa lainnya.

Pada tahun 2021 pertumbuhan perekonomian di Kota Bekasi mulai mengalami peningkatan akan tetapi harus berusaha lebih keras lagi dikarenakan beberapa kategori pada lapangan usaha pertumbuhan ekonominya masih kecil, kategori yang pertumbuhan kecil ada pada Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu 0,86 persen, beberapa kategori yang harus berjuang lebih keras lagi ada pada kategori Jasa lainnya, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga harus ditingkatkan lagi, untuk Jasa Pendidikan juga masih harus ditingkatkan.

- **Kemiskinan**

Tingkat kemiskinan di Kota Bekasi dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi, hingga tahun 2021 mencapai 4,74 persen dari total penduduk Kota Bekasi. Tingkat kemiskinan tersebut tergolong rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat maupun nasional. Namun upaya untuk mengurangi kemiskinan masih perlu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Bekasi yang lebih merata. Salah satu aspek penting dari tingkat kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan yang mencerminkan seberapa dalam perbedaan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinannya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan kemiskinan merupakan masalah laten yang perlu terus diantisipasi oleh pemerintah Kota Bekasi pada masa mendatang.

Adanya pandemi COVID-19 berdampak pada bertambahnya jumlah keluarga miskin, karena pemutusan hubungan kerja (PHK); usaha keluarga terganggu,



bangkrut, dan bahkan terlilit utang; serta anggota keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga mengalami sakit, dirawat, atau bahkan meninggal.

- Pengangguran

Tingkat Pengangguran terbuka di Kota Bekasi merupakan salah satu indikator yang perlu perhatian lebih serius bagi Pemerintah Kota Bekasi dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir memiliki kecenderungan mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 berkisar 8,30%, kemudian meningkat menjadi 10,68% di tahun 2020 dan meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 10,88%. Kenaikan Persentase tersebut disebabkan salah satunya merupakan dampak covid.

Jumlah pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

- Prevelensi Kekurangan Gizi pada Balita

Persentase balita stunting di Kota Bekasi tercatat sebesar 13,8% meskipun sudah dibawah standar WFO sebesar 20% dan dibawah nasional yaitu 24,4% serta dibawah Provinsi Jawa Barat yaitu 24,5%, namun angka ini masih perlu didorong untuk dikurangi. Faktor penyebabnya antara lain, terdapat ketimpangan ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, ketahanan pangan, sistem kesehatan, perlindungan sosial, lingkungan permukiman dan urbanisasi yang mempengaruhi tumbuh kembang balita serta kecukupan gizi dan kesehatan di semua siklus kehidupan.

- Keluarga Pra-Sejahtera

Menurut informasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), tingkat kesejahteraan sebuah keluarga dapat dibagi ke dalam 5 (lima) tahap, yaitu: Pra-Sejahtera (sangat miskin), Sejahtera Tahap I (miskin), Sejahtera Tahap II (hampir miskin), Sejahtera Tahap III (tidak miskin), dan Sejahtera Tahap III Plus. Selama kurun waktu tahun 2013-2017, persentase Keluarga Pra-Sejahtera ditambah Keluarga Sejahtera I dibandingkan jumlah seluruh keluarga di Kota Bekasi, memperlihatkan penurunan, yakni dari 21,88 persen (120.300 keluarga) menjadi 20,47 persen (116.233 keluarga) pada tahun 2015 dan pada tahun 2017 jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I menjadi 267.071 keluarga. Penurunan ini mengindikasikan secara eksplisit kesejahteraan keluarga di Kota Bekasi mulai meningkat menuju tahapan

Keluarga Sejahtera II dan seterusnya. Dengan kata lain, ekonomi masyarakat di Kota Bekasi membaik, namun proporsi Keluarga Pra-Sejahtera yang masih di atas 20 persen merupakan masalah yang perlu diantisipasi Pemerintah Kota pada masa mendatang.

4.1.2 Permasalahan terkait Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah. Daya saing daerah merupakan salah satu tinjauan tingkat keberhasilan pembangunan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk bertahan dalam menghadapi tantangan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan analisis terhadap 10 (sepuluh) indikator daya saing daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, terdapat 1(satu) indikator di lingkungan pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja belum optimal, yakni Produktivitas Total Daerah.

Dalam pembahasan ini selain permasalahan terkait indikator daya saing sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, pembahasan dilengkapi dengan indikator daya saing daerah berdasarkan referensi lainnya. Berikut pembahasan permasalahan terkait aspek daya saing daerah di kota Bekasi:

- Keamanan

Angka penanganan kriminalitas di Kota Bekasi tidak mengalami banyak perubahan signifikan dan cenderung *stagnant* antara tahun 2012 hingga 2015. Pada tahun 2012 dan 2015 angka kriminalitas yang terselesaikan sama-sama sejumlah 1,87 sedangkan tahun 2013 dan 2014 identik sebesar 1,92. Namun tahun 2016 terjadi peningkatan luar biasa hingga mencapai 6,54 (hampir 3,5 kali tahun sebelumnya). Peningkatan ini berkaitan dengan meningkatnya jumlah kriminalitas yang tertangani di tahun tersebut yaitu 1.833 perkara dibandingkan tahun 2015 yang hanya berjumlah 511 perkara.

Hingga tahun 2017 Kota Bekasi menjadi wilayah yang paling tinggi tingkat kriminalitasnya se-Provinsi Jawa Barat, baru disusul berikutnya oleh Kota Bandung. Informasi ini dirilis oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data yang diperoleh, angka kriminalitas di Kota Bekasi pada tahun 2013 mencapai 4.133 kasus, lalu pada tahun 2014 mencapai 3.941 kasus (turun 4,65 persen). Kemudian tahun 2015 ada 3.612 kasus (turun 8,35 persen), lalu pada 2016 naik sedikit menjadi 3.632 kasus (0,55 persen), dan tahun 2017 kembali turun menjadi 2.580 kasus (28,97 persen). Konon Statistik Kriminalitas Kota Bekasi



Tahun 2018 mencatat jumlah kejahatan yang teridentifikasi untuk tahun 2018 hanya 999 kasus, dengan 983 kasus tertangani atau angka penanganan sebesar 1,60.

Sedangkan untuk tahun 2020 angka kriminalitas mencapai 1.555 kasus, turun sebanyak 12 persen di tahun 2021 menjadi 1.365 kasus. Masih banyak kasus kriminalitas diakibatkan dari Dampak pandemi COVID-19, Berikut potensi dampak pandemi COVID-19:

- potensi meningkatnya gangguan keamanan dengan semakin lamanya pembatasan sosial, jalan sepi, dan rawan begal;
- potensi penjarahan toko/mal;
- potensi kriminalitas dengan menakuti-nakuti risiko penularan; dan
- potensi aksi buruh, karena berada dalam posisi tertekan oleh perusahaan dengan situasi pandemi COVID-19.

- Ketergantungan penduduk

Rasio ketergantungan menunjukkan rasio antara penduduk yang tidak produktif terhadap penduduk produktif dalam satu tahun tertentu. Kategori penduduk produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun sedangkan penduduk di luar usia tersebut dikategorikan sebagai penduduk tidak produktif. Data jumlah penduduk berdasarkan usia tersedia di dokumen Kota Bekasi Dalam Angka.

Pada tahun 2017, dengan jumlah penduduk sebesar 2.873.484 jiwa rasio ketergantungan penduduk di Kota Bekasi sebesar 38,39 persen. Tahun 2018, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.943.859 jiwa rasio ketergantungan penduduk tercatat sebesar 37,95 persen, pada tahun 2019, dengan jumlah penduduk 3.003.920 jiwa rasio ketergantungan penduduk tercatat sebesar 37,43 persen.

Sedangkan pada tahun 2020 jumlah penduduk di bekasi menurun hanya sebanyak 2.543.676 jiwa dengan rasio ketergantungan sebesar 38,92 persen. Penurunan jumlah penduduk ini antara lain karena sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dilakukan hanya 10 tahun sekali, untuk tahun-tahun di antara sensus digunakan data estimasi penduduk. Sensus penduduk dilaksanakan pada tahun 2010 dan 2020, maka jumlah penduduk tahun 2019 digunakan data estimasi, sehingga diperoleh jumlah yang lebih tinggi.

- Aksesibilitas dan sistem logistik



Aksesibilitas dan sistem logistik kota merupakan salah satu komponen yang mendukung daya saing daerah. Berdasarkan gambaran terkait sistem transportasi kota, maka secara struktural Kota Bekasi berpotensi memiliki aksesibilitas yang baik untuk mendukung pergerakan dalam dan luar kota. Namun permasalahan muncul dari ketidakseimbangan antara penggunaan kendaraan pribadi dengan angkutan umum yang mengakibatkan kapasitas jaringan jalan terlampaui. Sebagai akibatnya tingkat pelayanan jaringan jalan di Kota Bekasi menjadi rendah dan pada akhirnya mengakibatkan pergerakan menjadi terhambat. Tingkat pelayanan jalan yang semakin menurun juga dipengaruhi oleh sistem logistik (pergerakan angkutan barang) yang belum terencana dengan baik. Pemisahan sistem angkutan orang dan barang belum dilakukan secara optimal sehingga percampuran sistem pergerakan mengakibatkan sistem logistik kota belum optimal kinerjanya.

- **Kapasitas Keuangan Daerah**

Salah satu aspek daya saing daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan data keuangan yang diperoleh maka pada tahun 2021, keuangan Pemerintah Kota Bekasi berpotensi mengalami defisit. Hal ini terjadi karena beberapa target pendapatan daerah tidak tercapai. Permasalahan keuangan daerah ini penting untuk mendapatkan perhatian mengingat kemampuan Pemerintah Kota Bekasi dalam melaksanakan fungsi layanan masyarakat baik berupa pembangunan infrastruktur maupun jasa layanan umum sering dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah setiap tahunnya. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap beberapa komponen/aspek PAD seperti berikut:

- pajak daerah;
- retribusi daerah;
- hasil pendapatan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- lain-lain PAD yang sah;
- arus kas PAD;
- skenario waktu pemulihan PAD; dan
- skenario kebijakan pemulihan PAD.

- **Kinerja BUMD**

Salah satu komponen penting pada aspek daya saing daerah yang terkait keuangan daerah adalah kinerja BUMD. Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kinerja laporan keuangan 4 (empat) BUMD Kota Bekasi, yakni PDAM "Tirta Patriot", PD Migas, BPR Syariah, dan Mitra Patriot, teridentifikasi kontribusi keempat BUMD terhadap pendapatan



Kota Bekasi masih kurang optimal. Permasalahan lain dari kinerja BUMD Kota Bekasi adalah menyangkut penatausahaan dan pengelolaan aset tetap yang belum memadai.

4.1.3 Permasalahan terkait Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan pada aspek ini merupakan permasalahan pembangunan sesuai urusan pemerintah, yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Permasalahan yang disajikan pada bagian ini merupakan hasil dari kajian masing-masing bidang/urusan yang ada di Pemerintahan Kota Bekasi terhadap kinerja capaian masing-masing urusan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019, penyajian permasalahan dilakukan dengan memadukan dan mempertimbangkan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi.

4.1.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Permasalahan yang masih terdapat dalam penyelenggaraan urusan pendidikan diantaranya:

- a. Masih terdapatnya penduduk usia sekolah tidak bersekolah dan anak putus sekolah, hal ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi yaitu masih banyak penduduk usia sekolah dari keluarga tidak mampu sehingga tidak dapat masuk ke sekolah milik pemerintah, selain itu biaya transportasi melebihi biasa sekolah, Adapun faktor lingkungan atau pergaulan, semakin banyaknya kenalan remaja yang diakibatkan dari maraknya permainan game online. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2021 di dinas Pendidikan terdapat 1.349 anak yang mengalami putus sekolah. Permasalahan-permasalahan ini menjadi perhatian pemerintah untuk dapat mengurangi angka putus sekolah melalui

pemberian beasiswa maupun penyediaan biaya operasional sekolah untuk setiap jenjang Pendidikan.

- b. Sebaran lokasi sekolah tidak berdasarkan kepadatan penduduk, bisa dilihat pada jumlah rombongan belajar di sekolah milik pemerintah melebihi daya tampung (tidak sesuai dengan SPM bidang Pendidikan), selain itu juga sebaran pendidik/kependidikan tidak sesuai kebutuhan.
- c. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana sekolah, capaian pada kondisi ruang kelas dalam kondisi baik masih belum 100%.
- d. Kurangnya Pengendalian Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Masyarakat dan Pelayanan Pendidikan berbasis IT belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam "Smart School", dapat dilihat pada jumlah sekolah dengan akreditasi di kota Bekasi.

2. Urusan Kesehatan

Urusan bidang Kesehatan, permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan (DINKES) Kota Bekasi yaitu:

- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan rumah sakit tidak merata
- Belum tercapainya Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap
- Masih tingginya kasus anemia baik pada remaja putri maupun ibu hamil,
- Masih kurangnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti Puskesmas dan RSUD Kelas D
- belum seluruh lembaga kesehatan terakreditasi;
- angka harapan hidup rata-rata masih di bawah kota-kota besar di Indonesia;
- rendahnya persentase pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; dan
- gaya hidup dan lingkungan di Kota Bekasi menyebabkan berkembangnya penyakit akibat gaya hidup, tidak lagi penyakit menular.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah melampaui targetnya. Hanya terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang realisasinya belum melampaui target capaian. Permasalahan yang menjadi penentu dalam ketercapaian kinerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:



- Masih tingginya/luas sebaran titik banjir diakibatkan karena sisten drainase yang belum terintegrasi dengan baik sehingga fungsinya belum optimal serta masih terjadinya sumbatan sampah pada saluran.
- adanya pendangkalan sungai;
- belum terpenuhinya proporsi ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bekasi;
- banyaknya hambatan sampng dan persimpangan;
- adanya alih fungsi lahan;
- sulitnya pengadaan lahan untuk pembangunan fisik Kota Bekasi;

Beberapa permasalahan umum yang terjadi lainnya adalah adanya irisan kewenangan antar instansi di Kota Bekasi dalam menjalankan indikator kinerja terkait penataan ruang.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN) dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah:

- Belum tercapainya layanan air minum
- Belum tercapainya layanan sanitasi
- Belum optimalnya penanganan pengembangan jaringan air dan sanitasi
- Masih ada lokasi kumuh
- Masih adanya kebiasaan buruk masyarakat, yang tidak menghargailingkungan tempat tinggalnya
- Kurang tersosialisasikannya program-program pemerintah terkait kekumuhan

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Stabilitas keamanan dan ketertiban mutlak harus dapat dijaga Kota Bekasi agar tetap berkembang sektor industri pengolahan dan salah satu tempat untuk berinvestasi. Permasalahan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang ada di Kota Bekasi menurut perspektif Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) adalah:

- Masih lemahnya penyelesaian pelanggaran perda
- Masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat



- Masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada

Pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat juga memiliki permasalahan terkait Kebakaran yang mengganggu perlindungan masyarakat menurut Dinas Pemadam Kebakaran (DISDAMKAR), adalah:

- Belum tersedian pos sektor diseluruh kecamatan
- Belum tersedia mobil pemadam kebakaran sesuai dengan SPM
- Masih kurangnya kompetensi SDM dalam penanggulangan kebakaran
- Masih rendahnya jumlah bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran
- Belum optimalnya SOP dan kebijakan penanganan bencana tingkat Kabupaten (SOP, RPB, RAD mitigasi, Renkon, Renoperasi, perda PB,Perbup status darurat)
- Masih kurangnya kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana
- Kurangnya prasarana dan sarana penanggulangan bencana

6. Urusan Sosial

Berdasarkan hasil evaluasi dalam studi pendahuluan menunjukkan bahwa seluruh indikator sudah mencapai target RPJMD kecuali penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Namun demikian, Pemerintah Kota Bekasi masih memiliki permasalahan yang dihadapi, khususnya oleh Dinas Sosial (DINSOS) terkait dengan urusan Sosial, yaitu:

- Belum optimalnya pendataan dan penanganan PPKS
- Minimnya jumlah PSKS yang tersertifikasi
- Minimnya luas area TMP

4.1.3.2 Urusan Wajib yang tidak berkaitan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi oleh Kota Bekasi dalam urusan Ketenagakerjaan menurut persepsi Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) adalah:

- Rendahnya permintaan pasar
- Jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia



- Belum optimalnya proses penempatan pencari kerja
- Kurangnya keterampilan dan keahlian pencari kerja

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa permasalahan terkait dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dihadapi oleh Kota Bekasi berdasarkan tinjauan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yaitu:

- Kurangnya pemahaman terkait pengarusutamaan gender
- Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan perempuan (KDRT)
- Pemenuhan hak-hak anak masih belum menjadi agenda utama para pihak khususnya dalam bidang pendidikan perlunya Sekolah Ramah Anak dan pemenuhan Hak Anak Disabilitas, bidang kesehatan perlunya Puskesmas Ramah Anak serta pemenuhan ruang bermain ramah anak dan aksesibilitas bagi anak disabilitas
- Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan anak

3. Urusan Pangan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Pangan di Kota Bekasi menurut kacamata Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) adalah:

- Masih kurangnya stok cadangan pangan pemerintah daerah
- Kenaikan harga komoditas pangan strategis (stabilisasi harga pangan strategis)
- Masih adanya lahan kosong Milik Pemerintah Kabupaten Bekasi (Fasos/Fasum) dan lahan pekarangan milik Swasta di wilayah RW/Kel/Kec/di Kota Bekasi yang belum di fungsikan keanekaragaman pangan (P2L) dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kebutuhan pokok serta mencegah terjadinya Stunting.
- Tiadak tersedianya ruangan pemeriksaan (Laboratorium) Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

4. Urusan Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DISPERKIMTAN) adalah:

- tidak semua kegiatan memiliki dokumen perencanaan pengadaan tanah yang memadai;
- masalah sengketa tanah;



- administrasi tidak lengkap;
- tidak ada kesepakatan antar pihak yang bersengketa; dan
- proses pembebasan tanah yang belum efisien.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Lingkungan Hidup di Kota Bekasi berdasarkan rangkuman dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yaitu:

- Masih Kurangnya Excavator
- Masih Kurangnya Dump truck
- Masih Kurangnya TPS3R
- Proyek PSEL dengan
- Mekanisme KSDPK

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam urusan Administrasi Kepen-dudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan identifikasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) adalah terkait masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk atas kepemilikan dokumen kependudukan dan dokumen catatan sipil terutama untuk penduduk miskin, serta akurasi data kependudukan, pemanfaatan data kependudukan, dan permasalahan terkait administrasi kependudukan lainnya.

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Bekasi berdasarkan kajian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) adalah:

- Masih sedikitnya penganggaran untuk menunjang kegiatan pemasaran produk uppka
- Ketidaksiapan pasangan untuk menikah menimbulkan banyak risiko kesehatan terhadap ibu dan bayi yang dilahirkan
- Masih banyak yang menikah di usia muda. Satu dari sembilan anak perempuan berusia 20-24 tahun sudah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun.
- Kurangnya dukungan Sumber Daya Manusia dan Pemerintah Pusat dan Daerah
- Setiap tahunnya, banyak sekali bayi yang dilahirkan oleh orang-orang yang masih berusia sekitar 15 hingga 19 tahun.



- Kurangnya Perencanaan Keluarga.
- Masih rendahnya partisipasi fasilitasi layanan kesehatan dalam layanan KB terutama dari Sektor Swasta
- Rendahnya SDM yang mampu melayani vasektomi
- Peserta KB Aktif (PA) dengan MKJP masih rendah

8. Urusan Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Perhubungan di Kota Bekasi menurut inventarisasi Dinas Perhubungan (DISHUB) adalah:

- Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan
- Belum Mencukupi Sumber Daya Manusia (SDM) Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) yang berkompeten.
- Belum terbangunnya koordinasi lintas sektor yang efektif dalam penerapan dan pengendalian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
- Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) memerlukan perbaikan / penggantian secara berkala
- Banyaknya titik parkir liar yang mengambil bahu badan jalan
- Kurangnya Sosialisasi keselamatan berkendara di jalan
- Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) belum memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi
- Rendahnya aksesibilitas ke angkutan umum (pola jaringan trayek angkutan umum belum tertata membentuk spiral jalur utama memusat ke terminal utama)
- Kurangnya sosialisasi keberadaan angkutan umum massal
- Kurangnya koordinasi stakeholder berkaitan dengan pengelolaan angkutan umum massal
- Belum adanya evaluasi tata kelola angkutan umum massal
- Kurangnya Sosialisasi keselamatan berkendara di jalan
- Masih banyak kendaraan yang tidak laik jalan beroperasi
- Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian berkala
- Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan

9. Urusan Komunikasi dan Informatika



Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Bekasi menurut Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (DISKOMINFOSTANDI) adalah:

- Rendahnya pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi
- Rendahnya tingkat literasi digital mengenai penanganan pandemi
- Belum optimalnya kapasitas sumber daya komunikasi
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung sumber daya komunikasi
- Belum optimalnya pemanfaatan layanan pengaduan masyarakat
- Terbatasnya ketersediaan jaringan fiber optik untuk mendukung kelancaran akses data dan informasi di Kota Bekasi (Existing Infrastuktur FO terbangun ±22,6 km
- Terbatasnya ketersediaan akses jaringan internet berkecepatan tinggi
- Terbatasnya kemudahan masyarakat Kota Bekasi dalam mengakses layanan dan informasi mengenai pemerintah Kota Bekasi melalui terkoneksi jaringan internet wifi gratis di kantor pemerintahan, ruang publik dan fasilitas publik di Kota Bekasi (existing ± 1000 titik wifi gratis)
- Terbatasnya ketersediaan jaringan fiber optik untuk mendukung kelancaran akses data dan informasi di Kota Bekasi (Existing Infrastuktur FO terbangun ±22,6 km
- Terbatasnya ketersediaan akses jaringan internet berkecepatan tinggi
- Rendahnya kesadaran untuk menjaga dan mengintegrasikan aset data dan pengelolaan sistem informasi layanan digital Perangkat Daerah

10. Urusan Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kota Bekasi menurut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM) adalah:

- adanya produk UMKM yang belum tersertifikasi
- Kurangnya pembinaan bagi pelaku UMKM
- Belum adanya sentra UMKM di Kota Bekasi
- PKL blm tertata dengan baik
- kurangnya pemasaran produk umkm
- Kurangnya modal bagi UMKM
- rendahnya kapasitas sdm pengurus koperasi



- Pengetahuan tentang Perkoperasian di masyarakat masih relatif rendah
- Kurangnya modal bagi Koperasi
- Masih banyak koperasi yang belum memiliki izin simpan pinjam
- Banyaknya PKL yang menempati lokasi tidak sesuai dengan peeruntukannya
- Belum adanya sentra UMKM di Kota Bekasi, Banyaknya UMKM Kota Bekasi yang belum Mandiri
- Pengetahuan tentang Perkoperasian di masyarakat masih relatif rendah
- Penegakan aturan terhadap koperasi masih relatif kurang
- Minat Pengurus Koperasi dalam mengurus ijin simpan Pinjam masih rendah
- Permodalan Koperasi masih kurang

11. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam urusan Penanaman Modal di Kota Bekasi adalah:

- Kurangnya Sinkronisasi dengan OPD teknis terkait rekomendasi izin yang dimohonkan
- Kurangnya kontrol petugas verifikasi dan validasi berkas
- Kurangnya pemahaman petugas FO terhadap pelaksanaan standar pelayanan
- Masih belum memiliki ruang server yang memadai
- Belum lengkapnya format aplikasi pelayanan perizinan
- Regulasi tentang investasi atau penanaman modal sering mengalami perubahan
- Belum terfasilitasinya investor yang akan berinvestasi
- Belum optimalnya promosi investasi melalui media promosi
- Belum terbaharuinya data potensi dan peluang/profil investasi
- Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM dengan tertib
- Kurangnya pemahaman pelaku usaha akan OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)

12. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga



Permasalahan utama dalam bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kota Bekasi berdasarkan informasi Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) adalah:

- Kurangnya minat atau kesadaran pemuda melalui pendidikan agama, pendidikan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi dan karakter kebangsaan;
- Kurangnya daya saing wirausaha pemuda;
- Kurangnya minat partisipasi pemuda pengembangan kepeloporan;
- Kurangnya minat partisipasi pemuda dalam pengembangan kepemimpinan (developing leadership character);
- Kurangnya sinergis organisasi kepemudaan dan komunitas kreatif.
- Maraknya pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan pemuda;
- Lemahnya perlindungan pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial, perilaku kekerasan fisik dan mental;
- Ancaman potensi tingginya pengangguran pemuda;
- Minimnya proteksi bagi pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi;
- Kurangnya Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda
- Kurangnya ketersediaan ruang terbuka publik;
- Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi olahraga masyarakat;
- Masyarakat lebih menggemari social media ketimbang berolahraga;
- Rendahnya penyelenggaraan event kejuaraan tingkat lokal
- Minimnya pelatih yang bersertifikat;
- Belum optimalnya PPLPD;
- Belum optimalnya pengembangan industri olahraga;
- Rendahnya penyelenggaraan event kompetisi tingkat lokal;
- Terbatasnya sarana dan prasarana.

13. Urusan Statistik

Permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan Statistik di Kota Bekasi menurut informasi yang digali Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian (DISKOMINFOSTANDI) yaitu:



- Belum optimalnya ketersediaan data di OPD
- Belum optimalnya proses pengumpulan data

14. Urusan Persandian

Permasalahan terkait penyelenggaraan urusan Persandian di Kota Bekasi menurut informasi yang digali Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian (DISKOMINFOSTANDI) yaitu Belum optimalnya penanganan keamanan informasi Sistem Elektronik atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

15. Urusan Kebudayaan

Permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan Kebudayaan di Kota Bekasi berdasarkan kajian Dinas Pariwisata dan Budaya (DISPARBUD) adalah:

- Kurangnya minat masyarakat terhadap kesenian tradisional
- Kurangnya event-event kesenian tradisional
- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kesenian tradisional
- masih adanya obyek diduga cagar budaya yang belum dilakukan kajian oleh Tim Ahli cagar Budaya sehingga belum dapat direkomendasikan naskah penetapannya
- belum adanya museum pelestarian cagar budaya

16. Urusan Perpustakaan

Permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan Perpustakaan di Kota Bekasi menurut perspektif Dinas Arsip & Perpustakaan Daerah (DISARPUSDA) adalah:

- Kurangnya minat masyarakat terhadap kesenian tradisional
- Kurangnya event-event kesenian tradisional
- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kesenian tradisional
- masih adanya obyek diduga cagar budaya yang belum dilakukan kajian oleh Tim Ahli cagar Budaya sehingga belum dapat direkomendasikan naskah penetapannya
- belum adanya museum pelestarian cagar budaya

17. Urusan Kearsipan

Beberapa permasalahan urusan Kearsipan yang dihadapi oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (DISARPUSDA) Kota Bekasi yaitu Belum optimalnya

pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, koleksi arsip dan sistem informasi pengelolaan kearsipan terintegrasi.

4.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang terkait dengan urusan Kelautan dan Perikanan yang ada di Kota Bekasi menurut identifikasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) yaitu :

- Belum optimalnya sumber daya kelembagaan
- Belum optimalnya kapasitas SDM perikanan
- Sarana dan prasarana belum maksimal
- Luas lahan budidaya yang berkurang
- Harga pakan ikan yang tinggi
- Minimnya sarana, prasarana dan permodalan
- Keterbatasan Ketersediaan Ikan Konsumsi terkait dengan peningkatan usaha perikanan budidaya.

2. Urusan Pariwisata

Permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan Pariwisata di Kota Bekasi berdasarkan informasi dari Dinas Pariwisata dan Budaya (DISPARBUD) adalah:

- belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata
- belum optimalnya pemasaran destinasi pariwisata
- sertifikasi di sektor pariwisata masih minim
- Belum tersedianya Tourist Information Center (TIC) dan Sentra Oleh-oleh Kota Bekasi
- kualitas dan kuantitas produk ekraf masih rendah
- kurangnya pembinaan para pelaku ekraf

3. Urusan Pertanian

Permasalahan yang terkait urusan Pertanian yang ada di Kota Bekasi menurut identifikasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) adalah:

- Kebutuhan lahan semakin meningkat

- Harga tanah semakin meningkat
- Sektor pertanian kurang diminati sebagai suatu pekerjaan yang menjanjikan
- Usaha budidaya masih dilakukan secara konvensional
- Penggunaan teknologi budidaya peternakan yang belum optimal
- Peningkatan nilai tambah produk peternakan
- Ketersediaan sumber daya terbatas (SDM, Modal, bibit, pakan ternak dan Sarana prasarana usaha peternakan)
- Ketersediaan sarana prasarana penanganan penyakit hewan menular dan zoonosis
- Kompetensi pegawai teknis bidang kesehatan hewan
- Lalu lintas hewan dan Produk hewan ke Kota Bekasi sangat tinggi
- Hasil pemeriksaan laboratorium Pasar Tradisional positif virus flu burung
- Tempat penampungan dan pemotongan hewan masih belum terlokalisasi
- Unit pelayanan kesehatan hewan belum memadai
- Pemeliharaan hewan (domestik dan liar) oleh warga
- Penanganan produk pangan asal hewan (PAH) belum memenuhi standar hygiene sanitasi dan rantai dingin
- Banyak unit usaha PAH dan Produk hewan non pangan (PHNP) belum memenuhi persyaratan teknis kesmavet
- Belum Optimalnya Rumah Potong Hewan
- Terbatasnya jumlah Juru sembelih halal
- Penggunaan bahan kimia berbahaya
- Kecurangan dan pemalsuan pangan asal hewan
- Peredaran produk hewan non pangan untuk tujuan pangan
- Peredaran obat hewan yang belum memenuhi standar obat hewan Indonesia/ilegal
- Penggunaan obat hewan yang tidak sesuai ketentuan
- Keterbatasan lahan pertanian
- Kurangnya Minat Generasi Muda untuk melakukan usaha Pertanian
- Keterbatasan Sarana dan prasarana Pertanian



4. Urusan Kehutanan

Permasalahan umum terkait dengan urusan Kehutanan yang ada di Kota Bekasi menurut identifikasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) adalah terkait dengan pengembangan hutan kota.

5. Urusan Perdagangan

Permasalahan terkait dengan urusan Perdagangan yang ada di Kota Bekasi menurut identifikasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISDAGPERIN) adalah:

- Permintaan/Kebutuhan Masyarakat terus meningkat menjelang Hari Raya namun jumlah ketersediaan tidak ikut meningkat (sama)
- Kelangkaan barang kebutuhan tertentu yang tidak terprediksi sebelumnya
- Inflasi Kebutuhan Barang Pokok
- Sarana prasarana yang belum memadai
- SDM Pengelola pasar yang belum memadai.

6. Urusan Perindustrian

Permasalahan terkait dengan urusan Perindustrian yang ada di Kota Bekasi menurut identifikasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISDAGPERIN) adalah:

- Permintaan masyarakat terhadap produk berkurang
- biaya operasional lebih tinggi daripada keuntungan
- kurangnya event-event sebagai wadah promosi

4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan sehingga suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis pembangunan Kota Bekasi menempatkan isu penguatan struktur ekonomi kota sebagai inti dari isu strategis pembangunan kota yang terintegrasi dengan isu strategis pada urusan pemerintah daerah yang meliputi



aspek urusan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum. Penjelasan dari rumusan isu strategis pembangunan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Layanan Publik;

Peningkatan kualitas birokrasi menjadi salah satu pokok utama penguatan tata Kelola pemerintahan. Birokrasi yang dinamis dan inovatif diharapkan mampu menjadi daya ungkit peningkatan kualitas layanan publik. Ke depan, peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan masih akan menjadi focus utama dalam pengelolaan pemerintahan.

Isu strategis ini juga terkait erat dengan permasalahan pembangunan daerah, yang meliputi:

- Indikator kinerja yang disusun dalam dokumen perencanaan masih belum tajam. Indikator ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Indikator kinerja Utama, yang menjadi basis dalam menilai kinerja pemerintahan;
- Masih rendahnya kinerja reformasi birokrasi seperti (a) masih ada kebutuhan payung hukum pada beberapa sektor, (b) belum optimalnya pelaksanaan e-government, (c) belum optimalnya monitoring, evaluasi, dan pelaporan, dan (d) belum optimalnya akuntabilitas kinerja;
- Belum optimalnya transformasi layanan public yang berorientasi pada pemenuhan kualitas dan kepuasan masyarakat;
- Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kota Bekasi masih belum optimal, terutama dari dunia usaha dan kelompok masyarakat;
- Keterbatasan anggaran, SDM dan sarana pemerintahan yang menghambat pemenuhan layanan prima bagi masyarakat;
- Peningkatan kapasitas dan pengelolaan keuangan daerah.

2. Mewujudkan Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

Kualitas sumber daya manusia tetap menjadi isu strategis pembangunan kota Bekasi ke depan. Selain menjadi bagian dari SDGs, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga merupakan bagian dari agenda nasional yang juga sejalan dengan arah kebijakan RPJPD Kota Bekasi.

Lebh jauh, Isu strategis mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing terkait erat dengan permasalahan daerah yang meliputi :

- Lemahnya data dan informasi terkait layanan, data dan informasi ini terutama pada sektor sosial, kepemudaan dan olah raga, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



- Kesadaran masyarakat untuk beberapa isu utama masih belum optimal. seperti kesetaraan gender, kerukunan sosial dan toleransi, serta pelestarian cagar budaya.
- Keterbatasan dana juga menjadi kendala, keterbatasan tersebut terutama pada unit layanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti puskesmas, rumah sakit dan sekolah.
- Kerjasama dengan instansi vertikal (kemenag) untuk sektor Pendidikan masih perlu ditingkatkan. Kerjasama ini akan mempengaruhi APK dan APM SD/MI ataupun SMP/MTs di kota Bekasi.
- Tingkat kepadatan penduduk juga menjadi kendala untuk mitigasi lingkungan, terutama terkait dengan pengelolaan sampah dan sanitasi.
- Ketimpangan kesejahteraan masyarakat; dan
- Rendahnya Penempatan Angkatan kerja dapat dilihat pada belum optimalnya pemanfaatan informasi terkait ketersediaan lapangan lapangan kerja yang mudah diakses masyarakat, masih minimnya forum-forum sosialisasi dunia kerja dan pemanfaatan teknologi informasi yang menunjang pada tersalurkannya tenaga kerja yang profesional

3. Pembangunan Kota Berkelanjutan berbasis partisipasi;

Pembangunan kota Bekasi sesungguhnya merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan non pemerintah. Peran non pemerintah bukan hanya sebatas memberikan masukan kepada pemerintah Kota Bekasi, namun juga berperan sebagai pelaksana pembangunan. Kemajuan infrastruktur kota Bekasi misalnya, sebagiannya merupakan hasil kerja dunia usaha.

Keterbatasan pendanaan pembangunan, lebih jauh, menuntut adanya Kerjasama yang intensif antara pemerintah kota Bekasi dengan mitra kerjanya, terutama dari dunia usaha. Karena itu, pembangunan kota yang partisipatif akan tetap menjadi isu strategis pembangunan sampai tahun 2026. Pembangunan kota Bekasi menganut prinsip keberlanjutan, dimana aktifitas pembangunan harus disertai dengan upaya konservasi dan mitigasi lingkungan hidup. Tujuannya, supaya hasil pembangunan yang dilakukan masih dapat dinikmati oleh beberapa generasi mendatang.

Isu strategis pembangunan kota berkelanjutan berbasis partisipasi terkait erat dengan permasalahan kota Bekasi yang meliputi:

- Keterbatasan dana untuk pembangunan infrastruktur, jika dilihat dari struktur APBD setiap tahunnya, sebagian besar belanja diarahkan untuk pendanaan belanja pegawai. Untuk belanja infrastruktur pemerintah kota Bekasi masih perlu memberikan perhatian lebih. Alternative lain adalah dengan memanfaatkan kerjasama dengan pihak ketiga.



- Keterbatasan Lahan. Kota Bekasi termasuk dalam daerah yang padat, dengan kondisi ini ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur sering mengalami kendala, apalagi di lokasi lokasi strategis.
- Kemacetan, Ketidakseimbangan antara penggunaan kendaraan pribadi dengan angkutan umum yang mengakibatkan kapasitas jaringan jalan terlampaui. Akibatnya tingkat pelayanan jaringan jalan di Kota Bekasi menjadi rendah dan mengakibatkan pergerakan menjadi terhambat.
- Banjir, Masih adanya titik-titik lokasi banjir di kota Bekasi yaitu sebanyak 53 titik,
- Backlog perumahan dan kekumuhan, Pertumbuhan penduduk Kota Bekasi berada pada tingkat pertumbuhan yang tinggi, yang mengakibatkan permintaan lahan permukiman yang tinggi. Kebutuhan lahan sedemikian mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan lahan terbuka. Sebagian dari proses alih fungsi lahan tersebut bertentangan dengan RTRW Kota Bekasi.

4. Pemerataan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Tujuan dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aspek pembangunan ekonomi dalam hal ini tentunya tetap harus menjadi isu strategis pembangunan sampai tahun 2026. Penguatan sektor ekonomi baik sektor jasa maupun sektor lain yang berkontribusi terhadap PDRB masih perlu menjadi fokus utama.

Pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat, kota Bekasi perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi resesi global tahun 2023. Persiapan ini tentunya dilakukan untuk meminimalisir dampak resesi yang kemungkinan besar akan memberikan pukulan telak terhadap pertumbuhan ekonomi baik di skala nasional, provinsi dan kota.

Selain potensi resesi global, pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid 19 masih perlu terus berjalan. Dampak ekonomi yang terjadi di tahun 2020 dan 2021, perlu segera direcover sehingga masyarakat Kembali menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Isu strategis pemerataan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Bekasi juga terkait erat dengan permasalahan pembangunan, yakni:

- Rendahnya kandungan lokal kegiatan ekonomi Kota Bekasi yang dapat menghasilkan gap kemandirian ekonomi Kota Bekasi di masa yang akan datang;
- Rendahnya daya serap pasar domestik terhadap produk kegiatan ekonomi Kota Bekasi yang mengakibatkan gap berupa tidak tercapainya nilai



tambah kegiatan ekonomi kota yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal;

- Terbatasnya kesempatan kerja dari struktur ekonomi yang ada saat ini yang dapat menghasilkan gap kinerja ekonomi kota dalam hal pemenuhan lapangan kerja bagi tambahan angkatan kerja di Kota Bekasi;
- Rendahnya keterkaitan input-output kegiatan ekonomi Kota Bekasi yang sehingga menghasilkan multiplie effect yang kurang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi; dan
- Distribusi perkembangan ekonomi secara makro maupun spasial masih belum merata. Indeks gini rasio masih dalam kategori sedang, sehingga membutuhkan upaya peningkatan pemerataan pendapatan. Secara spasial distribusi perkembangan masih terlihat terakumulasi pada wilayah tengah dan utara.

Untuk Permasalahan dan isu strategis secara detail per urusan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel IV.1. dibawah.

IV. 1 Tabel Permasalahan per Urusan Pemerintah Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Belum Optimal	1. Tidak semua siswa dari keluarga tidak mampu bisa masuk disekolah milik pemerintah	Penduduk usia sekolah tidak bersekolah dan putus sekolah
		2. Kenakalan remaja (Games Online)	
		3. Biaya Transport melebihi biaya sekolah	
		1. Jumlah rombel di sekolah milik pemerintah melebihi smp/ melebihi daya tampung	Sebaran lokasi sekolah tidak berdasarkan kepadatan penduduk
		2. Sebaran pendidik/ kependidikan tidak sesuai kebutuhan	
		Belum meratanya kualitas sekolah	Sarana prasarana sekolah tidak merata
		Masih banyak lembaga Pendidikan yang dikelola masyarakat berstatus belum akreditasi	1. Kurangnya Pengendalian Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Masyarakat
			2. Pelayanan Pendidikan berbasis IT belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam " Smart School"
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan rumah sakit tidak merata	Masih adanya kesenjangan akses antar kelurahan terkait ketersediaan Puskesmas dan kesenjangan mutu terkait status akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit	Belum tersedianya Puskesmas di setiap kelurahan dan belum semua Puskesmas/RS terakreditasi
2	Belum tercapainya Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Terbatasnya media KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) tentang kesehatan	Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
3	Masih tingginya kasus anemia baik pada remaja putri maupun ibu hamil,	Terbatasnya media KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) tentang kesehatan	Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
4	Penambahan Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti Puskesmas dan RSUD Kelas D	alokasi anggaran di bagi untuk berbagai program	Terbatasnya anggaran
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	Masih tingginya/luas sebaran titik banjir (53 titik banjir)	Sistem Drainase yang belum terintegrasi dengan baik sehingga fungsinya belum optimal	Polder Masih Kurang
			Normalisasi Sungai
			Long Storage

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
2	Masih rendahnya prosentase RTH (%)		Sistem Perpompaan
		Terjadinya sumbatan sampah pada Saluran	Partisipasi Masyarakat rendah (buang sampah sembarangan)
		Tingginya perubahan tata guna lahan (%)	Kawasan permukiman (77,75%)
		Peran Serta Masyarakat	Penataan Sempadan Sungai /Situ/SUTET Mitra RTH
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan air minum dan sanitasi	Belum optimalnya layanan air minum dan sanitasi	Belum tercapainya layanan air minum 100%
			Belum tercapainya layanan sanitasi 100%
			Belum optimalnya penanganan pengembangan jaringan air dan sanitasi
2	Masih adanya lokasi kumuh yang belum ditangani	Masih rendahnya kualitas lingkungan perumahan	Masih ada lokasi kumuh
		Masih rendahnya kesadaran komunitas lokal dalam mempertahankan kualitas lingkungan tempat tinggalnya	Masih adanya kebiasaan buruk masyarakat, yang tidak menghargai lingkungan tempat tinggalnya
			Kurang tersosialisasikannya program-program pemerintah terkait kekumuhan
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTEBIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	Belum optimalnya layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan	Belum Optimalnya sarana prasarana kebakaran dan penyelamatan	Belum tersedian pos sektor diseluruh kecamatan
			Belum tersedia mobil pemadam kebakaran sesuai dengan SPM
			Masih kurangnya kompetensi SDM dalam penanggulangan kebakaran
			Masih rendahnya jumlah bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran
2	belum optimalnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Rendahnya kesiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana	Belum optimalnya SOP dan kebijakan penanganan bencana tingkat Kabupaten (SOP, RPB, RAD mitigasi, Renkon, Renoperasi, perda PB,Perbup status darurat)
		Belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Masih kurangnya kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana
			Kurangnya prasarana dan sarana penanggulangan bencana

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
3	Belum optimalnya pelaksanaan dan pelayanan keamanan dan kondisi daerah yang tertib	Masih rendahnya penegakan hukum	Masih lemahnya penyelesaian pelanggaran perda
		Belum terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat	Masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
			Masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	Belum optimalnya pendataan dan penanganan PPKS	Jumlah PPKS	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2	Minimnya jumlah PSKS yang tersertifikasi	Jumlah PSKS	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
3	Minimnya luas area TMP	Infrastruktur TMP	Taman Makam Pahlawan (TMP) Patriot Bangsa
G	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
1	Tingginya tingkat pengangguran terbuka	Terbatasnya lapangan pekerjaan	Rendahnya permintaan pasar
			Jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia
			Belum optimalnya proses penempatan pencari kerja
		Ketidaksesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan /permintaan pasar	Kurangnya keterampilan dan keahlian pencari kerja
H	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1	Keterbatasan kesempatan, informasi dan edukasi terkait partisipasi perempuan dalam pembangunan	Kurangnya partisipasi perempuan di segala bidang	Kurangnya pemahaman terkait pengarusutamaan gender
2	Kurang maksimalnya perlindungan terhadap perempuan	Kurangnya kegiatan promotif dan preventif terhadap permasalahan perempuan dari tindak kekerasan	Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan perempuan (KDRT)
3	Kurang maksimalnya pemenuhan hak anak	Kurangnya koordinasi, kerjasama dan sinergitas untuk menciptakan Kota Bekasi Layak Anak diantar para stakeholders, dunia usaha dan masyarakat	Pemenuhan hak-hak anak masih belum menjadi agenda utama para pihak khususnya dalam bidang pendidikan perlunya Sekolah Ramah Anak dan pemenuhan Hak Anak Disabilitas, bidang kesehatan perlunya Puskesmas Ramah Anak serta pemenuhan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			ruang bermain ramah anak dan aksesibilitas bagi anak disabilitas
4	Kurang maksimalnya perlindungan khusus terhadap anak	Kurangnya kegiatan promotif dan preventif terhadap permasalahan anak dari tindak kekerasan	Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan anak
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
1	Masih adanya daerah rawan pangan	Belum optimalnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah	Masih kurangnya stok cadangan pangan pemerintah daerah
		Masih adanya KK yang belum mampu menjangkau harga terhadap kebutuhan pangan	Kenaikan harga komoditas pangan strategis (stabilisasi harga pangan strategis)
2	Belum adanya skala prioritas dalam APBD Kota Bekasi	Belum adanya kegiatan pembudidayaan lahan pangan dari Dinas terkait	Masih adanya lahan kosong Milik Pemerintah Kabupaten Bekasi (Fasos/Fasum) dan lahan pekarangan milik Swasta di wilayah RW/Kel/Kec/di Kota Bekasi yang belum di fungsikan keanekaragaman pangan (P2L) dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kebutuhan pokok serta mencegah terjadinya Stunting.
3	Dinas terkait belum Fokus pada tugas dan fungsi di dalam pencapaian sasaran IKU	Belum adanya edukasi/petugas/SDM yang kurang melaksanakan pembinaan	
4	Belum adanya sinergitas antar bidang dalam menjalankan tugas dan fungsi	Peran Pemerintah Daerah belum maksimal	
5	Pengawasan Pangan segar yang asal tumbuhan yang optimal	Ruang Pengujian sampel pangan tidak memadai	Tiadak tersedianya ruangan pemeriksaan (Laboratorium) Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
J	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
K	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
1	Masih rendahnya cakupan pelayanan pengelolaan sampah (%)	Sarana dan prasarana yang belum memadai (Diestimasi total Kebutuhan armada Truk sampah pada Tahun 2020 sebanyak 219 unit truk sampah, Perkiraan kebutuhan armada truk sampah pada tahun 2022 meningkat menjadi	Masih Kurangnya Excavator
			Masih Kurangnya Dump truck
			Masih Kurangnya TPS3R

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		232 truk sampah dan tahun 2028 menjadi 277 truk)	
		Belum maksimalnya pelaksanaan pola kerjasama dengan Pihak Pengelola Sampah atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	Proyek PSEL dengan Mekanisme KSDPK
L	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
1	Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	Lokasi Layanan, Sarana Prasarana Layanan dan Sumber Daya Manusia	Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan
M	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
N	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	Strategi untuk meningkatkan pemasaran produk UPPKA untuk meningkatkan Pendapatan Keluarga	Bagaimana untuk mengetahui tingkat keberhasilan Program UPPKA di Kota Bekasi	Penganggaran untuk menunjang kegiatan pemasaran produk upпка
2	Tingginya Perumbuhan Penduduk di Kota Bekasi	Angka Kebersertaan KB Baru Masih Rendah	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Ketidaksiapan pasangan untuk menikah menimbulkan banyak risiko kesehatan terhadap ibu dan bayi yang dilahirkan
		Angka Revelensi Kontrasepsi Modern (MCPR) Rendah	Menikah Usia Muda. Satu dari sembilan anak perempuan berusia 20-24 tahun sudah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun.
		Kurangnya Tenaga Penyuluh Lapangan dengan Kopetensi yang sesuai	Ledakan Kelahiran Pasca Pandemi. Dengan laju pertumbuhan 1,25% saat ini, penduduk bertambah 3,2 juta orang setiap tahun.
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 (age specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Tinggi	Kurangnya dukungan Sumber Daya Manusia dan Pemerintah Pusat dan Daerah
		Masih Rendahnya Partisipasi Pria Dalam ber-KB	Melahirkan Usia Muda. Setiap tahunnya, banyak sekali bayi yang dilahirkan oleh orang-orang yang masih berusia sekitar 15 hingga 19 tahun. Kurangnya Perencanaan Keluarga.
			Masih Partisipasi Fasilitasi Layanan Kesehatan dalam Layanan KB Terutama dari Sektor Swasta

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Unmeet Tinggi	Rendahnya yang mampu melayani vasektomi Masih Rendah Partisipasi Fasilitas Layanan Kesehatan dalam Layanan KB Terutama dari Sektor Swasta Peserta KB Aktif (PA) dengan MKJP Masih Rendah
O	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
	Tingginya angka kemacetan	Tingkat jaringan jalan (Level of service/LOS) yang rendah, masih terdapat titik kemacetan lalu lintas	Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan
			Belum Mencukupi Sumber Daya Manusia (SDM) Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) yang berkompeten.
			Belum terbangunnya koordinasi lintas sektor yang efektif dalam penerapan dan pengendalian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
			Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) memerlukan perbaikan / penggantian secara berkala
			Banyaknya titik parkir liar yang mengambil bahu badan jalan
			Kurangnya Sosialisasi keselamatan berkendara di jalan
		Rendahnya minat masyarakat beralih ke moda transportasi umum massal	Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) belum memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi
			Rendahnya aksesibilitas ke angkutan umum (pola jaringan trayek angkutan umum belum tertata membentuk spiral jalur utama memusat ke terminal utama)
			Kurangnya sosialisasi keberadaan angkutan umum massal

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Kurangnya koordinasi stakeholder berkaitan dengan pengelolaan angkutan umum massal
			Belum adanya evaluasi tata kelola angkutan umum massal
		Rendahnya kesadaran masyarakat dalam keselamatan berlalu lintas	Kurangnya Sosialisasi keselamatan berkendara di jalan
			Masih banyak kendaraan yang tidak laik jalan beroperasi
			Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian berkala
			Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan
P	URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan publik	Belum optimalnya pemanfaatan E-Government dalam mendapatkan informasi dan layanan publik	Rendahnya pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi
		Dampak Covid-19 menyebabkan aktivitas ekonomi dimasyarakat belum sepenuhnya pulih sehingga berpengaruh terhadap produktifitas dan pertumbuhan ekonomi Dampak Covid-19 menyebabkan aktivitas ekonomi dimasyarakat belum sepenuhnya pulih sehingga berpengaruh terhadap produktifitas dan pertumbuhan ekonomi	Rendahnya tingkat literasi digital mengenai penanganan pandemi
		Belum optimalnya pengelolaan informasi publik	Belum optimalnya kapasitas sumber daya komunikasi
			Kurangnya sarana dan prasarana pendukung sumber daya komunikasi
			Belum optimalnya pemanfaatan layanan pengaduan masyarakat

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Belum optimal pembangunan infrastruktur jaringan TIK di Kota Bekasi	Terbatasnya ketersediaan jaringan fiber optik untuk mendukung kelancaran akses data dan informasi di Kota Bekasi (Existing Infrastuktur FO terbangun ±22,6 km
		Belum optimalnya penyediaan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika	Terbatasnya ketersediaan akses jaringan internet berkecepatan tinggi
		Belum optimalnya penyebaran akses internet wifi gratis di ruang publik	Terbatasnya kemudahan masyarakat Kota Bekasi dalam mengakses layanan dan informasi mengenai pemerintah Kota Bekasi melalui terkoneksi jaringan internet wifi gratis di kantor pemerintahan, ruang publik dan fasilitas publik di Kota Bekasi (existing ± 1000 titik wifi gratis)
		Belum optimal pembangunan infrastruktur jaringan TIK di Kota Bekasi	Terbatasnya ketersediaan jaringan fiber optik untuk mendukung kelancaran akses data dan informasi di Kota Bekasi (Existing Infrastuktur FO terbangun ±22,6 km
		Belum optimalnya penyediaan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika	Terbatasnya ketersediaan akses jaringan internet berkecepatan tinggi
		Belum optimalnya pemanfaatan hosting dan colocation pada infrastruktur pusat data Pemerintah Kota Bekasi yang telah tersertifikasi ISO 27001:2013	Rendahnya kesadaran untuk menjaga dan mengintegrasikan aset data dan pengelolaan sistem informasi layanan digital Perangkat Daerah
Q	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
1	Belum optimalnya produktivitas dan daya saing UMKM	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas produk UMKM	adanya produk UMKM yang belum tersertifikasi
			Kurangnya pembinaan bagi pelaku UMKM
			Belum adanya sentra UMKM di Kota Bekasi
			PKL blm tertata dengan baik
			kurangnya pemasaran produk umkm
			Kurangnya modal bagi UMKM
2		belum optimalnya kelembagaan koperasi	rendahnya kapasitas sdm pengurus koperasi

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Belum optimalnya sektor koperasi terhadap perekonomian		Pengetahuan tentang Perkoperasian di masyarakat masih relatif rendah Kurangnya modal bagi Koperasi Masih banyak koperasi yang belum memiliki izin simpan pinjam
3	1. Menentukan lokasi binaan PKL	Adanya perda K3 dan Kepwal zonasi larangan dagang	Banyaknya PKL yang menempati lokasi tidak sesuai dengan peeruntukannya
	2. Kesepakatan lokasi zona berdagang sesuai perkembangan kota bekasi dengan revisi Kepwal zonasi dan perda K3		
4	Perlunya sentra UMKM dan pembinaan bagi pelaku UMKM	Tidak adanya lahan untuk sentra dan kurangnya pengetahuan dari Pelaku UMKM	Belum adanya sentra UMKM di Kota Bekasi, Banyaknya UMKM Kota Bekasi yang belum Mandiri
5	Kurangnya sosialisasi tentang perkoperasian di masyarakat	Masih banyaknya kelompok usaha masyarakat yang belum berbadan hukum koperasi	Pengetahuan tentang Perkoperasian di masyarakat masih relatif rendah
6	Kepatuhan pengurus koperasi terhadap aturan relatif masih relatif rendah	Masih ada koperasi yang beroperasi tidak sesuai dengan peraturan	Penegakan aturan terhadap koperasi masih relatif kurang
7	sosialisasi tentang pentingnya ijin simpan pinjam kurang optimal	Masih banyak koperasi yang belum memiliki ijin simpan pinjam	Minat Pengurus Koperasi dalam mengurus ijin simpan Pinjam masih rendah
8	masih relatif rumit dan tingginya bunga Bank	Masih rendahnya akses koperasi terhadap sumber daya produktif (modal)	Permodalan Koperasi masih kurang
R	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
1	Kurang optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	Belum sesuai penerbitan perizinan dengan waktu yang ditetapkan	Kurangnya Sinkronisasi dengan OPD teknis terkait rekomendasi izin yang dimohonkan
		Masih kurangnya kualitas SDM	Kurangnya kontrol petugas verifikasi dan validasi berkas
		Kurangnya Bimtek mengenai Service Excellent bagi petugas FO	Kurangnya pemahaman petugas FO terhadap pelaksanaan standar pelayanan
2	Belum optimalnya pengembangan teknologi informasi	Belum optimal pengembangan teknologi informasi berbasis IT/E – Office	Masih belum memiliki ruang server yang memadai
			Belum lengkapnya format aplikasi pelayanan perizinan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
3	Terhambatnya Implementasi pelaksanaan regulasi di daerah yang berakibat pada tidak optimalnya realisasi investasi.	Belum terciptanya harmonisasi antara peraturan daerah dengan peraturan pusat terkait invetasi dan penanaman modal	Regulasi tentang investasi atau penanaman modal sering mengalami perubahan
		Belum optimalnya data potensi sumber daya, sarana, dan prasarana daerah yang terbaru	Belum terfasilitasinya investor yang akan berinvestasi
			Belum optimalnya promosi investasi melalui media promosi
		Belum terbaharuinya data potensi dan peluang/profil investasi	
		Kurang optimalnya perusahaan PMDN dalam menyampaikan LKPM	Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM dengan tertib
			Kurangnya pemahaman pelaku usaha akan OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)
S	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	Belum tersusunnya RAD Bidang Kepemudaan	Belum terciptanya sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda	Kurangnya minat atau kesadaran pemuda melalui pendidikan agama, pendidikan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi dan karakter kebangsaan;
			Kurangnya daya saing wirausaha pemuda;
			Kurangnya minat partisipasi pemuda pengembangan kepeloporan;
			Kurangnya minat partisipasi pemuda dalam pengembangan kepemimpinan (developing leadership character);
			Kurangnya sinergis organisasi kepemudaan dan komunitas kreatif.
		Kompleksitas persoalan pemuda	Maraknya pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan pemuda;
			Lemahnya perlindungan pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial, perilaku kekerasan fisik dan mental;
			Ancaman potensi tingginya pengangguran pemuda;

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Minimnya proteksi bagi pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi; Kurangnya Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda
3	Partisipasi dan kebugaran jasmani masyarakat berolahraga masih rendah	Belum Optimalnya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Kurangnya ketersediaan ruang terbuka publik; Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi olahraga masyarakat; Masyarakat lebih menggemari <i>social media</i> ketimbang berolahraga; Rendahnya penyelenggaraan event kejuaraan tingkat lokal
4	Sistem pembinaan olahraga prestasi belum dikembangkan dan dilakukan secara sistematis, terencana, berjenjang dan berkelanjutan	Pembibitan atlet dan pengembangan keolahragaan belum optimal	Minimnya pelatih yang bersertifikat; Belum optimalnya PPLPD; Belum optimalnya pengembangan industri olahraga; Rendahnya penyelenggaraan event kompetisi tingkat lokal; Terbatasnya sarana dan prasarana.
T	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
1	Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan layanan publik dalam penyediaan data sektoral yang berkualitas	Belum optimalnya ketersediaan data di OPD Belum optimalnya proses pengumpulan data	Data belum akurat dan terintegrasi Inkonsistensi data (Jangka Waktu proses pengambilan data)
U	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
	Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan layanan publik berdasarkan standar keamanan informasi yang ditetapkan	Belum optimalnya penanganan keamanan informasi Sistem Elektronik atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Belum optimal OPD dalam penerapan layanan keamanan informasi
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
1	Belum optimalnya pelestarian kesenian tradisional dan cagar budaya di kota bekasi	Belum optimalnya pembinaan terhadap para pelaku kesenian tradisional di kota bekasi	Kurangnya minat masyarakat terhadap kesenian tradisional Kurangnya event-event kesenian tradisional

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kesenian tradisional
		Fasilitasi pelestarian cagar budaya masih belum optimal	masih adanya obyek diduga cagar budaya yang belum dilakukan kajian oleh Tim Ahli cagar Budaya sehingga belum dapat direkomendasikan naskah penetapannya
			belum adanya museum pelestarian cagar budaya
W	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
1	Masih rendahnya Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi	Aksesibilitas Perpustakaan	Belum optimalnya pemberdayaan perpustakaan daerah, perpustakaan di tingkat sekolah dan perpustakaan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Belum berkembangnya pojok baca Belum optimalnya pengembangan perpustakaan digital Terbatasnya koleksi perpustakaan Semakin berkurangnya pengunjung perpustakaan Adanya perubahan perilaku membaca masyarakat dari bacaan cetak ke bacaan elektronik Gedung perpustakaan daerah tidak representatif/ sesuai standar Jumlah dan kompetensi Pustakawan belum memadai
X	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
1	Pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan untuk peningkatan kualitas layanan informasi kearsipan	Keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan untuk memfasilitasi terwujudnya peningkatan layanan kearsipan, penyimpanan, perlindungan dan pengamanan arsip dengan pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi Kearsipan)	Belum optimalnya pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, koleksi arsip dan sistem informasi pengelolaan kearsipan terintegrasi
Y	URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1	Belum terpenuhinya kuota ekspor hasil perikanan	Belum optimalnya kelembagaan yg mengurus pasar ekspor	Belum optimalnya sumber daya kelembagaan
		Belum optimalnya produksi perikanan	Belum optimalnya kapasitas SDM perikanan
			Sarana dan prasarana belum maksimal

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
2	Keterbatasan lahan		Luas lahan budidaya yang berkurang
3	Biaya produksi khususnya pakan ikan tinggi		Harga pakan ikan yang tinggi
4	Minimnya sarana dan prasarana budidaya di tingkat pembudidaya		Minimnya sarana, prasarana dan permodalan
5	Keterbatasan modal		Keterbatasan Ketersediaan Ikan Konsumsi
Z	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
1	belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian	Belum optimalnya kunjungan wisatawan	belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata
			belum optimalnya pemasaran destinasi pariwisata
			sertifikasi di sektor pariwisata masih minim
		daya saing ekonomi kreatif masih rendah	Belum tersedianya Tourist Information Center (TIC) dan Sentra Oleh-oleh Kota Bekasi
			kualitas dan kuantitas produk ekraf masih rendah
			kurangnya pembinaan para pelaku ekraf
AA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
1	Keterbatasan lahan pertanian	Lahan pertanian beralih fungsi dari pertanian ke non pertanian	Kebutuhan lahan semakin meningkat
			Harga tanah semakin meningkat
			Sektor pertanian kurang diminati sebagai suatu pekerjaan yang menjanjikan
2	Produksi peternakan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat Kota Bekasi	Keterbatasan lahan, sumber daya pendukung, sarana prasarana budidaya peternakan dan SDM peternakan	Usaha budidaya masih dilakukan secara konvensional
			Penggunaan teknologi budidaya peternakan yang belum optimal
			Peningkatan nilai tambah produk peternakan
			Ketersediaan sumber daya terbatas (SDM, Modal, bibit, pakan ternak dan Sarana prasarana usaha peternakan)
3	Ancaman penyakit hewan menular dan zoonosis	Kota Bekasi daerah tertular penyakit mulut dan kuku, dikelilingi oleh daerah tertular rabies dan anthrax	Ketersediaan sarana prasarana penanganan penyakit hewan menular dan zoonosis
		Unit pelayanan kesehatan hewan yang belum memenuhi kriteria teknis	Kompetensi pegawai teknis bidang kesehatan hewan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Kota Bekasi endemis penyakit flu burung	Lalu lintas hewan dan Produk hewan ke Kota Bekasi sangat tinggi
4	Jaminan keamanan pangan asal hewan	Sebagian besar pasar di Kota Bekasi masih melaksanakan pemotongan unggas	Hasil pemeriksaan laboratoium Pasar Tradisional positif virus flu burung
		Keterbatasan jumlah juru sembelih halal baik pada hewan besar, kecil dan unggas	Tempat penampungan dan pemotongan hewan masih belum terlokalisasi
		Beredarnya produk hewan yang belum memenuhi kriteria aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	Unit pelayanan kesehatan hewan belum memadai
		Rumah potong hewan belum memenuhi kriteria teknis	Pemeliharaan hewan (domestik dan liar) oleh warga
		belum tersedianya rumah potong hewan unggas	Penanganan produk pangan asal hewan (PAH) belum memenuhi standar hygiene sanitasi dan rantai dingin
		Unit usaha produksi dan distribusi produk hewan yang belum menerapkan standar teknis kesehatan masyarakat veteriner	Banyak unit usaha PAH dan Produk hewan non pangan (PHNP) belum memenuhi persyaratan teknis kesmavet
			Belum Optimalnya Rumah Potong Hewan
			Terbatasnya jumlah Juru sembelih halal
			Penggunaan bahan kimia berbahaya
			Kecurangan dan pemalsuan pangan asal hewan
			Peredaran produk hewan non pangan untuk tujuan pangan
5	Peredaran Obat Hewan Ilegal	Peredaran obat hewan yang belum memenuhi standar obat hewan Indonesia/ilegal	Peredaran obat hewan yang belum memenuhi standar obat hewan Indonesia/ilegal
		Penggunaan obat hewan yang tidak sesuai ketentuan	Penggunaan obat hewan yang tidak sesuai ketentuan
6	Alih Fungsi Lahan Pertanian	Keterbatasan lahan pertanian, sumber daya pendukung, sarana prasarana budidaya pertanian dan SDM pertanian	Keterbatasan lahan pertanian
7	Sektor pertanian kurang diminati sebagai pekerjaan yang menjanjikan		Kurangnya Minat Generasi Muda untuk melakukan usaha Pertanian
			Keterbatasan Sarana dan prasarana Pertanian
AB	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
1	Ketidakstabilan harga barang kebutuhan pokok	Harga Kebutuhan Barang Pokok terpengaruh oleh kenaikan harga barang lainnya pada situasi tertentu	Kebijakan Pemerintah :

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		- Kenaikan Harga BBM	- Kenaikan Harga BBM
		- Hari Raya	- Kenaikan Gaji PNS/TNI/POLRI
			Permintaan/Kebutuhan Masyarakat terus meningkat menjelang Hari Raya namun jumlah ketersediaan tidak ikut meningkat (sama)
			Kelangkaan barang kebutuhan tertentu yang tidak terprediksi sebelumnya
			Inflasi Kebutuhan Barang Pokok
2	pasar tradisional yang nyaman untuk masyarakat berbelanja	pasar yang masih semrawut/belum tertata dengan rapi/baik	Sarana prasarana yang belum memadai SDM Pengelola pasar yang belum memadai
AC	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
1	Banyak IKM yang gulung tikar	Permintaan masyarakat terhadap produk berkurang biaya operasional lebih tinggi daripada keuntungan kurangnya event-event sebagai wadah promosi	Pandemi Covid 19 Kebijakan Pemerintah : - Kenaikan Harga BBM - Kenaikan UMR
AD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)		
1	laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah	Tidak maksimalnya capaian IKK LPPD Pelaksanaan Evaluasi LPPD tahun 2022 ini dan seterusnya akan tetap menggunakan aplikasi elppd.kemendagri.go.id	Perangkat Daerah belum memahami dan menguasai data Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Perubahan Kebijakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap Tahunnya Penyampaian LPPD dan evaluasi LPPD dilaksanakan melalui daring aplikasi elppd.kemendagri.go.id yang masih dalam tahap pengembangan dari kemendagri Jaringan internet yang lambat sehingga terkendala pada saat proses upload dan evaluasi IKK LPPD kurangnya saran dan prasarana dalam penyusunan dan evaluasi LPPD Inventarisasi kebutuhan paket pengadaan barang/jasa belum optimal

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Perangkat Daerah kurang memahami mekanisme penginputan capaian penerapan SPM melalui aplikasi	Perubahan kebijakan mekanisme evaluasi capaian penerapan SPM yang semula per tahun menjadi per triwulan dan keterbatasan sumber data dan sumber daya Perangkat Daerah dalam melaporkan hasil capaiannya
2	Kurangnya Koordinasi dalam rangka Cipta Kondisi dan Stabilitas Wilayah	Kurangnya sinkronisasi kebijakan antara Instansi dalam menetapkan kebijakan pelayanan masyarakat	Belum optimalnya strategi dan sinergitas anatar intansi bertikal dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat
			Kurangnya intensitas rapat Koordinasi Forum Komunikasi Daerah Sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal
3	Belum terdapat gambaran secara menyeluruh tentang karakteristik kelurahan dalam mengukur status kemajuan kelurahan swadaya ke swakarya menuju swasembada	Pelaksanaan penginputan database kelurahan oleh unsur Kelurahan (Operator Kelurahan) melalui aplikasi Prodeskel yang masih belum optimal	Kurangnya pemahaman unsur Kelurahan dan Kecamatan tentang tata cara penyusunan profil kelurahan dalam aplikasi database Prodeskel (Profil Desa dan Kelurahan)
			kurangnya saran dan prasarana kelurahan dan kecamatan dalam melakukan penginputan database
4	Lambatnya proses verifikasi data calon penerima hibah	SOP hibah berupa uang belum di laksanakan secara optimal terkait hibah untuk RT dan RW di Kota Bekasi	masih kurangnya SDM untuk pelaksanaan verifikasi data hibah dan klarifikasi lapangan
5	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan analisis pengembangan kebijakan kesejahteraan Masyarakat
			Belum optimalnya pengelolaan data base kelembagaan sosial keagamaan dan kesejahteraan Sosial
			Belum terinventarisir secara optimal potensi resiko sosial dan akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan sosial dan keagamaan
			Minimnya koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan kebijakan bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan
6	Belum optimalnya perumusan produk hukum terkait penyelenggaraan pemerintahan	Belum optimalnya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah	Pembentukan produk hukum daerah belum optimal
			Peraturan perundangundangan yang sangat dinamis
		Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait	Perbedaan pemahaman dan penafsiran aturan hukum
			Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
7	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan bidang perekonomian	Belum optimalnya kinerja BUMD	Kurang optimalnya pembinaan kinerja BUMD
			Masih kurangnya kebijakan daerah dalam mendukung peningkatan kinerja BUMD
		Belum optimalnya strategi Pengendalian Inflasi	Literasi data yang masih rendah di pemangku kepentingan dan OPD terkait yang terlibat dalam Pengendalian Inflasi
			Belum adanya data yang akurat dan komprehensif dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah
			Belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi TPID
		Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif yang belum optimal	Belum terwujudnya pengembangan ekonomi kreatif yang berdaya saing
8	Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang administrasi pembangunan	Hasil kebijakan pembangunan masih belum termonitor dengan baik	Hasil kajian analisis terkait kebijakan pembangunan belum diaplikasikan dengan baik
		Pelaksanaan/ implementasi kebijakan daerah yang belum ditindaklanjuti secara serius	Regulasi terkait kebijakan pembangunan belum mampu mengatur proses pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien
			Keterbatasan SDM dalam melaksanakan pengendalian kegiatan
9	Belum Optimalnya kualitas perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa belum optimal	Inventarisasi kebutuhan paket pengadaan barang/jasa belum optimal
			Perencanaan pengadaan barang/jasa di OPD belum sepenuhnya memperhatikan waktu proses pengadaan
			Belum optimalnya kebijakan penyusunan Rencana Umum Pengadaan sesuai aturan pengadaan barang/jasa Pemerintah
		Kompetensi SDM pengadaan barang/jasa kurang	Jumlah personil bersertifikat PBJ kurang
		Pemetaan anggaran paket pekerjaan LPBJ kurang efektif dan efisien	Aplikasi pendukung belum terintegrasi dengan aplikasi perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah
10	Belum Optimalnya kualitas perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan	Kurang pemahaman OPD dalam memetakan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah	Perubahan peta kebutuhan kerjasama setiap Tahunnya
			masih kurangnya SDM pada Perangkat Daerah untuk pelaksanaan pemetaan kebutuhan kerja sama

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang kerjasama	Perangkat Daerah Belum optimal melakukan evaluasi pelaksanaan kewajiban dalam kerjasama yg menjadi tupoksi Perangkat Daerah.	Sistem yang mensinergikan antara Perangkat Daerah dengan Sekretariat TTKSD dalam tindaklanjut pelaksanaan Kerja Sama Dearah secara sistem baru dibangun
			Perangkat Daerah kurang memahami pelaksanaan link kerja sama pada melalui sistem aplikasi digitalisasi kerjasama daerah
			Aplikasi evaluasi kerjasama berbasis web masih dalam pengembangan
			Perangkat Daerah belum optimal melakukakan operasional penggunaan akun verifikasi dan evaluasi pelaksanaan objek perjanjian
			rendahnya tingkat penggunaan aplikasi kerja sama di perangkat daerah sehingga dalam tindaklanjut hasil evaluasi kerja sama daerah tidak optimal
			Perangkat Daerah belum melakukan uji coba dalam penggunaan sistem aplikasi kerja sama daerah
		lemahnya koordinasi antar perangkat daerah di bidang kerjasama.	Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah dalam penyusunan Dokumen Kerja Sama Daerah
			masih kurangnya SDM pada Perangkat Daerah dalam penyusunan kerja sama
11	Belum optimalnya kualitas perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administratif bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat PD	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik perangkat daerah
		Kelembagaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi orgasasi perangkat daerah belum optimal	Paradigma proses bisnis belum menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan SOTK perangkat daerah
			belum sesuaiinya struktur organisasi, dan jumlah pegawai untuk mewujudkan organisasi tepat ukuran dan fungsi yang lebih optimal dalam peningkatan kualitas dan akselerasi pelayanan publik.
			Pemahaman ASN terhadap core bisnis dan tujuan Perangkat Daerah masih kurang
			Dasar penyusunan SOTK belum mempertimbangkan keterkaitan dengan dokumen perencanaan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Rendahnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi	Belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja
12	Belum Optimalnya kualitas penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan Sekretariat Daerah.	Belum maksimalnya koordinasi antar unit Bagian Sekretariat Daerah dalam keterlibatan proses perencanaan	Keterbatasan waktu koordinasi karena tingginya kesibukan kegiatan tupoksi masing-masing unit Bagian Sekretariat Daerah
13	Lambatnya hasil pembangunan di terima oleh masyarakat	Belum Optimalnya penyerapan anggaran pemerintah daerah	PPTK yang tidak dapat memenuhi jadwal waktu penyusunan laporan keuangan
			Kehati-hatian dalam Membelanjakan Anggaran
			Kesalahan dalam penyusunan RKA OPD
AE	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DPRD)		
1	Potensi keterlambatan pembahasan dan persetujuan KUA PPAS APBD dan KUA PPAS APBD Perubahan	Potensi keterlambatan penyampaian Rancangan Nota Kesepakatan tentang KUA PPAS APBD dan KUA PPAS APBD Perubahan	Potensi keterlambatan penyusunan Rancangan Nota Kesepakatan tentang KUA PPAS APBD dan KUA PPAS APBD Perubahan
2	Potensi keterlambatan pembahasan dan persetujuan APBD dan APBD Perubahan	Potensi keterlambatan penyampaian Rancangan Perda tentang APBD dan APBD Perubahan	Potensi keterlambatan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan APBD Perubahan
3	Potensi keterlambatan pembahasan dan persetujuan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Potensi keterlambatan penyampaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Potensi keterlambatan penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
4	Potensi keterlambatan pembahasan LRA Semester I dan Prognosis untuk keperluan APBD Perubahan	Potensi keterlambatan penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Semester I dan Prognosis Keuangan Pemerintah Daerah	Potensi Keterlambatan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Semester I dan Prognosis Keuangan Pemerintah Daerah
5	Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tentang Hasil Pemeriksaan LKPD yang harus memperhatikan tahapan dan rekomendasi hasil temuan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.	Potensi Temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tentang Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Potensi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang masih belum sesuai ketentuan BPK
6	Dalam Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna berdasarkan kuorum yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib DPRD	Potensi Kehadiran Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi	Potensi Kehadiran Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
7	Keterlambatan berkas-berkas pendukung yang harus dilengkapi pada Paripurna Pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi	Potensi keterlambatan Paripurna Pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi	Potensi keterlambatan Paripurna Pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi
AF	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN)		
1	Belum optimalnya koordinasi, integrasi, digitalisasi dan	Belum terintegrasi secara menyeluruh sistem informasi perencanaan, penganggaran pembangunan, sampai dengan penatausahaan dan pengukuran capaian kinerja.	Belum tersedianya sietem penatausahaan dalam SIPD sehingga masih perlu input ulang dalam SIMDA keuangan.
	sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi	Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian	Belum tersedianya pedoman yang jelas terkait pengendalian
		pembangunan daerah	pembangunan daerah
		Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring	Belum tersedianya reward dan punishment terkait hasil monitoring
		dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
AG	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN)		
1	Belum optimalnya kebijakan pembangunan yang berbasis penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek dan inovasi daerah	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek dan inovasi daerah untuk mendukung kebijakan	Belum optimalnya hasil kelitbangan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat
			Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang pemanfaatan hasil penelitian
			Masih terbatasnya data base (sistem informasi) penelitian dan pengembangan
			Belum adanya link and match antara kebutuhan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
			Belum terbangunnya ekosistem inovasi
AH	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEUANGAN)		
1	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Belum optimalnya proses penagihan pajak dan retribusi daerah	Belum adanya perda turunan dari UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah
			kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah.
			rendahnya kualitas SDM penagih pajak dan retribusi daerah



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			belum adanya kajian metodologi penetapan target pendapatan daerah, dan perumusan perwal penetapan target pendapatan daerah belum optimalnya digitalisasi pelayanan terkait penagihan pajak dan retribusi daerah kurangnya sosialisasi pajak dan retribusi daerah kepada WP/WR maupun calon WP/WR belum optimalnya reward and punishment kepada WP/WR yang taat maupun tidak taat membayar pajak/retribusi tepat waktu
2	Adanya perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan penyesuaian terhadap peraturan yang berlaku yang mempengaruhi proses penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan	Masih kurangnya implementasi regulasi dalam pelaksanaan dan penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Belum adanya petunjuk teknis terbaru yang mengatur tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBD Tidak sinkronnya data penerimaan Kas Daerah Penghasil Pajak dan Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Bank Persepsi serta Pelaporan yang tidak teradministrasi dengan baik
3	Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang belum tertib dan taat pada peraturan yang berlaku	Kapasitas SDM pengelola keuangan/kegiatan di Perangkat Daerah	Masih adanya ketidakpatuhan dan keterlambatan perangkat daerah dalam penyelesaian pertanggungjawaban Belanja Terdapatnya Pelaporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang tidak teradministrasi dengan baik Masih kurangnya Bimbingan Teknis tentang pengelolaan keuangan daerah kepada pengelola keuangan/kegiatan di perangkat daerah Adanya mutasi dan rotasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang mengakibatkan adanya perubahan pejabat pengelola keuangan/kegiatan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Kurang tertibnya Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah dalam penginputan pajak ke Simda yang sudah disetorkan ke Bank Jabar, sehingga terjadi perbedaan jumlah penerimaan antara penerimaan di Simda dengan jumlah penerimaan di Kas Daerah
4	Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan dan penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	Sarana dan prasarana pendukung	Kondisi sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai Belum terintegrasinya sistem aplikasi kas daerah dengan OPD penghasil
5	Masih adanya ketidakpatuhan dan keterlambatan dalam penyelesaian masing- masing tahapan penyusunan APBD	Sumber Daya Manusia	Sulitnya memberikan pemahaman terhadap stakeholder terkait tahapan penyusunan APBD Masih adanya ketidakpahaman dan keterlambatan dalam penyelesaian masing-masing tahapan penyusunan APBD Kurangnya pemahaman OPD dalam proses penyusunan dokumen penganggaran terkait RKA dan DPA SKPD Kurangnya pemahaman OPD dalam proses penganggaran hibah dan bansos sehingga ditemukan adanya ketidaksesuaian pencantuman rekening dalam penganggaran hibah dan bansos Kurangnya ketelitian dan pemahaman terhadap peraturan dalam melaksanakan verifikasi dokumen RKA dan DPA SKPD
6	Adanya kebijakan penggunaan teknologi informai (aplikasi) terpusat dan masih dalam tahap pengembangan yang mengakibatkan kendala dalam proses penyusunan APBD secara cepat dan akurat	Teknologi Informasi (Aplikasi) pengelolaan keuangan terkait	Adanya kewajiban penggunaan aplikasi SIPD pada proses penyusunan APBD Masih terbatasnya menu pada SIPD Adanya kesulitan dalam mengakses SIPD karena server yang hanya ada di pusat Penggunaan aplikasi keuangan lain untuk mengakomodir kebutuhan penyusunan APBD mengakibatkan waktu pengerjaan menjadi lebih lama SIPD tidak dapat terintegrasi dengan aplikasi pendukung lain yang dibunakan oleh Pemerintah kota Bekasi.

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
7	Adanya perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan penyesuaian terhadap peraturan yang berlaku yang mempengaruhi proses penganggaran	Peraturan perundang- undangan dan peraturan pelaksanaan	Masih terbatasnya instrumen penganggaran/juklak/SOP yang digunakan dalam proses penyusunan APBD
8	Masih terdapat potensi aset yang belum tercatat dalam neraca	Belum terlaksananya Sensus BMD selama 10 tahun terakhir.	Terdapat beda luas lahan dengan data KIB
			Pencatatan dalam KIB belum dilengkapi dengan keterangan
			Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas
9	Kurangnya ketersediaan SDM yang mendukung dalam pengelolaan BMD	Kurangnya pemahaman SDM terkait pengelolaan BMD	Kurangnya pelaksanaan Bimtek, diklat, pelatihan, sosialisasi terkait Pengelolaan BMD
			Terbatasnya alokasi anggaran peningkatan SDM
10	Rendahnya capaian pengamanan BMD	Rendahnya capaian sertifikasi tanah	Tidak sesuai data administrasi dengan fisik
			tidak tersedianya data pendukung proses pensertifikatan
			Ketidakpastian jangka waktu penyelesaian sertifikat di instansi yang berwenang
			Kurangnya alokasi anggaran pembuatan dan pemasangan plang aset
		Siklus penghapusan BMD yang lambat	Kurang tersedianya gudang penyimpanan BMD rusak berat yang memadai
			Belum adanya JFT Penilai BMD
			Belum diusulkannya kebutuhan atas JFT Penilai BMD oleh Pemerintah Kota Bekasi
		Belum terlaksananya monitoring dan evaluasi pengamanan BMD secara optimal	Kurangnya SDM
11	Masih kurangnya implementasi regulasi dalam pemanfaatan BMD	Belum adanya sistem database pemanfaatan PSU melalui mekanisme sewa	Belum tersedianya alokasi anggaran pengadaan sistem database pemanfaatan PSU melalui mekanisme sewa
			Besarnya jumlah piutang sewa BMD
			Kurangnya monitoring dan evaluasi pemanfaatan aset
		Belum tersedianya JFT Penilai BMD yang bersertifikat	Terbatasnya formasi JFT Penilai BMD



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
AI	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN)		
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Manajemen ASN	Belum optimalnya pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan Belum optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya Belum semua pegawai memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian	Kesenjangan jumlah, kualitas, dan ketidaksinkronan antara kompetensi ASN dengan kebutuhan Ketentuan dalam menempatkan pegawai pada tempat yang tepat. Meningkatkan semangat kerja yang perwujudan dari moral kerja yang tinggi. Belum optimalnya kombinasi antara keterampilan, pengetahuan, sikap dan perilaku yang tercermin melalui perilaku kinerja yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi sesuai dengan jabatan Pelaksanaan manajemen ASN belum sepenuhnya berdasarkan perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan, serta Setiap instansi pemerintah harus menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) tuntutan kebutuhan media dan teknologi informasi yang terus meningkat dalam rangka pelayanan manajemen kepegawaian pelaksanaan pola karier pada jabatan fungsional belum sepenuhnya berdasarkan pada anjab/abk dan peta jabatan pada masing-masing perangkat daerah
2	Belum adanya kebijakan yang menetapkan standar kompetensi jabatan administrator, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana	Belum dapat menetapkan kesenjangan kompetensi sebagai dasar penetapan kebutuhan pengembangan kompetensi Perolehan hasil penilaian mandiri Penerapan Sistem Merit oleh Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) pada aspek pengembangan karir masih rendah dimana indikator utama yang harus dipenuhi adalah penetapan Standar Kompetensi Jabatan untuk seluruh jenjang jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Belum ditetapkannya Standar Kompetensi Jabatan untuk seluruh jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (baru ditetapkan untuk jenjang eselon II)
3		Belum optimalnya pemahaman konsep penyusunan HCDP	Belum tersusunnya dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi (Human Capital

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Perlunya pengembangan kompetensi sdm dalam pemahaman konsep dan penyusunan HCDP Kota Bekasi	Belum di tetapkannya Standar Kompetensi Jabatan untuk seluruh jenjang dan nama jabatan PNS	Development Plan /HCDP) sebagai masterplan pengembangan kompetensi ASN
4	Belum terpenuhinya hak PNS dalam pengembangan kompetensi minimal 20 jp setiap tahunnya.	Nilai domain kompetensi yang belum mencapai 40%	Perolehan nilai Indeks Profesionalitas ASN masih pada kategori sangat rendah (55,01)
5	Belum teralokasikannya anggaran pengembangan kompetensi paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah	Pelaksanaan pengembangan kompetensi (manajerial, teknis, fungsional, dan sosial kultural) belum optimal	Kompetensi PNS Kota Bekasi yang belum optimal
6	Pemenuhan standar kelayakan penyelenggaraan penilaian kompetensi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Penetapan kategori pengakuan kelayakan/akreditasi penyelenggaraan penilaian kompetensi Kategori C dengan masa berlaku 2 (dua) tahun oleh Badan Kepegawaian Negara Kewenangan penilaian kompetensi Kategori C sebatas pada penilaian kompetensi jenjang jabatan pengawas dan pelaksana	Belum optimalnya pelaksanaan penilaian kompetensi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
7	Belum ditetapkannya kebijakan tentang mekanisme manajemen talenta dalam penerapan sistem merit	Belum dilaksanakannya penilaian kompetensi sebagai salah satu aspek dalam penentuan pemetaan pegawai dalam nine box manajemen talenta Hasil penilaian kompetensi memiliki masa berlaku 2(dua) tahun dan besaran biaya Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) per orangnya masih terbilang cukup besar	Belum dilaksanakannya pemetaan pegawai dalam "nine box" manajemen talenta
8	Pemahaman ASN terhadap penyusunan dokumen SKP masih rendah	Pedoman penyusunan SKP belum tersosialisasikan kepada seluruh ASN	Perubahan regulasi penilaian kinerja yang dinamis
9	Belum adanya komitmen bersama untuk melaksanakan penilaian kinerja yang objektif dari pejabat penilai	Belum adanya pemahaman terhadap arti pentingnya pelaksanaan penilaian kinerja yang objektif, terukur dan transparan terhadap kinerja pegawai	Belum diterapkannya mekanisme sistem penilaian kinerja yang bersifat objektif, terukur dan transparan untuk mengukur capaian kinerja tiap pegawai
10	Belum diterapkannya reward dan punishment berdasarkan penilaian kinerja pegawai	Belum adanya sistem penilaian kinerja yang bersifat objektif, terukur dan transparan terhadap kinerja pegawai	Belum adanya perbedaan perlakuan terhadap pegawai yang berkinerja sangat baik dengan yang berkinerja biasa bahkan rendah
11	Penegakkan disiplin belum optimal	Komitmen pejabat yang berwenang menghukum masih rendah	Masih ditemukannya aparatur yang melakukan indisipliner

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
AJ	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN (INSPEKTORAT DAERAH)		
1	Inspektorat Daerah	Belum optimalnya pengawasan internal yang efektif dan menghasilkan kegiatan penjaminan (assurance) dan layanan konsultasi yang berkualitas	Lemahnya Pengawasan Internal Pada Masing-Masing Perangkat Daerah
	belum memiliki sistem		Kurang Optimalnya Penyusunan Perencanaan di Perangkat Daerah
	deteksi dini (early		Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota tidak Singkron

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Belum Optimal	1. Tidak semua siswa dari keluarga tidak mampu bisa masuk disekolah milik pemerintah	Penduduk usia sekolah tidak bersekolah dan putus sekolah
		2. Kenakalan remaja (Games Online)	
		3. Biaya Transport melebihi biaya sekolah	
		1. Jumlah rombongan belajar di sekolah milik pemerintah melebihi smp/ melebihi daya tampung	Sebaran lokasi sekolah tidak berdasarkan kepadatan penduduk
		2. Sebaran pendidik/ kependidikan tidak sesuai kebutuhan	
		Belum meratanya kualitas sekolah	Sarana prasarana sekolah tidak merata
		Masih banyak lembaga Pendidikan yang dikelola masyarakat berstatus belum akreditasi	1. Kurangnya Pengendalian Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Masyarakat 2. Pelayanan Pendidikan berbasis IT belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam " Smart School"
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan rumah sakit tidak merata	Masih adanya kesenjangan akses antar kelurahan terkait ketersediaan Puskesmas dan kesenjangan mutu terkait status akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit	Belum tersedianya Puskesmas di setiap kelurahan dan belum semua Puskesmas/RS terakreditasi
2	Belum tercapainya Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Terbatasnya media KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) tentang kesehatan	Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
3	Masih tingginya kasus anemia baik pada remaja putri maupun ibu hamil,	Terbatasnya media KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) tentang kesehatan	Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
4	Penambahan Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti Puskesmas dan RSUD Kelas D	alokasi anggaran di bagi untuk berbagai program	Terbatasnya anggaran
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	Masih tingginya/luas sebaran titik banjir (53 titik banjir)	Sistem Drainase yang belum terintegrasi dengan baik sehingga fungsinya belum optimal	Polder Masih Kurang
			Normalisasi Sungai
			Long Storage
			Sistem Perpompaaan
		Terjadinya sumbatan sampah pada Saluran	Partisipasi Masyarakat rendah (buang sampah sembarangan)
2	Masih rendahnya prosentase RTH (%)	Tingginya perubahan tata guna lahan (%)	Kawasan permukiman (77,75%)
			Penataan Sempadan Sungai /Situ/SUTET
		Peran Serta Masyarakat	Mitra RTH
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan air minum dan sanitasi	Belum optimalnya layanan air minum dan sanitasi	Belum tercapainya layanan air minum 100%
			Belum tercapainya layanan sanitasi 100%
			Belum optimalnya penanganan pengembangan jaringan air dan sanitasi
2	Masih adanya lokasi kumuh yang belum ditangani	Masih rendahnya kualitas lingkungan perumahan	Masih ada lokasi kumuh
		Masih rendahnya kesadaran komunitas lokal dalam mempertahankan kualitas lingkungan tempat tinggalnya	Masih adanya kebiasaan buruk masyarakat, yang tidak menghargailingkungan tempat tinggalnya
			Kurang tersosialisasikannya program-program pemerintah terkait kekumuhan
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTEBIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	Belum optimalnya layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan	Belum Optimalnya sarana prasarana kebakaran dan penyelamatan	Belum tersedian pos sektor diselurah kecamatan
			Belum tersedia mobil pemadam kebakaran sesuai dengan SPM
			Masih kurangnya kompetensi SDM dalam penanggulangan kebakaran
			Masih rendahnya jumlah bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
2	belum optimalnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Rendahnya kesiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana	Belum optimalnya SOP dan kebijakan penanganan bencana tingkat Kabupaten (SOP, RPB, RAD mitigasi, Renkon, Renoperasi, perda PB, Perbup status darurat)
		Belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Masih kurangnya kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana Kurangnya prasarana dan sarana penanggulangan bencana
3	Belum optimalnya pelaksanaan dan pelayanan keamanan dan kondisi daerah yang tertib	Masih rendahnya penegakan hukum	Masih lemahnya penyelesaian pelanggaran perda
		Belum terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat	Masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	Belum optimalnya pendataan dan penanganan PPKS	Jumlah PPKS	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2	Minimnya jumlah PSKS yang tersertifikasi	Jumlah PSKS	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
3	Minimnya luas area TMP	Infrastruktur TMP	Taman Makam Pahlawan (TMP) Patriot Bangsa
G	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
1	Tingginya tingkat pengangguran terbuka	Terbatasnya lapangan pekerjaan	Rendahnya permintaan pasar Jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia Belum optimalnya proses penempatan pencari kerja
		Ketidaksesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan /permintaan pasar	Kurangnya keterampilan dan keahlian pencari kerja
H	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1	Keterbatasan kesempatan, informasi dan edukasi terkait partisipasi perempuan dalam pembangunan	Kurangnya partisipasi perempuan di segala bidang	Kurangnya pemahaman terkait pengarusutamaan gender

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
2	Kurang maksimalnya perlindungan terhadap perempuan	Kurangnya kegiatan promotif dan preventif terhadap permasalahan perempuan dari tindak kekerasan	Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan perempuan (KDRT)
3	Kurang maksimalnya pemenuhan hak anak	Kurangnya koordinasi, kerjasama dan sinergitas untuk menciptakan Kota Bekasi Layak Anak diantar para stakeholders, dunia usaha dan masyarakat	Pemenuhan hak-hak anak masih belum menjadi agenda utama para pihak khususnya dalam bidang pendidikan perlunya Sekolah Ramah Anak dan pemenuhan Hak Anak Disabilitas, bidang kesehatan perlunya Puskesmas Ramah Anak serta pemenuhan ruang bermain ramah anak dan aksesibilitas bagi anak disabilitas
4	Kurang maksimalnya perlindungan khusus terhadap anak	Kurangnya kegiatan promotif dan preventif terhadap permasalahan anak dari tindak kekerasan	Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan anak
I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
1	Masih adanya daerah rawan pangan	Belum optimalnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah	Masih kurangnya stok cadangan pangan pemerintah daerah
		Masih adanya KK yang belum mampu menjangkau harga terhadap kebutuhan pangan	Kenaikan harga komoditas pangan strategis (stabilisasi harga pangan strategis)
2	Belum adanya skala prioritas dalam APBD Kota Bekasi	Belum adanya kegiatan pembudidayaan lahan pangan dari Dinas terkait	Masih adanya lahan kosong Milik Pemerintah Kabupaten Bekasi (Fasos/Fasum) dan lahan pekarangan milik Swasta di wilayah RW/Kel/Kec/di Kota Bekasi yang belum di fungsikan keanekaragaman pangan (P2L) dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kebutuhan pokok serta mencegah terjadinya Stunting.
3	Dinas terkait belum Fokus pada tugas dan fungsi di dalam pencapaian sasaran IKU	Belum adanya edukasi/petugas/SDM yang kurang melaksanakan pembinaan	
4	Belum adanya sinergitas antar bidang dalam menjalankan tugas dan fungsi	Peran Pemerintah Daerah belum maksimal	
5	Pengawasan Pangan segar yang asal tumbuhan yang optimal	Ruang Pengujian sampel pangan tidak memadai	Tiada tersedianya ruangan pemeriksaan (Laboratorium) Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
J URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
K	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
1	Masih rendahnya cakupan pelayanan pengelolaan sampah (%)	Sarana dan prasarana yang belum memadai (Diestimasikan total Kebutuhan armada Truk sampah pada Tahun 2020 sebanyak 219 unit truk sampah, Perkiraan kebutuhan armada truk sampah pada tahun 2022 meningkat menjadi 232 truk sampah dan tahun 2028 menjadi 277 truk)	Masih Kurangnya Excavator
			Masih Kurangnya Dump truck
			Masih Kurangnya TPS3R
		Belum maksimalnya pelaksanaan pola kerjasama dengan Pihak Pengelola Sampah atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	Proyek PSEL dengan Mekanisme KSDPK
L	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
1	Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	Lokasi Layanan, Sarana Prasarana Layanan dan Sumber Daya Manusia	Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan
M	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
N	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	Strategi untuk meningkatkan pemasaran produk UPPKA untuk meningkatkan Pendapatan Keluarga	Bagaimana untuk mengetahui tingkat keberhasilan Program UPPKA di Kota Bekasi	Penganggaran untuk menunjang kegiatan pemasaran produk uppk
2	Tingginya Perumbuhan Penduduk di Kota Bekasi	Angka Kebersertaan KB Baru Masih Rendah	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Ketidaksiapan pasangan untuk menikah menimbulkan banyak risiko kesehatan terhadap ibu dan bayi yang dilahirkan
		Angka Revelensi Kontrasepsi Modern (MCPR) Rendah	Menikah Usia Muda. Satu dari sembilan anak perempuan berusia 20-24 tahun sudah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun.
			Ledakan Kelahiran Pasca Pandemi. Dengan laju pertumbuhan 1,25% saat ini, penduduk bertambah 3,2 juta orang setiap tahun.
		Kurangnya Tenaga Penyuluh Lapangan dengan Kopetensi yang sesuai	Kurangnya dukungan Sumber Daya Manusia dan Pemerintah Pusat dan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 (age specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Tinggi	Melahirkan Usia Muda. Setiap tahunnya, banyak sekali bayi yang dilahirkan oleh orang-orang yang masih berusia sekitar 15 hingga 19 tahun.
			Kurangnya Perencanaan Keluarga.
		Masih Rendahnya Partisipasi Pria Dalam ber-KB	Masih Partisipasi Fasilitasi Layanan Kesehatan dalam Layanan KB Terutama dari Sektor Swasta
			Rendahnya yang mampu melayani vasektomi
		Unmeet Tinggi	Masih Rendah Partisipasi Fasilitas Layanan Kesehatan dalam Layanan KB Terutama dari Sektor Swasta
			Peserta KB Aktif (PA) dengan MKJP Masih Rendah
O	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
	Tingginya angka kemacetan	Tingkat jaringan jalan (Level of service/LOS) yang rendah, masih terdapat titik kemacetan lalu lintas	Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan
			Belum Mencukupi Sumber Daya Manusia (SDM) Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) yang berkompeten.
			Belum terbangunnya koordinasi lintas sektor yang efektif dalam penerapan dan pengendalian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
			Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) memerlukan perbaikan / penggantian secara berkala
			Banyaknya titik parkir liar yang mengambil bahu badan jalan
			Kurangnya Sosialisasi keselamatan berkendara di jalan
		Rendahnya minat masyarakat beralih ke moda transportasi umum massal	Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) belum memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Rendahnya aksesibilitas ke angkutan umum (pola jaringan trayek angkutan umum belum tertata membentuk spiral jalur utama memusat ke terminal utama)
			Kurangnya sosialisasi keberadaan angkutan umum massal
			Kurangnya koordinasi stakeholder berkaitan dengan pengelolaan angkutan umum massal
			Belum adanya evaluasi tata kelola angkutan umum massal
		Rendahnya kesadaran masyarakat dalam keselamatan berlalu lintas	Kurangnya Sosialisasi keselamatan berkendara di jalan
			Masih banyak kendaraan yang tidak laik jalan beroperasi
			Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian berkala
			Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan
P	URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan publik	Belum optimalnya pemanfaatan E-Government dalam mendapatkan informasi dan layanan publik	Rendahnya pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi
		Dampak Covid-19 menyebabkan aktivitas ekonomi dimasyarakat belum sepenuhnya pulih sehingga berpengaruh terhadap produktifitas dan pertumbuhan ekonomi Dampak Covid-19 menyebabkan aktivitas ekonomi dimasyarakat belum sepenuhnya pulih sehingga berpengaruh terhadap produktifitas dan pertumbuhan ekonomi	Rendahnya tingkat literasi digital mengenai penanganan pandemi
		Belum optimalnya pengelolaan informasi publik	Belum optimalnya kapasitas sumber daya komunikasi

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Kurangnya sarana dan prasarana pendukung sumber daya komunikasi
			Belum optimalnya pemanfaatan layanan pengaduan masyarakat
		Belum optimal pembangunan infrastruktur jaringan TIK di Kota Bekasi	Terbatasnya ketersediaan jaringan fiber optik untuk mendukung kelancaran akses data dan informasi di Kota Bekasi (Existing Infrastuktur FO terbangun $\pm 22,6$ km
		Belum optimalnya penyediaan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika	Terbatasnya ketersediaan akses jaringan internet berkecepatan tinggi
		Belum optimalnya penyebaran akses internet wifi gratis di ruang publik	Terbatasnya kemudahan masyarakat Kota Bekasi dalam mengakses layanan dan informasi mengenai pemerintah Kota Bekasi melalui terkoneksi jaringan internet wifi gratis di kantor pemerintahan, ruang publik dan fasilitas publik di Kota Bekasi (existing ± 1000 titik wifi gratis)
		Belum optimal pembangunan infrastruktur jaringan TIK di Kota Bekasi	Terbatasnya ketersediaan jaringan fiber optik untuk mendukung kelancaran akses data dan informasi di Kota Bekasi (Existing Infrastuktur FO terbangun $\pm 22,6$ km
		Belum optimalnya penyediaan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika	Terbatasnya ketersediaan akses jaringan internet berkecepatan tinggi
		Belum optimalnya pemanfaatan hosting dan colocation pada infrastruktur pusat data Pemerintah Kota Bekasi yang telah tersertifikasi ISO 27001:2013	Rendahnya kesadaran untuk menjaga dan mengintegrasikan aset data dan pengelolaan sistem informasi layanan digital Perangkat Daerah
Q	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
1	Belum optimalnya produktivitas dan daya saing UMKM	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas produk UMKM	adanya produk UMKM yang belum tersertifikasi Kurangnya pembinaan bagi pelaku UMKM Belum adanya sentra UMKM di Kota Bekasi PKL blm tertata dengan baik

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			kurangnya pemasaran produk umkm
			Kurangnya modal bagi UMKM
2	Belum optimalnya sektor koperasi terhadap perekonomian	belum optimalnya kelembagaan koperasi	rendahnya kapasitas sdm pengurus koperasi
			Pengetahuan tentang Perkoperasian di masyarakat masih relatif rendah
			Kurangnya modal bagi Koperasi
			Masih banyak koperasi yang belum memiliki izin simpan pinjam
3	1. Menentukan lokasi binaan PKL 2. Kesepakatan lokasi zona berdagang sesuai perkembangan kota bekasi dengan revisi Kepwal zonasi dan perda K3	Adanya perda K3 dan Kepwal zonasi larangan dagang	Banyaknya PKL yang menempati lokasi tidak sesuai dengan peeruntukannya
4	Perlunya sentra UMKM dan pembinaan bagi pelaku UMKM	Tidak adanya lahan untuk sentra dan kurangnya pengetahuan dari Pelaku UMKM	Belum adanya sentra UMKM di Kota Bekasi, Banyaknya UMKM Kota Bekasi yang belum Mandiri
5	Kurangnya sosialisasi tentang perkoperasian di masyarakat	Masih banyaknya kelompok usaha masyarakat yang belum berbadan hukum koperasi	Pengetahuan tentang Perkoperasian di masyarakat masih relatif rendah
6	Kepatuhan pengurus koperasi terhadap aturan relatif masih relatif rendah	Masih ada koperasi yang beroperasi tidak sesuai dengan peraturan	Penegakan aturan terhadap koperasi masih relatif kurang
7	sosialisasi tentang pentingnya ijin simpan pinjam kurang optimal	Masih banyak koperasi yang belum memiliki ijin simpan pinjam	Minat Pengurus Koperasi dalam mengurus ijin simpan Pinjam masih rendah
8	masih relatif rumit dan tingginya bunga Bank	Masih rendahnya akses koperasi terhadap sumber daya produktif (modal)	Permodalan Koperasi masih kurang
R	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
1	Kurang optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	Belum sesuai penerbitan perizinan dengan waktu yang ditetapkan	Kurangnya Sinkronisasi dengan OPD teknis terkait rekomendasi izin yang dimohonkan
		Masih kurangnya kualitas SDM	Kurangnya kontrol petugas verifikasi dan validasi berkas
		Kurangnya Bimtek mengenai Service Excellent bagi petugas FO	Kurangnya pemahaman petugas FO terhadap pelaksanaan standar pelayanan
2	Belum optimalnya pengembangan teknologi informasi	Belum optimal pengembangan teknologi informasi berbasis IT/E – Office	Masih belum memiliki ruang server yang memadai
			Belum lengkapnya format aplikasi pelayanan perizinan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
3	Terhambatnya Implementasi pelaksanaan regulasi di daerah yang berakibat pada tidak optimalnya realisasi investasi.	Belum terciptanya harmonisasi antara peraturan daerah dengan peraturan pusat terkait invetasi dan penanaman modal	Regulasi tentang investasi atau penanaman modal sering mengalami perubahan
			Belum terfasilitasinya investor yang akan berinvestasi
		Belum optimalnya data potensi sumber daya, sarana, dan	Belum optimalnya promosi investasi melalui media promosi
		prasarana daerah yang terbaru	Belum terbaharuinya data potensi dan peluang/profil investasi
		Kurang optimalnya perusahaan PMDN dalam menyampaikan LKPM	Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM dengan tertib
			Kurangnya pemahaman pelaku usaha akan OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)
S	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	Belum tersusunnya RAD Bidang Kepemudaan	Belum terciptanya sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda	Kurangnya minat atau kesadaran pemuda melalui pendidikan agama, pendidikan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi dan karakter kebangsaan;
			Kurangnya daya saing wirausaha pemuda;
			Kurangnya minat partisipasi pemuda pengembangan kepeloporan;
			Kurangnya minat partisipasi pemuda dalam pengembangan kepemimpinan (developing leadership character);
			Kurangnya sinergis organisasi kepemudaan dan komunitas kreatif.
		Kompleksitas persoalan pemuda	Maraknya pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan pemuda;
			Lemahnya perlindungan pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial, perilaku kekerasan fisik dan mental;
			Ancaman potensi tingginya pengangguran pemuda;

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Minimnya proteksi bagi pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi; Kurangnya Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda
3	Partisipasi dan kebugaran jasmani masyarakat berolahraga masih rendah	Belum Optimalnya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Kurangnya ketersediaan ruang terbuka publik; Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi olahraga masyarakat; Masyarakat lebih menggemari <i>social media</i> ketimbang berolahraga; Rendahnya penyelenggaraan event kejuaraan tingkat lokal
4	Sistem pembinaan olahraga prestasi belum dikembangkan dan dilakukan secara sistematis, terencana, berjenjang dan berkelanjutan	Pembibitan atlet dan pengembangan keolahragaan belum optimal	Minimnya pelatih yang bersertifikat; Belum optimalnya PPLPD; Belum optimalnya pengembangan industri olahraga; Rendahnya penyelenggaraan event kompetisi tingkat lokal; Terbatasnya sarana dan prasarana.
T	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
1	Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan layanan publik dalam penyediaan data sektoral yang berkualitas	Belum optimalnya ketersediaan data di OPD Belum optimalnya proses pengumpulan data	Data belum akurat dan terintegrasi Inkonsistensi data (Jangka Waktu proses pengabihan data)
U	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
	Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan layanan publik berdasarkan standar keamanan informasi yang ditetapkan	Belum optimalnya penanganan keamanan informasi Sistem Elektronik atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Belum optimal OPD dalam penerapan layanan keamanan informasi
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
1		Belum optimalnya pembinaan terhadap para pelaku kesenian tradisional di kota bekasi	Kurangnya minat masyarakat terhadap kesenian tradisional

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Belum optimalnya pelestarian kesenian tradisional dan cagar budaya di kota bekasi		Kurangnya event-event kesenian tradisional
			Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kesenian tradisional
		Fasilitasi pelestarian cagar budaya masih belum optimal	masih adanya obyek diduga cagar budaya yang belum dilakukan kajian oleh Tim Ahli cagar Budaya sehingga belum dapat direkomendasikan naskah penetapannya
			belum adanya museum pelestarian cagar budaya
W	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
1	Masih rendahnya Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi	Aksesibilitas Perpustakaan	Belum optimalnya pemberdayaan perpustakaan daerah, perpustakaan di tingkat sekolah dan perpustakaan di tingkat kelurahan dan kecamatan.
			Belum berkembangnya pojok baca
			Belum optimalnya pengembangan perpustakaan digital
			Terbatasnya koleksi perpustakaan
			Semakin berkurangnya pengunjung perpustakaan
			Adanya perubahan perilaku membaca masyarakat dari bacaan cetak ke bacaan elektronik
			Gedung perpustakaan daerah tidak representatif/ sesuai standar
			Jumlah dan kompetensi Pustakawan belum memadai
X	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
1	Pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan untuk peningkatan kualitas layanan informasi kearsipan	Keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan untuk memfasilitasi terwujudnya peningkatan layanan kearsipan, penyimpanan, perlindungan dan pengamanan arsip dengan pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi Kearsipan)	Belum optimalnya pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, koleksi arsip dan sistem informasi pengelolaan kearsipan terintegrasi
Y	URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1	Belum terpenuhinya kuota ekspor hasil perikanan	Belum optimalnya kelembagaan yg mengurus pasar ekspor	Belum optimalnya sumber daya kelembagaan
		Belum optimalnya produksi perikanan	Belum optimalnya kapasitas SDM perikanan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Sarana dan prasarana belum maksimal
2	Keterbatasan lahan		Luas lahan budidaya yang berkurang
3	Biaya produksi khususnya pakan ikan tinggi		Harga pakan ikan yang tinggi
4	Minimnya sarana dan prasarana budidaya di tingkat pembudidaya		Minimnya sarana, prasarana dan permodalan
5	Keterbatasan modal		Keterbatasan Ketersediaan Ikan Konsumsi
Z	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
1	belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian	Belum optimalnya kunjungan wisatawan	belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata
			belum optimalnya pemasaran destinasi pariwisata
			sertifikasi di sektor pariwisata masih minim
		daya saing ekonomi kreatif masih rendah	Belum tersedianya Tourist Information Center (TIC) dan Sentra Oleh-oleh Kota Bekasi
			kualitas dan kuantitas produk ekraf masih rendah
			kurangnya pembinaan para pelaku ekraf
AA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
1	Keterbatasan lahan pertanian	Lahan pertanian beralih fungsi dari pertanian ke non pertanian	Kebutuhan lahan semakin meningkat
			Harga tanah semakin meningkat
			Sektor pertanian kurang diminati sebagai suatu pekerjaan yang menjanjikan
2	Produksi peternakan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat Kota Bekasi	Keterbatasan lahan, sumber daya pendukung, sarana prasarana budidaya peternakan dan SDM peternakan	Usaha budidaya masih dilakukan secara konvensional
			Penggunaan teknologi budidaya peternakan yang belum optimal
			Peningkatan nilai tambah produk peternakan
			Ketersediaan sumber daya terbatas (SDM, Modal, bibit, pakan ternak dan Sarana prasarana usaha peternakan)
3	Ancaman penyakit hewan menular dan zoonosis	Kota Bekasi daerah tertular penyakit mulut dan kuku, dikelilingi oleh daerah tertular rabies dan anthrax	Ketersediaan sarana prasarana penanganan penyakit hewan menular dan zoonosis

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Unit pelayanan kesehatan hewan yang belum memenuhi kriteria teknis	Kompetensi pegawai teknis bidang kesehatan hewan
		Kota Bekasi endemis penyakit flu burung	Lalu lintas hewan dan Produk hewan ke Kota Bekasi sangat tinggi
4	Jaminan keamanan pangan asal hewan	Sebagian besar pasar di Kota Bekasi masih melaksanakan pemotongan unggas	Hasil pemeriksaan laboratoium Pasar Tradisional positif virus flu burung
		Keterbatasan jumlah juru sembelih halal baik pada hewan besar, kecil dan unggas	Tempat penampungan dan pemotongan hewan masih belum terlokalisasi
		Beredarnya produk hewan yang belum memenuhi kriteria aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	Unit pelayanan kesehatan hewan belum memadai
		Rumah potong hewan belum memenuhi kriteria teknis	Pemeliharaan hewan (domestik dan liar) oleh warga
		belum tersedianya rumah potong hewan unggas	Penanganan produk pangan asal hewan (PAH) belum memenuhi standar hygiene sanitasi dan rantai dingin
		Unit usaha produksi dan distribusi produk hewan yang belum menerapkan standar teknis kesehatan masyarakat veteriner	Banyak unit usaha PAH dan Produk hewan non pangan (PHNP) belum memenuhi persyaratan teknis kesmavet
			Belum Optimalnya Rumah Potong Hewan
			Terbatasnya jumlah Juru sembelih halal
			Penggunaan bahan kimia berbahaya
			Kecurangan dan pemalsuan pangan asal hewan
	Peredaran produk hewan non pangan untuk tujuan pangan		
5	Peredaran Obat Hewan Ilegal	Peredaran obat hewan yang belum memenuhi standar obat hewan Indonesia/ilegal	Peredaran obat hewan yang belum memenuhi standar obat hewan Indonesia/ilegal
		Penggunaan obat hewan yang tidak sesuai ketentuan	Penggunaan obat hewan yang tidak sesuai ketentuan
6	Alih Fungsi Lahan Pertanian	Keterbatasan lahan pertanian, sumber daya pendukung, sarana prasarana budidaya pertanian dan SDM pertanian	Keterbatasan lahan pertanian
7	Sektor pertanian kurang diminati sebagai pekerjaan yang menjanjikan		Kurangnya Minat Generasi Muda untuk melakukan usaha Pertanian
			Keterbatasan Sarana dan prasarana Pertanian
AB	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Ketidakstabilan harga barang kebutuhan pokok	Harga Kebutuhan Barang Pokok terpengaruh oleh kenaikan harga barang lainnya pada situasi tertentu	Kebijakan Pemerintah :
		- Kenaikan Harga BBM	- Kenaikan Harga BBM
		- Hari Raya	- Kenaikan Gaji PNS/TNI/POLRI
			Permintaan/Kebutuhan Masyarakat terus meningkat menjelang Hari Raya namun jumlah ketersediaan tidak ikut meningkat (sama)
			Kelangkaan barang kebutuhan tertentu yang tidak terprediksi sebelumnya
			Inflasi Kebutuhan Barang Pokok
2	pasar tradisional yang nyaman untuk masyarakat berbelanja	pasar yang masih semrawut/belum tertata dengan rapi/baik	Sarana prasarana yang belum memadai
			SDM Pengelola pasar yang belum memadai
AC	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
1	Banyak IKM yang gulung tikar	Permintaan masyarakat terhadap produk berkurang	Pandemi Covid 19
		biaya operasional lebih tinggi daripada keuntungan	Kebijakan Pemerintah :
			- Kenaikan Harga BBM
		kurangnya event-event sebagai wadah promosi	- Kenaikan UMR
AD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)		
1	laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah	Tidak maksimalnya capaian IKK LPPD	Perangkat Daerah belum memahami dan menguasai data Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
			Perubahan Kebijakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap Tahunnya
		Pelaksanaan Evaluasi LPPD tahun 2022 ini dan seterusnya akan tetap menggunakan aplikasi elppd.kemendagri.go.id	Penyampaian LPPD dan evaluasi LPPD dilaksanakan melalui daring aplikasi elppd.kemendagri.go.id yang masih dalam tahap pengembangan dari kemendagri
			Jaringan internet yang lambat sehingga terkendala pada saat proses upload dan evaluasi IKK LPPD
			kurangnya saran dan prasarana dalam penyusunan dan evaluasi LPPD

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Perangkat Daerah kurang memahami mekanisme penginputan capaian penerapan SPM melalui aplikasi	Inventarisasi kebutuhan paket pengadaan barang/jasa belum optimal
			Perubahan kebijakan mekanisme evaluasi capaian penerapan SPM yang semula per tahun menjadi per triwulan dan keterbatasan sumber data dan sumber daya Perangkat Daerah dalam melaporkan hasil capaiannya
2	Kurangnya Koordinasi dalam rangka Cipta Kondisi dan Stabilitas Wilayah	Kurangnya sinkronisasi kebijakan antara Instansi dalam menetapkan kebijakan pelayanan masyarakat	Belum optimalnya strategi dan sinergitas antar instansi bertikal dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat
			Kurangnya intensitas rapat Koordinasi Forum Komunikasi Daerah Sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal
3	Belum terdapat gambaran secara menyeluruh tentang karakteristik kelurahan dalam mengukur status kemajuan kelurahan swadaya ke swakarya menuju swasembada	Pelaksanaan penginputan database kelurahan oleh unsur Kelurahan (Operator Kelurahan) melalui aplikasi Prodeskel yang masih belum optimal	Kurangnya pemahaman unsur Kelurahan dan Kecamatan tentang tata cara penyusunan profil kelurahan dalam aplikasi database Prodeskel (Profil Desa dan Kelurahan)
			kurangnya saran dan prasarana kelurahan dan kecamatan dalam melakukan penginputan database
4	Lambatnya proses verifikasi data calon penerima hibah	SOP hibah berupa uang belum di laksanakan secara optimal terkait hibah untuk RT dan RW di Kota Bekasi	masih kurangnya SDM untuk pelaksanaan verifikasi data hibah dan klarifikasi lapangan
5	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan analisis pengembangan kebijakan kesejahteraan Masyarakat
			Belum optimalnya pengelolaan data base kelembagaan sosial keagamaan dan kesejahteraan Sosial
			Belum terinventarisir secara optimal potensi resiko sosial dan akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan sosial dan keagamaan
			Minimnya koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan kebijakan bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan
6			Pembentukan produk hukum daerah belum optimal

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Belum optimalnya perumusan produk hukum terkait penyelenggaraan pemerintahan	Belum optimalnya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah	Peraturan perundangundangan yang sangat dinamis
			Perbedaan pemahaman dan penafsiran aturan hukum
		Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait	Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi
7	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan bidang perekonomian	Belum optimalnya kinerja BUMD	Kurang optimalnya pembinaan kinerja BUMD
			Masih kurangnya kebijakan daerah dalam mendukung peningkatan kinerja BUMD
		Belum optimalnya strategi Pengendalian Inflasi	Literasi data yang masih rendah di pemangku kepentingan dan OPD terkait yang terlibat dalam Pengendalian Inflasi
			Belum adanya data yang akurat dan komprehensif dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah
			Belum optimalnya tindaklanjut rekomendasi TPID
		Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif yang belum optimal	Belum terwujudnya pengembangan ekonomi kreatif yang berdaya saing
8	Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang administrasi pembangunan	Hasil kebijakan pembangunan masih belum termonitor dengan baik	Hasil kajian analisis terkait kebijakan pembangunan belum diaplikasikan dengan baik
		Pelaksanaan/ implementasi kebijakan daerah yang belum ditindaklanjuti secara serius	Regulasi terkait kebijakan pembangunan belum mampu mengatur proses pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien
			Keterbatasan SDM dalam melaksanakan pengendalian kegiatan
9	Belum Optimalnya kualitas perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa belum optimal	Inventarisasi kebutuhan paket pengadaan barang/jasa belum optimal
			Perencanaan pengadaan barang/jasa di OPD belum sepenuhnya memperhatikan waktu proses pengadaan
			Belum optimalnya kebijakan penyusunan Rencana Umum Pengadaan sesuai aturan pengadaan barang/jasa Pemerintah
		Kompetensi SDM pengadaan barang/jasa kurang	Jumlah personil bersertifikat PBJ kurang
		Pemetaan anggaran paket pekerjaan LPBJ kurang efektif dan efisien	Aplikasi pendukung belum terintegrasi dengan aplikasi perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
10	Belum Optimalnya kualitas perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang kerjasama	Kurangnya pemahaman OPD dalam memetakan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah	Perubahan peta kebutuhan kerjasama setiap Tahunnya
			masih kurangnya SDM pada Perangkat Daerah untuk pelaksanaan pemetaan kebutuhan kerja sama
		Perangkat Daerah Belum optimal melakukan evaluasi pelaksanaan kewajiban dalam kerjasama yg menjadi tupoksi Perangkat Daerah.	Sistem yang mensinergikan antara Perangkat Daerah dengan Sekretariat TKKSD dalam tindaklanjut pelaksanaan Kerja Sama Dearah secara sistem baru dibangun
			Perangkat Daerah kurang memahami pelaksanaan link kerja sama pada melalui sistem aplikasi digitalisasi kerjasama daerah
			Aplikasi evaluasi kerjasama berbasis web masih dalam pengembangan
			Perangkat Daerah belum optimal melakukan operasional penggunaan akun verifikasi dan evaluasi pelaksanaan objek perjanjian
			rendahnya tingkat penggunaan aplikasi kerja sama di perangkat daerah sehingga dalam tindaklanjut hasil evaluasi kerja sama daerah tidak optimal
			Perangkat Daerah belum melakukan uji coba dalam penggunaan sistem aplikasi kerja sama daerah
		lemahnya koordinasi antar perangkat daerah di bidang kerjasama.	Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah dalam penyusunan Dokumen Kerja Sama Daerah
			masih kurangnya SDM pada Perangkat Daerah dalam penyusunan kerja sama
11	Belum optimalnya kualitas perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administratif bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat PD	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik perangkat daerah
		Kelembagaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi orgasasi perangkat daerah belum optimal	Paradigma proses bisnis belum menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan SOTK perangkat daerah
			belum sesuai struktur organisasi, dan jumlah pegawai untuk mewujudkan organisasi tepat ukuran dan fungsi yang lebih optimal dalam peningkatan kualitas dan akselerasi pelayanan publik.

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Pemahaman ASN terhadap core bisnis dan tujuan Perangkat Daerah masih kurang
			Dasar penyusunan SOTK belum mempertimbangkan keterkaitan dengan dokumen perencanaan
		Rendahnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi	Belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja
12	Belum Optimalnya kualitas penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan Sekretariat Daerah.	Belum maksimalnya koordinasi antar unit Bagian Sekretariat Daerah dalam keterlibatan proses perencanaan	Keterbatasan waktu koordinasi karena tingginya kesibukan kegiatan tupoksi masing-masing unit Bagian Sekretariat Daerah
13	Lambatnya hasil pembangunan di terima oleh masyarakat	Belum Optimalnya penyerapan anggaran pemerintah daerah	PPTK yang tidak dapat memenuhi jadwal waktu penyusunan laporan keuangan
			Kehati-hatian dalam Membelanjakan Anggaran
			Kesalahan dalam penyusunan RKA OPD
AE	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DPRD)		
1	Potensi keterlambatan pembahasan dan persetujuan KUA PPAS APBD dan KUA PPAS APBD Perubahan	Potensi keterlambatan penyampaian Rancangan Nota Kesepakatan tentang KUA PPAS APBD dan KUA PPAS APBD Perubahan	Potensi keterlambatan penyusunan Rancangan Nota Kesepakatan tentang KUA PPAS APBD dan KUA PPAS APBD Perubahan
2	Potensi keterlambatan pembahasan dan persetujuan APBD dan APBD Perubahan	Potensi keterlambatan penyampaian Rancangan Perda tentang APBD dan APBD Perubahan	Potensi keterlambatan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan APBD Perubahan
3	Potensi keterlambatan pembahasan dan persetujuan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Potensi keterlambatan penyampaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Potensi keterlambatan penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
4	Potensi keterlambatan pembahasan LRA Semester I dan Prognosis untuk keperluan APBD Perubahan	Potensi keterlambatan penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Semester I dan Prognosis Keuangan Pemerintah Daerah	Potensi Keterlambatan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Semester I dan Prognosis Keuangan Pemerintah Daerah
5	Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tentang Hasil Pemeriksaan LKPD yang harus memperhatikan tahapan dan rekomendasi hasil temuan agar	Potensi Temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tentang Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Potensi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang masih belum sesuai ketentuan BPK

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.		
6	Dalam Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna berdasarkan kuorum yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib DPRD	Potensi Kehadiran Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi	Potensi Kehadiran Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi
7	Keterlambatan berkas-berkas pendukung yang harus dilengkapi pada Paripurna Pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi	Potensi keterlambatan Paripurna Pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi	Potensi keterlambatan Paripurna Pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi
AF	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN)		
1	Belum optimalnya koordinasi, integrasi, digitalisasi dan	Belum terintegrasi secara menyeluruh sistem informasi perencanaan, penganggaran pembangunan, sampai dengan penatausahaan dan pengukuran capaian kinerja.	Belum tersedianya sistem penatausahaan dalam SIPD sehingga masih perlu input ulang dalam SIMDA keuangan.
	sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi	Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian	Belum tersedianya pedoman yang jelas terkait pengendalian
		pembangunan daerah	pembangunan daerah
		Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring	Belum tersedianya reward dan punishment terkait hasil monitoring
		dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
AG	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN)		
1	Belum optimalnya kebijakan pembangunan yang berbasis penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek dan inovasi daerah	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek dan inovasi daerah untuk mendukung kebijakan	Belum optimalnya hasil kelitbangan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat
			Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang pemanfaatan hasil penelitian
			Masih terbatasnya data base (sistem informasi) penelitian dan pengembangan
			Belum adanya link and match antara kebutuhan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
			Belum terbangunnya ekosistem inovasi
AH	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEUANGAN)		

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Belum optimalnya proses penagihan pajak dan retribusi daerah	Belum adanya perda turunan dari UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah. rendahnya kualitas SDM penagih pajak dan retribusi daerah belum adanya kajian metodologi penetapan target pendapatan daerah, dan perumusan perwal penetapan target pendapatan daerah belum optimalnya digitalisasi pelayanan terkait penagihan pajak dan retribusi daerah kurangnya sosialisasi pajak dan retribusi daerah kepada WP/WR maupun calon WP/WR belum optimalnya reward and punishment kepada WP/WR yang taat maupun tidak taat membayar pajak/retribusi tepat waktu
2	Adanya perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan penyesuaian terhadap peraturan yang berlaku yang mempengaruhi proses penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan	Masih kurangnya implementasi regulasi dalam pelaksanaan dan penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Belum adanya petunjuk teknis terbaru yang mengatur tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBD Tidak sinkronnya data penerimaan Kas Daerah Penghasil Pajak dan Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Bank Persepsi serta Pelaporan yang tidak teradministrasi dengan baik
3	Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang belum tertib dan taat pada peraturan yang berlaku	Kapasitas SDM pengelola keuangan/kegiatan di Perangkat Daerah	Masih adanya ketidakpatuhan dan keterlambatan perangkat daerah dalam penyelesaian pertanggungjawaban Belanja Terdapatnya Pelaporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang tidak teradministrasi dengan baik Masih kurangnya Bimbingan Teknis tentang pengelolaan keuangan daerah kepada pengelola keuangan/kegiatan di perangkat daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Adanya mutasi dan rotasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang mengakibatkan adanya perubahan pejabat pengelola keuangan/kegiatan
			Kurang tertibnya Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah dalam penginputan pajak ke Simda yang sudah disetorkan ke Bank Jabar, sehingga terjadi perbedaan jumlah penerimaan antara penerimaan di Simda dengan jumlah penerimaan di Kas Daerah
4	Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan dan penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	Sarana dan prasarana pendukung	Kondisi sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai
			Belum terintegrasinya sistem aplikasi kas daerah dengan OPD penghasil
5	Masih adanya ketidakpatuhan dan keterlambatan dalam penyelesaian masing- masing tahapan penyusunan APBD	Sumber Daya Manusia	Sulitnya memberikan pemahaman terhadap stakeholder terkait tahapan penyusunan APBD
			Masih adanya ketidakpahaman dan keterlambatan dalam penyelesaian masing-masing tahapan penyusunan APBD
			Kurangnya pemahaman OPD dalam proses penyusunan dokumen penganggaran terkait RKA dan DPA SKPD
			Kurangnya pemahaman OPD dalam proses penganggaran hibah dan bansos sehingga ditemukan adanya ketidaksesuaian pencantuman rekening dalam penganggaran hibah dan bansos
			Kurangnya ketelitian dan
			pemahaman terhadap peraturan dalam melaksanakan verifikasi dokumen RKA dan DPA SKPD
6	Adanya kebijakan penggunaan teknologi informai (aplikasi) terpusat dan masih dalam tahap pengembangan yang mengakibatkan	Teknologi Informasi (Aplikasi) pengelolaan keuangan terkait	Adanya kewajiban penggunaan aplikasi SIPD pada proses penyusunan APBD
			Masih terbatasnya menu pada SIPD
			Adanya kesulitan dalam mengakses SIPD karena server yang hanya ada di pusat

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	kendala dalam proses penyusunan APBD secara cepat dan akurat		Penggunaan aplikasi keuangan lain untuk mengakomodir kebutuhan penyusunan APBD mengakibatkan waktu pengerjaan menjadi lebih lama SIPD tidak dapat terintegrasi dengan aplikasi pendukung lain yang dibunakan oleh Pemerintah kota Bekasi.
7	Adanya perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan penyesuaian terhadap peraturan yang berlaku yang mempengaruhi proses penganggaran	Peraturan perundang- undangan dan peraturan pelaksanaan	Masih terbatasnya instrumen penganggaran/juklak/SOP yang digunakan dalam proses penyusunan APBD
8	Masih terdapat potensi aset yang belum tercatat dalam neraca	Belum terlaksananya Sensus BMD selama 10 tahun terakhir.	Terdapat beda luas lahan dengan data KIB Pencatatan dalam KIB belum dilengkapi dengan keterangan Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas
9	Kurangnya ketersediaan SDM yang mendukung dalam pengelolaan BMD	Kurangnya pemahaman SDM terkait pengelolaan BMD	Kurangnya pelaksanaan Bimtek, diklat, pelatihan, sosialisasi terkait Pengelolaan BMD Terbatasnya alokasi anggaran peningkatan SDM
10	Rendahnya capaian pengamanan BMD	Rendahnya capaian sertifikasi tanah Siklus penghapusan BMD yang lambat Belum terlaksananya monitoring dan evaluasi pengamanan BMD secara optimal	Tidak sesuai data administrasi dengan fisik tidak tersedianya data pendukung proses pensertifikatan Ketidakpastian jangka waktu penyelesaian sertifikat di instansi yang berwenang Kurangnya alokasi anggaran pembuatan dan pemasangan plang aset Kurang tersedianya gudang penyimpanan BMD rusak berat yang memadai Belum adanya JFT Penilai BMD Belum diusulkannya kebutuhan atas JFT Penilai BMD oleh Pemerintah Kota Bekasi Kurangnya SDM

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
11	Masih kurangnya implementasi regulasi dalam pemanfaatan BMD	Belum adanya sistem database pemanfaatan PSU melalui mekanisme sewa	Belum tersedianya alokasi anggaran pengadaan sistem database pemanfaatan PSU melalui mekanisme sewa
			Besarnya jumlah piutang sewa BMD
			Kurangnya monitoring dan evaluasi pemanfaatan aset
		Belum tersedianya JFT Penilai BMD yang bersertifikat	Terbatasnya formasi JFT Penilai BMD
AI	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN)		
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Manajemen ASN	Belum optimalnya pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan	Kesenjangan jumlah, kualitas, dan ketidaksinkronan antara kompetensi ASN dengan kebutuhan
		Belum optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya	Ketentuan dalam menempatkan pegawai pada tempat yang tepat. Meningkatkan semangat kerja yang perwujudan dari moral kerja yang tinggi. Belum optimalnya kombinasi antara keterampilan, pengetahuan, sikap dan perilaku yang tercermin melalui perilaku kinerja yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi sesuai dengan jabatan
		Belum semua pegawai memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan	Pelaksanaan manajemen ASN belum sepenuhnya berdasarkan perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan, serta Setiap instansi pemerintah harus menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)
		Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian	tuntutan kebutuhan media dan teknologi informasi yang terus meningkat dalam rangka pelayanan manajemen kepegawaian
		Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian	pelaksanaan pola karier pada jabatan fungsional belum sepenuhnya berdasarkan pada anjab/abk dan peta jabatan pada masing-masing perangkat daerah
2	Belum adanya kebijakan yang menetapkan standar kompetensi	Belum dapat menetapkan kesenjangan kompetensi sebagai dasar penetapan kebutuhan pengembangan kompetensi	Belum ditetapkannya Standar Kompetensi Jabatan untuk seluruh jabatan di lingkungan Pemerintah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	jabatan administrator, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana	Perolehan hasil penilaian mandiri Penerapan Sistem Merit oleh Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) pada aspek pengembangan karir masih rendah dimana indikator utama yang harus dipenuhi adalah penetapan Standar Kompetensi Jabatan untuk seluruh jenjang jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Kota Bekasi (baru ditetapkan untuk jenjang eselon II)
3	Perlunya pengembangan kompetensi sdm dalam pemahaman konsep dan penyusunan HCDP Kota Bekasi	Belum optimalnya pemahaman konsep penyusunan HCDP Belum di tetapkannya Standar Kompetensi Jabatan untuk seluruh jenjang dan nama jabatan PNS	Belum tersusunnya dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi (Human Capital Development Plan /HCDP) sebagai masterplan pengembangan kompetensi ASN
4	Belum terpenuhinya hak PNS dalam pengembangan kompetensi minimal 20 jp setiap tahunnya.	Nilai domain kompetensi yang belum mencapai 40%	Perolehan nilai Indeks Profesionalitas ASN masih pada kategori sangat rendah (55,01)
5	Belum teralokasikannya anggaran pengembangan kompetensi paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah	Pelaksanaan pengembangan kompetensi (manajerial, teknis, fungsional, dan sosial kultural) belum optimal	Kompetensi PNS Kota Bekasi yang belum optimal
6	Pemenuhan standar kelayakan penyelenggaraan penilaian kompetensi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Penetapan kategori pengakuan kelayakan/akreditasi penyelenggaraan penilaian kompetensi Kategori C dengan masa berlaku 2 (dua) tahun oleh Badan Kepegawaian Negara Kewenangan penilaian kompetensi Kategori C sebatas pada penilaian kompetensi jenjang jabatan pengawas dan pelaksana	Belum optimalnya pelaksanaan penilaian kompetensi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
7	Belum ditetapkannya kebijakan tentang mekanisme manajemen talenta dalam penerapan sistem merit	Belum dilaksanakannya penilaian kompetensi sebagai salah satu aspek dalam penentuan pemetaan pegawai dalam nine box manajemen talenta Hasil penilaian kompetensi memiliki masa berlaku 2(dua) tahun dan besaran biaya Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) per orangnya masih terbilang cukup besar	Belum dilaksanakannya pemetaan pegawai dalam "nine box" manajemen talenta
8	Pemahaman ASN terhadap penyusunan dokumen SKP masih rendah	Pedoman penyusunan SKP belum tersosialisasikan kepada seluruh ASN	Perubahan regulasi penilaian kinerja yang dinamis

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
9	Belum adanya komitmen bersama untuk melaksanakan penilaian kinerja yang objektif dari pejabat penilai	Belum adanya pemahaman terhadap arti pentingnya pelaksanaan penilaian kinerja yang objektif, terukur dan transparan terhadap kinerja pegawai	Belum diterapkannya mekanisme sistem penilaian kinerja yang bersifat objektif, terukur dan transparan untuk mengukur capaian kinerja tiap pegawai
10	Belum diterapkannya reward dan punishment berdasarkan penilaian kinerja pegawai	Belum adanya sistem penilaian kinerja yang bersifat objektif, terukur dan transparan terhadap kinerja pegawai	Belum adanya perbedaan perlakuan terhadap pegawai yang berkinerja sangat baik dengan yang berkinerja biasa bahkan rendah
11	Penegakkan disiplin belum optimal	Komitmen pejabat yang berwenang menghukum masih rendah	Masih ditemukannya aparatur yang melakukan indisipliner
AJ	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN (INSPEKTORAT DAERAH)		
1	Inspektorat Daerah	Belum optimalnya pengawasan internal yang efektif dan menghasilkan kegiatan penjaminan (assurance) dan layanan konsultasi yang berkualitas	Lemahnya Pengawasan Internal Pada Masing-Masing Perangkat Daerah
	belum memiliki sistem		Kurang Optimalnya Penyusunan Perencanaan di Perangkat Daerah
	deteksi dini (early		Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota tidak Singkron
	warning) yang handal sehingga masihadanya temuan yang berulang baik internal dan eksternal baik yang berdampak secara administrasi maupun secara hukum		Rendahnya Sumber Daya Manusia Penyusun Laporan Keuangan di Perangkat Daerah
			Perencanaan Pencairan Yang Menumpuk diakhir Tahun
			Dokumen Pendukung Laporan Keuangan Tidak Lengkap
			Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Yang Terlalu Singkat
			Lemahnya Kerjasama Antar Lembaga
			Perbedaan Persepsi Antar Lembaga
			Rendanya Tindak Lanjut Temuan Pada Perangkat Daerah
			Bahasa Rekomendasi yang susah dipahami
			Kesenjangan Kemampuan Apip
			Rekomendasi Tidak Bisa Dijalankan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		masih adanya temuan yang berdampak hukum yang melibatkan aparat sipil negara	Tidak Ada Bagian Evlap
			Rendahya Sangsi Bagi Aparatur Yang Tidak Menindak Lanjuti Hasil Temuan
			Masih Rendanya Hukuman Displin Bagi Pelaku Pelanggaran
			Pelaku Yang Sudah Terbukti Melanggar Berdasarkan Hasil Audit Tidak Dilimpahkan Ke Aparat Penegak Hukum
2	Implementasi dan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menuju pemerintahan yang bersih dan perbaikan tata kelola masih kurang memadai .	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan belum optimal	Belum semua Perangkat Daeeah Memiliki Risk Register Dan Manajemen Resiko
			Kurang Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Pengawasan
			Belum Tersedia Aplikasi Pelaksanaan Pengawasan
			Kurangnya Kompetensi SDM Penyusun Kebijakan Pengawasan
			Belum lengkapnya Eviden Penyusunan PKPT
			Kebijakan Pengawasan Yang Sudah Disusun Tidak Dilaksanakan
			Publikasi Pengawasan Yang Belum Optimal
		Belum optimalnya prioritas program yang dapat membangun sistem pendampingan dan asistensi yang efektif dan menghasilkan kegiatan pendampingan dan layanan konsultasi yang berkualitas	Lemahnya Pengetahuan Tentang Urusan Wajib Perangkat Daerah Yang Hurus Dilaksanakan
			Belum berkembangnya Kesadaran Perangkat Daerah Tentang Pelaksanaan WBBM dan WBK
			Lemahnya Pemenuhan Eviden Evaluasi SAKIP, LPPD LKPD
			Masih Rendahnya Persepsi Anti Korupsi
			Masih Ditemukannya Gratifikasi dan Pungutan Lair Oleh Oknum Aparatur
			Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah Tentang Zona Integritas
AK	UNSUR KEWILAYAHAN		
1	Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung meningkatnya kinerja	Beberapa Sarana dan Prasarana penunjang belum tersedia	Bagunan Gedung Kecamatan perlu direhab utk memaksimalkan pelayanan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
2	Banyaknya masyarakat yang berhenti di pinggir jalan untuk membeli dagangan	Masih banyaknya Pedagang yang bejualan di trotoar jalan dan belum memiliki kesadaran tentang hal tersebut	Kemacetan akibat tidak tertibnya pedagang di trotoar jalan dan yang membeli
3	Terjadinya Penumpukan pekerjaan pada beberapa SDM yang memiliki kualitas	Banyaknya SDM yang belum menyadari tentang tugas,pokok, dan fungsi mereka	Kurangnya SDM ASN dan Non ASN yang berkualitas
4	kurangnya kebersihan lingkungan	Rendahnya kesadaran diri masyarakat akan kebersihan lingkungan	Kurangnya kebersihan lingkungan
5	Administrasi pertanahan tidak tertib	Arsip pertanahan yang tidak tersusun rapih di tahun 2010 kebawah sehingga kesulitan untuk diinventarisir	Arsip pertanahan yang tidak tersusun rapih di tahun 2010 kebawah sehingga kesulitan untuk diinventarisir
6	Pagu anggaran yang tersedia yang direncanakan tahun sebelumnya tidak terakomodir secara optimal	terdapat kegiatan Pemerintah Kota Bekasi yang bersifat mendadak, seperti Lomba Kampung Tangguh Jaya, Lomba RW Siaga. Sehingga membutuhkan persiapan dan pendanaan.	Kurang Koordinasi dalam pelaksanaan Kegiatan dari Pemerintah Kota
7	1. Revitalisasi kali 2. Revitalisasi saluran pembuangan air di wilayah Kelurahan 3. Pembuatan polder/tandon air 4. Pematusan	Adanya Pendangkalam tanah di sungai atau kali dan penumpukan sampah	Masih terjadi banyak genangan di wilayah kecamatan
AL	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KESBANGPOL)		
1	Penanganan aksi unjuk rasa dan penyelesaian konflik sosial yang disebabkan oleh SARA	Sering terjadinya aksi unjuk rasa dari mahasiswa dan organisasi masyarakat serta konflik antar suku, agama, dan antar golongan	Kota Bekasi sebagai Kota yang heterogen, masyarakatnya terdiri dari berbagai Suku, Etnis, Agama dan Ras
2	Masih kurangnya pengawasan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing/Orang asing yang berdomisili di Kota Bekasi enggan melapor ke Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Kota Bekasi sebagai penyangga Ibukota Jakarta, Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga banyak perusahaan yang menggunakan WNA sebagai tenaga kerja asing
3	Menurunnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa	Rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila di masyarakat Rendahnya pemahaman tujuan pencapaian 4 konsensus dasar bernegara di kalangan Generasi Muda/Pelajar	Menurunnta kecintaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa khususnya di kalangan generasi muda Belum maksimal Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 4 Konsensus Dasar Bernegara
4	kurangnya sosialisasi politik	Pemahaman pemilih tentang politik masih rendah	

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	terhadap pemilih/masyarakat		Masih rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap politik
5	Risiko operasional berupa tuntutan hukum dari luar kepada organisasi	Adanya konflik internal di Parpol	Hibah kepada Parpol yang memiliki kursi di DPRD Kota Bekasi
6	Masih kurangnya koordinasi antar pelaku pembangunan	Kurangnya pemahaman ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	- Kondisi masyarakat yang Heterogen di Kota Bekasi - Intoleransi SARA - Kuatnya arus Globalisasi
7	- Pembinaan Ormas belum optimal - Kesadaran Ormas untuk melaporkan keberadaannya	Terdapat kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan belum mandiri dan belum melaporkan keberadaannya	Adanya kepentingan yang terjadi di antara kelompok masyarakat yang dapat memicu potensi konflik

BAB 05

TUJUAN DAN SASARAN



TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi 2024-2026

Tujuan merupakan kondisi yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan. Jika dalam RPJMD pencapaian tujuan diukur dalam jangka waktu lima tahun, maka dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 ini diukur dalam jangka waktu tiga tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 didefinisikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator pembangunan yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dalam penyusunan RPJMD kondisi normal, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Dalam penyusunan RPD, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kota Bekasi merumuskan sebuah konsep RPD 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut,

1. Indikator Makro dan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;
2. Misi RPJPD Kota Bekasi 2005-2025;
3. Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023;
4. Misi RPJMD Kota Bekasi 2018-2023;
5. Isu-isu strategis yang berkembang.

Dari hasil penyandingan substansi muatan beberapa acuan dokumen perencanaan tersebut teridentifikasi lima tujuan pembangunan Kota Bekasi untuk periode 2024-2026. Tujuan tersebut kemudian diterjemahkan lebih rinci ke dalam 11 sasaran. Kerangka umum tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi dalam RPD Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut.



Gambar V. 1 Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026

5.2 Cascading Kinerja

Tujuan dan sasaran diukur keberhasilannya melalui capaian indikator kinerja atau indikator pembangunan. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja yang dalam hal ini adalah sasaran dan tujuan dalam bentuk hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja di level hasil (*outcome*) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sedangkan indikator kinerja di level dampak (*impact*) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan didefinisikan sebagai kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*)



beberapa program. *Cascading* kinerja dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut.

Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang **Pertama** adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel. Perwujudan tujuan ini ditunjang oleh dua sasaran yaitu (1) Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah serta (2) Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut.

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA
Tujuan 1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran 1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik
Sasaran 1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
		Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)
		Presentase Peningkatan PAD

Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang **Kedua** yaitu Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas secara Berkeadilan. Tujuan tersebut didukung pemenuhannya oleh lima sasaran, yaitu (1) Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi, (2) Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat, (3) Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender, dan (4) Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut.



TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA
Tujuan 2	Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan	Indeks Pembangunan Manusia
Sasaran 2.1	Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi	Indeks Pendidikan
Sasaran 2.2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan
		Gini Ratio
Sasaran 2.3	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Keluarga
		Indeks Pembangunan Gender
Sasaran 2.4	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka
		Angka Kemiskinan

Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan merupakan Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang **Ketiga**. Tujuan ini didukung oleh satu sasaran yaitu Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut.

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA
Tujuan 3	Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah
Sasaran 3.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an
		Indeks Sarana Prasarana Perhubungan
		Indeks Perumahan Permukiman
		Pertanahan
		Indeks Penataan Ruang
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sementara tujuan Pembangunan Kota Bekasi **Keempat** adalah Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman. Tujuan tersebut didukung pemenuhannya oleh dua sasaran, yaitu (1) Meningkatkan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat dan (2) Meningkatkan Upaya dan Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Risiko



Bencana. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut.

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA
Tujuan 4	Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum
Sasaran 4.1	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum
		Prosentase Kerjasama Antar Kelompok Sara
		Indeks Risiko Bencana
Sasaran 4.2	Meningkatnya Upaya dan Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana
		Indeks Penanggulangan Kebakaran

Sedangkan tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang **Kelima**, adalah Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota. Untuk tujuan yang terakhir ini ditetapkan dua sasaran yang akan mendukung pencapaiannya yaitu (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi dan (2) Meningkatkan Daya Beli Masyarakat. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut.

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA
Tujuan 5	Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran 5.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa
		Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri
		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi
Sasaran 5.2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Peningkatan Pengeluaran Perkapita
		Laju Inflasi

Target pembangunan dari masing-masing Indikator berdasarkan *cascading* kinerja tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel V. 1 Indikator dan Terget dari Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
					2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64,75	69,20	70,12	72,10	72,10
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	83,33	84,20	85,15	86,10	86,10
1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Nilai	3,40	3,50	3,53	3,56	3,56
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	67,07	72,05	73,12	74,10	74,10
		Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)	Nilai	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Presentase Peningkatan PAD	%	25,9	0,01	18,99	3,90	3,90
2	Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,95	83,41	83,78	84,15	84,15
2.1	Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi	Indeks Pendidikan	Nilai	76,87	77,39	77,83	78,27	78,27
2.2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Nilai	84,91	84,93	84,95	84,97	84,97
		Gini Ratio	Nilai	0,401	0,395	0,385	0,375	0,375
2.4	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Keluarga	%	51,52	52	52,5	53	53
		Indeks Pembangunan Gender	Nilai	92,95	93	93,2	93,5	93,5

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
					2024	2025	2026	
2.5	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,88	8,55	8,42	8,29	8,29
		Angka Kemiskinan	%	4,74	4,5	4,4	4,3	4,3
3	Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah	%	52,90	62,48	64,40	66,20	66,20
3.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	%	43,66	46,48	47,46	48,56	48,56
		Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	%	76,44	83,3	85,8	87,6	87,6
		Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan	%	48,53	45,48	50,17	55,59	55,59
		Indeks Penataan Ruang	%	51,27	53,14	53,77	54,39	54,39
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	44,6	60	60,1	60,2	60,2
4	Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	%	6,53	2,69	1,99	1,29	1,29
		Indeks Risiko Bencana	Nilai	122	108	103	98	98
4.1	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	%	6,53	2,69	1,99	1,29	1,29
		Prosentase Kerjasama Antar Kelompok Sara	%	100	100	100	100	100
4.2	Meningkatnya Upaya dan Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	122	108	103	98	98
		Indeks Penanggulangan Kebakaran	Nilai	71,03	80,60	83	85,40	85,40
5	Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,22	2,70 – 5,17	2,75 – 5,12	2,81– 5,00	2,81–5,00



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
					2024	2025	2026	
5.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa	%	3,09	3,12	3,13	3,14	3,14
		Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri	%	3,13	3,16	3,17	3,18	3,18
		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	Rp. 8.167.096.033.071	7	7	7	Rp. 13.309.516.696.458
5.2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Peningkatan Pengeluaran Perkapita	%	0,81	1,5	1,5	1,5	1,5
		Laju Inflasi	%	1,61	3,05±1	3,08±1	3,07±1	3,07±1

BAB 06

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS





STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini berisi uraian tentang strategi, arah kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kota Bekasi tahun 2024-2026. Penyusunan strategi, arah kebijakan dan program prioritas ini selaras dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

6.1 Strategi Pembangunan

Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2024-2026 merancang strategi pembangunan secara komprehensif mencakup aspek tata kelola pemerintahan, pembangunan manusia, keamanan dan ketertiban kota, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan ekonomi.

Pada aspek tata kelola pemerintahan, strategi diarahkan pertama-tama untuk menyasar peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah. Dalam konteks ini strategi yang dibangun Kota Bekasi akan fokus pada peningkatan kompetensi SDM aparatur dan penerapan teknologi/transformasi digital. Sasaran berikutnya adalah peningkatan kualitas manajemen dan kinerja pemerintahan. Strategi yang dikembangkan di sektor ini akan fokus pada peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, kolaborasi dan kerja sama antar daerah, pengendalian proses pembangunan, transparansi kinerja dan promosi aparatur berbasis sistem.

Pada aspek pembangunan manusia, strategi diarahkan untuk menopang pembangunan di sektor Pendidikan, dan Kesehatan di samping itu juga sektor keluarga, gender, serta pekerjaan dan pendapatan dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan. Untuk meningkatkan masyarakat yang berpengetahuan tinggi akan dirancang strategi dengan fokus pembangunan pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan. Dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan akan dirancang strategi dengan fokus pada



peningkatan aksesibilitas layanan dan derajat Kesehatan masyarakat. Sementara dalam konteks pembangunan keluarga strategi pembangunan difokuskan pada pemberdayaan keluarga dengan mengedepankan kerjasama. Terkait pembangunan gender strategi yang akan dipakai akan berfokus pada peningkatan kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam hal pembentukan etos kemandirian dan pemenuhan hak dasar. Sedangkan untuk menurunkan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan akan diterapkan strategi yang fokusnya adalah pemberian pelatihan pada Angkatan kerja dan penyesuaian penanggulangan kemiskinan dari berbagai sektor.

Sementara pada aspek pembangunan infrastruktur, strategi diarahkan pada pemenuhan kapasitas dan kualitas infrastruktur serta pemenuhan layanan dasar. Fokus pembangunannya akan mencakup bidang infrastruktur ke-PU-an, perhubungan, perumahan, permukiman dan pertanahan, penataan ruang, dan lingkungan hidup. Fokus pembangunan infrastruktur ke-PU-an diaplikasikan melalui strategi peningkatan ketersediaan dan kualitas jalan, pengembangan trotoar dan pedestrian, serta restorasi system drainase dan sungai untuk mengurangi dampak banjir. Di sektor perhubungan strategi yang akan diterapkan adalah peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan angkutan umum serta mendorong pengurangan penggunaan kendaraan pribadi. Di sektor perumahan, permukiman dan pertanahan strategi yang akan digunakan adalah peningkatan akses air minum aman, pengolahan limbah, pemukiman bebas kumuh. Untuk sektor penataan ruang strategi yang akan diterapkan mencakup evaluasi penataan dan pemanfaatan ruang untuk lingkungan hijau berkelanjutan serta peningkatan kualitas tata kota berorientasi transit dan penyediaan ruang publik. Terakhir di sektor lingkungan hidup strategi yang akan digunakannya adalah penurunan beban pencemaran lingkungan, beban limbah domestik, peningkatan kapasitas ruang terbuka hijau, dan optimalisasi layanan persampahan dengan mendorong Kerjasama antar daerah, swasta dan masyarakat.

Pada sektor ketertiban dan keamanan kota, strategi yang akan dikembangkan diarahkan untuk menysar peningkatan ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta penurunan risiko bencana. Sebagai usaha meningkatkan kemandirian dan ketertiban masyarakat akan diterapkan strategi yang berfokus pada peningkatan pengetahuan masyarakat dalam



hal ketenteraman dan ketertiban, optimalisasi pencegahan dan penanganan pelanggaran lewat deteksi dini dan pengawasan berbasis digital, fasilitasi Kerjasama dan komunikasi antar kelompok masyarakat. Untuk menurunkan risiko bencana strategi yang akan dikembangkan adalah peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta peningkatan peran serta masyarakat.

Sedangkan pada sektor ketahanan ekonomi, strategi yang akan dibangun diarahkan untuk menyasar peningkatan pertumbuhan ekonomi berbagai sektor dan peningkatan daya beli masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan diterapkan strategi yang berfokus pada pemberian modal dan pelatihan bagi koperasi dan UKM, pembukaan ruang-ruang pemasaran berbasis kolaborasi, peningkatan sektor pariwisata dan pelestarian lingkungan, sertifikasi industri kecil dan menengah, serta promosi untuk meningkatkan penanaman modal. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat akan dikembangkan strategi pengembangan sektor-sektor ekonomi alternatif dan pemastian kestabilan harga komoditas melalui intervensi pada jalur distribusi.

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan disusun untuk memberikan arah dan memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan selama rentang waktu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dari 2024 sampai dengan 2026. Pada saat yang sama arah kebijakan juga dirancang untuk menjadi payung bagi pencapaian prioritas pembangunan dalam RPD Kota Bekasi 2024-2026 pada aspek tata kelola pemerintahan, pembangunan manusia, keamanan dan ketertiban kota, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan ekonomi.

Untuk mendukung pemenuhan tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel arah kebijakan RPD 2024-2026 adalah Penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital.

Dalam rangka mendorong pencapaian tujuan Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan terdapat dua arah kebijakan pada RPD 2024-2026 yaitu Penguatan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan dan



kesehatan yang inklusif dan merata dan Penguatan ketahanan keluarga dan mendorong kewirausahaan secara inklusif.

Sementara untuk mendukung pemenuhan tujuan Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dan tujuan Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib, arah kebijakan RPD 2024-2026 adalah Peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan.

Sedangkan untuk mendukung pemenuhan tujuan Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota arah kebijakan RPD 2024-2026 adalah Peningkatan kekuatan dan kemantapan perekonomian kota melalui kemudahan berusaha di sektor jasa, perdagangan, industri dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan.

Secara lebih detail, strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam RPD Kota Bekasi tahun 2024-2026 dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel VI. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT /OUTCOME)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi		1. Penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	1. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur pemerintah di bidang layanan masyarakat	
			2. Menerapkan teknologi/transformasi digital dalam menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat	
1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	1. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan berbasis bukti dan data yang saling terintegrasi	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	2. Penguatan, Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antar daerah serta kolaborasi	



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT /OUTCOME)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan) Presentase Peningkatan PAD	3. Meningkatkan pengendalian proses pembangunan dan percepatan penyelesaian rekomendasi hasil audit 4. Meningkatkan pemetaan, pengembangan kompetensi, penilaian evaluasi kinerja, kesejahteraan dan promosi aparatur berbasis sistem secara transparan.	
2	Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan	Indeks Pembangunan Manusia		2. Penguatan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan merata
2.1	Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi	Indeks Pendidikan	1. Meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan secara merata dan terjangkau seluruh kalangan 2. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh pihak guna peningkatan kualitas SDM siap berkompetisi	
2.2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	1. Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat secara merata dan terjangkau seluruh masyarakat 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penyediaan lingkungan sehat	
		Gini Ratio		
2.3	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Keluarga Indeks Pembangunan Gender	1. Memfasilitasi pemberdayaan keluarga ber-Wirausaha dengan pendekatan kerjasama antar pihak pengandil 1. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan anak menjadi lebih berkualitas dan berdikari	3. Penguatan ketahanan keluarga dan mendorong kewirausahaan secara inklusif

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT /OUTCOME)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak atas hak dasar serta dari kekerasan dan ancaman keselamatan	
2.4	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	Memperbanyak pelatihan kepada angkatan kerja lokal berbasis kolaborasi	
		Angka Kemiskinan	Menyelaraskan data pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dari berbagai sektor serta indikator penyebab	
3	Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah		4. Peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan.
3.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas jalan dan fasilitas pelengkap guna pemenuhan aksesibilitas dan mobilitas kendaraan	
			2. Melakukan pengembangan jalur trotoar dan pedestrian sebagai fasilitas pejalan kaki yang layak dan nyaman serta guna aktivitas sosial masyarakat	
			3. Melakukan pengurangan dampak banjir dengan merestorasi sistem drainase dan sungai melalui upaya kerjasama antar daerah dan pemerintah pusat	
		Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan angkutan umum, halte, terminal dan fasilitas parkir serta perlengkapan jalan	



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT /OUTCOME)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2. Merumuskan dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam upaya mendorong pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan beralih kepada penggunaan angkutan umum-massal berbasis bus	
		Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan	1. Meningkatkan akses dan kapasitas layanan air minum aman secara berkeadilan	
			2. Meningkatkan akses dan kapasitas layanan pengolahan air limbah domestik dan kualitas layanan sanitasi	
			3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas permukiman yang layak huni, bebas kumuh melalui peran partisipasi masyarakat dan berkelanjutan	
		Indeks Penataan Ruang	1. Meningkatkan kualitas dan evaluasi penataan serta pemanfaatan ruang dengan memperhatikan aspek lingkungan hijau, keberlanjutan dan ketahanan kota atas resiko bencana dan pencemaran	
			2. Meningkatkan kualitas penataan kota dengan optimalisasi terwujudnya sistem pusat layanan yang berorientasi transit dan ketersediaan ruang publik kota	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan upaya penurunan dan penanggulangan beban pencemaran lingkungan	
			2. Meningkatkan upaya penurunan dampak limbah non domestik dan limbah B3 melalui pendekatan partisipasi dan kolaborasi	

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT /OUTCOME	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			3. Meningkatkan kapasitas ruang terbuka hijau kota dan optimalisasi penghijauan di kawasan perumahan permukiman guna upaya penurunan termperatur kota	
			4. Menigoptimalkan kapasitas dan kualitas pelayanan persampahan dengan mendorong kerjasama antar daerah, pihak swasta dan masyarakat	
4	Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum		
4.1	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat dalam hal upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum	
			2. Mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan tindak pelanggaran keamanan dan ketertiban melalui deteksi dini dan pengawasan berbasis digital	
		Prosentase Kerjasama Antar Kelompok Sara	Memfasilitasi ruang kerjasama dan komunikasi antarkelompok	
		Indeks Risiko Bencana		
4.2	Meningkatnya Upaya dan Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana serta kesiapsiagaan SDM penanggulangan bencana	
		Indeks Penanggulangan Kebakaran	2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	
5	Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi		5. Peningkatan kekuatan dan kemandapan perekonomian kota



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT /OUTCOME	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
5.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa	1. Memberikan permodalan melalui dana bergulir atau pelatihan bagi koperasi dan UKM dengan mendorong peran organisasi non pemerintah	melalui kemudahan berusaha di sektor jasa, perdagangan, industri dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan
			2. Membuka ruang, fasilitas, dan kemudahan pemasaran berbasis kolaborasi	
			3. Meningkatkan sektor kepariwisataan perkotaan serta pelestarian kesenian lokal dan situs bersejarah	
		Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri	Memfasilitasi sertifikasi bagi Industri Kecil dan Menengah	
5.2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	Mengembangkan promosi penanaman modal	
		Peningkatan Pengeluaran Perkapita	Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan sektor-sektor alternatif	
		Laju Inflasi	Menjaga stabilitas harga komoditas melalui intervensi di sektor distribusi dan upaya kemandirian pangan masyarakat	

6.3 Program Prioritas

Program prioritas disusun selaras sekaligus untuk mendukung pemenuhan target tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026. Program pembangunan daerah jumlahnya sangat banyak, namun tidak semua program akan menjadi prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Di samping itu, ketersediaan anggaran pembangunan Kota Bekasi juga memiliki keterbatasan, maka tidak semua program pemerintahan daerah akan menjadi prioritas dalam rangka pelaksanaan RPD 2024-2026.

Program prioritas berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan RPD Kota Bekasi 2024-2026 sesuai dengan daftar program menurut



Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

6.3.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel

Tujuan pembangunan ini diturunkan ke dalam dua sasaran pembangunan. Sasaran pertama adalah Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah. Untuk mendukung pencapaian target sasaran tersebut, program prioritas yang akan dioperasikan selama periode RPD 2024-2026 adalah:

Program Administrasi Umum	Indikator Kinerja
	Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah
	Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah
	Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan
	persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi
	Presentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan
	Presentase Ketersediaan gedung pemerintahan dalam kondisi baik

Sasaran kedua dari tujuan pembangunan pertama ini adalah Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah. Untuk mendukung pencapaian target sasaran tersebut, beberapa program prioritas yang akan dioperasikan selama periode RPD 2024-2026 adalah:

Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indikator Kinerja
	Ketepatan Waktu Penetapan APBD
	Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD
	Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan Dengan SAP dan tepat waktu
	Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPM yang Diterima
	Presentase OPD yang melaksanakan Administrasi Penatausahaan Keuangan dengan Tertib
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak



Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Nilai Aset Antara LBMD Dengan LKPD
	Jumlah Bidang tanah milik pemkot yang bersertifikat
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
	Persentase Peningkatan Jumlah WP dan WR dari tahun sebelumnya
	Persentase piutang terbayarkan
	Nilai Hasil Survey Pelayanan Publik

6.3.2 Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan

Tujuan pembangunan ini diturunkan ke dalam lima sasaran pembangunan. Sasaran pertama adalah Meningkatkan Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi. Untuk mendukung pencapaian target sasaran tersebut, program prioritas yang akan dioperasikan selama periode RPD 2024-2026 adalah:

	Indikator Kinerja
Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD
	APM SD
	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum jenjang SD
	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum jenjang SD
	Persentase Pendidikan Dasar Terakreditasi A
	APK SMP
	APM SMP
	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP
	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP
	Jumlah pendidikan dasar inklusi perkecamatan
	Persentase Ketersediaan SMP d Setiap Kelurahan
	APK PAUD
	APM PAUD
	Persentase PAUD Terakreditasi B
	APM Kesetaraan
	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik
	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dalam Kondisi Baik
	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik



Sasaran kedua dari tujuan pembangunan kedua ini adalah Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat untuk Sehat. Program prioritas yang akan dioperasikan selama periode RPD 2024-2026 pada sasaran ini adalah :

	Indikator Kinerja
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)
	Persentase Ketersediaan gedung RS Type D dalam kondisi baik dan berfungsi
	Persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas
	Persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type B
	Persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type D
	Persentase Puskesmas Terakreditasi
	Persentase Rumah sakit Terakreditasi
	Terpenuhinya pemeliharaan 10 jenis sarana dan prasarana rumah sakit
	Capaian IKM Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Type B
	persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan Rumah Sakit
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas
	Persentase cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan
	Prevalensi Balita Status Gizi Stunting
	Persentase Institusi dan fasilitas umum memenuhi syarat kesehatan
	Ketersediaan Puskesmas di Kelurahan
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan
	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan
	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan
	Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan
	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan
	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan
	Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan
	Persentase Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan
	Persentase Warga Negara penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan
	Persentase Warga Negara penderita terduga Tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan



	Indikator Kinerja
	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

Sementara sasaran ketiga dari tujuan pembangunan kedua ini adalah Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender. Terdapat dua Program prioritas yang akan mendukung dalam pemenuhan sasaran ini, yaitu:

	Indikator Kinerja
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah PPKS Aktif di Kecamatan
	Persentase Cakupan anggota poktan yang ber KB.
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Sedangkan sasaran kelima dari tujuan pembangunan kedua ini adalah Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota. Untuk mendukung pencapaian target sasaran tersebut, beberapa program prioritas yang akan dioperasikan selama periode RPD 2024-2026 adalah:

	Indikator Kinerja
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja
	Persentase peningkatan kompetensi bagi pencari kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti
	Persentase anak telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti
	Persentase lanjut usia telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti
	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti



6.3.3 Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Tujuan pembangunan ini diturunkan ke dalam satu sasaran pembangunan, dengan cakupan bidang pembangunan meliputi infrastruktur ke-PU-an; perhubungan; perumahan, permukiman dan pertanahan; penataan ruang; dan lingkungan hidup. Sasaran pembangunan yang dirancang adalah Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan. Untuk mendukung pencapaian target sasaran tersebut, beberapa program prioritas yang akan dioperasikan selama periode RPD 2024-2026 adalah:

a. Infrastruktur ke-PU-an

Program prioritas untuk mendukung pencapaian target pembangunan infrastruktur ke-PU-an adalah:

	Indikator Kinerja
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi baik
	Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (> 40km/jam)
	Persentase Pembangunan Jembatan Baru
	Persentase Pemeliharaan Jembatan
	Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

b. Infrastruktur Perhubungan

Program prioritas untuk mendukung pencapaian target pembangunan infrastruktur perhubungan adalah:

	Indikator Kinerja
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan
	Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi
	Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas
	Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal
	Persentase kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor

c. Infrastruktur Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Program prioritas untuk mendukung pencapaian target pembangunan infrastruktur perumahan, permukiman dan pertanahan adalah:

	Indikator Kinerja
Program Pengembangan Permukiman	Persentase peningkatan pembangunan PJU Baru
	Persentase Pemeliharaan PJU
	Persentase Luasan Permukiman yang tertata

d. Infrastruktur Penataan Ruang

Program prioritas untuk mendukung pencapaian target pembangunan infrastruktur penataan ruang adalah:

	Indikator Kinerja
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan
	Jumlah penataan dan pemeliharaan reklame
	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang
	Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang
	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang

e. Infrastruktur Lingkungan Hidup

Program prioritas untuk mendukung pencapaian target pembangunan infrastruktur lingkungan hidup adalah:

	Indikator Kinerja
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R
	Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA
	Persentase sampah yang terangkut ke TPA
	Persentase Cakupan Area Pelayanan
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air
	Indeks kualitas udara



6.3.4 Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman

Tujuan pembangunan ini diturunkan ke dalam dua sasaran pembangunan. Sasaran pertama adalah Meningkatkan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat. Untuk mendukung pencapaian target sasaran tersebut, beberapa program prioritas yang akan dioperasikan selama periode RPD 2024-2026 adalah:

	Indikator Kinerja
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Prosentase Peningkatan Pendayagunaan data dan informasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penegakan pelanggaran perda Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Daerah

Sasaran kedua dari tujuan pembangunan keempat ini adalah Terwujudnya Upaya dan Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Risiko Bencana. Untuk mendukung pencapaian target sasaran tersebut, beberapa program prioritas yang akan dioperasikan selama periode RPD 2024-2026 adalah:

	Indikator Kinerja
Program Penanggulangan Bencana	Persentase kemampuan aparaturnya dan masyarakat dalam menghadapi bencana
	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
	Persentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan
	Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase layanan pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran
	Persentase layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran
	Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta non kebakaran
	Persentase Penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan
	Persentase layanan pencegahan pemadam kebakaran dan penyelamatan

6.3.5 Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota

Tujuan pembangunan ini diturunkan ke dalam dua sasaran pembangunan. Sasaran pertama adalah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi. Untuk mendukung pencapaian target sasaran tersebut, beberapa program prioritas yang akan dioperasikan selama periode RPD 2024-2026 adalah:

Program	Indikator Kinerja
Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi usaha Kecil
	Persentase jumlah pelaku UMKM kreatif
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar rakyat bersih yang berbasis modern
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kawasan wisata yang ditata
	Persentase Peningkatan Usaha/Jasa Kepariwisata yang berizin
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM yang ditingkatkan kopetensinya sesuai dengan perkembangan dan Tren Kepariwisata
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan fasilitasi terhadap Industri kecil dan menengah
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan
	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi
	Persentase fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
	Jumlah Bidang Usaha BUMD
	Persentase Peningkatan Deviden BUMD

Sasaran kedua dari tujuan pembangunan kelima ini adalah Meningkatnya Daya Beli Masyarakat. Untuk mendukung pencapaian target sasaran tersebut, beberapa program prioritas yang akan dioperasikan selama periode RPD 2024-2026 adalah:

	Indikator Kinerja
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Stabilisasi harga pangan
	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Laju inflasi kelompok pengeluaran bahan makanan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.	Jumlah Produksi komoditas pertanian
	Jumlah produksi peternakan
	Jumlah produksi olahan Hasil peternakan



Selain menunjang tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi, Beberapa Program Prioritas juga menunjang terhadap Prioritas Pembangunan yang telah dirumuskan oleh Kepala Daerah, beberapa rumusan prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan;

Untuk peningkatan partisipasi masyarakat diberikan melalui pemberian bantuan stimulus bagi Lembaga kemasyarakatan seperti: a) bantuan keuangan untuk seluruh LPM; b) bantuan operasional untuk RT dan RW; c) bantuan operasional untuk marbot masjid; d) bantuan operasional untuk kegiatan posyandu; dan e) bantuan operasional untuk forum kerukunan umat beragama (FKUB).

Prioritas pembangunan ini ditunjang oleh Program Administrasi Umum dengan indikator kinerja yaitu Cakupan Informasi Daerah yang dipublikasi dan Presentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi.

2. Peningkatan “Urban Farming” melalui bantuan hibah kompetitif;

Untuk prioritas pembangunan kedua ditunjang oleh Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan indicator Kinerjanya yaitu Jumlah Produksi Komoditas Pertanian.

3. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Program Prioritas yang menunjang adalah program pengembangan UMKM dengan indikator kinerja Persentase peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi usaha Kecil.

4. Pembentukan kampung-kampung tematik dalam pemberdayaan wisata lokal;

Prioritas pembanguunan ke empat ini ditunjang oleh dua Program prioritas yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

5. “Link and Match” program pemagangan kerja dengan dunia usaha;

Program Penempatan Tenaga Kerja adalah program yang mendukung atas prioritas pembangunan kelima, indikator program ini yaitu Presentase Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan.

6. Optimalisasi Bekasi Quick Respon (BQR);

Optimalisasi yang dimaksud dalam prioritas pembangunan ini adalah dengan memanfaatkan dan memaksimalkan tenaga para relawan yang berada di seluruh wilayah. Program Prioritas yang menunjang dalam Optimalisasi Bekasi Quick Respon adalah Program Penanggulangan



Bencana dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

7. Penggunaan “Saving Land/Land Banking”;

Prioritas Pembangunan ini adalah dengan memanfaatkan ruang terbuka dalam rangka meningkatkan aktivitas masyarakat di ruang terbuka untuk berolahraga atau aktivitas kemasyarakatan lainnya, Adapun program yang menunjang adalah Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

8. Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu);

Dikarenakan masih terdapatnya pemukiman tidak layak huni di Kota Bekasi dirasa perlu Pengentasan Rutilahu sebagai Prioritas Pembangunan Kepala Daerah, Adapun program prioritasnya adalah Program Pengembangan Permukiman.

9. Peningkatan Kualitas Pendidikan (Sekolah Inklusif);

Prioritas Pembangunan ini dilaksanakan melalui pemerataan pembangunan sarana sekolah (SD dan SMP) dengan memperhatikan tingkat kelulusan disetiap jenjang pendidikan setiap tahunnya serta mengutamakan pendirian bangunan sekolah (SMP) yang saat ini belum tersedia.

Untuk Prioritas Pembangunan ini ditunjang oleh Program Pengelolaan Pendidikan.

10. Subsidi Biaya Pendidikan di sekolah Swasta untuk siswa kurang mampu;

Untuk Prioritas Pembangunan ini ditunjang oleh Program Pengelolaan Pendidikan.

11. Peningkatan Kualitas Pendidikan di Pondok Pesantren.

Dilaksanakan melalui pemberian bantuan prasarana dan sarana pendidikan serta peningkatan kesejahteraan para pendidik di Pondok Pesantren serta pemberian bantuan kepada Lembaga Pengasuh Pondok Pesantren seperti FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren). Prioritas pembangunan ini ditunjang oleh Program Administrasi Umum dengan indikator Persentase Fasilitasi kegiatan keagamaan, hari besar Nasional dan hari besar lainnya.

Program prioritas pembangunan untuk mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026 dan Prioritas Pembangunan Kepala Daerah secara lebih detil dijabarkan dalam tabel berikut ini.





Tabel VI. 1 Program Prioritas Pembangunan

NO	TUJUAN/SASARAN/PRO GRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUT COME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
					2024		2025		2026				
					Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64,75	69,20		70,12		72,10		72,10		
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	83,33	84,20		85,15		86,10		86,10		
1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Nilai	3,40	3,50		3,53		3,56		3,56		
		Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	67.07	72,05		73,12		74,10		74,10		
		Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)	Nilai	WDP	WTP		WTP		WTP		WTP		
		Presentase Peningkatan PAD	%	25,9	0,01		18,99		3,90		3,90		
1	Program Administrasi Umum					165,218,387 ,440.00		165,168,387 ,440.00		165,168,387 ,440.00		165,168,38 7,440.00	Sekretariat Daerah
		Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah	%	93.18	75		75		75		75		Sekretariat Daerah (Bag. Tata Pemerintahan)
		Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	%	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah (Bag. Tata Usaha)
		Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	%	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah (Bag. Humas)



NO	TUJUAN/SASARAN/PRO GRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUT COME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
					2024		2025		2026				
					Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	
		persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi	%	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
		Presentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan	%	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah (Bag. Perlengkapan)
		Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	%	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah					79,585,240 ,000.00		79,630,240 ,000.00		79,715,240, 000.00		79,715,240 ,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Grade	A	A		A		A		A		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD	%	100	100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan Dengan SAP dan tepat waktu	%	100	100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPM yang Diterima	%	100	100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Presentase OPD yang melaksanakan Administrasi Penatausahaan Keuangan dengan Tertib	%	100	100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO	TUJUAN/SASARAN/PRO GRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUT COME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
					2024		2025		2026				
					Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	
		Persentase Kebutuhan Penggunaan Belanja Tak Terduga yang Diajukan dengan yang Ditetapkan	%	100	100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					4,050,000,000.00		3,350,000,000.00		3,350,000,000.00		3,350,000,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Kesesuaian Nilai Aset Antara LBMD Dengan LKPD	%	100	100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota yang Bersertifikat	%	19.62	23		26		29		29		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					5,693,566,000.00		5,800,000,000.00		7,050,000,000.00		7,050,000,000.00	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	47,57	56.51		62.50		62.80		62.80		Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Peningkatan Jumlah WP dan WR	%	2.86	1.50		1.50		1.50		1.50		Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Piutang Terbayarkan	%	11.95	8		8		8		8		Badan Pendapatan Daerah
		Nilai Hasil Survey Pelayanan Publik	Nilai	78.21	86.25		86.50		86.75		86.75		Badan Pendapatan Daerah
2	Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,95	83,41		83,78		84,15		84,15		
2.1	Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi	Indeks Pendidikan	Nilai	76,87	77,39		77,83		78,27		78,27		
5	Program Pengelolaan Pendidikan					865,954,555,596.70		924,808,730,742.08		857,332,722,421.61		857,332,722,421.61	Dinas Pendidikan /Dinas Perumahan Kawasan



NO	TUJUAN/SASARAN/PRO GRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUT COME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
					2024		2025		2026				
					Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	
													Pemukiman & Pertanahan
		APK SD	%	101.89	100.1		100.05		100.05		100.05		Dinas Pendidikan
		APM SD	%	98.08	100		100		100		100		Dinas Pendidikan
		Nilai Kemampuan Literasi jenjang SD	Nilai	1.9	1.95		2		2.1		2.1		Dinas Pendidikan
		Nilai Kemampuan Numerasi jenjang SD	Nilai	1.65	1.7		1.75		1.8		1.8		Dinas Pendidikan
		Persentase Pendidikan Dasar Terakreditasi A	%	77.43	79.43		81.43		83.43		83.43		Dinas Pendidikan
		APK SMP	%	91.4	100		100		100		100		Dinas Pendidikan
		APM SMP	%	84.35	90		93		95		95		Dinas Pendidikan
		Nilai Kemampuan Literasi jenjang SMP	Nilai	1.98	2		2.05		2.09		2.09		Dinas Pendidikan
		Nilai Kemampuan Numerasi jenjang SMP	Nilai	1.8	2		2.05		2.09		2.09		Dinas Pendidikan
		Rasio pendidikan dasar inklusi per kecamatan	Rasio	1 : 12	5 : 12		9 : 12		12 : 12		12 : 12		Dinas Pendidikan
		Persentase Ketersediaan SMP di Setiap Kelurahan	%	85.71	91.07		96.43		100.00		100.00		Dinas Pendidikan
		APK PAUD	%	27.65	60		65		70		70		Dinas Pendidikan
		APM PAUD	%	54.73	60		65		70		70		Dinas Pendidikan
		Persentase PAUD Terakreditasi B	%	33.71	38.71		43.71		48.71		48.71		Dinas Pendidikan
		APM Kesetaraan	%	85.23	87.23		90		90		90		Dinas Pendidikan
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	%	33.85	20.69		62.93		100		100		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dalam Kondisi Baik	%	20.83	36.11		83.33		100		100		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan



NO	TUJUAN/SASARAN/PRO GRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUT COME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
					2024		2025		2026				
					Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	%	60	70.00		85.00		100		100		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
2.2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat untuk Sehat	Indeks Kesehatan	Nilai	84,91	84,93		84,95		84,97		84,97		
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					870,570,81 6,894.00		911,082,689 ,993.00		920,133,18 4,319.00		920,298,18 4,319.00	Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
		Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)	%	15	16		16		17		17		Dinas Kesehatan. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan. Rumah Sakit Umum Daerah
		Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi	%	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
		persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas	%	67.75	68		68		68		68		Dinas Kesehatan
		persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type B	%	86.68	86.68		86.69		86.7		86.7		Rumah Sakit Umum Daerah
		persentase ketersediaan alat kesehatan dan non	%	25.88	60		60		60		60		Dinas Kesehatan



NO	TUJUAN/SASARAN/PRO GRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUT COME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
					2024		2025		2026				
					Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	
		kesehatan di Rumah Sakit Type D											
		Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	28	35		42		48		48		Dinas Kesehatan
		persentase Rumah sakit Terakreditasi	%	89.36	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		terpenuhinya pemeliharaan 10 jenis sarana dan prasarana rumah sakit	%	100	100		100		100		100		Rumah Sakit Umum Daerah
		Capaian IKM Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Type B	Indeks	80,32	85		87		88		88		Rumah Sakit Umum Daerah
		persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan Rumah Sakit	%	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	%	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan	%	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah
		Prevalensi Balita Status Gizi Stunting	%	7.87	7.82		7.77		7.72		7.72		Dinas Kesehatan
		persentase Institusi dan fasilitas umum memenuhi syarat kesehatan	%	68.47	72		72		72		72		Dinas Kesehatan
		Ketersediaan Puskesmas di Kelurahan	Puskemas	47	50		53		56		56		Dinas Kesehatan
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	97.27	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase ibu bersalin yang	%	97.93	100		100		100		100		Dinas Kesehatan



NO	TUJUAN/SASARAN/PRO GRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUT COME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
					2024		2025		2026				
					Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	
		mendapatkan layanan kesehatan											
		Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	97.96	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	74.1	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	63.08	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	36.42	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	69.51	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	14.67	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase Warga Negara penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	91	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	%	65.17	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase Warga Negara penderita terduga Tuberculosis	%	42.87	100		100		100		100		Dinas Kesehatan



NO	TUJUAN/SASARAN/PRO GRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUT COME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
					2024		2025		2026				
					Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	
		yang mendapatkan layanan kesehatan											
		Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	34.1	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Gini Ratio	Nilai	0,401	0,395		0,385		0,375		0,375		
2.4	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Keluarga	%	51,52	52		52,5		53		53		
		Indeks Pembangunan Gender	Nilai	92,95	93		93,2		93,5		93,5		
8	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)					900,000,00 0.00		900,000,00 0.00		900,000,00 0.00		900,000,0 00.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah PPKS Aktif di Kecamatan	unit	6	8		10		12		12		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Cakupan anggota poktan yang ber KB.	%	55	60		65		70		70		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan					3,700,000, 000.00		3,830,000, 000.00		3,950,000, 000.00		3,950,000, 000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



NO	TUJUAN/SASARAN/PRO GRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUT COME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
					2024		2025		2026				
					Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	
		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	77.90	77.90		77.95		78		78		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.5	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,88	8,55		8,42		8,29		8,29		
		Angka Kemiskinan	%	4,74	4,5		4,4		4,3		4,3		
10	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja					1,200,000,000.00		1,200,000,000.00		1,200,000,000.00		1,200,000,000.00	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	%	100	30		30		40		40		Dinas Tenaga Kerja
		Persentase peningkatan kompetensi bagi pencari kerja	%	20	30		30		40		40		Dinas Tenaga Kerja
11	Program Penempatan Tenaga Kerja					750,000,000.00		750,000,000.00		750,000,000.00		750,000,000.00	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan	%	76.17	76.51		76.63		76.74		74.74		Dinas Tenaga Kerja
12	Program Rehabilitasi Sosial					11,000,000,000.00		13,750,000,000.00		16,400,000,000.00		16,400,000,000.00	Dinas Sosial
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100	100		100		100		100		Dinas Sosial



NO	TUJUAN/SASARAN/PRO GRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUT COME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
					2024		2025		2026				
					Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	
3	Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah	%	52,90	62,48		64,40		66,20		66,20		
3.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	%	43,66	46,48		47,46		48,56		48,56		
		Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	%	76,44	83.3		85.8		87.6		87.6		
		Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan	%	48,53	45,48		50,17		55,59		55,59		
		Indeks Penataan Ruang	%	51.27	53,14		53.77		54.39		54.39		
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	44,6	60		60,1		60,2		60,2		
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase					106,500,00 0,000.00		106,500,00 0,000.00		106,500,00 0,000.00		106,500,00 0,000.00	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
		Persetase Drainase Dalam Kondisi Baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	66.68	68.27		68.57		68.88		66.88		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
14	Program Penyelenggaraan Jalan					202,751,190 ,971.00		202,751,190 ,971.00		202,751,190 ,971.00		202,751,19 0,971.00	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
		Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi baik	Point	0.73	0.81		0.83		0.85		0.85		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
		Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (> 40km/jam)	%	95.76	101.21		105.01		108.76		108.76		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air



NO	TUJUAN/SASARAN/PRO GRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUT COME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
					2024		2025		2026				
					Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	
		Presentase Pembangunan Jembatan Baru	%	47.88	64.64		64.79		64.94		64.94		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
		Persentase Pemeliharaan Jembatan	%	93.03	71.41		71.93		72.44		72.44		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
		Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	19.69	21.01		21.41		21.8		21.8		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
15	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)					92,678,335 ,492.00		95,497,358 ,297.00		105,776,521 ,324.00		105,776,52 1,324.00	Dinas Perhubungan
		Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan	%	0.917	92		92.5		93		93		Dinas Perhubungan
		Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi	%	100	70		85		90		90		Dinas Perhubungan
		Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas	%	11.7	12		13		14		14		Dinas Perhubungan
		Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal	%	70	72		75		80		80		Dinas Perhubungan
		Jumlah kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor	Jumlah	68000	69000		70000		71000		71000		Dinas Perhubungan
16	Program Pengembangan Permukiman					69,416,505, 499.00		69,416,505, 499.00		69,416,505, 499.00		94,416,505 ,499.00	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air/Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan



NO	TUJUAN/SASARAN/PRO GRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUT COME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
					2024		2025		2026				
					Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	
		Persentase peningkatan pembangunan PJU Baru	%	52.41	55,06		56.33		57.22		57.22		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
		Presentase Pemeliharaan PJU	titik	11250	11250		11250		11250		59403		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
		Persentase Luasan Permukiman yang tertata	%	7.84	13.72		15.68		17.64		17.64		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
17	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang					5,000,000,000.00		5,000,000,000.00		5,000,000,000.00		5,000,000,000.00	Dinas Tata Ruang/Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
		Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan	%	19.37	19.73		19.85		19.96		19.96		Dinas Tata Ruang
		Jumlah penataan dan pemeliharaan reklame	Buah	8	8		8		8		32		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
		Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang	%	74	77		78		79		79		Dinas Tata Ruang
		Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang	%	74	77		78		79		79		Dinas Tata Ruang
		Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	%	64	67		68		69		69		Dinas Tata Ruang
18	Program Pengelolaan Persampahan					159,000,000,000.00		159,000,000,000.00		159,000,000,000.00		159,000,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	11.7	12		13		14		14		Dinas Lingkungan Hidup



NO	TUJUAN/SASARAN/PRO GRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUT COME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
					2024		2025		2026				
					Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	
		Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA	Point	73	73,05		73,10		73,15		73,15		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase sampah yang terangkut ke TPA	%	63	62		62		62		62		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	100	100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
19	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup					7,300,000, 000.00		7,300,000, 000.00		7,300,000, 000.00		7,300,000, 000.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks kualitas air	Nilai	4 (IP=1-35)	IP=5		IP=5		IP=5		IP=5		Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks kualitas udara	Nilai	Nilai	83.80		62.20		62.40		62.60		Dinas Lingkungan Hidup
4	Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	%	6,53	2,69		1,99		1,29		1,29		
		Indeks Risiko Bencana	Nilai	122	108		103		98		98		
4.1	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	%	6,53	2,69		1,99		1,29		1,29		
		Prosentase Kerjasama Antar Kelompok Sara	%	100	100		100		100		100		
20	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial					2,100,000,0 00.00		2,325,000, 000.00		2,700,000, 000.00		2,700,000, 000.00	Dinas Sosial
		Persentase Peningkatan Pendayagunaan data dan informasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan	%	100	100		100		100		100		Dinas Sosial



NO	TUJUAN/SASARAN/PRO GRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUT COME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
					2024		2025		2026				
					Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	
		Kesejahteraan Sosial(PPKS)											
21	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum					18,100,856,450.00		36,225,000,000.00		40,225,000,000.00		40,225,000,000.00	SATPOL PP
		Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	Rasio	1 : 31	1 : 31		1 : 31		1 : 31		1 : 31		SATPOL PP
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	100		100		100		100		SATPOL PP
		Persentase penegakan pelanggaran perda	%	100	100		100		100		100		SATPOL PP
22	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial					1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Daerah	%	100	100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.2	Meningkatnya Upaya dan Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Risio Bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	122	108		103		98		98		
		Indeks Penanggulangan Kebakaran	Nilai	71,03	80,60		83		85,40		85,40		
23	Program Penanggulangan Bencana					5,599,442,353.00		23,817,700,604.00		41,725,861,627.00		41,725,861,627.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase kemampuan aparaturnya dan masyarakat dalam menghadapi bencana	%	100	100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah



NO	TUJUAN/SASARAN/PRO GRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUT COME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
					2024		2025		2026				
					Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	
		Presentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan	%	100	100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran					37,902,610,520.00		42,495,000,000.00		43,325,000,000.00		43,325,000,000.00	Dinas Pemadam Kebakaran
		Persentase layanan pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran	%	40	55		60		65				Dinas Pemadam Kebakaran
		Persentase layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran	%	79	89		92		95				Dinas Pemadam Kebakaran
		Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakran serta non kebakaran	%	100	100		100		100				Dinas Pemadam Kebakaran
		Presentase Penyediaan sarana dan prasarana	%	55,215	59		63		67				Dinas Pemadam Kebakaran



NO	TUJUAN/SASARAN/PRO GRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUT COME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
					2024		2025		2026				
					Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	
		pemadam kebakaran dan penyelamatan											
		Presentase layanan pencegahan pemadam kebakaran dan penyelamatan	%	82.14	100		100		100				Dinas Pemadam Kebakaran
5	Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,22	2,70 – 5,17		2,75 – 5,12		2,81– 5,00		2,81-5,00		
5.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa	%	3,09	3,12		3,13		3,14		3,14		
		Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri	%	3,13	3,16		3,17		3,18		3,18		
		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	Rp. 8.167.096.0 33.071	7		7		7		Rp. 13.309.516 .696.458		
25	Program Pengembangan UMKM					1,100,187,0 00.00		1,575,006,2 00.00		2,047,800, 200.00		2,047,800, 200.00	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi usaha Kecil	%	0.3	0.1		0.1		0.1		0.6		Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
26	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					4,728,309, 432.00		4,728,309, 432.00		4,728,309, 432.00		4,728,309, 432.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Jumlah pasar rakyat bersih yang berbasis modern	Unit	8	10		10		10		10		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
27	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					1,600,000,0 00.00		1,600,000,0 00.00		1,600,000,0 00.00		1,600,000, 000.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Jumlah kawasan wisata yang ditata	Lokasi	1	1		1		1		3		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



NO	TUJUAN/SASARAN/PRO GRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUT COME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
					2024		2025		2026				
					Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	
28	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif					350,000,00 0.00		600,000,00 0.00		750,000,00 0.00		750,000,0 00.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Jumlah SDM yang ditingkatkan kopetensinya sesuai dengan perkembangan dan Tren Kepariwisataan	orang	75	300		325		350		1.050		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
29	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri					2,025,133,0 00.00		1,846,138,0 00.00		1,919,983,0 00.00		1,919,983,0 00.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase peningkatan fasilitas terhadap Industri kecil dan menengah	%	5.34	4		4		4		4		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
30	Program Pelayanan Penanaman Modal					6,054,450, 000.00		6,191,950,0 00.00		6,350,000, 000.00		6,350,000, 000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	%	100	100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
31	Program Perekonomian Dan Pembangunan					7,814,700,0 00.00		7,814,700,0 00.00		7,814,700,0 00.00		7,814,700, 000.00	Sekretariat Daerah (Bag. Pembangunan)
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan	%	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan)
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi	%	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
		Persentase fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	%	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah (Bagian



NO	TUJUAN/SASARAN/PRO GRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUT COME	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
					2024		2025		2026		Target	Rp. (Milyar)	
					Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)	Target	Rp. (Milyar)			
													Pengadaan Barang dan Jasa)
5.2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Peningkatan Pengeluaran Perkapita	%	0,81	1,5		1,5		1,5		1,5		
		Laju Inflasi	%	1,61	3,05±1		3,08±1		3,07±1		3,07±1		
32	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat					325,000,00 0.000		400,000,00 0.00		500,000,00 0.00		500,000,0 00.00	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
		Stabilisasi harga pangan	%	2.27	<5		<5,00		<5,00		<5,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	%	87.94	88.5		89		90		90		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
33	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting					750,000,00 0.00		750,000,00 0.00		750,000,00 0.00		750,000,0 00.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Laju inflasi kelompok pengeluaran bahan makanan	%	0.88	<4.00		<4.00		<4.00		<4.00		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
34	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.					1,975,000,0 00.00		2,200,000, 000.00		2,425,000, 000.00		2,425,000, 000.00	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
		Jumlah Produksi komoditas pertanian	Ton	34,250	36,168		36,711		37,261		37,261		Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
		Jumlah produksi peternakan	Ton	10.765	11,093		11,195		11,300		11,300		Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
		Jumlah produksi olahan Hasil peternakan	Ton	3,700	3,817		3,875		3,925		3,925		Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan

BAB 07

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH





BAB 07

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan rangkaian program perangkat daerah sesuai dengan Urusan Konkuren (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) serta fungsi penunjang urusan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Adapun penyusunan program perangkat daerah dalam bab ini merujuk pada (1) Muatan program sesuai janji politik Walikota dan Wakil Walikota, (2) Nomenklatur program yang mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Bekasi, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN dan Sumber-sumber pendanaan lainnya).

Tabel Program Perangkat Daerah Kota Bekasi beserta target dan pagu indikatifnya untuk tahun perencanaan 2024-2026 selengkapnya tergambar sebagai berikut.

Tabel VII. 1 Program Perangkat Daerah disertai Pagu Indikatif

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	1		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN												
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				865,954,55 5,596.70		924,808,73 0,742.08		857,332,72 2,421.61		857,332,722 ,421.61	Dinas Pendidikan /Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan	
				APK SD	%	101.89	100.1		100.05		100.05		100.05	Dinas Pendidikan	
				APM SD	%	98.08	100		100		100		100	Dinas Pendidikan	
				Nilai Kemampuan Literasi jenjang SD	Nilai	1.9	1.95		2		2.1		2.1	Dinas Pendidikan	
				Nilai Kemampuan Numerasi jenjang SD	Nilai	1.65	1.7		1.75		1.8		1.8	Dinas Pendidikan	
				Persentase Pendidikan Dasar Terakreditasi A	%	77.43	79.43		81.43		83.43		83.43	Dinas Pendidikan	
				APK SMP	%	91.4	100		100		100		100	Dinas Pendidikan	
				APM SMP	%	84.35	90		93		95		95	Dinas Pendidikan	
				Nilai Kemampuan Literasi jenjang SMP	Nilai	1.98	2		2.05		2.09		2.09	Dinas Pendidikan	
				Nilai Kemampuan Numerasi jenjang SMP	Nilai	1.8	2		2.05		2.09		2.09	Dinas Pendidikan	
				Rasio pendidikan dasar inklusi per kecamatan	Rasio	1 : 12	5 : 12		9 : 12		12 : 12		12 : 12	Dinas Pendidikan	

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Ketersediaan SMP di Setiap Kelurahan	%	85.71	91.07		96.43		100.00		100.00		Dinas Pendidikan
				APK PAUD	%	27.65	60		65		70		70		Dinas Pendidikan
				APM PAUD	%	54.73	60		65		70		70		Dinas Pendidikan
				Persentase PAUD Terakreditasi B	%	33.71	38.71		43.71		48.71		48.71		Dinas Pendidikan
				APM Kesetaraan	%	85.23	87.23		90		90		90		Dinas Pendidikan
				Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	%	33.85	20.69		62.93		100		100		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
				Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dalam Kondisi Baik	%	20.83	36.11		83.33		100		100		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
				Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	%	60	70.00		85.00		100		100		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					2,680,000,000.00		2,762,544,000.00		2,847,354,100.80		2,847,354,100.80	Dinas Pendidikan
				Persentase pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar	%	70	75		80		85		85		Dinas Pendidikan
				Cakupan Pelayanan Berbasis IT	%	40	60		80		100		100		Dinas Pendidikan

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					1,600,000,0 00.00		1,649,280,0 00.00		1,699,912,89 6.00		1,699,912,89 6.00	Dinas Pendidikan
				Presentase pendidikan Dasar terakreditas B	%	91.87	92.05		92.54		93.16		93.16		Dinas Pendidikan
				PAUD Terakreditasi	%	39.41	40.25		41.05		41.85		41.85		Dinas Pendidikan
				Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi	%	31.62	38.73		39.63		40.53		40.53		Dinas Pendidikan
1	2		URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN												
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					4,550,000, 000.00		5,600,000, 000.00		6,600,000,0 00.00		6,600,000,0 00.00	Dinas Kesehatan. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
				Cakupan rumah tangga Ber-PHBS	%	65.9	64		64		64		64		Dinas Kesehatan
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					870,570,81 6,894.00		911,082,689 ,993.00		920,133,184 ,319.00		920,298,184 ,319.00	Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
				Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)	%	15	16		16		17		17		Dinas Kesehatan. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan. Rumah Sakit Umum Daerah
				Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi	%	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas	%	67.75	68		68		68		68		Dinas Kesehatan
				persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type B	%	86.68	86.68		86.69		86.7		86.7		Rumah Sakit Umum Daerah
				persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type D	%	25.88	60		60		60		60		Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	28	35		42		48		48		Dinas Kesehatan
				persentase Rumah sakit Terakreditasi	%	89.36	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
				terpenuhinya pemeliharaan 10 jenis sarana dan prasarana rumah sakit	%	100	100		100		100		100		Rumah Sakit Umum Daerah
				Capaian IKM Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Type B	Indeks	80,32	85		87		88		88		Rumah Sakit Umum Daerah
				persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan Rumah Sakit	%	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah
				Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	%	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
				Persentase cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan	%	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Prevalensi Balita Status Gizi Stunting	%	7.87	7.82		7.77		7.72		7.72		Dinas Kesehatan
				persentase Institusi dan fasilitas umum memenuhi syarat kesehatan	%	68.47	72		72		72		72		Dinas Kesehatan
				Ketersediaan Puskesmas di Kelurahan	Puskem as	47	50		53		56		56		Dinas Kesehatan
				Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	97.27	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
				Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	97.93	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
				Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	97.96	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
				Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	74.1	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
				Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	63.08	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
				Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	36.42	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
				Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan lavanan kesehatan	%	69.51	100		100		100		100		Dinas Kesehatan

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	14.67	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
				Persentase Warga Negara penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	91	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
				Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	%	65.17	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
				Persentase Warga Negara penderita terduga Tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	42.87	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
				Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	34.1	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					200,000,00 0.00		200,000,00 0.00		200,000,00 0.00		200,000,00 0.00	Dinas Kesehatan
				persentase jumlah sarana kefarmasian yang memenuhi standar kesehatan	%	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				persentase jumlah produk pangan industri rumah tangga(PIRT) berlabel yang memenuhi standar kesehatan	%	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					60,142,162,878.00		60,162,162,878.00		60,182,162,878.00		60,182,162,878.00	Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
				persentase ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas dan RS	%	89.87	100		100		100		100		Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					87,500,000,000.00		87,500,000,000.00		87,500,000,000.00		87,500,000,000.00	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
				Presentase Pembangunan Polder	%	64.48	65.54 %		66.12%		66.71%		66.71%		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
				Presentase Pemeliharaan Polder	%	5.14	7.01%		8.17%		9.27%		9.27%		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					10,000,000,000.00		35,400,000,000.00		35,400,000,000.00		35,400,000,000.00	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	23.05%	24.72%		25.26 %		25.78 %		25.78 %		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					500,000,0 00.00		500,000,00 0.00		-			Dinas Lingkungan Hidup
				Luasan Zona Buang Yang Terbangun	Ha		1		1		1		1		Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase tersedianya perencanaan sektoral persampahan	%		1		1						Dinas Lingkungan Hidup
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					47,100,000, 000.00		47,100,000, 000.00		47,100,000, 000.00		47,100,000, 000.00	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
				Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Layak	%	99.37%	99.58%		99.79%		100%		100%		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
				Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Aman	%	6.14%	2.84%		6.34%		9.74%		13.14%		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					106,500,00 0,000.00		106,500,00 0,000.00		106,500,00 0,000.00		106,500,000 ,000.00	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
				Persetase Drainase Dalam Kondisi Baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	66.68	68.27		68.57		68.88		66.88		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					69,416,505, 499.00		69,416,505, 499.00		69,416,505, 499.00		94,416,505, 499.00	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air/Dinas Perumahan Kawasan

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
															Pemukiman & Pertanahan
				Persentase peningkatan pembangunan PJU Baru	%	52.41	55.06		56.33		57.22		57.22		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
				Presentase Pemeliharaan PJU	titik	11250	11250		11250		11250		59403		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
				Persentase Luasan Permukiman yang tertata	%	7.84	13.72		15.68		17.64		17.64		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					63,444,551,020.00		34,781,280,480.00		19,250,000,000.00		19,250,000,000.00	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan, Dinas Tata Ruang
				Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi	%	56.41	35.71%		78.57 %		100%		100%		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
				Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan	%	-	90		90		90		90		Dinas Tata Ruang
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					202,751,190,971.00		202,751,190,971.00		202,751,190,971.00		202,751,190,971.00	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
				Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi baik	Point	0.73	0.81		0.83		0.85		0.85		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
				Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (> 40km/jam)	%	95.76	101.21		105.01		108.76		108.76		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
				Presentase Pembangunan Jembatan Baru	%	47.88	64.64		64.79		64.94		64.94		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Pemeliharaan Jembatan	%	93.03	71.41		71.93		72.44		72.44		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
				Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	19.69	21.01		21.41		21.8		21.8		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					5,161,512,000.00		5,076,506,000.00		5,076,506,000.00		5,076,506,000.00	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
				Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi Dalam Keadaan Baik	%	0	100		100		100		100		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					5,000,000,000.00		5,000,000,000.00		5,000,000,000.00		5,000,000,000.00	Dinas Tata Ruang/Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
				Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan	%	19.37	19.73		19.85		19.96		19.96		Dinas Tata Ruang
				Jumlah penataan dan pemeliharaan reklame	Buah	8	8		8		8		32		Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
				Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang	%	74	77		78		79		79		Dinas Tata Ruang
				Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang	%	74	77		78		79		79		Dinas Tata Ruang
				Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	%	64	67		68		69		69		Dinas Tata Ruang
1	4		URUSAN PEMERINTAHAN												

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					6,000,000, 000.00		6,000,000, 000.00		5,450,000, 000.00		17,450,000, 000.00	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
				Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	5.99	6.26%		6.26%		6.26%		6.26%		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
				Persentase Penyediaan/ Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	%	95.84	100		100		100		100		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					6,000,000, 000.00		6,000,000, 000.00		6,000,000, 000.00		6,000,000,0 00.00	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
				Persentase Luasan Permukiman kumuh dikawasan perkotaan	%	1	1.64%		1.64%		1.64%		4.92%		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
1	4	4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					600,000,00 0.00		600,000,00 0.00		600,000,00 0.00		600,000,00 0.00	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
				Persentase Luasan Permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar dikawasan perkotaan	%	66.76	79.84%		92.89 %		100%		100%		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					54,200,000 ,000.00		54,200,000 ,000.00		54,200,000 ,000.00		64,200,000, 000.00	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
				Cakupan Yang sehat dan aman yang	%	28.99	43.75		47.26		50.78		50.78		Dinas Perumahan Kawasan

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				didukung dengan PSU											Pemukiman & Pertanahan
				Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum	Rasio	6.02	7.13		7.35		7.57		7.57		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					18,100,856, 450.00		36,225,000 ,000.00		40,225,000, 000.00		40,225,000, 000.00	SATPOL PP
				Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	Rasio	1 : 31	1 : 31		1 : 31		1 : 31		1 : 31		SATPOL PP
				Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	100		100		100		100		SATPOL PP
				Persentase penegakan pelanggaran perda	%	100	100		100		100		100		SATPOL PP
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					5,599,442, 353.00		23,817,700, 604.00		41,725,861, 627.00		41,725,861,6 27.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase kemampuan aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana	%	100	100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Presentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan	%	100	100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					37,902,610,520.00		42,495,000,000.00		43,325,000,000.00		43,325,000,000.00	Dinas Pemadam Kebakaran
				Persentase layanan pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran	%	40	55		60		65				Dinas Pemadam Kebakaran
				Persentase layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran	%	79	89		92		95				Dinas Pemadam Kebakaran
				Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakran serta non kebakaran	%	100	100		100		100				Dinas Pemadam Kebakaran
				Presentase Penyediaan sarana dan prasarana	%	55,215	59		63		67				Dinas Pemadam Kebakaran

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				pemadam kebakaran dan penyelamatan											
				Presentase layanan pencegahan pemadam kebakaran dan penyelamatan	%	82.14	100		100		100			Dinas Pemadam Kebakaran	
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					4,066,624, 000.00		4,166,624,0 00.00		4,266,624,0 00.00		4,266,624,0 00.00	Dinas Sosial
				Persentase PSKS yang ikut serta dalam penanganan masalah kesejahteraan Sosial	%	100	100		100		100		100	Dinas Sosial	
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					11,000,000, 000.00		13,750,000, 000.00		16,400,000, 000.00		16,400,000, 000.00	Dinas Sosial
				Persentase penyanggah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100	100		100		100		100	Dinas Sosial	
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					2,100,000,0 00.00		2,325,000, 000.00		2,700,000,0 00.00		2,700,000,0 00.00	Dinas Sosial

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Peningkatan Pendayagunaan data dan informasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS)	%	100	100		100		100		100		Dinas Sosial
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					2,750,000,000.00		3,400,000,000.00		4,000,000,000.00		4,000,000,000.00	Dinas Sosial
				Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	100		100		100		100		Dinas Sosial
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					1,350,000,000.00		1,450,000,000.00		1,700,000,000.00		1,700,000,000.00	Dinas Sosial
				Persentase Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Area	1	1		1		1		1		Dinas Sosial
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					300,000,000.00		-		-		-	Dinas Tenaga Kerja
				Persentase Cakupan Ketersedian dokumen	%	20	100						100		Dinas Tenaga Kerja

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1,200,000,0 00.00		1,200,000,0 00.00		1,200,000,0 00.00		1,200,000,0 00.00	Dinas Tenaga Kerja
				Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	%	100	30		30		40		40		Dinas Tenaga Kerja
				Persentase peningkatan kompetensi bagi pencari kerja	%	20	30		30		40		40		Dinas Tenaga Kerja
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					750,000,00 0.00		750,000,00 0.00		750,000,00 0.00		750,000,00 0.00	Dinas Tenaga Kerja
				Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan	%	76.17	76.51		76.63		76.74		74.74		Dinas Tenaga Kerja
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					375,000,00 0.00		375,000,00 0.00		375,000,00 0.00		375,000,00 0.00	Dinas Tenaga Kerja
				Persentase penanganan sengketa pengusaha dengan pekerja	%	100	100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					770,000,00 0.00		895,000,00 0.000		950,000,00 0.00		950,000,00 0.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Presentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	%	100	100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					1,900,000,0 00.00		2,030,000, 000.00		2,160,000,0 00.00		2,160,000,0 00.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	%	100	100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					3,700,000, 000.00		3,830,000, 000.00		3,950,000,0 00.00		3,950,000,0 00.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	77.90	77.90		77.95		78		78		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK					2,100,000,0 00.00		2,200,000, 000.00		2,300,000,0 00.00		2,300,000,0 00.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase Pemenuhan Hak Anak dalam 5 Klaster	%	73	73		75		76		76		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					325,000,00 0.000		400,000,0 00.00		500,000,00 0.00		500,000,00 0.00	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
				Stabilisasi harga pangan	%	2.27	<5		<5,00		<5,00		<5,00		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	%	87.94	88.5		89		90		90		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					4,000,000,000.00		4,000,000,000.00		4,000,000,000.00		4,000,000,000.00	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
				Persentase Penanganan kerawanan pangan	%	80.58	87		87.5		88		88		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					300,000,000.00		350,000,000.00		400,000,000.00		400,000,000.00	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
				Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	84	88.5		89		90		90		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												
2	10	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
				Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot	%	100	33.33%		66.67%		100.00 %		100.00 %		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
2	10	5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					90,000,000,000.00		247,630,000,000.00		247,530,000,000.00		247,530,000,000.00	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
				Persentase Pemenuhan pengadaan tanah	%	16.55%	38.93%		69.47 %		100.00 %		100.00 %		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				7,300,000, 000.00		7,300,000, 000.00		7,300,000,0 00.00		7,300,000,0 00.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Indeks kualitas air	Nilai	4 (IP=1- 35)	IP=5		IP=5		IP=5		IP=5	Dinas Lingkungan Hidup	
				Indeks kualitas udara	Nilai	Nilai	83.80		62.20		62.40		62.60	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				21,000,000, 000.00		21,000,000, 000.00		21,000,000, 000.00		21,000,000, 000.00	Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air	
				Capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) / Hutan Kota yang tersedia dan terkelola	%	100	100		100		100		100	Dinas Lingkungan Hidup	
				Presentase Pembangunan Taman Baru	%	18.03	22.37		23.67		24.98		24.98	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air	
				Presentase Pemeliharaan Taman	%	64.95	98.02		100		100		100	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air	
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				200,000,00 0.00		200,000,00 0.00		200,000,00 0.00		200,000,00 0.00	Dinas Lingkungan Hidup	
				Persentase Usaha Kegiatan yang Memiliki TPS Limbah B3	%	55	65		70		75		75	Dinas Lingkungan Hidup	

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Limbah B3 Rumah Tangga Yang Tertangani	%	0	0.10		0.12		0.15		0.15		Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					300,000,00 0.00		300,000,00 0.00		300,000,00 0.00		300,000,00 0.00	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase pembinaan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	% (usaha / kegiatan)	55%	100% (60 usaha / kegiat an)		100% (60 usaha / kegiat an)		100% (60 usaha / kegiat an)		100% (60 usaha / kegiat an)		Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	% (usaha / kegiatan)	55%	100% (50 usaha / kegiat an)		100% (50 usaha / kegiat an)		100% (50 usaha / kegiat an)		100% (50 usaha / kegiat an)		Dinas Lingkungan Hidup
2	11	7	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		%	0					900,000,00 0.00		900,000,00 0.00		Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	0	100	-	100	-	100	900,000,00 0	100		Dinas Lingkungan Hidup

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					460,000,0 00.00		460,000,00 0.00		460,000,00 0.00		460,000,00 0.00	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam lingkungan hidup	%	50	80		80		80		80		Dinas Lingkungan Hidup
2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					400,000,0 00.00		400,000,0 00.00		400,000,00 0.00		400,000,00 0.00	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase pemberian penghargaan Lingkungan Hidup	%	0	80		80		80		80		Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase perolehan penghargaan Lingkungan Hidup	%	0	100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					300,000,00 0.00		300,000,00 0.00		300,000,00 0.00		300,000,00 0.00	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tentang Permasalahan Lingkungan	%	100	100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					159,000,00 0,000.00		159,000,00 0,000.00		159,000,00 0,000.00		159,000,000 ,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	11.7	12		13		14		14		Dinas Lingkungan Hidup

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN					KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB	
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
				Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA	Point	73	73,05		73,10		73,15		73,15		Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase sampah yang terangkut ke TPA	%	63	62		62		62		62		Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	100	100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					3,300,000, 000.00		3,300,000, 000.00		3,300,000, 000.00		3,300,000,0 00.00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				cakupan kepemilikan KTP el	%	94.51	94.51		94.82		95.23		95.23		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				cakupan kepemilikan kartu keluarga	%	94.97	94.97		97.75		99.6		99.6		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Cakupan Penerbitan KIA	%	65	65		80		95		95		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					800,000,0 00.00		700,000,00 0.00		700,000,00 0.00		700,000,00 0.00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Cakupan kepemilikan akte kelahiran	%	67.29	67.29		67.62		67.96		67.96		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Cakupan Kepemilikan akte perkawinan	%	60.55	60.55		60.63		60.71		60.71		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Cakupan kepemilikan akte kematian	%	64.26	64.26		64.32		64.32		64.32		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					3,625,000, 000.00		3,625,000, 000.00		3,625,000,0 00.00		3,625,000,0 00.00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				persentase ketersediaan data catatan sipil dan administrasi kependudukan yang lengkap dan terbaru	%	100	100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					450,000,000.00		500,000,000.00		500,000,000.00		500,000,000.00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Pemutakhiran profil kependudukan	%	100	100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCA												
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					900,000,000.00		900,000,000.00		900,000,000.00		900,000,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Jumlah PPKS Aktif di Kecamatan	unit	6	8		10		12		12		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase Cakupan anggota poktan yang ber KB.	%	55	60		65		70		70		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					1,856,000,000.00		3,433,000,000.00		4,600,000,000.00		4,600,000,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase pemakaian kontrasepsi/CPR	%	77	78.5		79		79.2		79.5		Dinas Pengendalian Penduduk dan

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				bagi perempuan Menikah											Keluarga Berencana
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					995,000,00 0.00		685,000,00 0.00		900,000,00 0.00		900,000,00 0.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Presentase Cakupan Data Mikro Keluarga	%	75	80		85		90		90		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					92,678,335 ,492.00		95,497,358 ,297.00		105,776,521, 324.00		105,776,521, 324.00	Dinas Perhubungan
				Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan	%	0.917	92		92.5		93		93		Dinas Perhubungan
				Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi	%	100	70		85		90		90		Dinas Perhubungan
				Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas	%	11.7	12		13		14		14		Dinas Perhubungan
				Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal	%	70	72		75		80		80		Dinas Perhubungan
				Jumlah kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor	Jumlah	68000	69000		70000		71000		71000		Dinas Perhubungan

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIK												
2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				21,987,128, 000.00		22,512,777, 700.00		23,125,324, 855.00		23,125,324, 855.00	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian	
				Indeks Pengelolaan sitem Layanan Publik Berbasis Digital	Indeks	3.27	3.24		4.06		4.98		4.98	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian	
2	16	2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1,171,000,0 00.00		1,380,400, 000.00		1,598,710,0 00.00		1,598,710,00 0.00	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian	
				Indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan pengaduan dan informasi publik	Indeks	4.26	4.38		4.43		4.48		4.48	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian	
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
2	17	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				76,355,000 .00		100,000,00 0.00		100,000,00 0.00		100,000,000 .00	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	
				Persentase Koperasi yang memiliki Izin Simpan Pinjam	%	5	2		2		2		11	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				505,527,50 0.00		710,361,00 0.00		660,973,00 0.00		660,973,000 .00	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN					KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB	
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
				Persentase PKL yang Menempati Tempat yang telah Ditetapkan	%	15	10		10		10		45		Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					1,100,187,000.00		1,575,006,200.00		2,047,800,200.00		2,047,800,200.00	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
				Persentase peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi usaha Kecil	%	0.3	0.1		0.1		0.1		0.6		Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					40,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
				Persentase Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	%	8.7	10		10		10		38.7		Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					200,000,000.00		270,000,000.00		270,000,000.00		270,000,000.00	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
				Persentase Koperasi yang telah Tersertifikasi Kesehatannya	%	8.17	4		4		4		20.17		Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					400,000,000.00		457,999,100.00		518,911,000.00		518,911,000.00	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
				Persentase Koperasi yang Meningkatkan Skala Usahanya	%	0.5	0.2		0.2		0.2		1.1		Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					300,000,000.00		500,000,000.00		475,000,000.00		475,000,000.00	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian	%	4	3		3		3		16		Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					6,054,450, 000.00		6,191,950,0 00.00		6,350,000,0 00.00		6,350,000,0 00.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	%	100	100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					700,000,00 0.00		700,000,00 0.00		700,000,00 0.00		700,000,00 0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola	Jumlah	2	4		4		4		4		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					250,000,00 0.00		150,000,00 0.00		150,000,00 0.00		150,000,000 .00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase Peningkatan Investor Baru	%	27,6	4		4		4		4		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
															Terpadu Satu Pintu
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					450,000,0 00.00		450,000,0 00.00		450,000,00 0.00		450,000,00 0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Jumlah Pelaku usaha yang Mendapatkan Informasi dan Potensi dan Peluang Investasi	Jumlah	10.000	12.000		13.000		14.000		14.000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					450,000,0 00.00		475,000,00 0.00		500,000,00 0.00		500,000,00 0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	%	10,5	16		21		26		26		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAG												
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					3,700,000, 000.00		3,800,000, 000.00		3,600,000,0 00.00		3,950,000,0 00.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	52	55		58		61		61		Dinas Pemuda dan Olahraga

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Cakupan Pembinaan Komunitas Pemuda Kreatif dan Pemuda yang Aktif	%	57	60		63		66		66		Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					134,160,00 0,000.00		137,900,00 0,000.00		159,150,000 ,000.00		159,150,000, 000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Cakupan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	%	70	70		76		93		93.00		Dinas Pemuda dan Olahraga
				Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Representatif	%	55	55		71		92		92.00		Dinas Pemuda dan Olahraga
				Cakupan Pembinaan Olahraga Berprestasi	%	82	82		85		89		89.00		Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					1,000,000, 000.00		1,000,000, 000.00		1,000,000,0 00.00		1,000,000,0 00.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Presentase Gugus Depan Aktif	%	73,4	73,4		73,8		74,1		74,1		Dinas Pemuda dan Olahraga
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					350,000,00 0.00		350,000,00 0.00		350,000,00 0.00		350,000,00 0.00	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
				Indeks ketersediaan data sektoral berbasis digital	Indeks	3.5	3.75		4.38		5		5		Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					1,653,000,0 00.00		1,654,950,0 00.00		1,657,192,50 0.00		1,657,192,50 0.00	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
				Indeks penyelenggaraan pengamanan informasi	Indeks	5	5		5		5		5		Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					550,000,0 00.00		550,000,00 0.00		550,000,00 0.00		550,000,00 0.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Jumlah Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Situs	2	6		6		6		20		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					650,000,00 0.00		650,000,00 0.00		700,000,00 0.00		700,000,00 0.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Jumlah sanggar budaya yang dikembangkan	lembaga	26	5		5		7		43		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					2,000,000, 000.00		42,820,000 ,000.00		3,270,000,0 00.00		3,270,000,0 00.00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
				Jumlah Ketersediaan Fasilitas Membaca	Perpust akaan	1544	1556		1568		1580	1,820,000,0 00.00	1580		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
				Persentase Kemanfaatan Perpustakaan oleh masvarakat	%	53.75	54		55		56	1,450,000,0 00.00	56		Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				1,970,000,0 00.00		2,450,000, 000.00		2,630,000,0 00.00		2,630,000,0 00.00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
				Persentase Perangkat Daerah, dan lembaga/ BUMD yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Tertib	%	22.72	36.36		45.45		56.81		56.81	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				800,000,0 00.00		500,000,00 0.00		550,000,00 0.00		550,000,00 0.00	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
				Penambahan khasanah arsip statis pada depo arsip	Boks	278	322		366		410		410	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				600,000,00 0.00		900,000,00 0.00		1,400,000,0 00.00		1,400,000,0 00.00	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan	
				Jumlah produksi ikan konsumsi	Ton	1910	1974.7 9		1994.5 4		2014.4 9		2014.4 9	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan	
				Jumlah Produksi Ikan Hias	ekor	22.737.6 61	25.361. 323		25.614. 936		25.871. 086		25.871. 086	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan	
3	25	5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				700,000,00 0.00		900,000,00 0.00		1,100,000,0 00.00		1,100,000,00 0.00	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan	
				Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	89.130.5 0	93.865 ,05		95.000		97.000		97.000	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan	

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				1,600,000,0 00.00		1,600,000,0 00.00		1,600,000,0 00.00		1,600,000,0 00.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
				Jumlah kawasan wisata yang ditata	Lokasi	1	1		1		1		3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				900,000,00 0.00		900,000,00 0.00		900,000,00 0.00		900,000,00 0.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
				Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	615,598	951.28 6		1.046. 414		1.151.0 55		1.151.0 55	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				350,000,00 0.00		600,000,00 0.00		750,000,00 0.00		750,000,00 0.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
				Jumlah SDM yang ditingkatkan kopetensinya sesuai dengan perkembangan dan Tren Kepariwisataan	orang	75	300		325		350		1.050	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				1,975,000,0 00.00		2,200,000, 000.00		2,425,000,0 00.00		2,425,000,0 00.00	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan	
				Jumlah Produksi komoditas pertanian	Ton	34,250	36,168		36,711		37,261		37,261	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan	
				Jumlah produksi peternakan	Ton	10.765.0 0	11,093		11,195		11,300		11,300	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan	

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Jumlah produksi olahan Hasil peternakan	Ton	3,700	3,817		3,875		3,925		3,925		Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					949,500,00 0.00		1,150,000,0 00.00		1,345,000,0 00.000		1,345,000,0 00.00	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
				Terkendalnya Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis	Kasus	tidak ada	tidak ada		tidak ada		tidak ada		tidak ada		Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
				Unit Usaha Peternakan Kesehatan dan Produk hewan yang bersertifikat teknis	unit	65	80		85		90		90		Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
				Persentase produk PAH yang ASUH	%	44	45.2		45.4		45.5		45.5		Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					4,728,309, 432.00		4,728,309, 432.00		4,728,309,4 32.00		4,728,309,4 32.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Jumlah pasar rakyat bersih yang berbasis modern	Unit	8	10		10		10		10		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					750,000,00 0.00		750,000,00 0.00		750,000,00 0.00		750,000,00 0.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Laju inflasi kelompok pengeluaran bahan makanan	%	0.88	<4.00		<4.00		<4.00		<4.00		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					301,174,00 0.00		310,209,00 0.00		319,514,600 .00		319,514,600. 00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Persentase pertumbuhan alat UTTP yang ditera/tera ulang	%	23.50	3		3		3		3		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					1,000,000, 000.00		1,175,000,0 00.00		1,350,000,0 00.00		1,350,000,0 00.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Nilai ekspor Kota Bekasi	US Dollar	480.609. 228	515.00 0.000		530.00 0.000		545.0 00.00 0		545.00 0.000		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
3	31	3	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					2,025,133,0 00.00		1,846,138,0 00.00		1,919,983,0 00.00		1,919,983,00 0.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Persentase peningkatan fasilitas terhadap Industri kecil dan menengah	%	5.34	4		4		4		4		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4	1		SEKRETARIAT DAERAH												
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					59,010,038, 856.00		59,010,038, 856.00		59,010,038, 856.00		59,010,038, 856.00	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
				Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan	%	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	%	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
				Persentase peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah	%	68.18	75		75		75		M		Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)
				Presentase peningkatan profile kelurahan	%	96.43	25		25		25		25		Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)
				Persentase Fasilitasi kegiatan keagamaan. hari besar Nasional dan hari besar lainnya	%	75	100		100		100		100		Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Sosial)
				Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial	%	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Sosial)
				Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah (Bagian Kerja Sama)
				Persentase penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah	%	100	95		95		95		95		Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					7,814,700,000.00		7,814,700,000.00		7,814,700,000.00		7,814,700,000.00	Sekretariat Daerah (Bag. Pembangunan)

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan	%	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan)
				Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi	%	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
				Persentase fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	%	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
4	1	4	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM					165,218,387,440.00		165,168,387,440.00		165,168,387,440.00		165,168,387,440.00	Sekretariat Daerah
				Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah	%	93.18	75		75		75		75		Sekretariat Daerah (Bag. Tata Pemerintahan)
				Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	%	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah (Bag. Tata Usaha)
				Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	%	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah (Bag. Humas)
				persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi	%	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
				Presentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan	%	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah (Bag. Perlengkapan)
				Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	%	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
4	2		SEKRETARIAT DPRD												

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	2	2	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA		%	100.00	100.00	98,040,165,183.00	100.00	102,886,431,754.00	100.00	105,948,836,225.00	100.00	105,948,836,225.00	Sekretariat DPRD
				Optimalisasi peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD	%	100	100		100		100		100		Sekretariat DPRD
				Optimalisasi Disiplin Aparatur Sekretariat DPRD	%	100	100		100		100		100		Sekretariat DPRD
				Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD	%	100	100		100		100		100		Sekretariat DPRD
				Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	%	100	100		100		100		100		Sekretariat DPRD
				Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD	%	100	100		100		100		100		Sekretariat DPRD
				Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	%	100	100		100		100		100		Sekretariat DPRD
4	2	3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		%	100.00	100.00	121,006,149,608.00	100.00	126,481,299,276.00	100.00	137,030,826,086.00	100.00	137,030,826,086.00	Sekretariat DPRD
				Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan	%	100	100		100		100		100		Sekretariat DPRD

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Penetapan APBD dan LAPBD											
				Persentase Terasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA	%	100	100		100		100		100		Sekretariat DPRD
				Persentase Terasilitasinya informasi DPRD	%	100	100		100		100		100		Sekretariat DPRD
				Persentase Terasilitasinya kegiatan DPRD	%	100	100		100		100		100		Sekretariat DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	1		PERENCANAAN												
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		%			4,400,000,000.00		4,600,000,000.00		2,500,000,000.00		2,500,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
				Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan tahunan daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah	%	64,00	80		80		80		80		Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					4,650,000,000.00		4,650,000,000.00		4,650,000,000.00		4,650,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN					KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB	
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
				Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan perencanaan pembangunan daerah	%	60,00	80		80		80		80	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	
				Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan perencanaan pembangunan daerah	%	57,14	80		80		80		80	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	
				Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan perencanaan pembangunan daerah	%	75,00	80		80		80		80	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	
5	2		KEUANGAN												
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					79,585,240 ,000.00		79,630,240 ,000.00		79,715,240, 000.00		79,715,240,0 00.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Grade	A	A		A		A		A	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
				Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APRD	%	100	100		100		100		100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan Dengan SAP dan tepat waktu	%	100	100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPM yang Diterima	%	100	100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Presentase OPD yang melaksanakan Administrasi Penatausahaan Keuangan dengan Tertib	%	100	100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase Kebutuhan Penggunaan Belanja Tak Terduga yang Diajukan dengan yang Ditetapkan	%	100	100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					4,050,000,000.00		3,350,000,000.00		3,350,000,000.00		3,350,000,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase Kesesuaian Nilai Aset Antara LBMD Dengan LKPD	%	100	100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota yang Bersertifikat	%	19.62	23		26		29		29		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					5,693,566,000.00		5,800,000,000.00		7,050,000,000.00		7,050,000,000.00	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	47,57	56.51		62.50		62.80		62.80		Badan Pendapatan Daerah

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Peningkatan Jumlah WP dan WR	%	2.86	1.50		1.50		1.50		1.50		Badan Pendapatan Daerah
				Persentase Piutang Terbayarkan	%	11.95	8		8		8		8		Badan Pendapatan Daerah
				Nilai Hasil Survey Pelayanan Publik	Nilai	78.21	86.25		86.50		86.75		86.75		Badan Pendapatan Daerah
5	3		KEPEGAWAIAN DAERAH												
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					11,865,550,500.00		12,231,010,343.00		12,606,502,178.00		12,606,502,178.00	Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia
				Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, pengadaan, promosi dan mutasi serta sistem informasi pada indeks sistem merit	Nilai	97	97		107.58		116.54		116.54		Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia
				Nilai aspek pengembangan karir pada indeks sistem merit	Nilai	60	60		66.54		72.09		72.09		Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia
				Nilai aspek manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin serta perlindungan dan pelayanan pada indeks sistem merit	Nilai	113.5	113.5		125.88		136.37		136.37		Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia
5	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1,650,000,000.00		1,650,000,000.00		1,650,000,000.00		1,650,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	%	29	60		60		60		60		Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	%	20	60		60		60		60		Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi	%	25	60		60		60		60		Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
				Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang mendapatkan predikat	Jumlah	2 predikat	1 predikat		1 Predikat		1 Predikat		1 Predikat		Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
6	1		INSPEKTORAT DAERAH												
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1,850,000,000.00		2,075,000,000.00		2,350,000,000.00		2,350,000,000.00	Inspektorat Kota
				Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal	%	79.01	80		80		80		80		Inspektorat Kota
				Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Ekternal	%	90.52	91		91		91		91		Inspektorat Kota

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Perangkat Daerah dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel	%	90	100		100		100		100		Inspektorat Kota
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1,750,000,000.00		1,975,000,000.00		2,200,000,000.00		2,200,000,000.00	Inspektorat Kota
				Presentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01	%	36	36		39		41		41		Inspektorat Kota
				Persentase PD dengan nilai AKIP BB keatas	%	98	98		100		100		100		Inspektorat Kota
				Level Kapabilitas APIP	Level	3	3		3		3		3		Inspektorat Kota
7			UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1		KECAMATAN												
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		%	100	100	2,886,750,000.00		3,279,087,500.00		3,751,041,875.00		3,751,041,875.00	Kecamatan
				Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	%	100	100		100		100		100		Kecamatan
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		%	100	100	89,167,129,916.00	100	92,525,013,687.00	100	104,596,528,246.00	100	104,596,528,246.00	Kecamatan

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	100		100		100		100		Kecamatan
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		%	100	100	900,000,00 0.00	100	917,500,00 0.00	100	967,125,000 .00	100	967,125,000. 00	Kecamatan
				Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	%	100	100		100		100		100		Kecamatan
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		%	100	100	3,037,845, 400.00	100	2,829,095, 400.00	100	2,969,657,9 00.00	100	2,969,657,9 00.00	Kecamatan
				Persentase wilayah tertib K3	%	100	100		100		100		100		Kecamatan
8			URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1,400,000, 000.00		1,500,000,0 00.00		1,600,000,0 00.00		1,600,000,0 00.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI					1,000,000, 000.00		1,000,000, 000.00		1,000,000,0 00.00		1,000,000,0 00.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			PENANGANAN KONFLIK SOSIAL												
				Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Daerah	%	100	100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					123,350,73 4,000.00		11,750,000, 000.00		11,750,000, 000.00		11,750,000,0 00.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah	%	100	100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					9,400,000, 000.00		9,900,000, 000.00		9,900,000,0 00.00		9,900,000,0 00.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Optimalisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	%	100	100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA					1,000,000, 000.00		1,000,000, 000.00		1,000,000,0 00.00		1,000,000,0 00.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Optimalisasi pembinaan dan pengembangan	%	100	100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODEFIKASI URUSAN/BID ANG URUSAN/PRO GRAM			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
							2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya											
x	x		PENUNJANG URUSAN												
x	x	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		%	100	100	2,440,218, 488,639.00		2,440,218,4 88,639.00		2,440,218,4 88,639.00		2,440,218,4 88,639.00	Seluruh OPD
				Optimalisasi Disiplin Aparatur	%	100	100		100		100		100		Seluruh OPD
				Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100		100		100		100		Seluruh OPD
				Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100		100		100		100		Seluruh OPD
				Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100		100		100		100		Seluruh OPD
				Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100		100		100		100		Seluruh OPD

BAB 08

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI





KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

Pada Bab ini akan disampaikan penjabaran mengenai Indikator Kinerja Daerah. Adapun penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja pembangunan setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact).

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

8.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran serta merupakan ikhtisar hasil berbagai Program sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Lebih lanjut penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel VIII. 1 Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi 2024-2026

SASARAN RANCANGAN RPD	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (CAPAIAN 2021)	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerinta	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	83.33	84.20	85.15	86.10	86,10



SASARAN RANCANGAN RPD	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (CAPAIAN 2021)	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	2	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Nilai	3.40	3.50	3.53	3.56
	3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	67.07	72.05	73.12	74.10
	4	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP
	5	Persentase Peningkatan PAD	%	25.9	0,01	18,99	3,90
Meningkatnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi	6	Indeks Pendidikan	Nilai	76.87	77.39	77.83	78.27
Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	7	Indeks Kesehatan	Nilai	84.91	84.93	84.95	84.97
Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan Pembangunan responsif Gender	8	Indeks pembangunan keluarga	%	51.52	52	52.5	53
	9	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	92.95	93	93.2	93.5
Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10.88	8,55	8,42	9,29
	11	Angka Kemiskinan	%	4.74	4.5	4.4	4.3
Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berwawasan lingkungan	12	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	%	43,66	46,48	47,46	48,56
	13	Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	%	76.44	83.3	85.8	87.6
	14	Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan	%	48.53	45,48	50,17	55,59
	15	Indeks Penataan Ruang	%	51.27	53.14	53.77	54.39
	16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	44.6	60	60,1	60,2
Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	17	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban umum	%	6.53	2.69	1.99	1.29
	18	Persentase kerjasama antar kelompok sara	%	100	100	100	100
Meningkatnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana	19	Indeks Risiko Bencana	Nilai	122	108	103	98
	20	Indeks Penanggulangan Kebakaran	Nilai	71.03	80.60	83	85.40
Meningkatnya Pertumbuhan	21	Persentase Peningkatan Nilai	%	3.09	3.12	3.13	3.14



SASARAN RANCANGAN RPD	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (CAPAIAN 2021)	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi		Sektor Perdagangan dan Jasa					
	22	Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri	%	3.13	3.16	3.17	3.18
	23	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	Rp 8,167,096,0 33,071	7	7	7
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	24	Peningkatan Pengeluaran perkapita	%	0,81	1,5	1,5	1,5
	25	Laju Inflasi	%	1.61	3.05±1	3.08±1	3.07±1

Sumber : Proyeksi Indikator Makro Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Bappelitbangda 2022

8.2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

8.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Penentuan capaian indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan indikator seni budaya dan olahraga.

Tabel VIII. 2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	3.22	2.70 – 5.17	2.75 – 5.12	2.81-5.00	2.81-5.00
2	PDRB ADHB	Rp. (Miliar)	101.388.4 7	116.620.00	121.697.00	126.774.0 0	126.774.0 0
3	PDRB ADHK	Rp. (Miliar)	69.796.94	76.676.90	78.970.20	81.263.60	81.263.60
4	Laju inflasi	%	1.61	3.05±1	3.08±1	3.07±1	3.07±1
5	Indeks Gini	Nilai	0.401	0.395	0.385	0.375	0.375
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	81.95	83.41	83.78	84.15	84.15
7	Persentase penduduk miskin	%	4,74	4,5	4,4	4,3	4,3
8	Angka Harapan Hidup	Tahun	75.01	75.10	75.19	75.29	75.29
9	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	34.00	34.03	34.07	34.10	34.10
10	Pertumbuhan sektor Industri	%	3.13	3.16	3.17	3.18	3.18
11	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	21.87	21.90	21.93	21.96	21.96
12	Pertumbuhan sektor Perdagangan	%	2.81	2.88	2.95	3.02	3.02
13	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan/ perikanan terhadap PDRB	%	0.57	0.58	0.60	0.61	0.61



NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
14	Pertumbuhan sektor pertanian/perkebunan/perikanan	%	1.44	1.49	1.53	1.58	1.58
15	Kontribusi sektor Jasa terhadap PDRB	%	10.60	10.78	10.97	11.15	11.15
16	Pertumbuhan sektor Jasa	%	4.33	4.50	4.68	4.85	4.85
17	Indeks Pendidikan	Nilai	76.87	77.39	77.83	78.27	78.27
18	Rata2 Lama Sekolah	Tahun	11.31	11.40	11.49	11.58	11.58
19	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.10	14.21	14.31	14.42	14.42
20	Indeks Kesehatan	Nilai	84.91	84.93	84.95	84.97	84.97
21	Jumlah kasus balita gizi buruk	Kasus	226.00	243	259	276	276
22	Prevalensi kekurangan gizi pada balita (kesehatan keluarga dan gizi)	%	7.87	7.82	7.77	7.72	7.72
23	Jumlah Penduduk Usia Kerja	(Juta) Jiwa	2.39	2.43	2.48	2.52	2.52
24	Jumlah Angkatan kerja	(Juta) Jiwa	1.54	1.60	1.65	1.70	1.70
25	Angka Pencari kerja/Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10.88	8.55	8.42	8.29	8.29
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83.33	84.20	85.15	86.10	86.10
27	Persentase Peningkatan PAD	%	25.9	0,01	18,99	3.90	3,90
28	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	40.23	0.41	0.41	0.42	0.42
29	Opini BPK	Nilai	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
30	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	%	87.94	88.5	89	90	90
31	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	%	87.80	88.17	88.53	88.90	88.90

Sumber : Proyeksi Indikator Makro Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Bappelitbangda 2022

8.2.2 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah. iklim berinvestasi. serta inovasi dan kreativitas daerah.

Tabel VIII. 3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Aspek Daya Saing Daerah

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	
1	Pengeluaran per kapita	Rp. (Juta)	29.86	32.30	34.74	37.17	37.17
2	Rasio Ekspor terhadap PDRB	%	14	0.15	0.15	0.15	0.15
3	Rasio Impor terhadap PDRB	%	84.46	84.87%	0.85	0.86	0.86
4	Angka Kriminalitas yang Tertangani/Terselesaikan	%	4.79	4.36	3.93	3.50	3.50
5	Rasio Ketergantungan	Rasio	38.92	39.665	40.41	41.155	41.155

Sumber : Proyeksi Indikator Makro Kota Bekasi Tahun 2024-2026, 2022



8.2.3 Aspek Pelayanan Umum

Penentuan capaian indikator tahunan pada aspek Pelayanan Umum dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Urusan Wajib Pelayanan non Dasar dan Urusan Pilihan.

Tabel VIII. 4 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Aspek Pelayanan Umum

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	1	PENDIDIKAN						
	APK SD	%	101.89	100.1	100.05	100.05	100.05	Dinas Pendidikan
	APM SD	%	98.08	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	Nilai Kemampuan Literasi jenjang SD	Nilai	1.9	1.95	2	2.1	2.1	Dinas Pendidikan
	Nilai Kemampuan Numerasi jenjang SD	Nilai	1.65	1.7	1.75	1.8	1.8	Dinas Pendidikan
	Persentase Pendidikan Dasar Terakreditasi A	%	77.43	79.43	81.43	83.43	83.43	Dinas Pendidikan
	APK SMP	%	91.4	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	APM SMP	%	84.35	90	93	95	95	Dinas Pendidikan
	Nilai Kemampuan Literasi jenjang SMP	Nilai	1.98	2	2.05	2.09	2.09	Dinas Pendidikan
	Nilai Kemampuan Numerasi jenjang SMP	Nilai	1.8	2	2.05	2.09	2.09	Dinas Pendidikan
	Rasio pendidikan dasar inklusi per kecamatan	Rasio	1 : 12	5 : 12	9 : 12	12 : 12	12 : 12	Dinas Pendidikan
	Persentase Ketersediaan SMP di Setiap Kelurahan	%	85.71	91.07	96.43	100.00	100.00	Dinas Pendidikan
	APK PAUD	%	27.65	60	65	70	70	Dinas Pendidikan
	APM PAUD	%	54.73	60	65	70	70	Dinas Pendidikan
	Persentase PAUD Terakreditasi B	%	33.71	38.71	43.71	48.71	48.71	Dinas Pendidikan
	APM Kesetaraan	%	85.23	87.23	90	90	90	Dinas Pendidikan
	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	%	33.85	20.69	62.93	100	100	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dalam Kondisi Baik	%	20.83	36.11	83.33	100	100	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	%	60	70.00	85.00	100	100	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
	Persentase pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar	%	70	75	80	85	85	Dinas Pendidikan



KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026		
	Cakupan Pelayanan Berbasis IT	%	40	60	80	100	100	Dinas Pendidikan
	Presentase pendidikan Dasar terakreditasi B	%	91.87	92.05	92.54	93.16	93.16	Dinas Pendidikan
	PAUD Terakreditasi	%	39.41	40.25	41.05	41.85	41.85	Dinas Pendidikan
	Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi	%	31.62	38.73	39.63	40.53	40.53	Dinas Pendidikan
1	2	KESEHATAN						
	Cakupan rumah tangga Ber-PHBS	%	65.9	64	64	64	64	Dinas Kesehatan
	Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)	%	15	16	16	17	17	Dinas Kesehatan. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan. Rumah Sakit Umum Daerah
	Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
	persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas	%	67.75	68	68	68	68	Dinas Kesehatan
	persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type B	%	86.68	86.68	86.69	86.7	86.7	Rumah Sakit Umum Daerah
	persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type D	%	25.88	60	60	60	60	Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	28	35	42	48	48	Dinas Kesehatan
	persentase Rumah sakit Terakreditasi	%	89.36	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	terpenuhinya pemeliharaan 10 jenis sarana dan prasarana rumah sakit	%	100	100	100	100	100	Rumah Sakit Umum Daerah
	Capaian IKM Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Type B	Indeks	80,32	85	87	88	88	Rumah Sakit Umum Daerah
	persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah
	Prevalensi Balita Status Gizi Stunting	%	7.87	7.82	7.77	7.72	7.72	Dinas Kesehatan
	persentase Institusi dan fasilitas umum memenuhi	%	68.47	72	72	72	72	Dinas Kesehatan



KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026		
	syarat kesehatan							
	Ketersediaan Puskesmas di Kelurahan	Puskemas	47	50	53	56	56	Dinas Kesehatan
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	97.27	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	97.93	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	97.96	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	74.1	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	63.08	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	36.42	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	69.51	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	14.67	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase Warga Negara penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	91	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	%	65.17	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase Warga Negara penderita terduga Tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	42.87	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	34.1	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	persentase jumlah sarana kefarmasian yang memenuhi standar kesehatan	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	persentase jumlah produk pangan industri rumah tangga (PIRT) berlabel yang memenuhi standar kesehatan	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	persentase ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas dan RS	%	89.87	100	100	100	100	Dinas Kesehatan. Rumah Sakit



KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026		
								Umum Daerah. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
1	3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
		Presentase Pembangunan Polder	%	64.48	65.54 %	66.12%	66.71%	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
		Presentase Pemeliharaan Polder	%	5.14	7.01%	8.17%	9.27%	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	23.05%	24.72%	25.26%	25.78%	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
		Luasan Zona Buang Yang Terbangun	Ha		1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase tersedianya perencanaan sektoral persampahan	%		1	1		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Layak	%	99.37%	99.58%	99.79%	100%	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
		Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Aman	%	6.14%	2.84%	6.34%	9.74%	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
		Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	66.68	68.27	68.57	68.88	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
		Persentase peningkatan pembangunan PJU Baru	%	52.41%	55.06%	56.33%	57.22%	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
		Presentase Pemeliharaan PJU	titik	11250	11250	11250	11250	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
		Persentase Luasan Permukiman yang tertata	%	7.84	13.72%	15.68%	17.64%	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
		Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi	%	56.41	35.71%	78.57%	100%	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
		Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan	%	-	90	90	90	Dinas Tata Ruang
		Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi baik	Point	0.73	0.81	0.83	0.85	Dinas Bina Marga & Sumber Daya



KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026		
								Air
	Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (> 40km/jam)	%	95.76	101.21	105.01	108.76	108.76	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
	Persentase Pembangunan Jembatan Baru	%	47.88	64.64	64.79	64.94	64.94	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
	Persentase Pemeliharaan Jembatan	%	93.03	71.41	71.93	72.44	72.44	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
	Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	19.69	21.01	21.41	21.8	21.8	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi Dalam Keadaan Baik	%	0	100	100	100	100	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan	%	19.37	19.73	19.85	19.96	19.96	Dinas Tata Ruang
	Jumlah penataan dan pemeliharaan reklame	Buah	8	8	8	8	32	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang	%	74	77	78	79	79	Dinas Tata Ruang
	Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang	%	74	77	78	79	79	Dinas Tata Ruang
	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	%	64	67	68	69	69	Dinas Tata Ruang
1	4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	5.99	6.26%	6.26%	6.26%	6.26%	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
	Persentase Penyediaan/ Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	%	95.84	100	100	100	100	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
	Persentase Luasan Permukiman kumuh dikawasan perkotaan	%	1	1.64%	1.64%	1.64%	4.92%	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
	Persentase Luasan Permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar dikawasan perkotaan	%	66.76	79.84%	92.89%	100%	100%	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
	Cakupan Yang sehat dan aman yang didukung	%	28.99	43.75	47.26	50.78	50.78	Dinas Perumahan



KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026		
	dengan PSU							Kawasan Pemukiman & Pertanahan
	Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum	Rasio	6.02	7.13	7.35	7.57	7.57	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
1	5	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
	Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	Rasio	1 : 31	1 : 31	1 : 31	1 : 31	1 : 31	SATPOL PP
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	%	100	100	100	100	100	SATPOL PP
	Persentase penegakan pelanggaran perda	%	100	100	100	100	100	SATPOL PP
	Persentase kemampuan aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana	%	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Presentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan	%	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase layanan pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran	%	40	55	60	65		Dinas Pemadam Kebakaran
	Persentase layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran	%	79	89	92	95		Dinas Pemadam Kebakaran
	Persentase Layanan Penyelematan dan evakuasi korban kebakran serta non kebakaran	%	100	100	100	100		Dinas Pemadam Kebakaran
	Presentase Penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan	%	55,215	59	63	67		Dinas Pemadam Kebakaran
	Presentase layanan pencegahan pemadam kebakaran dan penyelamatan	%	82.14	100	100	100		Dinas Pemadam Kebakaran
1	6	SOSIAL						
	Persentase PSKS yang ikut serta dalam penanganan masalah	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial



KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026		
	kesejahteraan Sosial							
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	Persentase Peningkatan Pendayagunaan data dan informasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	Persentase Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Area	1	1	1	1	1	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	7 TENAGA KERJA							
	Persentase Cakupan Ketersediaan dokumen	%	20	100			100	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	%	100	30	30	40	40	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase peningkatan kompetensi bagi pencari kerja	%	20	30	30	40	40	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan	%	76.17	76.51	76.63	76.74	74.74	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase penanganan sengketa pengusaha dengan pekerja	%	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja
2	8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	%	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	%	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	77.90	77.90	77.95	78	78	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Pemenuhan Hak Anak dalam 5 Klaster	%	73	73	75	76	76	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026		
2	9	PANGAN						
		Stabilisasi harga pangan	%	2.27	<5	<5,00	<5,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	%	87.94	88.5	89	90	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Persentase Penanganan kerawanan pangan	%	80.58	87	87.5	88	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	84	88.5	89	90	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	10	PERTANAHAN						
		Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik Pemkot	%	100	33.33%	66.67%	100.00 %	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
		Persentase Pemenuhan pengadaan tanah	%	16.55%	38.93%	69.47%	100.00 %	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
2	11	LINGKUNGAN HIDUP						
		Indeks kualitas air	Nilai	4 (IP=1- 35)	IP=5	IP=5	IP=5	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks kualitas udara	Nilai	Nilai	83.80	62.20	62.40	Dinas Lingkungan Hidup
		Capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) / Hutan Kota yang tersedia dan terkelola	%	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
		Presentase Pembangunan Taman Baru	%	18.03	22.37	23.67	24.98	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
		Presentase Pemeliharaan Taman	%	64.95	98.02	100	100	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
		Persentase Usaha Kegiatan yang Memiliki TPS Limbah B3	%	55	65	70	75	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Limbah B3 Rumah Tangga Yang Tertangani	%	0	0.10	0.12	0.15	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase pembinaan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya	% (usaha / kegiatan)	55%	100% (60 usaha / kegiat	100% (60 usaha / kegiatan)	100% (60 usaha / kegiat	Dinas Lingkungan Hidup



KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026		
	terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah			an)		an)		
	Persentase Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	% (usaha / kegiatan)	55%	100% (50 usaha / kegiatan an)	100% (50 usaha / kegiatan)	100% (50 usaha / kegiatan an)	100% (50 usaha / kegiatan)	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	0	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam lingkungan hidup	%	50	80	80	80	80	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase pemberian penghargaan Lingkungan Hidup	%	0	80	80	80	80	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase perolehan penghargaan Lingkungan Hidup	%	0	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tentang Permasalahan Lingkungan	%	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	11.7	12	13	14	14	Dinas Lingkungan Hidup
	Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA	Point	73	73,05	73,10	73,15	73,15	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase sampah yang terangkut ke TPA	%	63	62	62	62	62	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	ADMINISTRAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	cakupan kepemilikan KTP el	%	94.51	94.51	94.82	95.23	95.23	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	cakupan kepemilikan kartu keluarga	%	94.97	94.97	97.75	99.6	99.6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Cakupan Penerbitan KIA	%	65	65	80	95	95	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Cakupan kepemilikan akte kelahiran	%	67.29	67.29	67.62	67.96	67.96	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Cakupan Kepemilikan akte perkawinan	%	60.55	60.55	60.63	60.71	60.71	Dinas Kependudukan dan Catatan



KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026		
								Sipil
	Cakupan kepemilikan akte kematian	%	64.26	64.26	64.32	64.32	64.32	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	persentase ketersediaan data catatan sipil dan administrasi kependudukan yang lengkap dan terbaru	%	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Pemutakhiran profil kependudukan	%	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCA						
	Jumlah PPKS Aktif di Kecamatan	unit	6	8	10	12	12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Cakupan anggota poktan yang ber KB.	%	55	60	65	70	70	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan Menikah	%	77	78.5	79	79.2	79.5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Presentase Cakupan Data Mikro Keluarga	%	75	80	85	90	90	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	15	PERHUBUNGAN						
	Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan	%	0.917	92	92.5	93	93	Dinas Perhubungan
	Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi	%	100	70	85	90	90	Dinas Perhubungan
	Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas	%	11.7	12	13	4 ¹	14	Dinas Perhubungan
	Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal	%	70	72	75	80	80	Dinas Perhubungan
	Jumlah kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor	Jumlah	68000	69000	70000	71000	71000	Dinas Perhubungan
2	16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIK						
	Indeks Pengelolaan sitem Layanan Publik Berbasis Digital	Indeks	3.27	3.24	4.06	4.98	4.98	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
	Indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan pengaduan dan	Indeks	4.26	4.38	4.43	4.48	4.48	Dinas Komunikasi Informasi



KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026		
	informasi publik							Statistik dan Persandian
2	17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
	Persentase Koperasi yang memiliki Izin Simpan Pinjam	%	5	2	2	2	11	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase PKL yang Menempati Tempat yang telah Ditetapkan	%	15	10	10	10	45	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi usaha Kecil	%	0.3	0.1	0.1	0.1	0.6	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase Koperasi yang Beroperasi sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	%	8.7	10	10	10	38.7	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase Koperasi yang telah Tersertifikasi Kesehatannya	%	8.17	4	4	4	20.17	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Skala Usahanya	%	0.5	0.2	0.2	0.2	1.1	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase Pengurus Koperasi yang telah Mengikuti Pendidikan Perkoperasian	%	4	3	3	3	16	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
2	18	PENANAMAN MODAL						
	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola	Jumlah	2	4	4	4	4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase Peningkatan Investor Baru	%	27,6	4	4	4	4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Jumlah Pelaku usaha yang Mendapatkan Informasi dan Potensi dan Peluang Investasi	Jumlah	10.000	12.000	13.000	14.000	14.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDN/PMA Yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	%	10,5	16	21	26	26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAG						
	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	52	55	58	61	61	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Cakupan Pembinaan Komunitas Pemuda Kreatif dan Pemuda yang Aktif	%	57	60	63	66	66	Dinas Pemuda dan Olahraga



KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026		
	Cakupan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	%	70	70	76	93	93.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Representatif	%	55	55	71	92	92.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Cakupan Pembinaan Olahraga Berprestasi	%	82	82	85	89	89.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Presentase Gugus Depan Aktif	%	73,4	73,4	73,8	74,1	74,1	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	20	STATISTIK						
	Indeks ketersediaan data sektoral berbasis digital	Indeks	3.5	3.75	4.38	5	5	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
2	21	PERSANDIAN						
	Indeks penyelenggaraan pengamanan informasi	Indeks	5	5	5	5	5	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
2	22	KEBUDAYAAN						
	Jumlah Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Situs	2	6	6	6	20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Jumlah sanggar budaya yang dikembangkan	lembaga	26	5	5	7	43	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	23	PERPUSTAKAAN						
	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Membaca	Perpustakaan	1544	1556	1568	1580	1580	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan oleh masyarakat	%	53.75	54	55	56	56	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
2	24	KEARSIPAN						
	Persentase Perangkat Daerah, dan lembaga/ BUMD yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Tertib	%	22.72	36.36	45.45	56.81	56.81	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
	Penambahan khasanah arsip statis pada depo arsip	Boks	278	322	366	410	410	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
3	25	KELAUTAN DAN PERIKANAN						
	Jumlah produksi ikan konsumsi	Ton	1910	1974.7 9	1994.54	2014.4 9	2014.49	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
	Jumlah Produksi Ikan Hias	ekor	22.737.6 61	25.361. 323	25.614.9 36	25.871. 086	25.871.0 86	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	89.130.5 0	93.865 ,05	95.000	97.000	97.000	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan



KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026		
								Perikanan
3	26	PARIWISATA						
		Jumlah kawasan wisata yang ditata	Lokasi	1	1	1	3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	615,598	951.286	1.046.414	1.151.055	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Jumlah SDM yang ditingkatkan kopetensinya sesuai dengan perkembangan dan Tren Kepariwisata	orang	75	300	325	350	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	27	PERTANIAN						
		Jumlah Produksi komoditas pertanian	Ton	34,250	36,168	36,711	37,261	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
		Jumlah produksi peternakan	Ton	10.765.00	11,093	11,195	11,300	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
		Jumlah produksi olahan Hasil peternakan	Ton	3,700	3,817	3,875	3,925	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
		Terkendalinya Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis	Kasus	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
		Unit Usaha Peternakan Kesehatan dan Produk hewan yang bersertifikat teknis	unit	65	80	85	90	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
		Persentase produk PAH yang ASUH	%	44	45.2	45.4	45.5	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian dan Perikanan
3	30	PERDAGANGAN						
		Jumlah pasar rakyat bersih yang berbasis modern	Unit	8	10	10	10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Laju inflasi kelompok pengeluaran bahan makanan	%	0.88	<4.00	<4.00	<4.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase pertumbuhan alat UTP yang ditera/tera ulang	%	23.50	3	3	3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Nilai ekspor Kota Bekasi	US Dollar	480.609.228	515.000.000	530.000.000	545.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian



KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026		
3	31	PERINDUSTRIAN						
		Persentase peningkatan fasilitas terhadap Industri kecil dan menengah	%	5.34	4	4	4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4	1	SEKRETARIAT DAERAH						
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan	%	100	100	100	100	Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)
		Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	%	100	100	100	100	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
		Persentase peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah	%	68.18	75	75	M	Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)
		Persentase peningkatan profile kelurahan	%	96.43	25	25	25	Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)
		Persentase Fasilitas kegiatan keagamaan, hari besar Nasional dan hari besar lainnya	%	75	100	100	100	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Sosial)
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial	%	100	100	100	100	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Sosial)
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	Sekretariat Daerah (Bagian Kerja Sama)
		Persentase penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah	%	100	95	95	95	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan	%	100	100	100	100	Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan)
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi	%	100	100	100	100	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
		Persentase fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	%	100	100	100	100	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
		Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah	%	93.18	75	75	75	Sekretariat Daerah (Bag. Tata Pemerintahan)
		Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	%	100	100	100	100	Sekretariat Daerah (Bag. Tata Usaha)
		Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	%	100	100	100	100	Sekretariat Daerah (Bag. Humas)
		persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Pemerintah	%	100	100	100	100	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)



KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026		
	Kota Bekasi							
	Presentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah (Bag. Perlengkapan)
	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)
4	2	SEKRETARIAT DPRD						
	Optimalisasi peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD	%	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
	Optimalisasi Disiplin Aparatur Sekretariat DPRD	%	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD	%	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	%	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD	%	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
	Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	%	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
	Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD	%	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
	Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA	%	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
	Persentase Terfasilitasinya informasi DPRD	%	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
	Persentase Terfasilitasinya kegiatan DPRD	%	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	1	PERENCANAAN						
	Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan tahunan daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah	%	64,00	80	80	80	80	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan perencanaan pembangunan daerah	%	60,00	80	80	80	80	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah



KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026		
	Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan perencanaan pembangunan daerah	%	57,14	80	80	80	80	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan perencanaan pembangunan daerah	%	75,00	80	80	80	80	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
5	2	KEUANGAN						
	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Grade	A	A	A	A	A	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD	%	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan Dengan SAP dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPM yang Diterima	%	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Presentase OPD yang melaksanakan Administrasi Penatausahaan Keuangan dengan Tertib	%	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Kebutuhan Penggunaan Belanja Tak Terduga yang Diajukan dengan yang Ditetapkan	%	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Kesesuaian Nilai Aset Antara LBMD Dengan LKPD	%	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota yang Bersertifikat	%	19.62	23	26	29	29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	47,57%	56.51%	62.50%	62.80%	62.80%	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Peningkatan Jumlah WP dan WR	%	2.86%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	Badan Pendapatan Daerah
	Persentase Piutang Terbayarkan	%	11.95%	8%	8%	8%	8%	Badan Pendapatan Daerah
	Nilai Hasil Survey Pelayanan Publik	Nilai	78.21	86.25	86.50	86.75	86.75	Badan Pendapatan Daerah
5	3	KEPEGAWAIAN DAERAH						
	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, pengadaan,	Nilai	97	97	107.58	116.54	116.54	Badan Kepegawaian

KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026		
	promosi dan mutasi serta sistem informasi pada indeks sistem merit							Pelatihan Sumber Daya Manusia
	Nilai aspek pengembangan karir pada indeks sistem merit	Nilai	60	60	66.54	72.09	72.09	Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia
	Nilai aspek manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin serta perlindungan dan pelayanan pada indeks sistem merit	Nilai	113.5	113.5	125.88	136.37	136.37	Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia
5	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	%	29	60	60	60	60	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	%	20	60	60	60	60	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi	%	25	60	60	60	60	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
	Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang mendapatkan predikat	Jumlah	2 predikat	1 predikat	1 Predikat	1 Predikat	1 Predikat	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
6	1	INSPEKTORAT DAERAH						
	Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal	%	79.01	80	80	80	80	Inspektorat Kota
	Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Eksternal	%	90.52	91	91	91	91	Inspektorat Kota
	Persentase Perangkat Daerah dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel	%	90	100	100	100	100	Inspektorat Kota
	Presentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01	%	36	36	39	41	41	Inspektorat Kota
	Persentase PD dengan nilai AKIP BB keatas	%	98	98	100	100	100	Inspektorat Kota
	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	Inspektorat Kota
7		UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1	KECAMATAN						
	Capaian Kepuasan	%	100	100	100	100	100	Kecamatan



KODEFIKASI URUSAN/ BIDANG URUSAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2024	2025	2026		
	terhadap pelayanan masyarakat							
	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	100	100	100	100	Kecamatan
	Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	%	100	100	100	100	100	Kecamatan
	Persentase wilayah tertib K3	%	100	100	100	100	100	Kecamatan
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
8	1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
	Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Daerah	%	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah	%	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Optimalisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	%	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
x	x PENUNJANG URUSAN							
	Optimalisasi Disiplin Aparatur	%	100	100	100	100	100	Seluruh OPD
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	100	100	Seluruh OPD
	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	Seluruh OPD
	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	100	100	100	Seluruh OPD
	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	100	100	Seluruh OPD

Sumber : Hasil Desk Perangkat Daerah dengan Bappelitbangda, 2022



PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 berisikan kebijakan jangka menengah transisi sampai dengan periode perencanaan jangka menengah hasil dari pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024. RPD ini juga merupakan penjabaran kebijakan periode terakhir RPJPD (2005-2025) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan juga menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Bekasi sampai dengan tahun 2026. Oleh karena itu unsur Pemerintahan Daerah baik Eksekutif dan Legislatif, masyarakat serta dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam pemenuhan target pembangunan RPD.

Dalam perjalanannya, keberhasilan pelaksanaan pembangunan menengah daerah akan tercermin dari kualitas manusianya, integritas birokrasinya infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan serta ekonomi kreatif yang berdaya saing dan merata. Dengan pencapaian tujuan pembangunan, diharapkan Kota Bekasi akan semakin dekat dalam pencapaian visi jangka panjangnya, yaitu "BEKASI KOTA KREATIF YANG IHSAN".

Bekasi, 13 Februari 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI



TRI ADHILANTO TJAHYONO